



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH 2020**

# KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan “BANGKA SETARA” sebagai Visi Pembangunan tahun 2019-2023. Berbagai dinamika yang terjadi sekarang ini terutama terkait dengan perubahan beberapa regulasi penting di tingkat pusat menyebabkan Pemkab Bangka perlu untuk melakukan perubahan mendasar atas perencanaan jangka menengah daerah. Untuk memenuhi aspek organisatoris, penyesuaian kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang setelah mendapatkan legitimasi hukum akan menjadi instrument penting dan *powerfull* guna mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Bangka 5 tahun kedepan.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 ini berisikan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu startegis, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Perubahan RPJMD juga diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Saya percaya kehadiran Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2023 ini, akan menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh *stakeholder* untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi

kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan *stakeholder* pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan Perubahan RPJMD ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen Perubahan RPJMD ini disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Perubahan RPJMD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA, Nyaman Bersama.

Sungailiat, Desember 2020



**BUPATI BANGKA,**

**MULKAN**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-19
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen .....	I-20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-35
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-49
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-88
2.5. Evaluasi Capaian Perencanaan Pembangunan .....	II-90
2.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	II-103
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA</b>	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-20
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-26
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>	
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.....	IV-2
4.2. Isu Strategis .....	IV-25
<b>BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
5.1. Visi.....	V-5
5.2. Misi.....	V-6
5.3. Tujuan dan Sasaran .....	V-11
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2. Tema dan Prioritas RPJMD 2019 - 2023 .....	VI-13
6.3. Arah Kebijakan .....	VI-15
6.4. Program Pembangunan Daerah .....	VI-18
6.5. Program Spesifik Unggulan Daerah .....	VI-20
6.5.1. Program Spesifik Unggulan Daerah 2020 .....	VI-20
6.5.2. Program Spesifik Unggulan Daerah 2021 .....	VI-25

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah .....	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah .....	VII-3
7.3. Dukungan Anggaran Terhadap Rencana Program Perangkat Daerah .....	VII-16

## **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

8.1. Indikator Kinerja Daerah .....	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VIII-3
8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	VIII-6

<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	IX-1
-----------------------------	------



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
  - b. bahwa guna menjamin sinergi, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
16. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
25. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D );
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023;

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 201-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Perubahan RPJMD adalah perubahan atas hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur serta terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, dan tidak termasuk perubahan terhadap target indikator kinerja, penanggung jawab program, perubahan indikator kinerja utama.
11. Pemutakhiran adalah perubahan nomenklatur dan/atau kodefikasi, penambahan dan/atau penghapusan kodefikasi dan nomenklatur serta penyesuaian substansi perencanaan.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat pemutakhiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di kemudian hari, diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

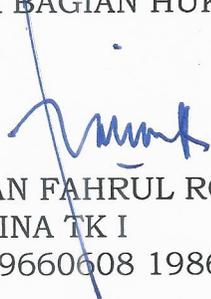
Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.14/2020)**

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat pemutakhiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di kemudian hari, diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2020

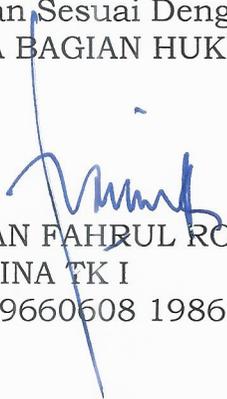
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.14/2020)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

**I. PENJELASAN UMUM**

**1. Dasar Pemikiran.**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

Bahwa guna menjamin sinergi, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 perlu untuk disesuaikan.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2**

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencanakerja pemerintah daerah, menyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 perlu disusun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan berpedoman pada Perda No 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka tahun 2010-2030) serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan

dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama :

1. **Pendekatan teknokratik** : menyusun RPJMD menggunakan metode dan cara berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** : dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD.
3. **Pendekatan politik** : pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** : dimaksudkan bahwa RPJMD disusun menurut jenjang pemerintahan, hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi program lintas perangkat daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ke empat dari RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005–2025. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD)

RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2018, memuat Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019-2023 yaitu 'BANGKA SETARA' terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri

Pencapaian Misi ini diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- 4) Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- 5) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam perjalanannya setelah ditetapkan pada tahun 2018 mengalami beberapa perubahan asumsi ekonomi dan pendapatan daerah akibat bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID 19)* yang menimbulkan dampak ekonomi global maupun nasional yang menyebabkan penurunan daya beli yang sangat tajam yang selama ini merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, melemahnya investasi karena kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan dan melemahnya ekonomi global dan nasional. Kondisi ini menyebabkan sulitnya pencapaian target ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelum bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID 19)* terjadi. Pengaruh COVID 19 ini diprediksi akan masih mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia dan Kabupaten Bangka hingga 3 tahun ke depan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan beberapa peraturan diantaranya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 mengamanahkan setiap daerah untuk melakukan penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan program dan kegiatan secara bertahap mulai tahun 2020.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD dapat dilakukan diantaranya bila terjadi perubahan mendasar. Perubahan mendasar yang dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Selain hal tersebut, dalam pasal 342 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ini adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 25 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- 26 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- 27 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 28 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 29 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 30 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona

- Virus Disease (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
- 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 32 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  - 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

- 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID 19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
- 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease (COVID 19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
- 44 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
- 45 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
- 46 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5);
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44);
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);

- 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
- 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
- 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Berita Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);
- 59 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77).
- 60 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dari segi waktu dokumen perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari Rencana

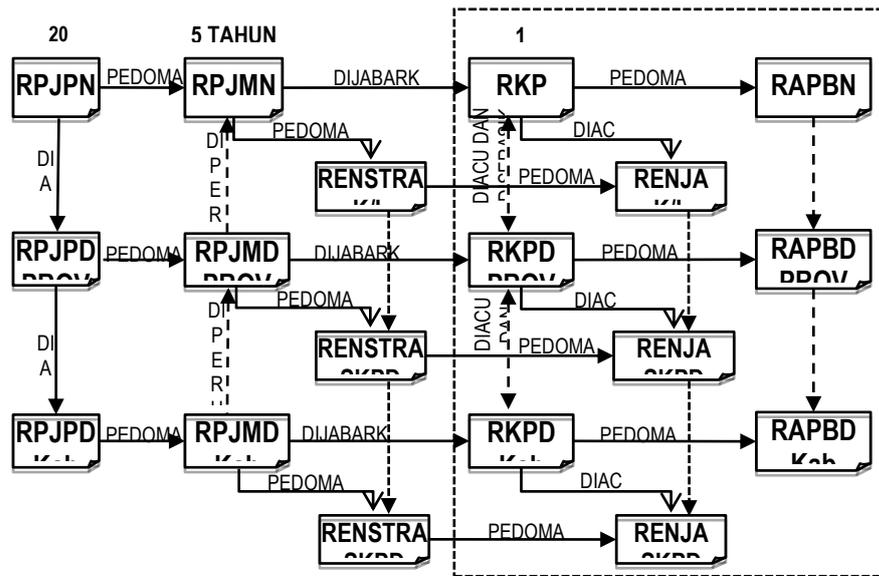
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Startegis (Renstra)-Perangkat Daerah (PD), serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Renja)-PD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka berpedoman dengan pembangunan nasional ( RPJMN 2020-2024) khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 berpedoman juga pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, dan RPJMD Kabupaten dan Kota sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan keselarasan dan sinergitas antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 yang juga telah diacu dalam RPJP Kabupaten Bangka 2005-2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023. Selain itu RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja OPD.

Hubungan Keterkaitan antar dokumen perenanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar**  
**Dokumen Perencanaan**



### A. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RPJMN 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 mempedomani RPJMN tahun 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dilakukan melalui penyelerasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Bangka.

### B. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RPJPD 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, merupakan Tahap ke Empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005-2025.

### **C. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022**

Hubungan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Dalam RPJMD tersebut perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan mengarah pada Kemakmuran Daerah yang dilaksanakan pada tahun pertama melalui Peningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, tahun kedua melalui Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, tahun ketiga melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat, tahun ke empat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis Masyarakat dan Peningkatan pelayanan dasar dan tahun kelima melalui Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana.

Dalam konteks Kabupaten Bangka di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata kawasan lintas timur Pulau Bangka, Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu dan Peningkatan Penataan Kawasan Kumuh.

### **D. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RTRW Kabupaten Bangka tahun 2010-2030**

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 memperhatikan dan mempedomani struktur, pola ruang serta kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Bangka tahun 2010-2030 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. Artinya keseluruhan perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal – hal yang menyangkut aspek keruangan tetap berpedoman pada RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dinamika pemangku kepentingan tetap mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan lingkungan.

#### **E. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan RKPD Kabupaten Bangka**

RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bangka sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah pasal 12 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 79 ayat (2) berbunyi, RKPD paling sedikit memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja

dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangka yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

#### **F. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Sektoral**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Bangka. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan (*Road Map*), Pencapaian Tujuan Pembangunan *Sustainable Development Goals (SDG's)* di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana

Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu diperhatikan yaitu: RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Bangka yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 yaitu: RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bangka, Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bangka dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka.

### **G. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)**

RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD tahun 2019-2023 dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD tahun 2019-2023 merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka.

Renstra PD sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 111 memuat pendahuluan, gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang

urusan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023. Isi pada bab 9 RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra PD tahun 2019-2023 yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, ditetapkan dengan maksud selain mengakomodir perencanaan pembangunan tahun 2019 dan 2020 juga adalah:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka periode 2021-2023;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka selama periode 2021-2023;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ditetapkan adalah:

1. Menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra OPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif,

sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindak;
6. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen**

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memberikan gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi sub bab latar belakang perubahan, dasar hukum penyusunan perubahan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi perubahan RPJMD

### **BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menampilkan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi perubahan RPJMD

### **BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi *core bussines* pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan meliputi permasalahan pembangunan, isu strategis yang sudah disesuaikan dengan kondisi perubahan RPJMD.

### **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Sekurang-kurangnya menyajikan suatu kondisi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambar keterkaitan elemen – elemen perencanaan dalam suatu matrik yang telah disesuaikan dengan kondisi Perubahan RPJMD.

### **BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### **BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan yang sudah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD.

### **BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode jangka menengah yang sudah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

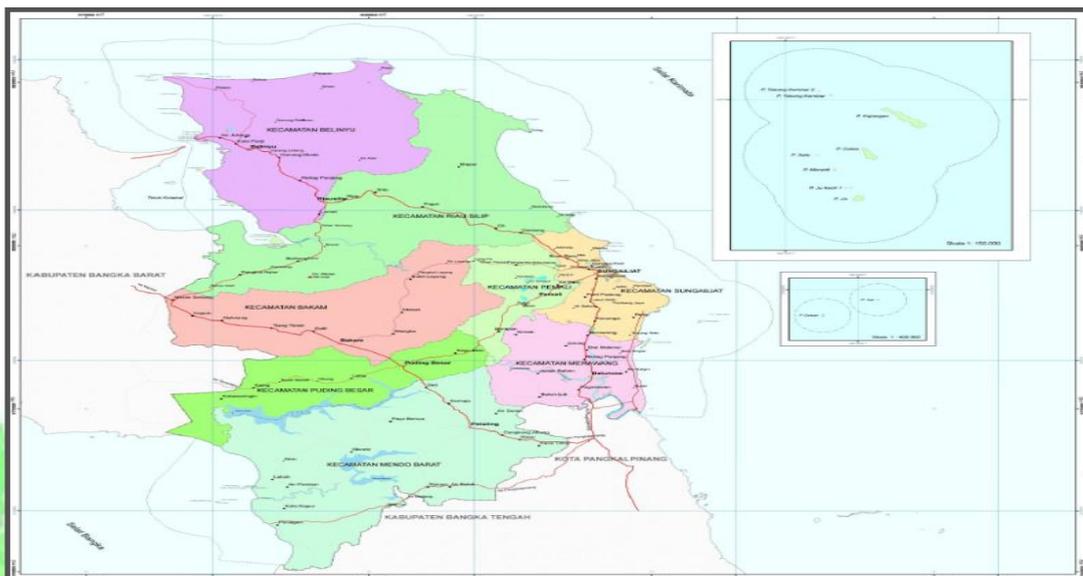
### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten, memiliki luas kurang lebih sebesar 2.950,68 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Secara administratif, Kabupaten Bangka terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 62 (enam puluh dua) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan, dengan pembagian kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan**  
**di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kelurahan	Desa
1	Sungailiat	146,63	12	1
2	Bakam	425,04	-	9
3	Pemali	140,06	-	6
4	Merawang	215,26	-	10
5	Puding Besar	271,32	-	7
6	Mendo Barat	683,67	-	15
7	Belinyu	514,60	7	5
8	Riau Silip	624,11	-	9
	<b>Jumlah</b>	<b>2.950,68</b>	<b>19</b>	<b>62</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara pulau Bangka pada posisi antara 105038'-106018' Bujur Timur dan 103'-2021' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah yaitu: (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam.

### 2.1.2. Kondisi Topografis

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti : pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batuan Plutonik Masam.

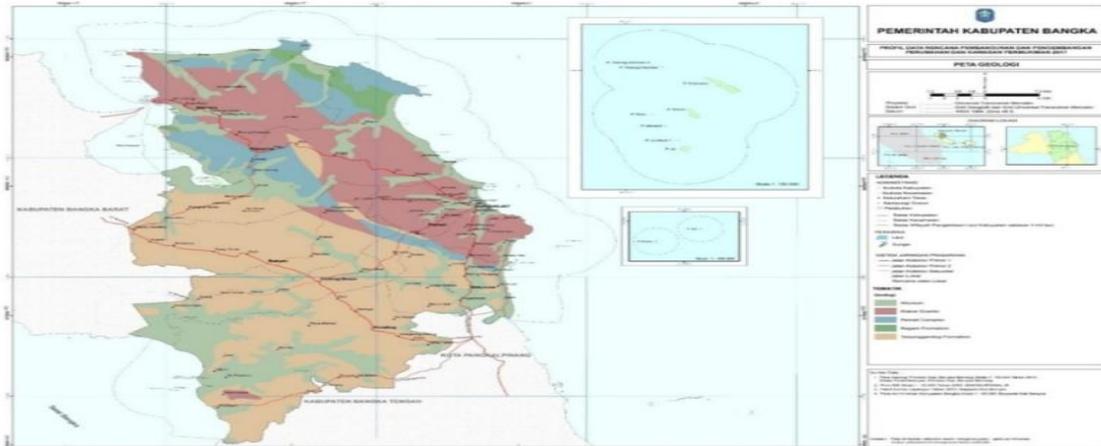
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi AlluvialHedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

### 2.1.3. Kondisi Geologi

Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sunda Land dan merupakan bagian terangkat dari penepian Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari GraniteBelt yang berumur Yura – Kapur yang membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malaysia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. GraniteBelt sendiri merupakan deretan formasi batuan granite kaya akan mineral cassiterite yang kemudian dikenal dengan sebutan The Tin Belt.

Pulau-pulau dari The Tin Belt diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya Sunda Shelf. Pupili (1973) menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak Paleozoikum Bawah dimanaberdasarakan Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah penunjaman (subductionzone) berada di bagian timur Malaysia dan pada Mesozoikum Bawah – tengah menghasilkan busur gunung api (magmaticarc) dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat.

**Gambar 2.2**  
**Peta Geologi Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan, pengayaan (leaching), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (craton) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.

#### **2.1.4. Kondisi Hidrologi**

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Bangka lebih didominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Secara detail, Kabupaten Bangka mempunyai 38 (tiga puluh delapan) aliran sungai, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai tepanjang dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan**

	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (m)	Nama Sungai	Panjang (m)
1.	Sungailiat	S. Jeliti	3.000		
2.	Bakam	S. Telang	5.000	S. Layang	32.500
		S. Mabat	15.000		
3.	Merawang	S. Baturusa	31.250		
4.	Puding Besar	S. Perai	10.000	S. Kayubesi	500
		S. Kerang	8.000	S. Jeruk	15.000
		S. Kotawaringin	20.000	S. Lubang	6.000
5.	Mendo Barat	S. Mendo	28.500	S. Penagan	2.500
		S. Rukam	20.000	S. Penjirang	5.000
		S. Air Pandan	20.000	S. Kelabingil	3.000
		S. Sembilang	2.000		
6.	Belinyu	S. Panji	10.000	S. Belinyu	6.000
		S. Pasir	5.000	S. Berok	3.000
		S. Pejem	4.500	S. Romodong	3.000
		S. Tengkalak	2.000	S. Bubus	4.000
		S. Jeliti	3.000	S. Sembuang	5.000
		S. Bayat	9.000	S. Sekak	5.000
		S. Layang	12.000	S. Buntang	1.500
		S. Jelutung	12.000		
7.	Riau Silip	S. Tengkalak	5.000	S. Mapur	21.250
		S. Bedukang	900	S. Semubur	3.000
		S. DeniangLaut	1.300	S. Perimping	2.750

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

### 2.1.6. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bangka beriklim tropis dengan rata-rata suhu 27,3 derajat Celcius dan kelembaban udara rata-rata 80,3 % pada tahun 2019. Untuk kecepatan angin pada tahun 2019 rata-rata sebesar 2,8 dan rata-rata tekanan udara sebesar 1010,1. Pada tahun 2019 jumlah hari hujan sebesar 196 hari.

**Gambar 2.3.**  
**Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan**  
**Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2019**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Stasiun BMKG <i>BMKG Station</i>	Suhu/Temperature		
		Minimum <i>Minimum</i>	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	22,5	27,3	34,9
Merawang		22,5	27,3	34,9
Puding Besar		22,5	27,3	34,9
Sungailiat		22,5	27,3	34,9
Pemali		22,5	27,3	34,9
Bakam		22,5	27,3	34,9
Belinyu		22,5	27,3	34,9
Riau Silip		22,5	27,3	34,9
<b>Bangka</b>		<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>34,9</b>

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Stasiun BMKG <i>BMKG Station</i>	Kelembaban/Humidity		
		Minimum <i>Minimum</i>	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	32	80,3	99
Merawang		32	80,3	99
Puding Besar		32	80,3	99
Sungailiat		32	80,3	99
Pemali		32	80,3	99
Bakam		32	80,3	99
Belinyu		32	80,3	99
Riau Silip		32	80,3	99
<b>Bangka</b>		<b>32</b>	<b>80,3</b>	<b>99</b>

Kecamatan Subdistrict	Stasiun BMKG BMKG Station	Kecepatan Angin/Wind Velocity		
		Minimum Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	0	2,8	11,4
Merawang		0	2,8	11,4
Puding Besar		0	2,8	11,4
Sungailiat		0	2,8	11,4
Pemali		0	2,8	11,4
Bakam		0	2,8	11,4
Belinyu		0	2,8	11,4
Riau Silip		0	2,8	11,4
<b>Bangka</b>			<b>0</b>	<b>2,8</b>

Sumber: BMKG, Stasiun Meteorologi Pangkalpinang,

Kecamatan Subdistrict	Stasiun BMKG BMKG Station	Tekanan Udara/Atmospheric Pressure		
		Minimum Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	1004,7	1010,1	1015,3
Merawang		1004,7	1010,1	1015,3
Puding Besar		1004,7	1010,1	1015,3
Sungailiat		1004,7	1010,1	1015,3
Pemali		1004,7	1010,1	1015,3
Bakam		1004,7	1010,1	1015,3
Belinyu		1004,7	1010,1	1015,3
Riau Silip		1004,7	1010,1	1015,3
<b>Bangka</b>			<b>1004,7</b>	<b>1010,1</b>

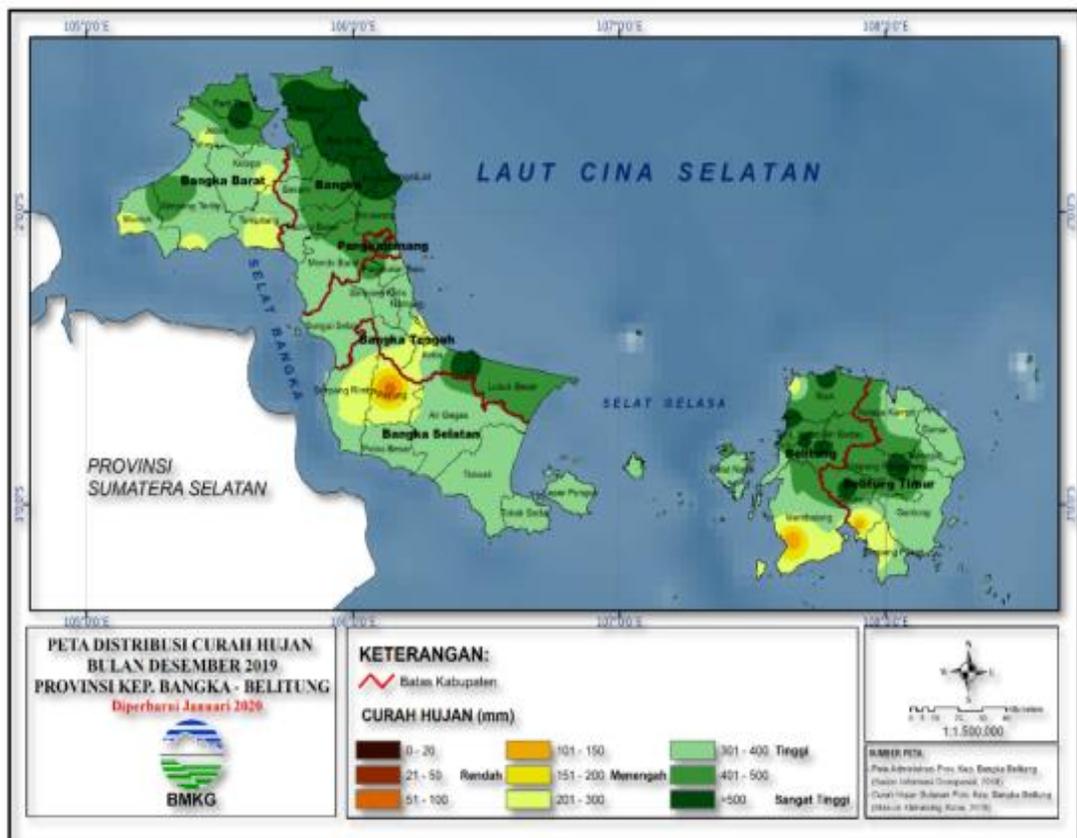
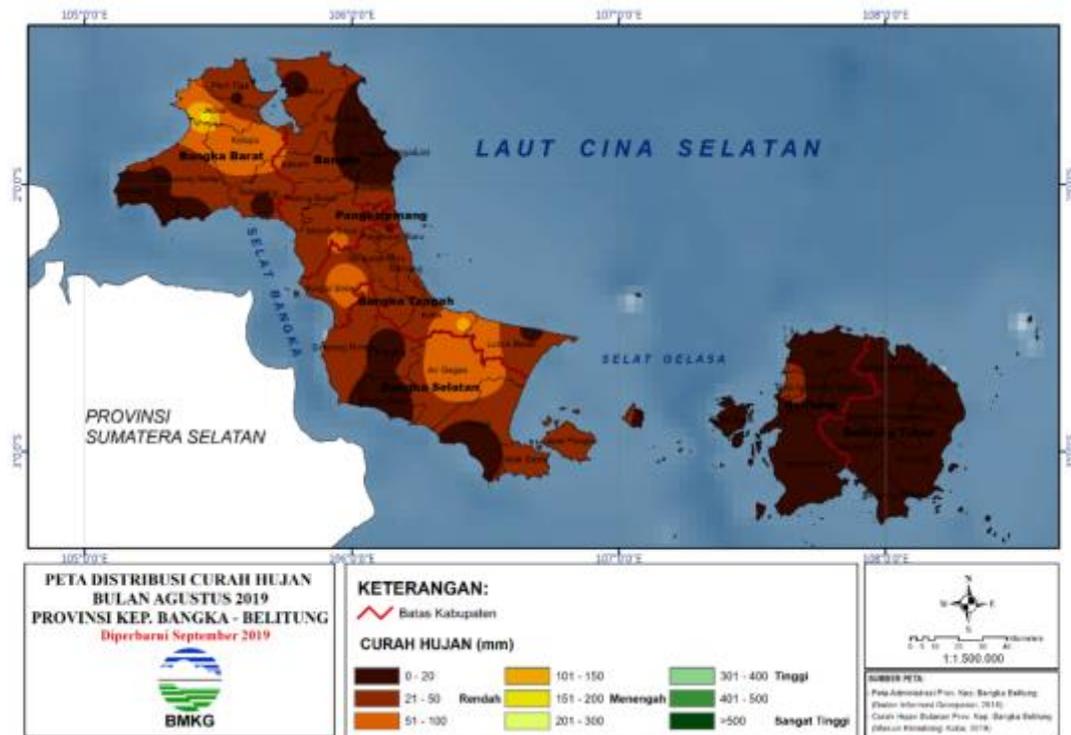
Kecamatan Subdistrict	Stasiun BMKG BMKG Station	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
		(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
Mendo Barat	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	2 073,3	196	58,9
Merawang		2 073,3	196	58,9
Puding Besar		2 073,3	196	58,9
Sungailiat		2 073,3	196	58,9
Pemali		2 073,3	196	58,9
Bakam		2 073,3	196	58,9
Belinyu		2 073,3	196	58,9
Riau Silip		2 073,3	196	58,9
<b>Bangka</b>			<b>2 073,3</b>	<b>196</b>

BPS Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

Adapun kondisi distribusi curah hujan di wilayah Kabupaten Bangka secara umum hampir sama dengan distribusi curah hujan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.4**  
**Peta Distribusi Curah Hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Bulan Januari, April, Agustus dan Desember 2019**





Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, 2020

### 2.1.7. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

#### 2.1.7.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 261.823,44 Ha atau 88,09% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti pada tabel 2.3. Kawasan budidaya ini mencakup kawasan pertanian, kawasan permukiman, pertambangan dan industri. Secara spasial, pola ruang kawasan budidaya mengarah pada bagian wilayah Barat-Timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan.

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	Kawasan Hutan Produksi	70,105.04	23.21
2	Kawasan Hutan Rakyat	13,894.97	4.60
3	Kawasan Pertanian	15,220.87	5.04
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	10,346.93	3.43
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	4,873.94	1.61
4	Kawasan Perkebunan	98,662.13	32.66
	Kawasan Usaha Perkebunan	56,297.17	18.64
	Kawasan Perkebunan Rakyat	42,364.96	14.02
5	Kawasan Peternakan	700.00	0.23
6	Kawasan Perikanan	3,309.54	1.10
7	Kawasan Pertambangan	28,441.33	9.42
8	Kawasan Pertambangan Rakyat	4,125.00	1.37
9	Kawasan Industri	983.13	0.33
10	Kawasan Pariwisata	948.23	0.31
11	Kawasan Pemukiman Kota	9,680.43	3.20
12	Kawasan Pemukiman Pedesaan	19,906.87	6.59
13	Kawasan Peruntukan Lainnya	681.49	0.23
	<b>JUMLAH</b>	<b>266,659.03</b>	<b>88,28</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

### 2.1.7.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 35.409,97 Ha atau sekitar 11,91% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti tersaji pada Tabel 2.4

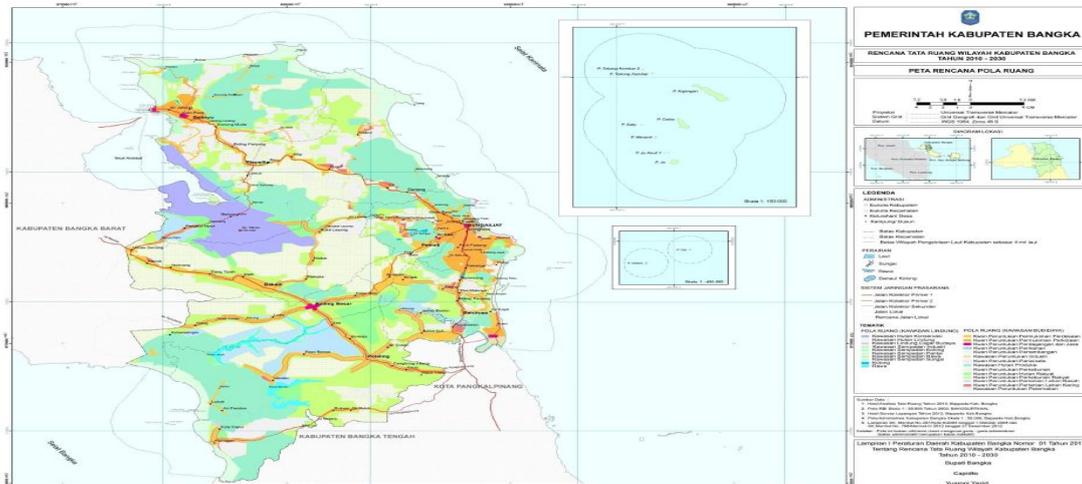
**Tabel 2.4**  
**Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS(HA)	(%)
1	Kawasan Hutan Lindung	16.897,95	5,68
2	Kawasan Perlindungan Setempat	2.162,39	0,73
	Kawasan Sempadan Pantai	963,43	0,32
	Kawasan Sempadan Sungai	1.062,64	0,36
	Kawasan Sempadan Danau/Kolong	136,32	0,05
3	Kawasan Hutan Konservasi	15.619,51	5,25
4	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	600,00	0,20
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	130,12	0,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.409,97</b>	<b>11,72</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Kawasan yang termasuk ke dalam kawasan lindung antara lain HL Pejem, HL Bubus II, HL Bubus, HL SungailiatMapur, dan HL Kotawaringin. Sementara untuk kawasan hutan konservasi memiliki luas kurang lebih 24.961,40 ha atau 8,46 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka yakni HK Gunung Maras (Sumber: BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020). Secara keseluruhan, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bangka baik lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung seperti pada Gambar 2.5.

**Gambar 2.5**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

### 2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

#### 2.1.8.1. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pengembangan potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar, sedang, kecil, dan perkebunan rakyat. Pengembangan potensi perkebunan besar/sedang/kecil untuk komoditas perkebunan seperti: sawit dan singkong. Pengembangan potensi perkebunan rakyat untuk komoditas berupa: lada, karet, dan singkong.

**Gambar 2.6**  
**Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030

Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk usaha perkebunan memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi perkebunan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.6. dan Gambar 2.7.

**Gambar 2.7**  
**Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Adapun wilayah sentra produksi tanaman perkebunan tersebar pada 4 (empat) kecamatan seperti disajikan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Perkebunan**  
**di Kabupaten Bangka**

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Lada	Bakam, Puding Besar, Mendo Barat
2	Karet	Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang,
3	Singkong Casesa	Mendo Barat, Riau Silip, Puding Besar, Belinyu, Sungailiat
4	Kelapa Sawit	Bakam, Puding Besar, Belinyu, Riau Silip, Merawang, Mendo Barat
5	Kelapa	Sungailiat, Riau Silip

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2020

Luas panen dan produksi komoditi tanaman perkebunan Kabupaten Bangka kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi seperti disajikan pada Tabel 2.1.6.

Luas panen komoditi lada tahun 2019 seluas 4.138,95 ha meningkat dibanding tahun 2018 seluas 3.464,82 ha. Demikian juga produksinya, tahun 2019 sebesar 4.479,21 ton meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 4.259,82 ton.

Sementara luas panen komoditi karet tahun 2019 sebesar 17.075,17 ha menurun dibanding tahun 2018 sebesar 17.140,20 ha. Akan tetapi berbeda dengan produksinya, tahun 2019 sebesar 51.304,93 ton meningkat drastis dibanding tahun 2018 sebesar 22.672,30 ton.

Salah satu komoditi perkebunan yang mulai dikembangkan di wilayah Kabupaten Bangka adalah singkong casesa sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka. Hal ini didukung dengan keberadaan pabrik pengolahan tapioka di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Sungailiat. Luas panen dan produksi singkong casesa setiap tahun semakin meningkat, data terakhir tahun 2019 luas panen mencapai 1.848,50 ha dengan produktivitas sebesar 28.707,50 ton.

Luas panen komoditi kelapa sawit tahun 2019 seluas 8.697,32 ha, meningkat dibanding tahun 2018 seluas 8.616,70 ha. Produksinya juga

meningkat pada tahun 2019 sebesar 39.067,04 ton dibanding tahun 2018 sebesar 38.550,50 ton.

Luas panen komoditi kelapa tahun 2019 seluas 2.343,53 ha, menurun dibanding tahun 2018 seluas 2.901,90 ha. Akan tetapi, produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 2.343,53 ton dibanding tahun 2018 sebesar 2.140,10 ton.

**Tabel 2.6**  
**Luas Panen (ha) dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan (Ton)**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019**

No	Komoditi	2017		2018		2019	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Lada	5.989,53	5.927,85	3.464,82	4.259,94	4.138,95	4.479,21
2	Karet	32.110,07	41.412,77	17.140,20	22.672,30	17.075,17	51.304,93
3	Singkong Casesa	614,50	9.375,00	1.517,00	22.755,00	1.848,50	28.707,50
3	Kelapa Sawit	21.375,11	83.547,73	8.616,70	38.550,50	8.697,32	39.067,04
4	Kelapa	6.421,52	1.205,86	2.901,90	2.140,10	2.935,77	2.343,53

Sumber : Data Statistik Perkebunan, Dinas Pangan Pertanian Kab. Bangka, 2020

### 2.1.8.2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi cukup besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Sektor pertanian juga berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan serta peningkatan daya saing komoditi produk pertanian tahun 2019. Peningkatan daya saing komoditas dan produk olahan pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna peningkatan Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir.

Secara keseluruhan, potensi pertanian memiliki luas kurang lebih 15.220,87 ha atau 5,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertanian ini terdiri dari: (i) potensi pertanian lahan basah yaitu dengan luas kurang lebih 10.346,93 ha atau 3,43% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (ii) potensi pertanian lahan kering yaitu dengan luas kurang lebih 4.873,94 ha

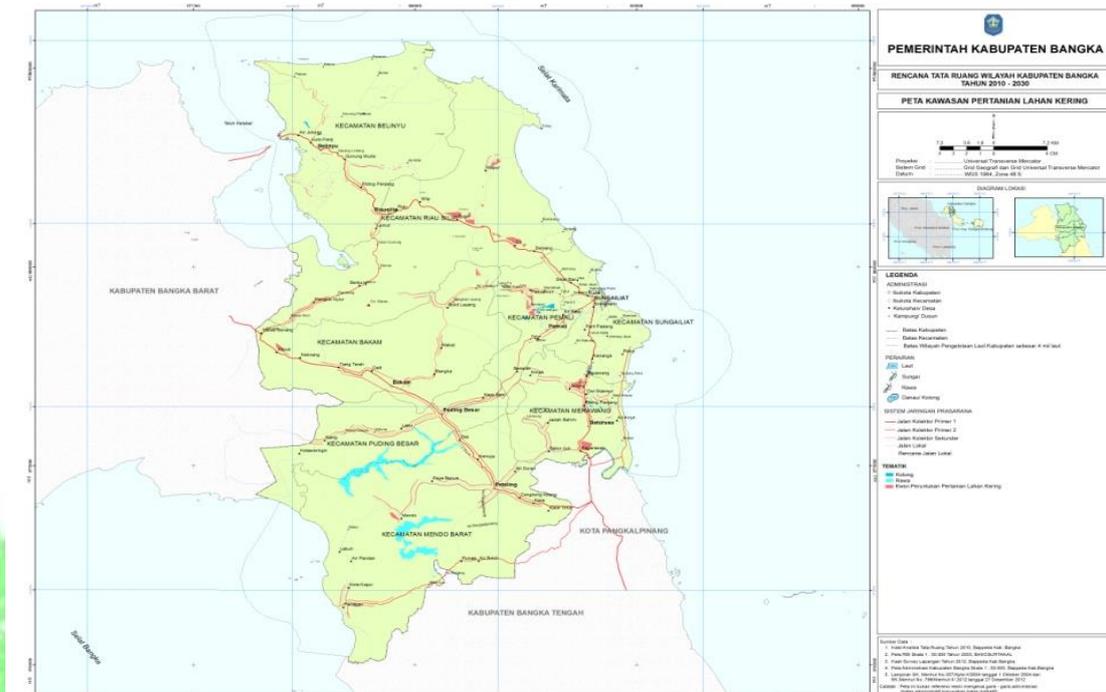
atau 1,61% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertanian tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.8. dan Gambar 2.9.

**Gambar 2.8**  
**Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

**Gambar 2.9**  
**Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

### 2.1.8.3.Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan juga dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air laut, konservasi dan rehabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing komoditi produk perikanan.

Potensi perikanan ini memiliki luas kurang lebih 3.309,54 ha atau 1,10% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.10.

**Gambar 2.10**  
**Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

### 2.1.8.4.Potensi Peternakan

Kabupaten Bangka memiliki potensi peternakan yang cukup besar karena kawasan peternakan ini menyebar hampir di seluruh kecamatan.

Kawasan ini dapat terintegrasi dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa khususnya dengan mengintegrasikan peternakan sapi di dalam kawasan perkebunan sawit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang.

Potensi peternakan ini memiliki luas kurang lebih 700 ha atau 0,23% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.11.

**Gambar 2.11**  
**Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

#### **2.1.8.5. Potensi Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan sektor yang masih berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Peruntukan kawasan pertambangan yang memiliki potensi untuk diusahakan melalui penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan usaha pertambangan. WIUP di

Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, nonlogam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu:

- WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat);
- WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Namun, berdasarkan pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka, secara keseluruhan potensi pertambangan di Kabupaten Bangka memiliki luas lebih kurang 32.566,33 ha atau 10,78% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Potensi pertambangan ini terdiri dari: (1) potensi pertambangan dengan luas 28.441,33 ha atau 9,42% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, dan (2) potensi pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha atau 1,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi pertambangan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.12.

**Gambar 2.12**  
**Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

### 2.1.8.6.Potensi Industri

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kabupaten Bangka sebagai daerah industri dan perdagangan. Pemerintah daerah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2005 menetapkan Kawasan JelitikSungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Secara keseluruhan, potensi industri direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang dengan luasan lebih kurang 983,13 ha atau 0,33% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.13.

**Gambar 2.13**  
**Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Perkembangan jumlah industri besar, menengah dan kecil di Kabupaten Bangka tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7, Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	4	279	343.727.232
2	Merawang	3	194	162.132.198
3	Pemali	0	0	0
4	Puding Besar	1	100	230.000.000
5	Mendo Barat	0	0	0
6	Bakam	2	162	354.967.348
7	Riau Silip	1	0	27.800.000
8	Belinyu	1	526	151.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>1.261</b>	<b>1.269.626.778</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	15	1.092	65.152.000
2	Merawang	10	474	57.690.353
3	Pemali	2	30	9.275.000
4	Puding Besar	1	119	8.200.000
5	Mendo Barat	2	157	18.031.305
6	Bakam	0	0	0
7	Riau Silip	4	315	22.732.000
8	Belinyu	2	190	5.500.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>2.377</b>	<b>186.580.658</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

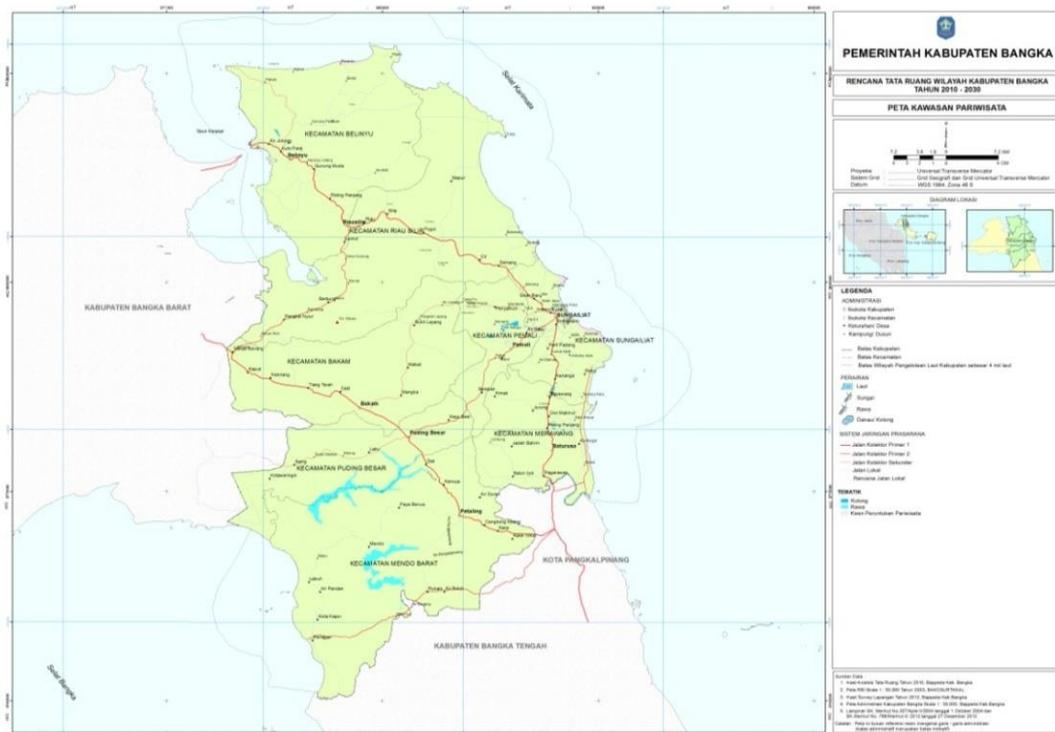
NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA (UNIT)	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)
1	Sungailiat	898	3.010	34.925.909.000
2	Merawang	302	1.037	8.713.092.000
3	Pemali	323	832	10.153.050.000
4	Puding Besar	206	379	1.689.900.000
5	Mendo Barat	210	454	3.046.450.000
6	Bakam	164	317	1.837.000.000
7	Riau Silip	114	289	36.521.068.848
8	Belinyu	301	1.027	10.083.080.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.518</b>	<b>7.345</b>	<b>106.969.549.848</b>

Sumber: Dinakerperindag Kabupaten Bangka, 2020

### 2.1.8.7.Potensi Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 948,23 ha atau 0,31% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat, seperti disajikan pada Gambar 2.14.

**Gambar 2.14**  
**Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Potensi pariwisata di Kabupaten Bangka ini semakin memberikan keyakinan bagi para investor seiring upaya kuat dan intens yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dalam upaya menciptakan dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang lebih 600 ha dari 948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka. Pada kawasan ini akan dibangun *golf resort, leisure and entertainment*,

*cultural resort, wellness resort, dan tourism village*, seperti disajikan pada Gambar 2.15.

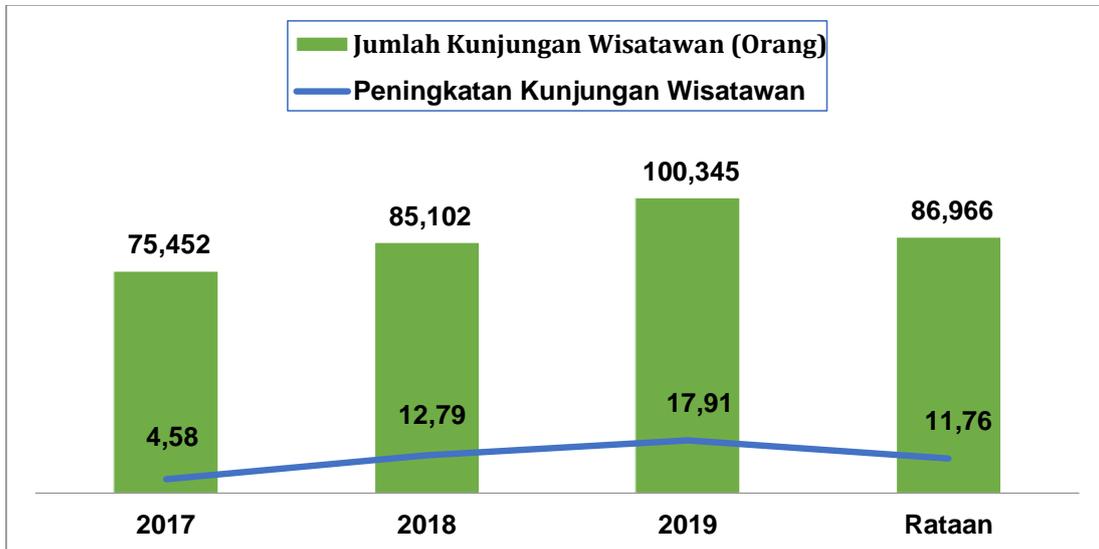
**Gambar 2.15**  
**Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2019**



Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2018

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2017–2019 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan rata-rata sebanyak 86.966 orang. Jika pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka berjumlah 85.102 orang, mengalami pertumbuhan hingga 12,79 persen atau bertambah sebanyak 9.650 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 75.452 orang saja, dan kembali mengalami peningkatan jumlah kunjungan hingga mencapai sebanyak 100.345 orang atau tumbuh sebesar 17,91 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi salah satu event internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yakni Event Internasional Sungailiat Triathlon 2019 yang bertempat di Pantai Tanjung Pesona Sungailiat, Sungailiat Adventure Trail, Bangka Outdoor, Lintas Timur Trail Run, festival kepariwisataan dan berbagai festival budaya lainnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat pada Grafik 2.1.

**Grafik 2.1**  
**Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan**  
**di Kabupaten Bangka Tahun 2017 - 2019**



Sumber: Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

Munculnya beberapa spot baru destinasi wisata di Kabupaten Bangka seperti Pantai Tongachi dengan penangkaran penyu-nya, Pantai Tikus Emas, Ecopark Pemali dan lain-lain mampu memacu peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka, disamping beberapa lokasi wisata yang telah ada lebih dulu dan tetap menarik untuk dikunjungi. Selengkapny beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka**

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
1	Sungailiat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Matras</li> <li>2. Pantai Parai Tenggara</li> <li>3. Pantai Tanjung Pesona</li> <li>4. Pantai Tongachi</li> <li>5. Pantai Tikus Emas</li> <li>6. Pantai Rebo</li> <li>7. Pantai Rambak</li> <li>8. Pantai Mang Kalok</li> <li>9. Pantai Takari</li> <li>10. Novila Kuala</li> <li>11. Puri Tri Agung</li> <li>12. Bukit Mahayana</li> <li>13. Pantai Teluk Uber</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Tanjung Pesona, Hotel Parai, Novilla Hotel, Puri Ansel, Batu Bedaun Resort, Hotel Sunjaya, Hotel ST 12, Boss Hotel, Hotel Tri Mustika</li> <li>- Penginapan</li> <li>- Restoran</li> <li>- Rumah makan</li> <li>- Cafe</li> <li>- Pusat oleh-oleh</li> <li>- Tempat Ibadah</li> </ul>

NO	KECAMATAN	DESTINASI WISATA	AMENITAS
2	Pemali	1. Pemandian Air Panas Tirta Tapta 2. Air Simpur 3. Bukit Tujuh Sempan 4. <i>Ecopark</i> Pemali	- Rumah makan - Cafe - Tempat Ibadah
3	Merawang	1. Pantai Air Anyir 2. Pantai Temberan 3. Hutan Nyato Kimak	- Hotel Jatimas - Rumah makan - Tempat Ibadah
4	Belinyu	1. Pantai Penyusuk 2. Pantai Remodong 3. Pantai Levar 4. Wisata Aik Bedelew 5. Mangrove Perpat Permai 6. Mangrove Sungai Buntu 7. Situs Benteng Kutopanji 8. Kelenteng Bongkap 9. Goa Maria Belinyu 10. Kuil Pha Kak Liang	- Hotel Dragon, Sam Pesaren Hotel, Mink-Mink Inn - Penginapan - Rumah Makan - Cafe - Pusat oleh-oleh - Tempat Ibadah
5	Riau Silip	1. Gunung Maras 2. Pantai Tuing	- Cafe - Tempat Ibadah
6	Bakam	Hutan Raya Rimbe Mambang	- Rumah makan - Tempat Ibadah
7	Mendo Barat	Situs Benteng Kota Kapur	- Rumah makan - Tempat Ibadah

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

#### 2.1.8.8. Potensi Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan potensi kawasan seluas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada gambar 2.16. Potensi sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut skalanya, yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, kawasan perdagangan Belinyu, kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

**Gambar 2.16**  
**Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka**



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan Belinyu dikembangkan di sepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktifitas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan, *show room* mobil, motor, *spare part* kendaraan, bengkel, dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.

### 2.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum wilayah di Pulau Bangka termasuk Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat dijelaskan karena bentuk morfologi Pulau Bangka yang cenderung datar. Gambaran wilayah rawan bencana di Kabupaten Bangka seperti dijelaskan dalam peta berikut :

**Gambar 2.17.**  
**Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka**



Sumber: Dokumen Profil Daerah Rawan Bencana Kab. Bangka, Bappeda, 2014

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya banjir genangan air di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan air laut saat pasang dan tingginya curah hujan pada musim penghujan. Namun, genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Kejadian bencana lainnya secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah kebakaran hutan pada musim kemarau dan adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut.

Berdasarkan data tahun 2019, dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka ada 6 (enam) Kecamatan yang termasuk rawan terjadi bencana sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	LOKASI/ KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ LINGKUNGAN	JENIS BENCANA	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BANGUNAN
A.1	<b>KECAMATAN SUNGAILIAT</b> Daerah Rawan Bencana/SeringTerjad iBencana				
	1. Kel. Kudai				
	- Jl. A. Yani	Banjir	-	1.342 Org	347
	- Kp. Pasir	Banjir	-	591 Org	170
	2. Kel. Parit Padang				
	- Lingk. Parit Padang	Banjir	4 Ha	270 Org	64
	- Lingk. SudiMampir	Banjir	2 Ha	38 Org	20
	- Lingk. LubukKelik	Banjir	2 Ha	41 Org	20
	- Lingk. Rambak	Banjir	3 Ha	80 Org	27
	3. Kel. SrimenantiLingk. Sidodadi	BanjirGenan gan Air	-	1.495 Org	400
4. Kel. Sungailiat	Banjir/	10 Ha	30 KK	15	
- Lingk. Maria Goreti					
- Lingk. Nelayan I Daerah yang Berpotensi TerjadiBencana	Gelombang Pasang	- -	2.700 Jiwa	550	
5. Kel. Kudai	Gelombang Pasang	-	878 Org	216	
- Lingk. Parit IV	WabahPenya kit Banjir				
B.2	<b>KECAMATAN PUDING BESAR</b>				
	1 Daerah Rawan Bencana/SeringTerjad iBencana				
	- Desa Kayu Besi	Banjir	1 Ha	100 org	60
- Desa Kota Waringin	Banjir	12.000 m2	104 org	26	
2	Daerah Yang BerpotensiTerjadiBen cana	-	-	-	-
C.3	<b>KECAMATAN BAKAM</b>				
	1 Daerah Rawan Bencana/SeringTerjad iBencana	-	-	-	-
		BanjirGenan	25.270 m2	2.887	549

NO	LOKASI/ KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ LINGKUNGAN	JENIS BENCANA	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BANGUNAN
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana 1. Bukit Layang 2. Mangka	gan Air dan Tanah Longsor  Banjir Genangan Air dan Tanah Longsor	5.500 m <sup>2</sup>	855	195
<b>D.4</b>	<b>KECAMATAN BELINYU</b>				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana 1. Desa Riding Panjang KpJintan	Banjir Genangan air	79.766 m <sup>2</sup>	2.866	816
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana 1. Kel. Kuto Panji Kp. Berok & Sungai Keladi Desa Bintet Dusun Pesaren	Banjir Genangan Air Banjir Genangan Air	24.739 m <sup>2</sup> 68.670 m <sup>2</sup>	11.693 2.092	2.712 445
<b>E.5</b>	<b>KECAMATAN MERAWANG</b>				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana 1. Desa Kimak 2. Desa Jurung	Banjir Banjir	3 Ha 1 Ha	70 Orang 275 Orang	24 6
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana	-	-	-	-
<b>F.6</b>	<b>KECAMATAN PEMALI</b>				
1	Daerah Rawan Bencana/Sering Terjadi Bencana 1. Desa Air Duren	Banjir & Genangan air	7.650 Ha	3.024 Jiwa	-
2	Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana	-	-	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Bangka, 2020

### **2.1.10. Aspek Demografi**

Aspek demografi memberikan deskripsi tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014;102).

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, akan tetapi juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, serta kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

#### **2.1.10.1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2019 semester 2 (dua) sebanyak 318.756 jiwa dengan kepadatan 108 jiwa per km<sup>2</sup>, meningkat

dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 317.052 jiwa dengan kepadatan 107 jiwa per km<sup>2</sup>, seperti tersaji pada tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan per km<sup>2</sup> Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km <sup>2</sup> (jiwa)
1	Sungailiat	146,38	91.822	627,29
2	Bakam	488,1	18.473	37,85
3	Pemali	127,87	33.379	261,04
4	Merawang	164,4	29.743	180,92
5	Puding Besar	383,29	19.484	50,83
6	Mendo Barat	570,46	48.853	85,64
7	Belinyu	546,5	49.229	90,08
8	Riau Silip	523,68	27.773	53,03
<i>Time Series</i>	<b>2019</b>	<b>2.950,68</b>	<b>318.756</b>	<b>108,03</b>
	<b>2018</b>	<b>2.950,68</b>	<b>317.052</b>	<b>107</b>
	<b>2017</b>	<b>2.950,68</b>	<b>313.689</b>	<b>106</b>
	<b>2016</b>	<b>2.950,68</b>	<b>311.525</b>	<b>105</b>
	<b>2015</b>	<b>2.950,68</b>	<b>309.067</b>	<b>105</b>

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2019

Dari Tabel 2.12 diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penambahan penduduk sebanyak 1.074 jiwa. Pertambahan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar karena berkembangnya daerah Kabupaten Bangka dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka.

### 2.1.10.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Selama tahun 2014-2019, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan, seperti disajikan pada tabel 2.13.

**Tabel 2.13**  
**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio**  
**Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sungailiat	46.709	45.113	91.822	103,54
2	Bakam	9.659	8.814	18.473	109,59
3	Pemali	17.092	16.287	33.379	104,94
4	Merawang	15.288	14.455	29.743	105,76
5	Puding Besar	10.244	9.240	19.484	110,87
6	Mendo Barat	25.499	23.354	48.853	109,18
7	Belinyu	25.108	24.121	49.229	104,09
8	Riau Silip	14.358	13.415	27.773	107,03
	<b>2019</b>	<b>163.957</b>	<b>154.799</b>	<b>318.756</b>	<b>105,92</b>
	<b>2018</b>	<b>163.189</b>	<b>153.863</b>	<b>317.052</b>	<b>106,06</b>
	<b>2017</b>	<b>161.912</b>	<b>151.777</b>	<b>313.689</b>	<b>106,68</b>
	<b>2016</b>	<b>160.915</b>	<b>150.610</b>	<b>311.525</b>	<b>106,84</b>
	<b>2015</b>	<b>159.361</b>	<b>149.706</b>	<b>309.067</b>	<b>106,45</b>

Sumber: Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2019

Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 163.957 jiwa atau sebesar 51,43 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 154.799 jiwa atau sebesar 48,57 persen. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

### 2.1.10.3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, seperti disajikan pada Tabel 2.14.

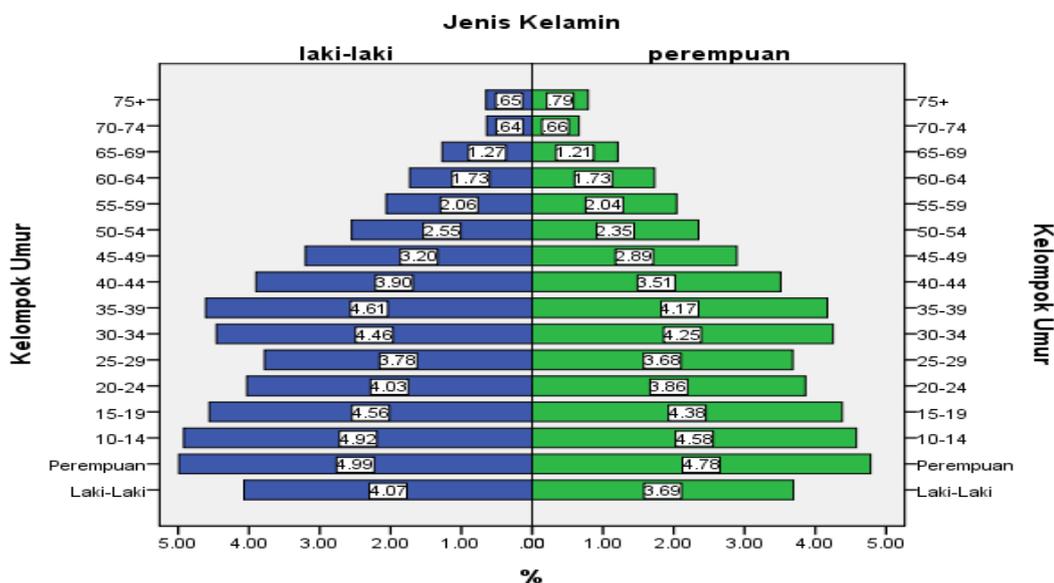
**Tabel 2.14**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 (%)**

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
0 - 4	7,45	7,68	7,36	7,8	7,76
5 - 9	9,52	9,24	9,02	9,28	9,76
10 - 14	9,59	9,31	9,4	9,21	9,50
15 - 19	8,38	8,61	8,78	8,71	8,94
20 - 24	7,73	7,9	7,84	7,77	7,89
25 - 29	9,3	9,11	8,71	8,34	7,46
30 - 34	9,48	9,47	9,21	8,99	8,72
35 - 39	8,65	8,77	9,15	9,11	8,78
40 - 44	6,87	7,13	7,24	7,23	7,41
45 - 49	5,73	5,79	6,03	6,06	6,09
50 - 54	4,85	4,8	4,78	4,76	4,91
55 - 59	4,45	4,28	4,31	4,25	4,10
60 - 64	3,26	3,37	3,42	3,43	3,46
65 - 69	2,02	2,07	2,23	2,34	2,49
70 - 74	1,09	1,05	1,06	1,11	1,30
≥ 75	1,61	1,41	1,46	1,6	1,44
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2019 (Data Diolah)

Dalam bentuk piramida penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2019, tersaji pada grafik berikut :

**Grafik 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2019 (%)**



Pada Tahun 2019, Kabupaten Bangka memperoleh bonus demografi yang dalam kata lain Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non Produktif (0-14 tahun dan  $\geq 65$  tahun) seperti yang tergambar di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.15**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	44.549	27,17	41.581	26,86	86.130	27,02
2	15-64	111.227	67,84	104.742	67,66	215.969	67,75
3	$\geq 65$	8.181	4,99	8.476	5,48	16.657	5,23
<b>Jumlah</b>		<b>163.957</b>	<b>100,00</b>	<b>154.799</b>	<b>100,00</b>	<b>318756,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dindikpencapil Kab. Bangka, 2020

#### 2.1.10.4. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Secara struktur, pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 (tiga) sektor yaitu primer, sekunder dan tersier, seperti terlihat pada tabel 2.16. Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan,

perikanan, usaha pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup pekerjaan dalam usaha industri pengolahan dan usaha konstruksi. Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Tabel 2.16**  
**Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan**  
**Di Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019**

SEKTOR	TAHUN			RATAAN
	2017	2018	2019	
PRIMER	47,82	47,30	44,36	46,49
SEKUNDER	12,72	15,30	16,19	14,74
TERSIER	39,46	37,40	39,45	38,77
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Bangka dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota**  
**di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.358,78	2.554,17	2.608,42	2.594,48	2.683,99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.463,58	1.476,18	1.592,60	1.487,37	1.370,82
C	Industri Pengolahan	2.485,12	2.574,15	2.865,56	2.968,49	2.927,90
D	Pengadaan Listrik & Gas	19,57	26,23	31,71	34,96	34,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	2,29	2,50	2,85	3,09	3,25

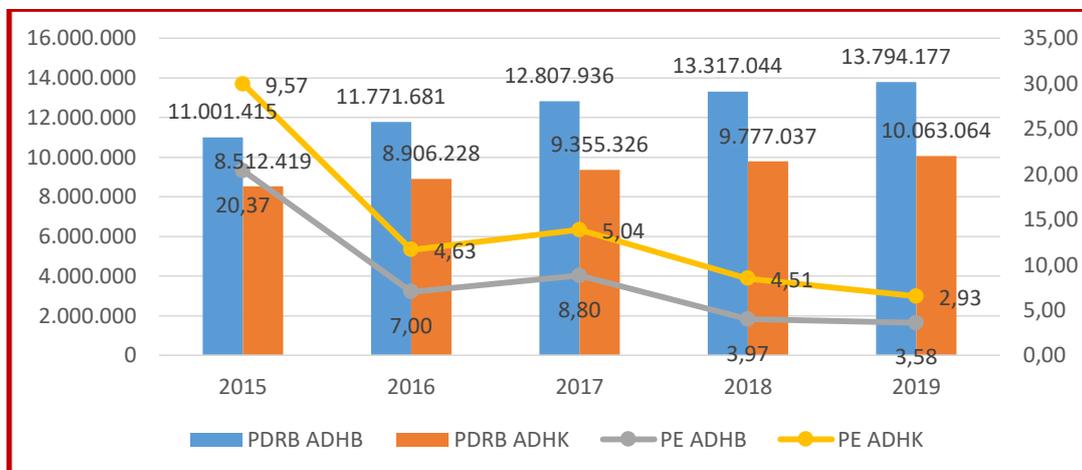
Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	964,87	1.048,01	1.189,44	1.306,43	1.479,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.355,74	1.516,73	1.706,86	1.857,97	1.954,85
H	Transportasi dan Pergudangan	245,19	266,01	292,54	315,95	350,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,11	295,15	320,83	352,50	406,76
J	Informasi & Komunikasi	195,50	214,56	236,29	263,30	295,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	302,41	328,23	352,14	380,65	398,50
L	Real Estate	370,45	393,82	426,89	476,29	502,11
M,N	Jasa Perusahaan	26,09	27,81	30,56	34,39	37,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	548,05	598,26	658,93	704,07	750,26
P	Jasa Pendidikan	225,78	256,48	277,82	301,84	328,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,87	111,51	121,83	131,86	148,98
R,S,T, U	Jasa lainnya	70,01	81,88	92,67	103,40	119,79
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>11.001,41</b>	<b>11.771,68</b>	<b>12.807,94</b>	<b>13.317,04</b>	<b>13.794,18</b>

Sumber BPS Kab. Bangka

### 2.2.2. Pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada Grafik 2.3.

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Berdasarkan pertumbuhan Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kabupaten Bangka secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha. Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.794.177 Milyar. Sementara perkembangan PDRB menurut sektor atau lapangan usaha selama periode tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2. dan Tabel 2.

**Tabel 2.18**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.358,78	2.554,17	2.608,42	2.594,48	2.683,99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.463,58	1.476,18	1.592,60	1.487,37	1.370,82
C	Industri	2.485,12	2.574,15	2.865,56	2.968,49	2.927,90

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik & Gas	19,57	26,23	31,71	34,96	34,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	2,50	2,85	3,09	3,25
F	Konstruksi	964,87	1.048,01	1.189,44	1.306,43	1.479,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.355,74	1.516,73	1.706,86	1.857,97	1.954,85
H	Transportasi dan Pergudangan	245,19	266,01	292,54	315,95	350,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,11	295,15	320,83	352,50	406,76
J	Informasi & Komunikasi	195,50	214,56	236,29	263,30	295,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	302,41	328,23	352,14	380,65	398,50
L	Real Estate	370,45	393,82	426,89	476,29	502,11
M,N	Jasa Perusahaan	26,09	27,81	30,56	34,39	37,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	548,05	598,26	658,93	704,07	750,26
P	Jasa Pendidikan	225,78	256,48	277,82	301,84	328,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,87	111,51	121,83	131,86	148,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	70,01	81,88	92,67	103,40	119,79
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>11.001,41</b>	<b>11.771,68</b>	<b>12.807,94</b>	<b>13.317,04</b>	<b>13.794,18</b>

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

**Tabel 2.19**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

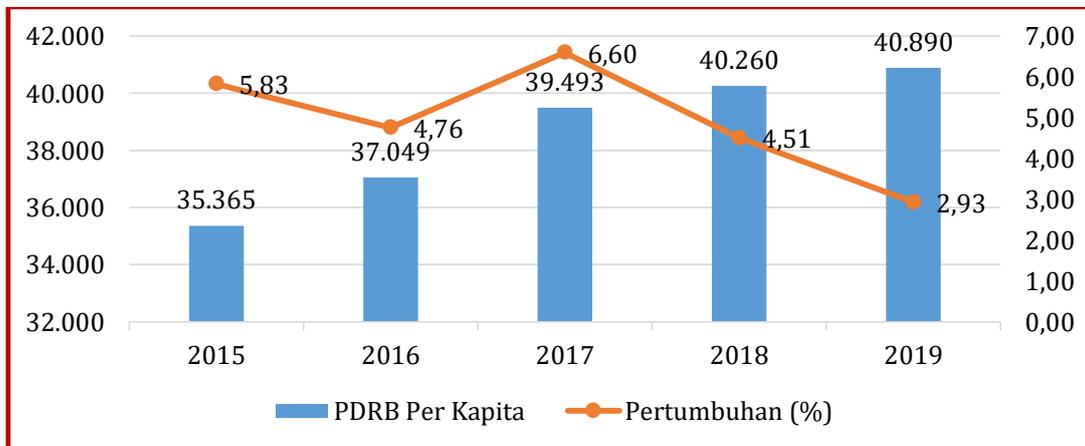
Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.685,29	1.779,35	1.781,09	1.911,35	1.975,12
B	Pertambangan dan Penggalan	1.303,97	1.324,89	1.385,52	1.387,05	1.400,20
C	Industri Pengolahan	2.085,12	2.168,22	2.319,79	2.351,86	2.326,79

Sektor PDRB Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
D	Pengadaan Listrik & Gas	15,54	17,78	18,63	20,21	19,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,61	1,70	1,85	1,92	2,01
F	Konstruksi	683,61	723,60	779,37	819,40	896,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.003,41	1.052,49	1.128,49	1.189,19	1.213,81
H	Transportasi dan Pergudangan	172,79	182,84	195,53	210,61	222,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188,85	200,64	211,13	224,99	245,15
J	Informasi & Komunikasi	178,51	195,07	210,39	234,63	262,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	225,70	240,23	245,84	256,64	264,45
L	Real Estate	287,23	295,01	310,26	338,14	346,54
M,N	Jasa Perusahaan	18,67	19,14	19,85	21,23	21,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385,76	409,65	434,30	472,36	500,01
P	Jasa Pendidikan	147,60	157,26	165,51	180,07	192,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,85	82,88	87,93	92,61	101,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	49,91	55,48	59,85	64,78	72,23
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>8.512,42</b>	<b>8.906,23</b>	<b>9.355,33</b>	<b>9.777,04</b>	<b>10.063,06</b>

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Sementara perkembangan PDRB per kapita dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 2.4

**Grafik 2.4**  
**PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

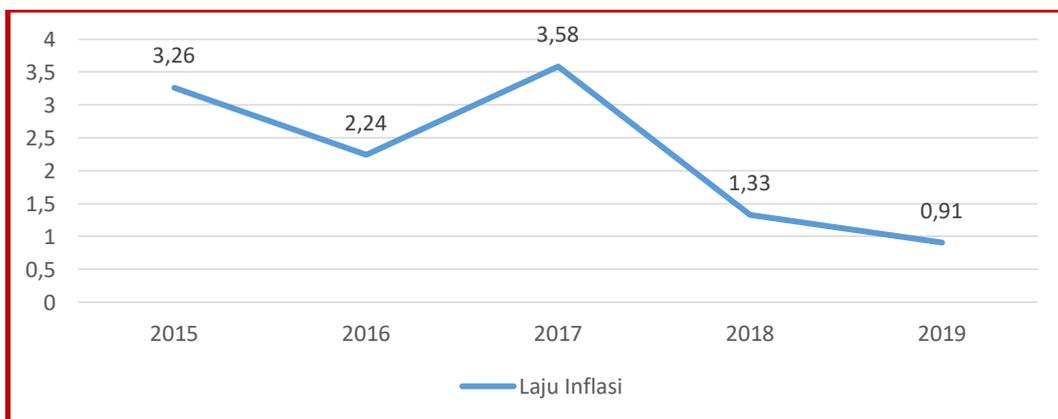


Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

### 2.2.2. Laju Inflasi

Laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada Grafik 2.5.

**Grafik 2.5**  
**Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Kab. Bangka, 2020

Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah 10 % (sepuluh persen). Pada tahun 2019 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami penurunan inflasi yang sangat ekstrim sebesar 0,91 persen. Angka inflasi 0,91 tahun 2019 ini menunjukkan angka inflasi yang menurun dibandingkan

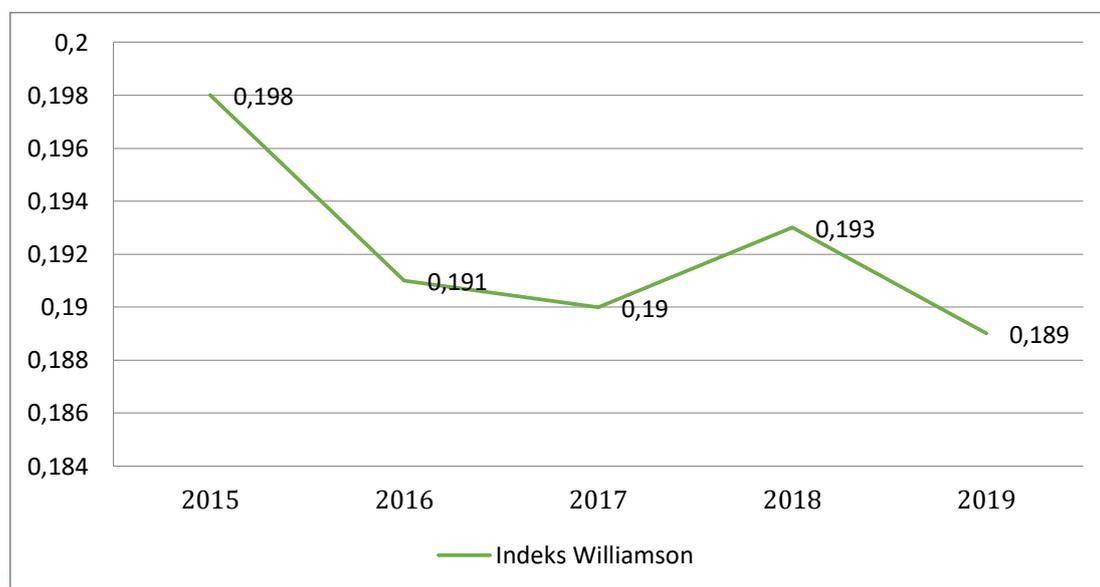
dengan angka inflasi tahun 2018 yang sebesar 1,33 persen. Laju inflasi sektoral pada tahun 2019 yang menurun ini disumbang oleh semua sektor lapangan usaha.

### 2.2.3. Indeks Disparitas Pendapatan Antar Kecamatan

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarkecamatan di Kabupaten Bangka digunakan teknik analisis Indeks Williamson.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai indeks sebesar 0,198 - 0,189. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Bangka termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kecamatan.

**Grafik 2.6**  
**Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

#### 2.2.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini (GiniRatio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

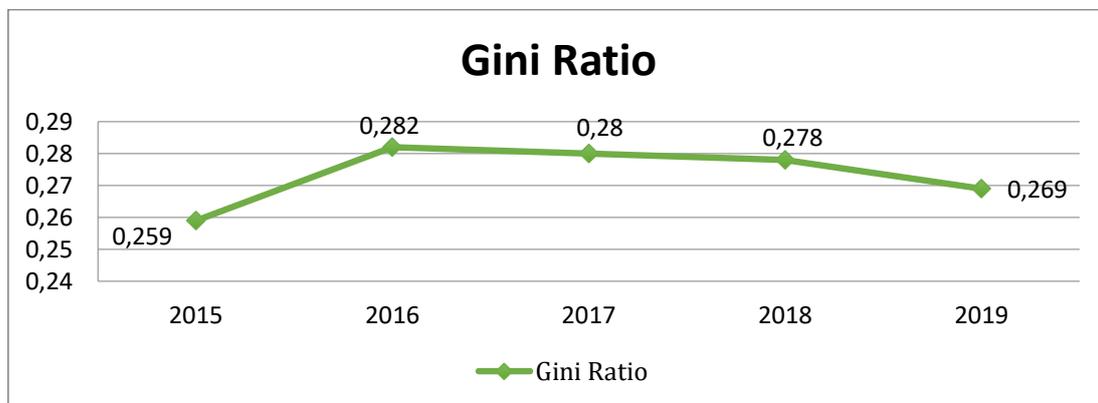
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- $GR < 0.4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada periode 2015-2019, GiniRatio berkisar pada angka 0,259 hingga 0,269, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Ketimpangan pendapatan ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, GiniRatio berada pada angka 0,259. Angka ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,282 di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan hingga mencapai 0,269 pada tahun 2019, seperti disajikan pada Grafik 2.7.

**Grafik 2.7**  
**GiniRatio Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

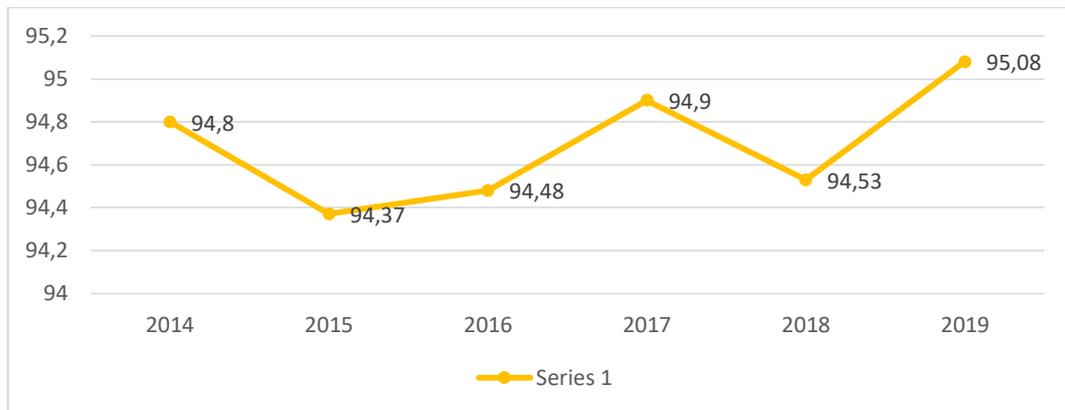
### 2.2.5. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Grafik 2. menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2014 – 2019 mempunyai trend yang terus meningkat. Pada tahun 2014 penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 94,80 persen, kemudian menurun hingga mencapai 94,37 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016 serta meningkat lagi menjadi 94,90 pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 94,53 dan terjadi peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 95,08.

**Grafik 2.8**  
**Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019**



Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

### 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapny tren perkembangan IPM dalam empat tahun terakhir, tersaji pada Tabel.

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2019**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,79	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39
2	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000,-)	10.679	10.904	11.279	11.420	12.043	12.480
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,36	12,37	12,58	12,68	12,76
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92	7,94	7,96	8,19	8,20	8,23
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,47	70,48	70,52	70,56	70,73	70,99

Sumber: BPS Kab Bangka, 2020

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 -2019, IPM terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Bangka sebesar 69,79 pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 menjadi 70,03 dan 70,43 pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai 71,80 dan pada

tahun 2019 sebesar 72,39. Pada tahun 2019 IPM laki-laki sebesar 76,73 sedangkan IPM Perempuan 67,90 hal ini menunjukkan bahwa IPM laki-laki masih diatas IPM Perempuan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2014-2019 tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuknya.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,92 pada tahun 2014 menjadi 8,23 di tahun 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,33 di tahun 2014 menjadi 12,76 di tahun 2019. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,47 pada tahun 2014 menjadi 70,99 di tahun 2019. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 10,679 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 12,480 juta rupiah di tahun 2019. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

a. Angka Harapan Lama Sekolah

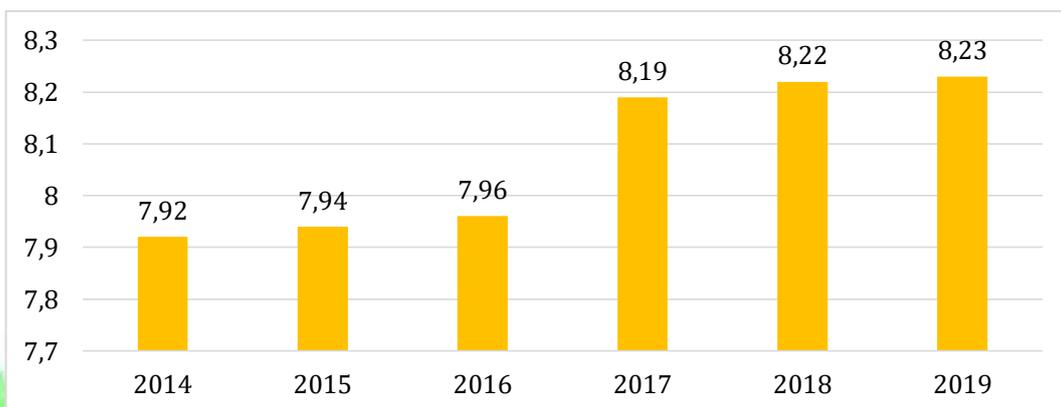
Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi "*Knowledge Based Society*". Pengertian "*Knowledge Based Society*" muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Knowledge yang menyatu (*embedded*) dengan sumber daya manusia sebagai human capital dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga knowledge merupakan bagian langsung yang mempengaruhi faktor produksi. Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling - EYS*). Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka pada Tahun 2019 berada pada peringkat ke 2 diantara 8 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu

sebesar 12,79 tahun dengan rincian Angka Harapan Lama Sekolah Laki-laki sebesar 12,67 perempuan sebesar 13,08 dan diatas harapan sekolah penduduk Provinsi pada umumnya yang mencapai 11,94 tahun.

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka pada tahun 2019 baru mencapai 8,23 tahun dengan rincian RLS laki sebesar 8,69 dan RLS Perempuan sebesar 7,98. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi pada umumnya yang mencapai 7,98 tahun. Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Selengkapnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2014 hingga 2019, tersaji pada Grafik berikut.

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2014- 2019**



Sumber: BPS Kab. Bangka, 2020

c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, pada tahun 2019 AHH di Kabupaten Bangka telah mencapai 70,99 tahun dengan rincian 72,89 untuk AHH Perempuan dan 68,98 AHH Laki-laki apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

### 2.2.7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Kondisi perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Perkembangan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kemiskinan (%)	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92

Sumber : BPS Kabupaten Bangka

Berdasarkan data statistik pada tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun tetap berada pada kisaran 4,00-5,00 persen. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin mencapai 5,63 persen, kemudian turun menjadi 5,52 persen pada tahun 2016, kembali mengalami penurunan hingga menjadi 5,10 pada tahun 2017, namun kembali meningkat hingga mencapai 5,47 persen pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 4,92 persen pada tahun 2019.

Kebijakan pembangunan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index atau P1*) menjelaskan rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks atau P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

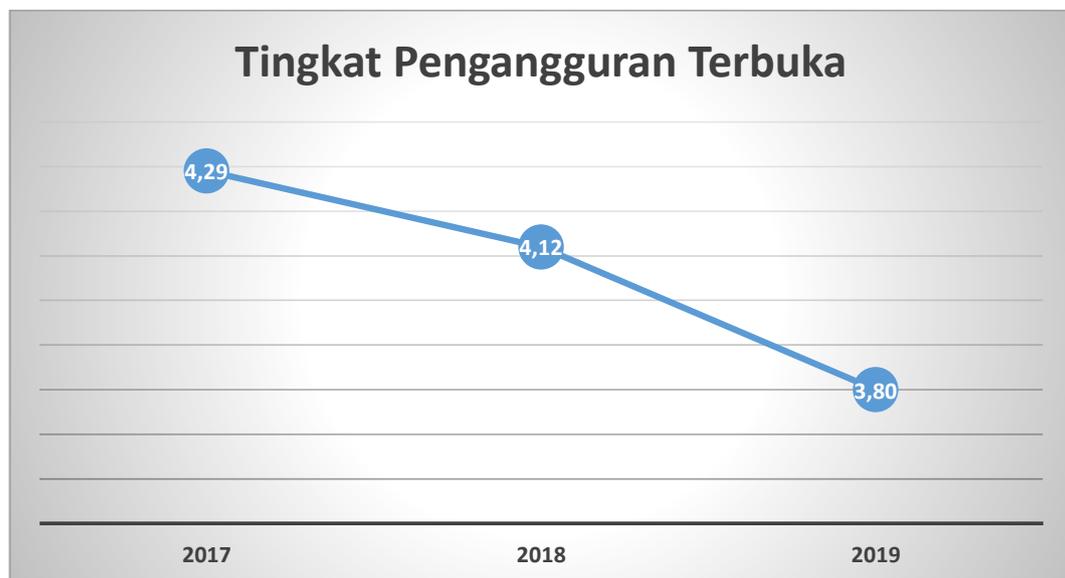
### 2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk

angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Kondisi perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.10**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019**



### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Layanan Umum Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

##### 2.3.1.1. Bidang Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar

yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan. Selengkapnya perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 2.22

**Tabel 2.22**  
**Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	104,37	110,93	109,33	100,00	103,56
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	88,1	102,64	95,5	95,35	96,27
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Rasio Guru/Murid	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
5	<b>Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

### **b. Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan yang berkualitas. Selengkapnya perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Fasilitas Pendidikan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah SD Bangunan Baik	89,53	90,28	93,71	93,73	93,92
2	Sekolah SMP Bangunan Baik	85,70	94,19	96,66	96,68	97,78

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

### c. Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak, dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,60	72,80	73,01	73,03	73,05

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

Tabel 2.24 menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Persentase PAUD terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 73,01 persen. Di tahun 2019 persentase PAUD mengalami kenaikan menjadi 73,05 persen.

### d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka selama periode tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 2.25

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI	0,10	0,08	0,07	0,05	0,06
2	Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs	0,20	0,20	0,18	0,16	0,23

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

### e. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang sama. Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka tahun 2015-2019 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL)**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelulusan SD/ MI	99,30	97,97	99,58	99,60	99,85
2	Angka Kelulusan SMP/ MTs	98,20	99,85	99,90	99,88	99,61
3	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	98,14	99,91	99,95	99,97	99,85
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV	70,15	75,97	82,17	82,19	84,54

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bangka, 2019

#### 2.3.1.2. Bidang Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru yang dicanangkan PBB yaitu SDG's sebagai kelanjutan dari program MDG's, bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun data sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.27**  
**Daftar 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH PENDERITA
1	COMMON COLD / FLU BIASA	14.719
2	ISPA / INFEKSI SALURAN PERNAPASAN ATAS	11.991
3	HYPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI	10.518
4	DYSPEPSIA /GANGGUAN PENCERNAAN	8.055
5	MYALGIA / NYERI OTOT	6.189
6	DIABETES MELLITUS	4.721
7	NECROSIS OF PULP / KERUSAKAN GIGI	4.237
8	PURE HYPERCOLESTEROL / KOLESTEROL TINGGI	3.518
9	PULPITIS / PERADANGAN GIGI	2.643
10	DIARRHOAE DAN GASTROENTERITUIS / DIARE DAN INFEKSI USUS	1.826
<b>TOTAL</b>		<b>68.417</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka, 2020

#### **a. Angka Kematian Bayi**

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal

dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**

NO	URAIAN	REALISASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	4,87	4,36	4,22	4,19	3,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

Perkembangan angka kematian bayi dari tahun 2015 terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 3,25. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor

eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

### b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (*maternal mortalityrate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

**Tabel 2.29**  
**Perkembangan Angka Kematian Ibu**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	0,94	0,81	0,68	0,65	0,61

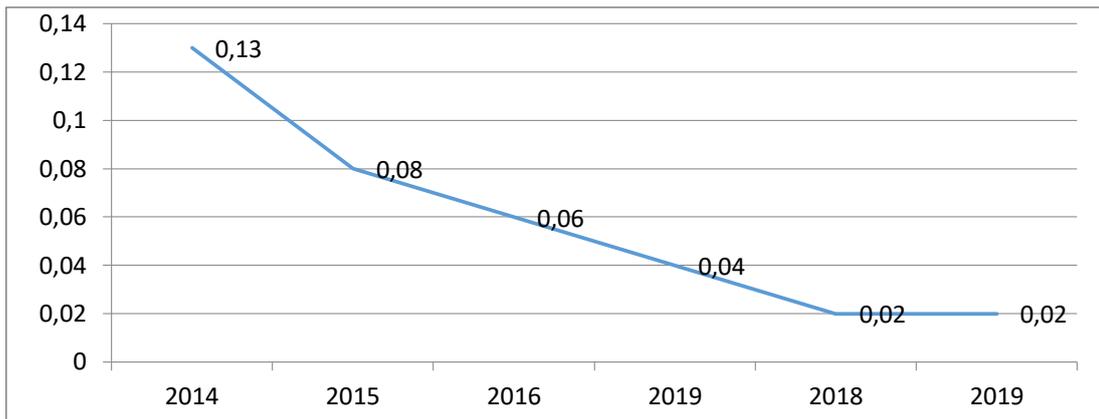
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

Secara umum selama tahun 2015-2019 AKI di Kabupaten Bangka terus menunjukkan penurunan, yaitu 0,94 pada tahun 2015 dan menurun menjadi 0,61 pada tahun 2019. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat dan dengan optimalisasi inovasi “SMS Bunda Cerdas”. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

### **c. Persentase Balita Gizi Buruk**

Balita Gizi Buruk adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Balita gizi buruk terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Persentase Balita gizi buruk mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 0,13 persen pada tahun 2014 menjadi 0,02 persen pada tahun 2019.

### **Grafik 2.11 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2019

### 2.3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 sebesar 73,18 persen atau mengalami peningkatan sebesar 7,52 persen dibanding tahun 2016 dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 0,7 persen dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 74,59 persen.

**Tabel 2.30**  
**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	458.966	461.842	537.422	547.343	547.864
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
Persentase (%)	62,48	70,00	73,18	73,25	74,59

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2019

#### b. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 90,20% meningkat menjadi sebesar 98,07% di tahun 2019, seperti tersaji pada Tabel 2.31. Peningkatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan pembangunan cetak sawah yang dilakukan dalam skala maksimal pada tahun sampai dengan tahun 2017

melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bangka baik dari APBD Kabupaten Bangka, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN. Pembangunan cetak sawah yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat melalui kegiatan Upaya Khusus tanaman padi sejak tahun 2016 diharapkan mampu mendukung upaya ketahanan pangan daerah Kabupaten Bangka.

**Tabel 2.31**  
**Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	1.206	2.210	2.220	2.235	2.240
Luas irigasi Kabupaten	1.337	2.284	2.284	2.284	2.284
<b>Ratio (%)</b>	<b>90,20</b>	<b>96,76</b>	<b>97,20</b>	<b>97,85</b>	<b>98,07</b>

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2019

### c. Ketaatan terhadap RTRW

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bangka perlu dilakukan penyusunan indikasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/urgensi dari program/sub program maupun sektor/subsektor yang harus diprioritaskan.

**Tabel 2.32**  
**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	100	100	100	100	100
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	74,65	75,79	76,77	76,79	91,26
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	87,33	87,90	88,39	88,40	95,63

Sumber : DPUPRP Kabupaten Bangka, 2019

Rencana kegiatan pembangunan dalam RTRW Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan program pembangunan pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan program pembangunan pengembangan struktur tata ruang (pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah).

#### d. Luas Wilayah Produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2019 memiliki luas sebesar 210.052,5ha dari luas seluruh wilayah/kawasan budidaya sebesar 261.823,44 ha, secara rinci disajikan pada tabel 2.33

Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi.

**Tabel 2.33**  
**Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif (Ha)	213.045,73	215.009,41	216.554,17	260.544,25	210.052,50
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44	261.823,44
3	Rasio (1/2)	81,37	82,12	82,71	99,51	80,23

Sumber : DPUPRP Kabupaten Bangka, 2019

Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
  - kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
  - kawasan peruntukan pertanian lahan kering
3. Kawasan peruntukan perkebunan;
4. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
5. Kawasan peruntukan peternakan;
6. Kawasan peruntukan perikanan;
7. Kawasan peruntukan pertambangan;
8. Kawasan peruntukan industri;
9. Kawasan peruntukan pariwisata;

#### 2.3.1.4. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

##### a. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bangka semakin bertambah setiap tahun, sehingga pada pada tahun 2019 persentase rumah layak huni mencapai sebesar 97,40%.

**Tabel 2.34**  
**Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Layak Huni	61.638	61.712	65.901	76.814	77.627
Jumlah Seluruh Rumah	62.990	63.080	69.388	78.376	79.669
Ratio	97,85	97,83	94,97	98,01	97,40

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2019

##### b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada Tabel 2.35. Realisasi jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2019 meningkat menjadi 89.820 atau sebesar 98,71 persen dibanding tahun 2015 sebesar 86,03 persen. Dukungan pencapaian target ini

dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan dari APBN melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) I dan II.

**Tabel 2.35**  
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	66.910	78.775	81.960	87.782	89.820
Jumlah RT	77.771	81.180	90.998	95.734	90.998
Rasio (%)	86,03	97,04	90,07	91,69	98,71

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2020

### c. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan listrik di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 meningkat menjadi 59.932 rumah tangga atau sebesar 98,67% dibanding tahun 2018 sebanyak 57.578 rumah tangga, seperti tersaji pada Tabel 2.36. Pada prinsipnya seluruh desa di Kabupaten Bangka sudah dialiri listrik walaupun belum semua masyarakat memiliki sambungan rumah terhadap listrik yang sudah tersedia.

**Tabel 2.36**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RT yang memiliki sambungan listrik (Unit)	47.653	51.026	60.211	57.578	59.932
Jumlah RT (Unit)	62.909	63.080	69.388	71.737	86.176
Ratio (%)	75,75	80,89	86,77	93,93	98,67

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

### d. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 86,78% dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 menjadi sebesar 94,12%, seperti tersaji pada tabel 2.37

**Tabel 2.37**  
**Rumah Tangga Bersanitasi**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
% Rumah Tangga Bersanitasi	86,78	86,81	91,67	91,69	94,12

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka, 2019

Kenaikan jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bangka merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja-AMPL) yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan jamban yang didanai dari APBD Kabupaten (pemicuan), Program Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten Bangka 2019, Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2019, Program Pembangunan Rumah Layak Huni Dana Bantuan Provinsi 2018, peran serta masyarakat (Arisan Jamban), peran serta swasta (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan.

#### **e. Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka adalah :

- Kecamatan Sungailiat yaitu Lingkungan Nelayan I seluas 26,32 ha, Lingkungan Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday 3,572 ha, dan

- Kecamatan Belinyu yaitu Kelurahan Kuto Panji seluas 2,44 ha dan Kelurahan Air Jukung seluas 27,98 ha;
- Dengan total luas 105,42 ha.
- Namun, setelah dilakukan verifikasi data melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diperoleh data kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bangka seluas 81,63 ha.

**Tabel 2.38**  
**Lingkungan Permukiman Kumuh**  
**di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	78,52	78,52	72,25	50,02	49,27
Luas Wilayah	302.069,36	302.069,36	302.879	302.879	302.879
Ratio (%)	0,026	0,026	0,024	0,017	0,016

Sumber : DINPERKPP Kabupaten Bangka, 2019

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 kurang lebih 49,27 ha atau sebesar 0,016 persendari total luas wilayah, seperti tersaji pada Tabel 2.38. Kondisi ini menurun dibanding luas tahun 2018 yang kurang lebih sebesar 50,02 ha atau sebesar 0,017 persen dari total luas wilayah. Kondisi ini disebabkan keberhasilan dari program pengentasan kumuh kota terhadap lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan dan perbaikan drainase, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana persampahan, dan air limbah.

#### **2.3.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesbangpol, dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja yaitu angka kriminalitas kabupaten seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.39**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

No	JenisKriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	480	442	343	273	342
2.	JumlahPenduduk	309.067	311.525	313.689	316.093	318.756
3.	AngkaKriminalitas	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

### 2.3.1.6. Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan. Berdasarkan tabel 2.40, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif.

**Tabel 2.40**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah Penduduk miskin (Rumah Tangga)	17.390	17.290	16.450	18.020	16.520
2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial					
a. Penduduk rawan Sosial dan Sarana					
1). Lanjut Usia Terlantar (Orang)	251	247	35	35	35
2). Komunitas Adat Terpencil (Orang)	0	0	0	0	0
3). Penyandang Cacat (Orang)	1.073	1.053	930	930	1.714
4). Pengungsi dan Korban Bencana (Orang)	17	713	343	343	138
b. Jumlah Penghuni Panti Asuhan (Orang)	107	51	106	106	125
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					

a. Karang Taruna (Orang)	76	76	76	76	67
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) (Orang)	8	8	8	8	8

Sumber : Dinsos Kab. Bangka dan BPS Kab. Bangka, 2020

## 2.3.2. Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 2.3.2.1. Bidang Tenaga Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 sebanyak 155.733 orang dan pada tahun 2019 menjadi 159.950 orang. Data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari jumlah 285 orang pekerja yang mendaftar sebanyak 103 orang pekerja diantaranya telah ditempatkan.

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Penduduk Angkatan Kerja**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015–2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	144.364	146.755	149.103	155.733	159.950
2	Jumlah Penduduk usia 15 - 64 Tahun	211.247	215.370	218.530	230.001	153.874
3	Jumlah Pekerja yang Ditempatkan	512	763	862	897	103
4	Jumlah Pekerja yang Mendaftar	617	824	977	989	285

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2019

### 2.3.2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun

kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki.

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun laki-laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (*Gender Parity Index/GPI*), angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki.

Selengkapnya perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 2.42

**Tabel 2.42**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar					
▪ Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,02	0,96	0,99	1,01	1,01
▪ Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,96	1,01	1,51	1,50	0,96
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16,67	16,67	16,67	16,67	17,14

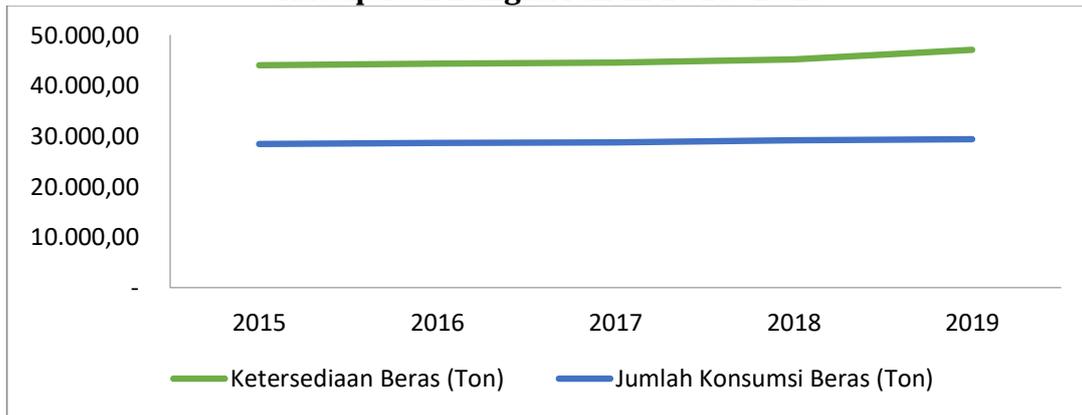
Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2019

### 2.3.2.3. Bidang Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan

secara mandiri merupakan hal yang amat penting, di samping ketersediaan pangan itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi.

**Grafik 2.12**  
**Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton)**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

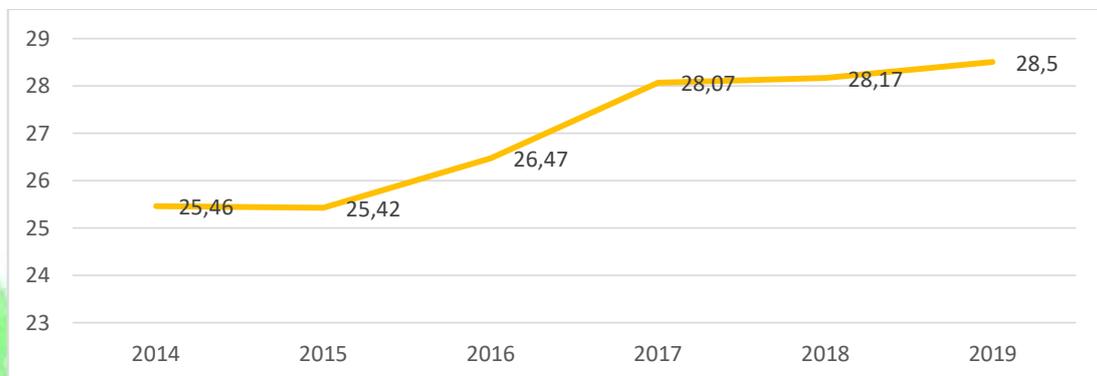


Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, 2019

#### 2.3.2.4. Bidang Pertanahan

Indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2014-2019. Tahun 2014 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 24,46 persen saja, meningkat hingga mencapai 28,5 persen pada tahun 2019.

**Grafik 2.13**  
**Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019**



Sumber: DINPERKPP Kab Bangka, 2019

#### 2.3.2.5. Bidang Lingkungan Hidup

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2015-2019 tersaji pada tabel 2.43.

**Tabel 2.43**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019**
Persentase Penanganan Sampah	91,24	91,30	91,70	91,72	76,55
JumlahTPS per Satuan Penduduk	0,14	0,19	0,23	0,25	0,25

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2020

### 2.3.2.6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan capaian yang sangat baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari rasio kepemilikan KTP pada tahun 2019 mencapai 99,11 persen, meningkat dibandingkan rasio kepemilikan KTP tahun 2018 sebesar 92,79 persen, seperti tersaji pada tabel 2.44

**Tabel 2.44**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019**
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,84	0,93	0,95	0,97	0,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,73	0,84	0,86	0,88	0,88

3	Rasio pasangan berakate nikah	0,73	0,73	0,75	0,79	0,79
4	Kepemilikan KTP (%)	85,80	92,50	92,75	92,79	99,11
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	80,42	84,67	88,18	88,20	92,60
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dindukpencapil Kab. Bangka,2019

Berdasarkan data pada Tabel 2.44, untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga tahun 2019 telah mencapai nilai sebesar 92,60%. Hal ini di sebabkan karena adanya inovasi “Bang Muda” atau Bangka Mudah Dapat Akta. Program ini merupakan inovasi dimana begitu bayi lahir langsung mendapatkan akta gratis. Sedangkan untuk ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan sejak tahun 2011, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2011.

### 2.3.2.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun dan persentase Desa Swasembada. Perkembangan capaian masing-masing indikator tersebut dalam periode tahun 2017-2019 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.45**  
**Perkembangan Rata-rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,5864	0,5864	0,6437	0,6711	0,6760
	Jumlah Desa Maju	0	0	4	10	11
	Jumlah Desa Berkembang	48	48	48	52	51
	Jumlah Desa Tertinggal	14	14	10	0	0
2	Persentase Desa Swasembada (%)	16,13	16,13	16,13	24,19	25,81
	Jumlah Desa Swasembada	10	10	10	15	16
	Jumlah Desa se- Kabupaten Bangka	62	62	62	62	62

Sumber : Laporan Kinerja 2019 Dinsospemdes Kab. Bangka, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rata-rata Indeks Desa membangun Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari 0,5864 pada tahun 2015 menjadi 0,6760 pada tahun 2019. Hal ini seiring dengan peningkatan status perkembangan desa, di mana pada tahun 2015 masih terdapat 14 Desa yang termasuk kategori Desa Tertinggal, mengalami peningkatan status pada tahun 2018 sehingga seluruhnya memenuhi kategori Desa Berkembang. Demikian pula halnya dengan Desa yang termasuk kategori Desa Maju meningkat dari 0 (nol) Desa pada tahun 2015 menjadi 11 Desa pada tahun 2019. Sementara jumlah Desa Swasembada juga mengalami peningkatan dari 10 Desa pada tahun 2015 menjadi 16 Desa pada tahun 2019.

### 2.3.2.8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Dari Tabel 2.46, diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah PUS di Kabupaten Bangka sebanyak 50.437 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta aktif sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38.015 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 38.092 orang.

**Tabel 2.46**  
**Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2017-2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS	56.196	47.318	49.980	49.017	50.437
2	Jumlah Peserta KB Aktif	43.073	38.350	37.041	38.092	38.015

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka,2019

**Tabel 2.47**  
**Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
-----	--------	------	------	------	------	------

1	Keluarga Prasejahtera	2.271	1.936	805	469	271
2	Keluarga Sejahtera 1	11.892	11.680	3.776	2.921	2.076
<b>Jumlah</b>		<b>14.163</b>	<b>13.616</b>	<b>4.581</b>	<b>3.390</b>	<b>2.347</b>

### Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2019

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka, 2019

Tabel 2.47 menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2015 Keluarga Prasejahtera berjumlah 2.271 dan Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 11.892. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 jumlah Keluarga Prasejahtera tinggal sebanyak 271 kepala keluarga dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 2.076 keluarga.

#### 2.3.2.9. Bidang Perhubungan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Perhubungan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa kontribusi sub sektor transportasi terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.48**  
**Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB (%)	1,97	2,11	2,19	2,27	2,54

Sumber : BPS, Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2020

#### 2.3.2.10. Bidang Komunikasi dan informatika

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.49

**Tabel 2.49**  
**Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2018- 2019**

URAIAN	TAHUN	
	2018	2019
Indeks SPBE	2,36	2,47
Kategori	Cukup	Cukup

Sumber : Laporan Kinerja 2019 DinkominfoKab.Bangka, 2020

### 2.3.2.11. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 138 unit dan meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 140 unit. Sementara jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebanyak 32.118 unit, seperti tersaji pada tabel 2.50

**Tabel 2.50**  
**Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2016- 2019**

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Aktif (unit)	138	138	138	140
2	Koperasi Tidak Aktif (unit)	86	69	65	65
3	Jumlah Induk Koperasi (unit)	-	-	-	-
4	Jumlah Koperasi Primer (unit)	224	207	203	205
5	Jumlah KUD (unit)	9	8	8	8
6	Jumlah Non KUD (unit)	215	199	195	197
7	Pengusaha Besar	-	-	-	-
8	Pengusaha Menengah	34	37	37	37

9	Pengusaha Kecil	22.579	22.615	22.615	22.615
10	Pengusaha Mikro	29.442	29.472	32.021	32.118

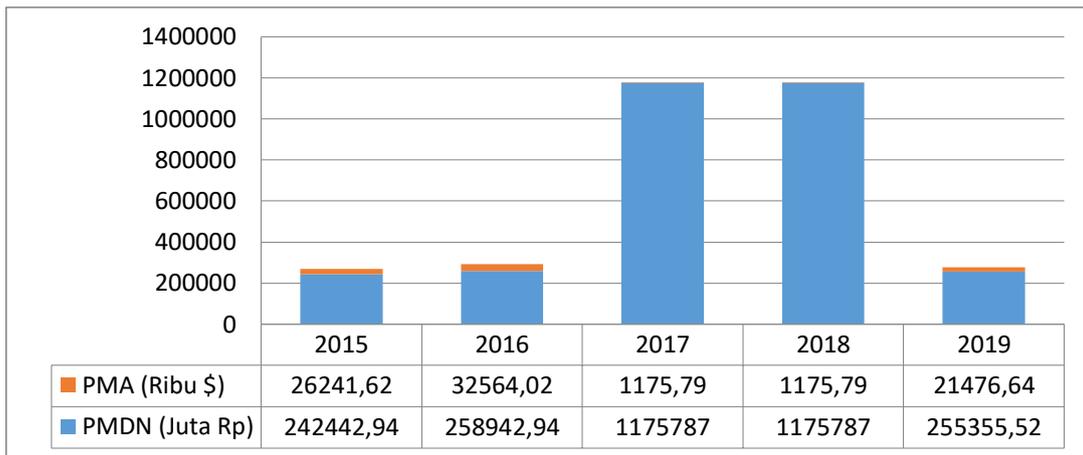
Sumber : DINPMP2KUKM Kab. Bangka, 2019

### 2.3.2.12. Bidang Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Komoditi inilah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa. Sektor ini dibentuk oleh 3 (tiga) subsektor yaitu : subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel, dan subsektor restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sektor yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2015-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada grafik 2.16. Pada tahun 2015, nilai PMDN sebesar Rp.242.442.940.000,- rupiah dan PMA sebesar US\$26.241.620,- sementara nilai investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 PMDN sebesar Rp.255.355.520.000,- dan PMA sebesar Rp.21.476.640,-.

**Grafik 2.14**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**



Sumber : DINPMP2KUKMKabupaten Bangka, 2019

Terjadi pergeseran sektor investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-2014, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi serta bidang perdagangan sebagai sektor penunjang. Namun, selama tahun 2015-2016, bidang pertambangan dan energi mulai ditinggalkan dan investor beralih ke bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta perdagangan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus berjalan meskipun tidak lagi ditopang oleh sektor pertambangan sebagai sektor penggerak utama perekonomian. Dengan demikian, Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah berhasil menghadapi era pasca pertambangan timah dengan mencari sektor alternatif penggerak ekonominya.

### 2.3.2.13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel 2.51

**Tabel 2.51**

### Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten	478	478	478	478	479
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten	10	10	10	10	11
3	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Rasio Lapangan olahraga per 1000 penduduk	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kab. Bangka, 2020

#### 2.3.2.14. Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diukur melalui indikator persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan uptodate, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.52.

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase ketersediaan data informasi statistik yang akurat dan uptodate (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja DinkominfotikKab.Bangka, 2020

#### 2.3.2.15. Bidang Kebudayaan

Analisis kinerja atas penyelenggaraan layanan pada bidang urusan kebudayaan dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel 2.53

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan**

## Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

No	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	6	8	8	8
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	11	11	10	10	10

Sumber : Dinparbud dan Dindikpora Kab. Bangka, 2020

### 2.3.2.16. Bidang Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam penguasaan informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan daerah Kabupaten Bangka hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat.

**Tabel 2.54**  
**Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019**

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan daerah	6.976	7.761	8.200	11.713	12.643
2	Jumlah koleksi buku di Perpustakaan daerah	13.646	15.216	15.959	16.038	18.751
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan selama 1 tahun	4.230	4.720	78.282	79.351	143.486

Sumber : Dinas Kearsipandan Perpustakaan Kab. Bangka, 2020

Pada tahun 2019, jumlah koleksi judul buku sebanyak 12.643 judul buku, naik sebanyak 930 judul dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tersaji pada tabel 2.54. Sementara itu, jumlah koleksi buku pada tahun 2019 sebanyak 18.715 buku atau naik sebanyak 2.677 buku dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2018 berjumlah 79.351 orang dan naik secara signifikan di tahun 2019 menjadi 143.486 orang.

### 2.3.2.17. Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan layanan bidang Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka diukur melalui beberapa indikator, dengan perkembangan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.55

**Tabel 2.55**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdus yang tertib arsip (baku, sesuai ketentuan Permendagri)	50,00	40,37	53,91	67,43	69,57
2.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemdus yang dibina dan dilatih (pembinaan dan pelatihan pengelola arsip)	10,43	48,65	83,48	100,00	20,00*
3.	Persentase arsip dinamis dan statis yang terdata dan tertata baik (sama dengan terselamatkan, tidak kacau)	N/A	3,39	7,49	20,04	21,88*
4.	Persentase arsip dinamis dan statis yang tertata dan terpelihara baik (dirawat)	N/A	100,00	100,00	100,00	24,96*
5.	Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (didata arsip statis)	2,94	2,94	2,94	17,65	17,65

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, 2020

### 2.3.3. Layanan Umum Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk dikembangkan.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2019 sebanyak 26.214,82 ton, sementara ketersediaan sarana kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2019 sebanyak 2.842 unit.

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	TAHUN					SATUAN
	2015	2016	2017	2018	2019	
Perikanan Laut						
Jumlah Tangkapan	26.005	27.216	27.761	27.761	26.214	Ton
Jumlah Kapal Penangkap Ikan	2.556	2.577	2.982	2.982	2.842	Unit
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	5.176	10.082	8.949	8.949	6.669	KK
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	1	1	1	1	1	Unit
Perikanan Darat						
Tambak						
Luas	16,00	23,50	66,11	66,11	271,26	Ha
Jumlah Produksi Perikanan Darat	302,5	472,77	596,07	596,07	1.925,21	Ton
Kolam						
a. Luas	1.733	9,09	9,63	9,63	32,27	Ha
b. Jumlah Produksi Rumah Tangga	162,82	180,20	187,02	187,02	200,28	Ton

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2020

### 2.3.3.2. Bidang Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam terutama timah yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata dianggap sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan karena potensi pariwisata Kabupaten Bangka yang sangat besar diharapkan menjadi penunjang sektor lainnya sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan *spending of money tourism* selama kurun waktu 2016-2019 seperti tersaji pada Tabel 2.57

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Spending of Money Tourism Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2019**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	71.738	72.309	75.618	77.130	90.714
2	<i>Spending Of Tourism Money</i>	Milyar/tahun	6,78	7,11	7,65	8,77	16,31

Sumber : Dinparbud Kabupaten Bangka, 2020

### 2.3.3.3. Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bangka merupakan program prioritas karena terkait dengan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan tabel 2.58, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 luas panen padi seluas 5.315,7 hektar dengan produksi beras sebesar 10.092,5 ton, sementara jumlah konsumsi beras sebesar 30.498,7ton/tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap beras dari luar daerah masih tinggi yaitu sekitar 20.406,2 ton/tahun.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2019 seluas 759,9 Ha, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seluas 895,4 Ha, demikian juga dengan produksi jagung pada tahun 2019 menjadi 3.799,5 ton. Konsumsi perkapita jagung selama tahun 2019 sebanyak 637,5 ton.

**Tabel 2.58**  
**Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi**  
**Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2016–2019**

Uraian	Capaian					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>A. Padi</b>						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	3.118,0	3.585,5	5.078,0	5.078,0	5.315,7	Ha
2). Produksi Beras	3.799,0	4.320,0	9.569,4	9.569,4	10.092,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi Beras	29.437,0	31.899,0	35.088,0	35.088,0	30.498,7	Ton/Tahun
<b>B. Jagung</b>						
1). Jumlah Areal Produksi (Panen)	26,0	325,4	407,0	895,4	759,9	Ha
2). Jumlah Produksi	78,0	976,0	1.223,1	4924,7	3.799,5	Ton
3). Jumlah Konsumsi	370,0	483,0	624,9	634,1	637,5	Ton/Tahun
<b>C. Singkong dan Hasil Umbi-Umbian</b>						
1). Luas Areal Produksi (Panen)	701,0	1.333,0	1.148,0	1.826,0	2.049,0	Ha
2). Jumlah Produksi	5.990,0	12.107,0	10.158,5	24.779,0	28.281,0	Ton
3). Jumlah Konsumsi	7.983,0	9.118,0	10.485,7	10.640,3	10.697,5	Ton/Tahun

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Tabel 2.58 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong dan umbi-umbian pada tahun 2019 seluas 2.049 Ha, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seluas 1.826 Ha. Demikian pula produksi meningkat menjadi 28.281 ton.

#### 2.3.3.4. Bidang Perdagangan

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

**Tabel 2.59**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,32	12,88	13,33	13,96	14,17

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

#### 2.3.3.5. Bidang Industri

Keberhasilan pelaksanaan urusan industri di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Dari tabel berikut, diketahui bahwa Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

**Tabel 2.60**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	22,59	21,87	22,37	22,29	21,23

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2020

#### 2.3.4. Layanan Urusan Penunjang

### 2.3.4.1. Fungsi Penunjang Perencanaan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah hasil penilaian perencanaan dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat Provinsi dan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tingkat Nasional.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan hasil penilaian terhadap perencanaan dan pembangunan Kabupaten Bangka memperlihatkan hasil yang sangat positif sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.61**  
**Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2020**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
HASIL PENILAIAN TINGKAT PROVINSI	Peringkat 1 Penghargaan Anugerah Pangripta Serumpun Sebalai 2016	Peringkat 1 Penghargaan Anugerah Pangripta Serumpun Sebalai 2017	Peringkat 1 Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2018	Peringkat 1 Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2019	Peringkat 1 Penghargaan Pembangunan Daerah Serumpun Sebalai 2020
HASIL PENILAIAN TINGKAT NASIONAL	Penghargaan Top 5 Anugerah Pangripta Nasional 2016	Penghargaan Top 4 Anugerah Pangripta Nasional 2017	Penghargaan Top 6 Perencanaan &Pembangunan Daerah Nasional 2018	Penghargaan Top 6 Perencanaan &Pembangunan Daerah Nasional 2019	Penghargaan Top 3 Perencanaan &Pembangunan Daerah Nasional 2020

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perencanaan adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya pada komponen perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan

oleh Pemkab Bangka mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**  
**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil Penilaian AKIP (Komponen Perencanaan Kinerja)	17,04	19,95	20,27	22,30	22,95

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

#### 2.3.4.2. Fungsi Penunjang Keuangan

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang merupakan penggabungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir semakin membaik, dalam hal ini dapat dilihat melalui opini hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**  
**Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LKPD Pemkab Bangka	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

#### 2.3.4.3. Fungsi Penunjang Kepegawaian dan SDM Daerah

Fokus layanan pada fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat profesionalitas ASN pada instansi pemerintah termasuk Pemkab Bangka adalah Indeks Profesionalitas ASN yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi (pendidikan formal), Kompetensi (riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya), Kinerja (penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja individu dan organisasi), dan Disiplin (riwayat hukuman disiplin).

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka selama empat tahun terakhir, walaupun masih berada pada kategori “Rendah”, akan tetapi menunjukkan perbaikan secara kontinyu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.64**  
**Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018**	2019
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	66,64	68,80	58,80	67,26
Kategori	Belum Ada Pengukuran	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2020

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Bangka mengalami peningkatan dari 66,64 pada tahun 2016 menjadi 68,80 pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga masuk kategori “Sangat Rendah” dengan nilai 58,80. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi pengukuran berdasarkan ketentuan dari pusat. Selanjutnya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan,

maka pada tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,26 dengan kategori “Rendah”.

#### 2.3.4.4. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Perkembangan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemkab Bangka termasuk salah satu pemerintah daerah dengan kategori “Sangat Inovatif” berdasarkan hasil penilaian *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam lima tahun terakhir juga selalu mendapatkan apresiasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan beberapa inovasi berhasil menembus Top 35, Top 45 dan Top 99 Inovasi Terbaik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.65**  
**Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka**  
**Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Tahun 2016-2020**

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
1	2016	5 inovasi	1	SIM data AMPL Bangka, Tak Lekang oleh Waktu	BAPPEDA	3 Inovasi TOP 99, 1 inovasi TOP 35
			2	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Dibalik Kocokan Arisan “Ibu”	DINKES	
			3	Kurangi Risiko Kecacatan dan Kematian Melalui Layanan Gawat Darurat oleh PSC	SPGDT	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
				SPGDT yang berbasis IT.		
			4	Eliminasi Malaria	DINKES	
			5	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
2	2017	9 inovasi	1	SENSASI SILET PSC 119 (Sentuhan Satu Aplikasi Sistem Layanan Emergency Terpadu)	SPGTD	1 inovasi TOP 99, Bang Muda
			2	ABSC (Anak Bangka Sehat Cerdas)	DINKES	
			3	Si Surtam (Survey Kontak Malaria, Eliminasi Malaria Di Bangka)	DINKES	
			4	SMS Bunda Cerdas	DINKES	
			5	Bangka Jambanisasi Total (Bang Jamal)	BAPPEDA	
			6	Kemiskinan Bangka dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			7	"MAJELIS SABTU!!" – Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			8	Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) – Petani Menjadi Tuan Tanah Di Daerahnya Sendiri	DINAS PERTANIAN	
			9	BANG MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) – Solusi Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	DINAS DUKCAPIL	
3	2018	11 inovasi	1	Perburuan Si Resti Turunkan AKI	DINKES	11 inovasi telah melalui seleksi administrasi KEMENPAN RB, SIMPANAN CANTIK memperoleh TOP 99
			2	Rumah Bang Baliga (Rumah Penimbangan Balita Siaga) Solusi Pemantauan Status Gizi Balita Diluar Jadwal Posyandu	DINKES	
			3	Layanan Emergency Berbasis IT Solusi Kegawatdaruratan Medis Dan Non Medis Kabupaten	DINKES	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			Bangka		
			4 "SIMPANAN CANTIK" (Sistem Pelayanan Cepat Akurat dan Tepat Medik) RSUD DEPATI BAHRIN Kabupaten Bangka	RSUD DEPATI BAHRIN	
			5 MADU SARI (Masyarakat Peduli Sampahnya Sendiri)	DINAS LH	
			6 Nelayan Mudah Informasi, Pembinaan, dan Administrasi (NeMuIPad)	DINAS PERIKANAN	
			7 Bang Rasyid (Bangka Rumah Sehat Idaman)	BAPPEDA	
			8 "Jari Manis Si Kembang Desa" Jaring Informasi Masyarakat Miskin Dengan Sistem Dan Aplikasi Kembang Desa	BAPPEDA	
			9 "Majelis Sabtu!!" - Model Jawaban Problematika Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bangka	BAPPEDA	
			10 Tujuh Pendekar Tampan (Tuntas Dan Rampungkan Pembangunan Jamban)	BAPPEDA	
			11 Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN	
4	2019	12 inovasi	1 Anak Bangka Sehat Cerdas (ABSC)	DINKES	2 inovasi TOP 99
			2 Gerlingan ODGJ	DINKES	Ransel Si Dora
			3 Ojek Lansia	DINKES	Ojek Lansia
			4 Matras TB	DINKES	
			5 SMS Bunda Cerdas	DINKES	1 inovasi TOP 45
			6 Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Si Resti Cikar	DINKES	Ransel Si Dora
			7 Ransel Si Dora	DINKES	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI		JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			8	"Nganggung" Germas	DINKES	
			9	Si Manis Teman Kelompok Wanita Tani	PANGAN	
			10	Pintu Kite	DIN PMP2KUKM	
			11	PORCATWIN 5 in 1	DINKES	
			12	"Lada Putih" RSUD Depati Bahrin Turunkan AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
5	2020	14 inovasi	1	Laboratorium Terpadu Publikasi Inovasi Bangka (LA REPUBLIKA)	BAPPEDA	
			2	Kesejahteraan Masyarakat Bangka Dengan Sistem dan Aplikasi (Kembang Desa)	BAPPEDA	
			3	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	BAPPEDA	
			4	Si Tumbuh Cerdas (Aksi Kolaborasi Penurunan Stunting Agar Bayi Hidup Cerdas dan Sehat)	BAPPEDA	
			5	TIMAH CORNER SEBAGAI EFEKTIFITAS UPAYA PENYELAMATAN ARSIP SEJARAH TIMAH BANGKA DI KABUPATEN BANGKA	DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN	
			6	Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Balik Kocokan Arisan "IBU"	DINKES	
			7	PAMOR KANCIL	DINKES	
			8	SMART-IN PIRT	DINKES	
			9	"GERLINGAN ODGJ" Gerakan PERLINDUNGAN ODGJ	DINKES	
			10	"Matras" TBC	DINKES	

NO	TAHUN	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI	OPD PENGUSUL	KET
			11 ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH UNTUK BUDIDAYA PADI SAWAH)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	TOP 99
			12 PENINGKATAN LAYANAN PATEN DENGAN SISTEM APLIKASI	KECAMATAN BAKAM	
			13 "SILADA PUTIH" RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB	RSUD DEPATI BAHRIN	
			14 Open Links : Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Sekolah Oleh Seluruh Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua dan Peserta Didik) Dalam Rangka Memperkuat Pembentukan Karakter di SD Negeri 12 Sungailiat Kabupaten Bangka	SDN 12 Sungailiat	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, baik domestik ataupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan Rasio Ketergantungan.

### 2.4.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani.

**Tabel 2.66**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019**
Nilai Tukar Petani	89,80	89,96	95,00	91,45	95,17

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 Nilai Tukar Petani menunjukkan trend yang fluktuatif, sempat mengalami peningkatan dan mencapai angka 95,00 pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 91,45, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 95,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah cukup sejahtera.

#### 2.4.2. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan memberikan gambaran tentang kemampuan nelayan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya. NTN tahun 2019 sebesar 113,17 berarti harga produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan subsektor perikanan tangkap lebih tinggi dari harga barang/jasa yang dikonsumsi dan biaya produksi nelayan subsektor perikanan tangkap.

**Tabel 2.67**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019**
Nilai Tukar Petani	100,00	106,47	113,85	113,10	113,17

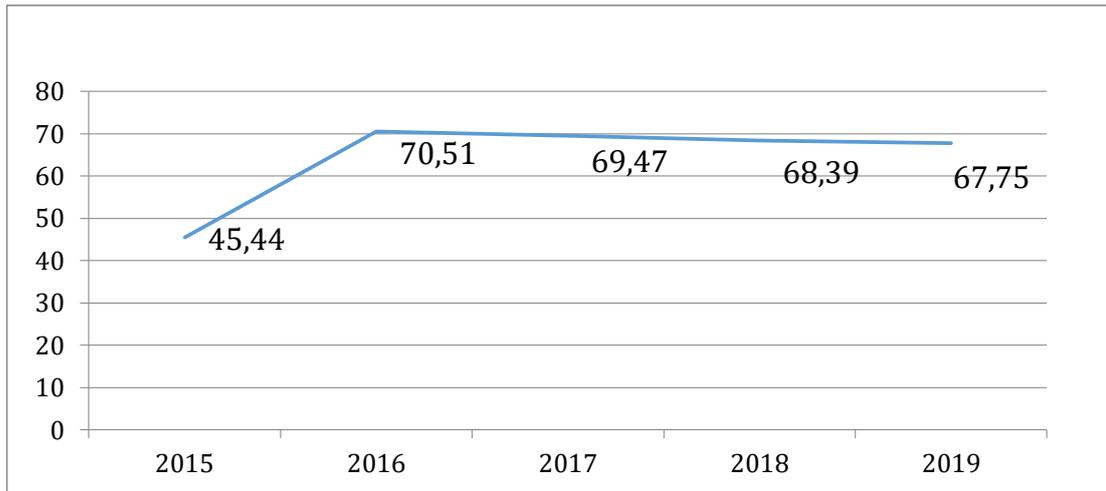
Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 NTN menunjukkan trend yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Nelayan sudah cukup sejahtera.

#### **2.4.3. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Semakin tingginya persentase *dependencyratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Grafik 2.15**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka 2015-2019**



Sumber: Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2019

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan sampai tingkat daerah agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

## 2.5. Evaluasi Capaian Perencanaan Pembangunan

### 2.5.1. Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023

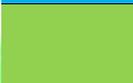
Evaluasi capaian perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dilakukan dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja utama RPJMD pada tahun 2019, dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi.

**Tabel 2.67**  
**Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023 (sampai dengan tahun 2019)**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET (2019)	REALISASI (2019)	CAPAIAN (2019)	KONDISI AKHIR RPJMD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	114,00	A
	Indeks SPBE	Indeks	2,36	2,38	2,47	103,78	3,00
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58,80	62,34	67,26	107,89	75,01
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	68,51	69,73	74,07	106,22	85,40
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	8,21	8,23	100,24	9,04
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,69	12,76	100,55	12,95
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,73	70,79	70,99	100,28	70,65
	Angka stunting	Tahun	27,70	18,20	3,82	179,01	15,48
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	62,20	67,31	72,07	107,07	81,40
Meningkatnya perlindungan pemenuhan hak-hak anak	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	N/A	Pratama	Pratama	100,00	Utama
Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	73,25	74,31	74,59	100,38	80,24
	Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	93,21	93,21	93,77	100,60	97,15
	Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,88	98,89	98,91	100,02	100,00
Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	%	94,39	94,57	95,12	100,58	100,00
	Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	%	98,60	98,65	98,71	100,06	100,00
	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	32,38	32,38	32,38	100,00	32,38
	Persentase Masyarakat Miskin yang Terlayani Rumah Layak Huni	%	95,98	95,99	97,40	101,47	100,00

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET (2019)	REALISASI (2019)	CAPAIAN (2019)	KONDISI AKHIR RPJMD
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	0,02	0,02	0,016	120,00	0,01
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis sport tourism, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	12,79	12,81	17,91	139,81	5,20
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,48	19,49	19,46	99,85	22,10
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan PDRB Perkapita	%	1,94	1,94	1,57	80,93	6,86
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	5,47	5,04	4,97	101,39	4,82
	Angka Pengangguran Terbuka	%	4,12	4,02	3,80	105,47	4,12
Meningkatnya peran serta desa dalam mendorong perekonomian daerah	Persentase Desa Swasembada	%	n.a	19,35	25,81	133,39	40,32
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	65,27	63,00	63,07	100,11	83,50
	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

	= melebihi target
	= mencapai target
	= tidak mencapai target

### 2.5.2. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDG's)

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDG's*) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG's Kabupaten Bangka sesuai RKPD Tahun 2018 Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, bahwa hampir semua indikator MDG's telah tercapai, namun masih beberapa indikator yang belum tercapai terutama yang termasuk ke dalam indikator pada T.3, T.5, dan T.7 yaitu : indikator angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), indikator unmeetneed (kebutuhan Keluarga Berencana/ KB) dan memastikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga pada tahun 2019, urusan kesehatan dan lingkungan hidup diharuskan menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mencapai target MDG's yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (*Sustainable Development Goals (SDGs)*), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals (MDGs)* yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

**Gambar 2.18.**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**



Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RKPd Kabupaten Bangka tahun 2021 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021. Secara detail, sinkronisasi SDG's dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.68**  
**Bidang dan Tujuan Utama *Sustainable Development Goals* (SDG's)**  
**dan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2019**

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
1	Kemiskinan	Mengurangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan aspek	Angka Kemiskinan (%)	4,97
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,65
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14
2	Makanan	Mengurangi kelaparan melalui peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama per 1.000 Penduduk (Kg/1000 Penduduk)	161.200
			Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan (%)	75,95
			Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	121,18
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,99

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
		mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	3,93
			Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup	0,62
			Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,02
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,23
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,76
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	72,07
			Indeks Pembangunan Gender	88,49
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)	98,71
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	95,12
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Rasio Elektrifikasi	98,12
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,58
			Peningkatan PDRB per Kapita (%)	1,57
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,8
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	74,59
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	98,91
			Persentase Panjang Jembatan Baik di Kabupaten	93,77
			Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	73,99
10	Ketimpangan	Mengurangi	Indeks Gini	0,269

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
		ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara	Indeks Williamson	0,189
			Kriteria Bank Dunia	23,06
11	Hunian	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk	0,21
			Rasio Pemukiman Layak Huni	0,996
			Rasio Lingkungan Permukiman Kumuh	0,016
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,10
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT untuk Makanan (%)	55,74
			Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan (%)	46,26
13	Iklm	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	32,38
			Ketaatan terhadap RTRW	100%
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air (%)	100,00
			Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber yang tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara (%)	100,00
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Praktik Illegal Fishing dan Perusakan Sumber Daya Kelautan	22,73
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan	Rasio Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	16,36

No	Bidang	Tujuan Utama	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja Daerah 2019
		hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikannya hilangnya	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100,00
			Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka (%)	0
16	Lembaga	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Hasil Evaluasi AKIP	70,18
			Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	74,07
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	32,36
			Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	31,83
			Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Pembangunan	61,04
			Perlindungan dan Pembinaan KDRT	100
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Kuantitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Swasta serta Perguruan Tinggi	53

### 2.5.3. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bangka berusaha menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bangka 2019-2023 yaitu terwujudnya BANGKA SETARA melalui pelaksanaan visi yang sejalan dengan percepatan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Bangka melaksanakan 6 (enam) urusan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, urusan keamanan dan ketertiban umum dan urusan sosial dengan indikator-indikator SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia (SETARA).

Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Bangka tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **A. Urusan Pendidikan**

SPM Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Target dan capaian SPM Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.69**

**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan  
Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	69,44%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs/SLB)	100%	101,19%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	21,59%

**B. Urusan Kesehatan**

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus). Target dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.70  
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan  
Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,13%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,65%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	101,10%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,17%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,04%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68,09%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,55%
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86,80%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita DM	Jumlah warga negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,59%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,36%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (Human Innunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	107,24%

### C. Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.71**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	87%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	95,12%

#### **D. Urusan Perumahan Rakyat**

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.72**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

#### **E. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum**

Jenis pelayanan dasar Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.73**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	70,73%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	70,73%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

## F. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Target dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.74**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	91,13%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

## 2.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada (Soerjanietal. 1987). Menurut Khana dalam KLH (2010), daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumberdayanya.

Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumberdaya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan.

Khanna (1999) membagi daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung / menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Berdasarkan UU 32/2009, *supportive capacity* merupakan daya dukung lingkungan hidup dan *assimilative capacity* merupakan daya tampung lingkungan hidup.

**Gambar 2.19**  
**Komponen dalam Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**



Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Atau dengan kata lain, jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein et.al., 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu dan ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi

bagian dari penilaian. Secara umum, jasa ekosistem di Kabupaten Bangka dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.75**  
**Kategori dan Jenis Jasa Ekosistem**

No	Kategori Jasa	Jenis
1	Penyediaan	1. Pangan
		2. Air
2	Pengaturan	1. Pengaturan Iklim
		2. Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir
		3. Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam
		4. Pemurnian Air
		5. Pengolahan dan Penguraian Limbah

### 2.6.1. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Pangan

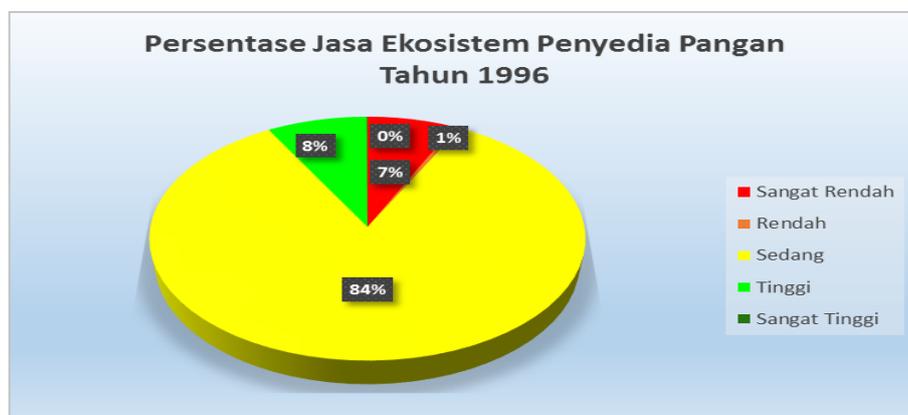
Penyediaan pangan pada dasarnya dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pangan yang berasal dari pertanian, perikanan (hasil laut), perkebunan, kehutanan hingga sumber daya peternakan. Prioritas pemenuhan dan penyediaan pangan merupakan salah satu aspek penting yang sudah sepatutnya diperhatikan lebih mendalam. Daya dukung lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan lebih seksama agar dapat digunakan sebagai langkah awal dalam menetapkan strategi penyediaan pangan masyarakat. Strategi penyediaan pangan yang jitu dapat menjamin keamanan dan ketahanan pangan yang sistematis pada suatu lingkungan.

### 2.6.2. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

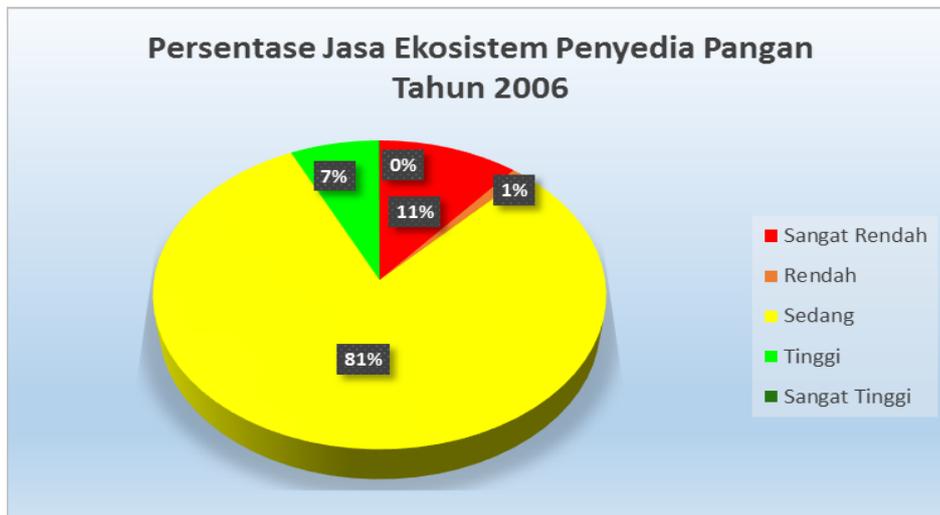
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

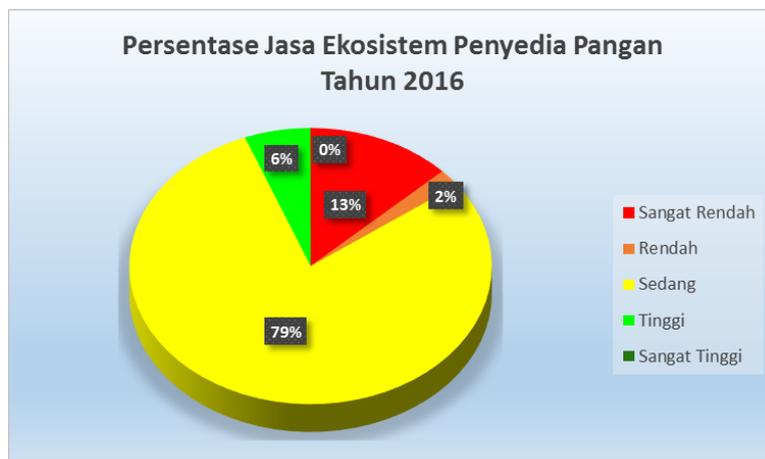
**Gambar 2.20**  
**Grafik Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tahun 1996**



**Gambar 2.21**  
**Grafik Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tahun 2006**



**Gambar 2.22**  
**Grafik Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tahun 2016**



Berdasarkan gambar grafik persentase di atas, kelas jasa penyedia pangan di Kabupaten Bangka yang paling dominan pada Tahun 1996, Tahun 2006 dan Tahun 2016 adalah kelas sedang dengan masing-masing persentase 84,12%, 80,92% dan 79,11%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyediaan pangan di Kabupaten Bangka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya perubahan fungsi lahan yang menjadi sumber penyediaan pangan menjadi lahan yang tidak berpotensi untuk penyediaan pangan.

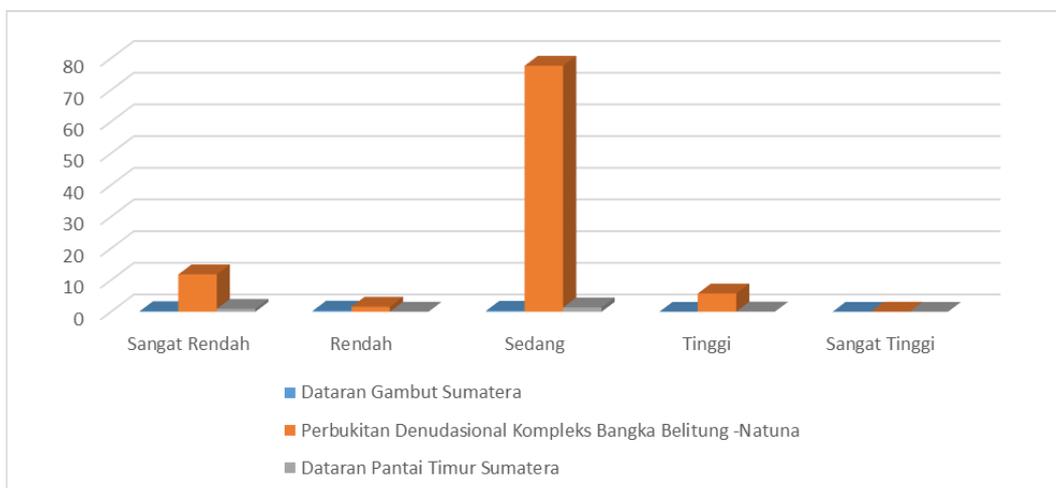
Berdasarkan kondisi ekoregion Kabupaten Bangka, lahan yang berpotensi sangat tinggi untuk penyedia bahan pangan di Kabupaten Bangka hanya 0,02% dari total luas lahan, dan yang berpotensi tinggi hanya 5,78%. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia bahan pangan yang ada di Kabupaten Bangka berpotensi sedang dengan persentase luas sebesar 77,67%. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan pangan menurut ekoregion disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
**Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan**  
**Menurut Ekoregion Kabupaten Bangka**

NO	Nama Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Dataran Gambut Sumatera	606,50	0,21	1.109,8	0,38	93,27	0,032	-	-	-	-
2.	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	34.185,5	11,8	4.624,38	1,6	224.593,4	77,67	16.719,7	5,78	59,28	0,02
3.	Dataran Pantai Timur Sumatera	2.643,23	0,91	166,64	0,057	4.058,35	1,40	294,42	0,10	-	-

Kondisi ekoregion Kabupaten Bangka sebagian besar adalah Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna. Jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Ekoregion Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna sebagian besar berpotensi sedang dengan persentase sebesar 77,67%. Secara umum distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan pangan menurut ekoregion dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

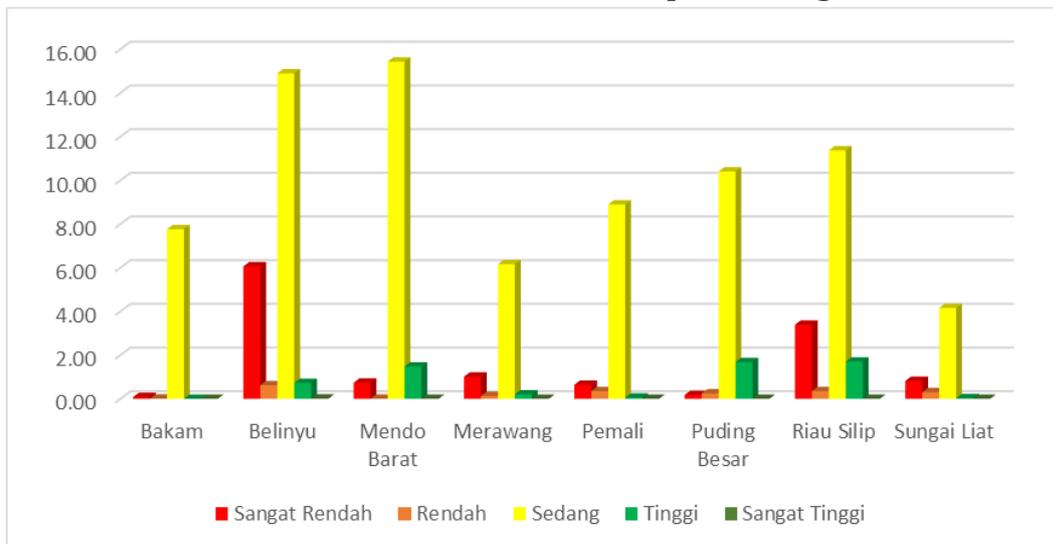
**Gambar 2.23**  
**Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan Menurut Ekoregion Kabupaten Bangka**



Apabila distribusi peran jasa ekosistem penyediaan pangan dilihat berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Bangka pada Tahun 2016, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.24**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan**

### Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka



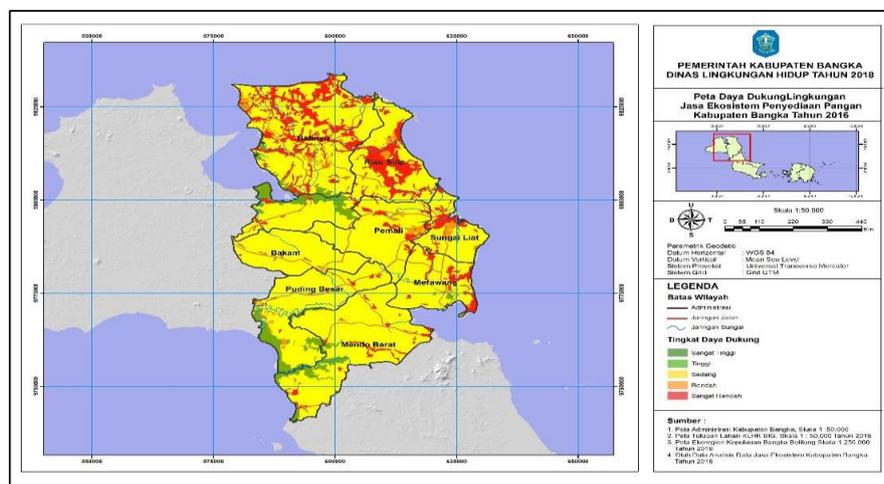
Pada grafik di atas, terlihat bahwa jasa ekosistem penyedia pangan kelas sedang lebih dominan disetiap kecamatan, dengan persentase paling besar untuk kelas sedang berada pada Kecamatan Mendo Barat yaitu sebesar 15,44%, disusul oleh kecamatan Belinyu dengan persentase 14,9%. Kelas yang paling dominan kedua setelah kelas sedang adalah kelas sangat rendah dengan presentase luasan sebesar 12,95 %. Kecamatan Belinyu merupakan kecamatan dengan kelas penyedia pangan sangat rendah di Kabupaten Bangka dengan presentase luasan sebesar 6,07%. Kecamatan Mendo Barat yang memiliki potensi kelas sedang paling besar untuk jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Bangka dikarenakan penggunaan lahannya lebih di dominasi oleh pertanian lahan kering campur semak. Begitu juga dengan Kecamatan Belinyu, penggunaan lahannya lebih di dominasi oleh pertanian lahan kering campur semak, selain itu penyebab besarnya kelas sangat rendah untuk jasa ekosistem penyedia pangan di Kecamatan Belinyu adalah besarnya persentase luasan penggunaan lahan pertambangan di Kecamatan tersebut.

Kecamatan Riau Silip, Puding Besar dan Mendo Barat memiliki peran dan fungsi jasa ekosistem pangan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini memiliki makna bahwa ketiga Kecamatan tersebut secara umum memiliki kemampuan yang relatif lebih tinggi untuk mendukung kegiatan

penyediaan pangan (dalam arti luas) apabila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka.

Sedangkan untuk memahami lebih jelas distribusi spasial jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Bangka, akan disajikan pada Gambar tentang Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Bangka.

**Gambar 2.25**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**



### 2.6.3. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Air Bersih

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan.

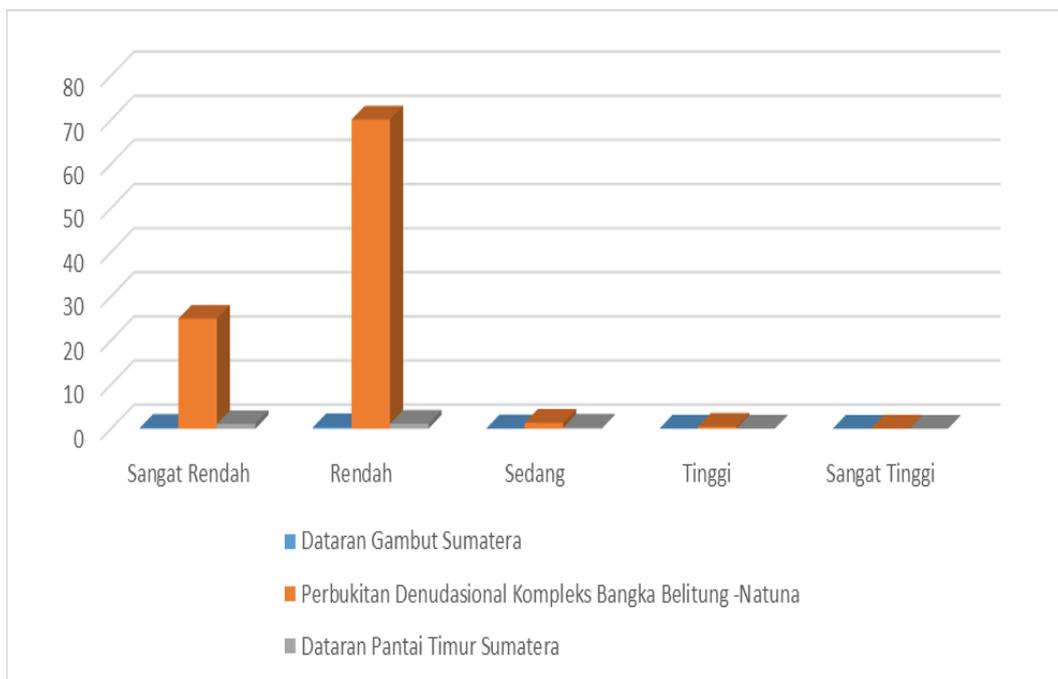
Menurut ekoregion, distribusi dan luasan jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bangka digambarkan dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.77**  
**Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih**  
**Menurut Ekoregion Kabupaten Bangka Tahun 2016**

NO	Nama Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Dataran Gambut Sumatera	606,50	0,21	942,47	0,36	167,33	0,06	93,27	0,03	-	-
2	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	72.141,5	24,95	202.641,7	70,08	3952.697	1,36	1364.894	0,47	81,51	0,03
3	Dataran Pantai Timur Sumatera	3.059,40	1,06	3.291,88	1,14	691,47	0,24	119,88	0,04	-	-

Dilihat dari penampakan ekoregion yang tersaji pada Tabel diatas,Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna memiliki tingkat daya dukung yang rendah sampai sangat rendah dalam penyediaan air bersih yaitu berada pada angka 70,08% untuk kelas rendah dan 24,95% untuk kelas sangat rendah, sedangkan padatipe ekoregion lainnya tersebar pada kategori sangat rendah sampai tinggi dengan persentase kurang dari 2%, hal ini dikarenakan ekoregion di Kabupaten Bangka lebih didominasi oleh Ekoregion Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna. Permukaan yang tidak begitu landai dengan topografi yang relatif berbukit memberikan gambaran bahwa Kabupaten Bangka memiliki daya dukung yang tidak begitu baik dalam penyediaan air bersih, walaupun masih berada dalam kategori sedang sampai tinggi. Secara umum distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan air bersih menurut ekoregion dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.26**  
**Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**  
**Menurut Ekoregion Kabupaten Bangka Tahun 2016**

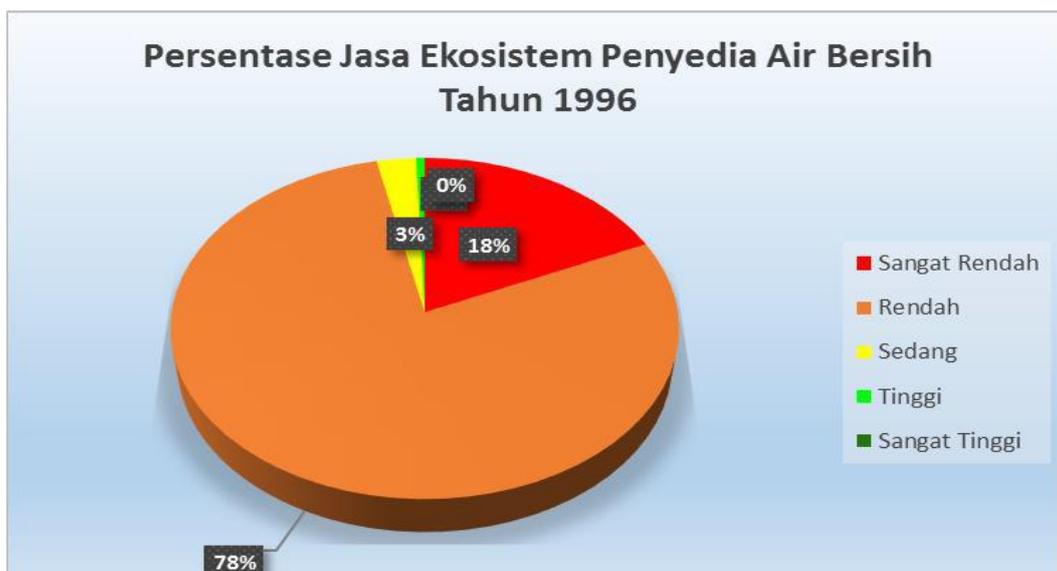


Apabila distribusi peran jasa ekosistem penyediaan air bersih dilihat berdasarkan wilayah administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

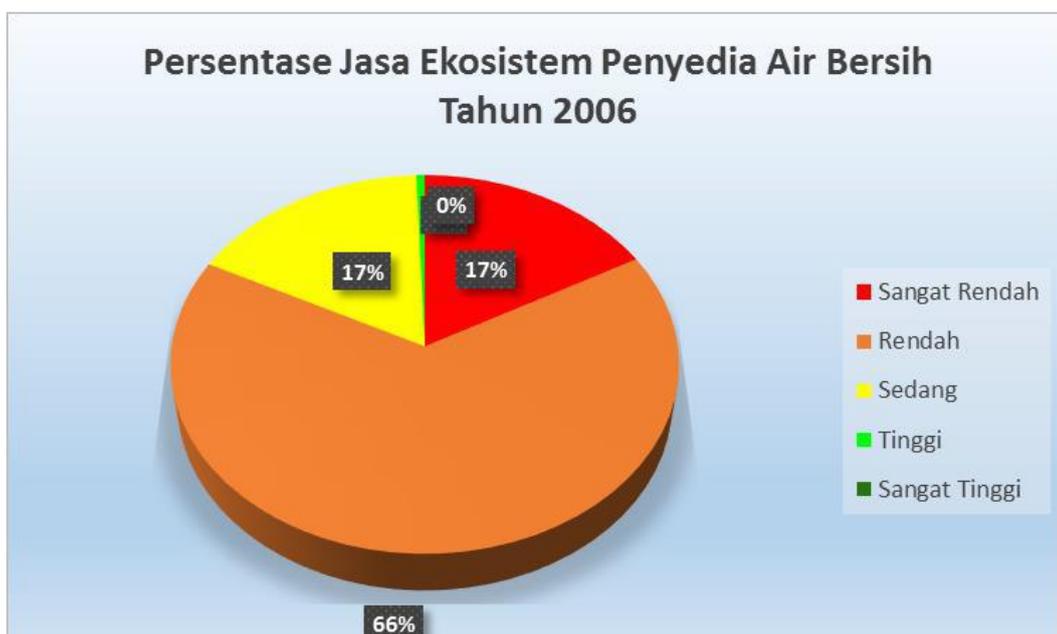
**Tabel 2.78**  
**Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Bakam	7,846.17	2.71	14,883.78	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Belinyu	25,236.04	8.73	39,279.02	13.58	0.00	0.00	77.62	0.03	0.00	0.00
3.	Mendo Barat	4,129.61	1.43	45,761.00	15.83	817.19	0.28	393.28	0.14	0.00	0.00
4.	Merawang	3,433.96	1.19	17,061.74	5.90	849.16	0.29	402.03	0.14	0.00	0.00
5.	Pemali	11,993.00	4.15	16,641.92	5.76	0.00	0.00	58.05	0.02	81.33	0.03
6.	Puding Besar	6,625.71	2.29	26,918.16	9.31	2,428.44	0.84	202.86	0.07	0.00	0.00
7.	Riau Silip	13,863.67	4.79	33,671.73	11.64	716.72	0.25	405.50	0.14	0.00	0.00
8.	Sungailiat	2,679.25	0.93	12,658.70	4.38	0.00	0.00	38.72	0.01	0.18	0.00

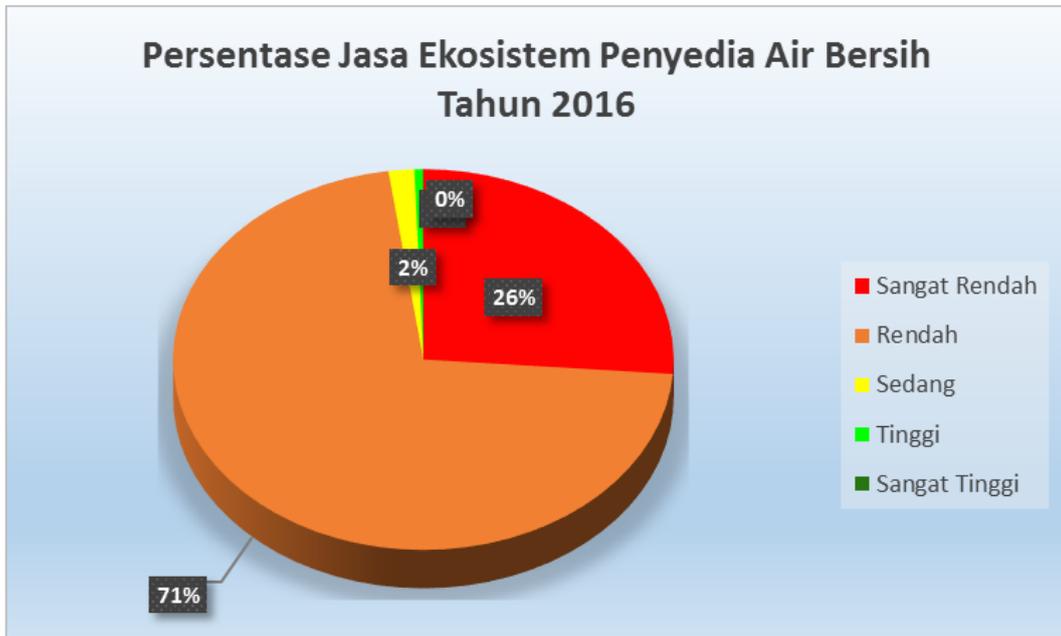
**Gambar 2.27**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**  
**Kabupaten Bangka Tahun 1996**



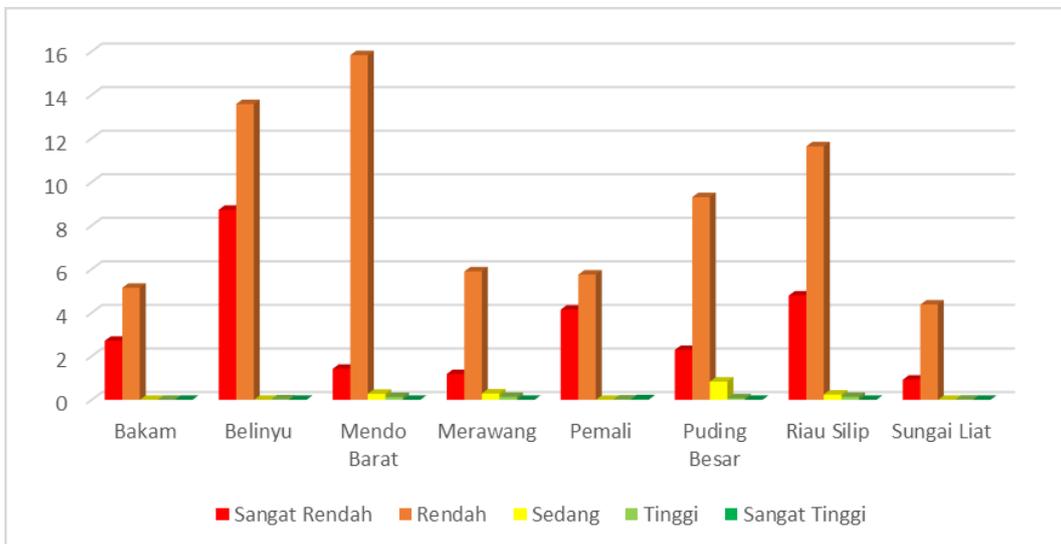
**Gambar 2.28**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2006**



**Gambar 2.29**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2016**



**Gambar 2.30**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**

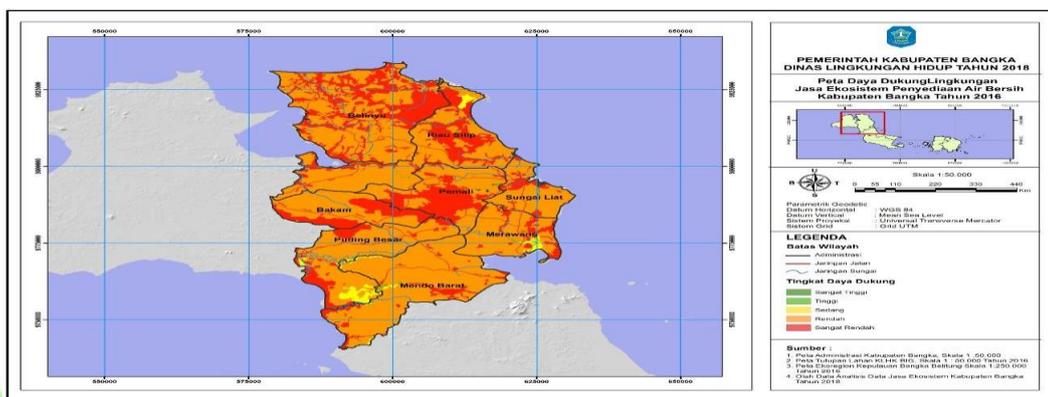


Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Pada Gambar 2.27, Gambar 2.28, dan Gambar 2.29 menunjukkan bahwa dari Tahun 1996 sampai Tahun 2016 sebagian besar luasan Kabupaten Bangka memiliki peran penyedia air bersih

rendah sampai sangat rendah dengan persentase luasan sangat rendah pada Tahun 2016 sebesar 71%. Sedangkan jika dilihat dari distribusi persentase luasan perkecamatan di Kabupaten Bangka sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.78 dan Gambar 2.30 maka dapat dilihat hampir diseluruh kecamatan mengalami penyediaan air bersih yang rendah sampai sangat rendah. Kecamatan dengan persentase luasan sangat besar untuk kelas sangat rendah pada jasa ekosistem penyediaan air bersih terdapat pada Kecamatan Mendo Barat dengan persentase luasan sebesar 15,83%. Kurangnya potensi jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Bangka berhubungan dengan penggunaan lahan dan karakteristik lahan. Penggunaan lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan potensi jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Bangka rendah, selain itu karakteristik lahan yang berupa rawa juga ikut berpengaruh dalam penyediaan air bersih.

Sedangkan untuk memahami lebih jelas distribusi spasial jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bangka, akan disajikan pada Gambar 2.31 berikut tentang Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Bangka Tahun 2016.

**Gambar 2.31**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2016**



#### 2.6.4. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Iklim

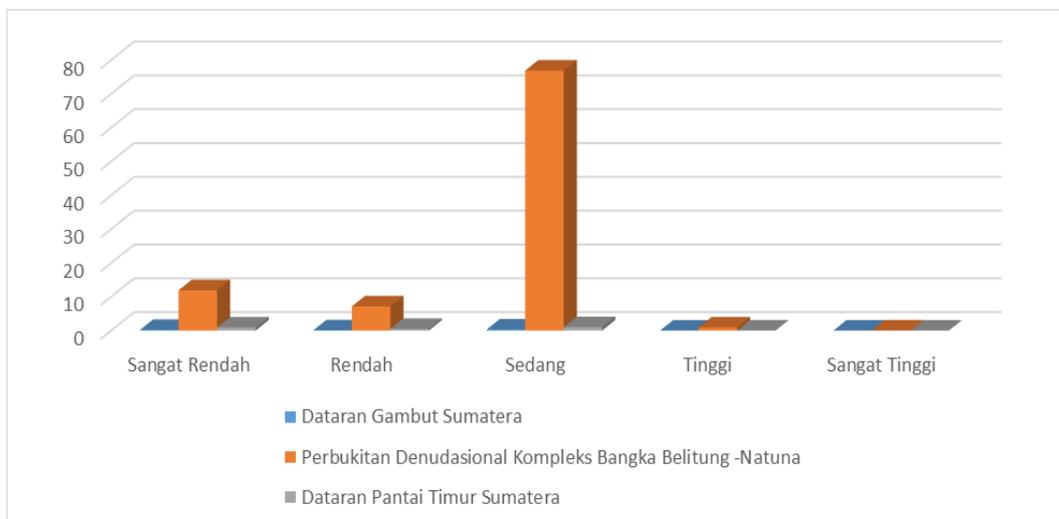
Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan

hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan iklim menurut ekoregion secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.79**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Ekoregion Tahun 2016**

NO	Nama Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Dataran Gambut Sumatera	606.50	0.21	290.76	0.1	912.33	0.32	0	0	0	0
2.	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	34465.04	11.92	20694.55	7.16	222.254.2	76.86	2720.61	0.94	47.86	0.02
3.	Dataran Pantai Timur Sumatera	2643.24	0.91	1477.64	0.51	2983.77	1.03	58	0.02	0	0

**Gambar 2.32**  
**Distribusi Luas dan peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Ekoregion Tahun 2016**



Pada Tabel dan Gambar diatas menunjukkan tingkat daya tampung berbasis jasaekosistem pengaturan iklim menurut ekoregion di Kabupaten Bangka. Pada Gambar tersebut terlihat distribusi daya tampung pengaturan iklim dominan sedang terutama pada Ekoregion Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna dengan persentase luasan sebesar 76,86% dari total luas Kabupaten Bangka.

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan iklim pada Ekoregion Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna luasan untuk kategori sangat rendah-rendah yaitu 55.159,59 Ha (19,08%), kategori sedang seluas 222.254,2 Ha (76,86%) dan kategori tinggi - sangat tinggi mencakup luasan 2.768,47 Ha (0,96%).

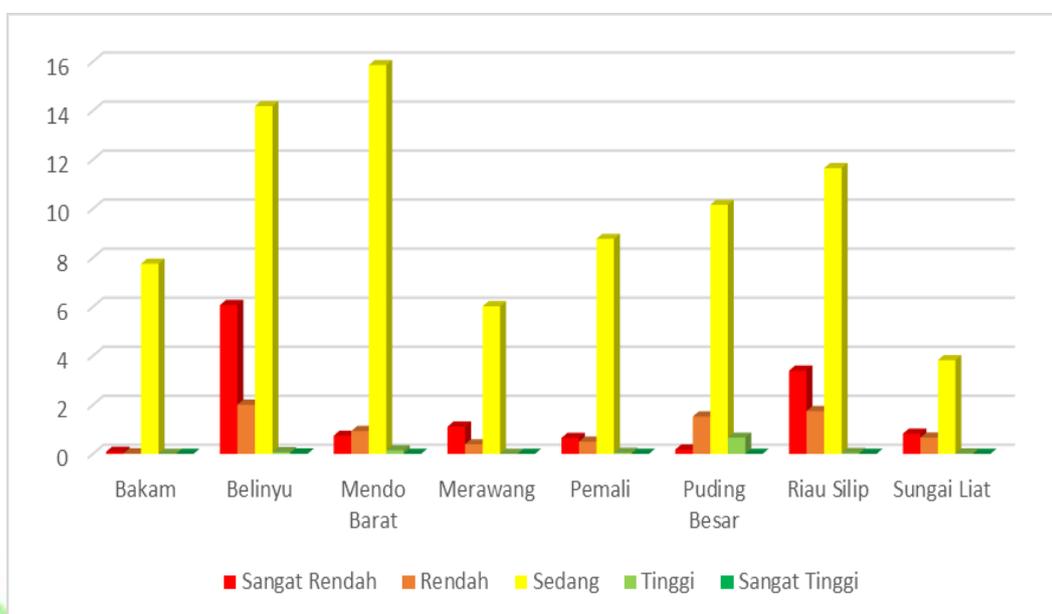
Pada Ekoregion Dataran Gambut Sumatera, distribusi luasan untuk kategori sangatrendah-rendah pada ekoregion ini sebesar 897,26 Ha (0,22%), kategori sedang yaitu 912,33 Ha (0,32%) dan kategori tinggi-sangat tinggi tidak ada. Pada Ekoregion DataranPantai Timur Sumatera, pada ekoregion ini sebaran luasan untuk kategori sangat rendah-rendah sebesar 4.120,88 Ha (1,42%), kategori sedang memiliki luasan sebesar 2.983,77 Ha (1,03%) dan kategori tinggi - sangat tinggi yaitu seluas 58 Ha (0,02%).

Apabila distribusi peran jasa ekosistem pengaturan iklim dilihat berrdasarkan wilayah administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

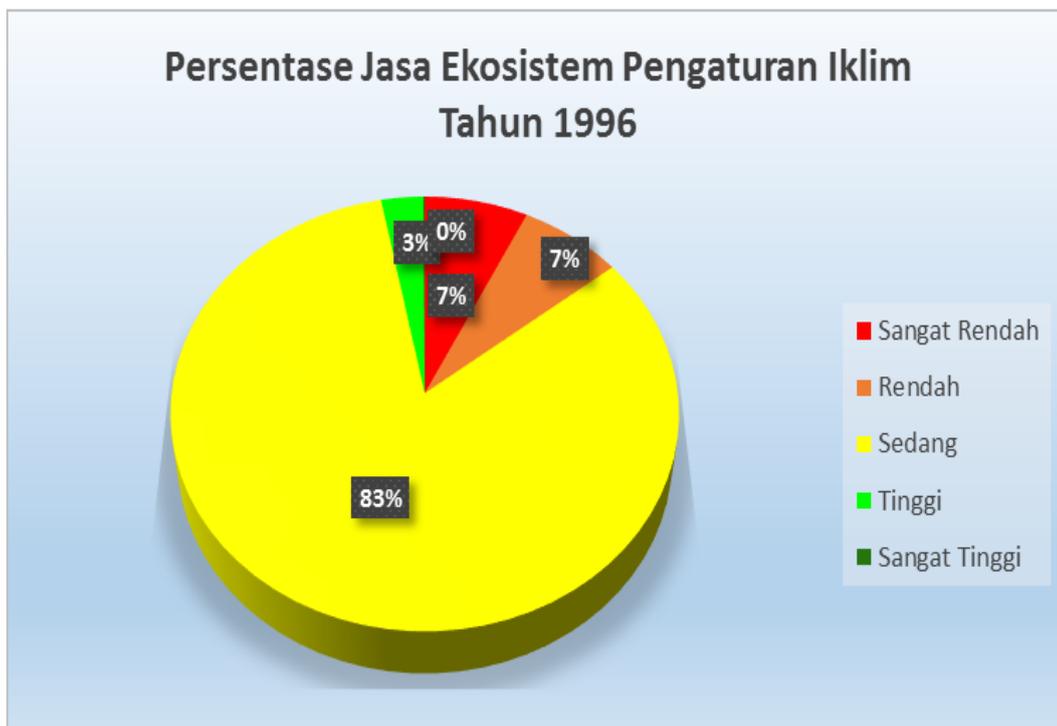
**Tabel 2.80**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Bakam	241.57	0.08	64.78	0.02	22,423.60	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Belinyu	17,544.93	6.07	5,797.45	2.00	41,007.91	14.18	194.54	0.07	47.86	0.02
3.	Mendo Barat	2,142.67	0.74	2,688.98	0.93	45,852.81	15.86	416.62	0.14	0.00	0.00
4.	Merawang	3,221.44	1.11	1,123.26	0.39	17,402.19	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pemali	1,870.49	0.65	1,434.55	0.50	25,353.96	8.77	115.30	0.04	0.00	0.00
6.	Puding Besar	508.47	0.18	4,402.89	1.52	29,361.26	10.15	1,902.55	0.66	0.00	0.00
7.	Riau Silip	9,811.75	3.39	5,040.61	1.74	33,703.04	11.66	102.22	0.04	0.00	0.00
8.	Sungailiat	2,373.46	0.82	1,910.43	0.66	11,045.56	3.82	47.39	0.02	0.00	0.00

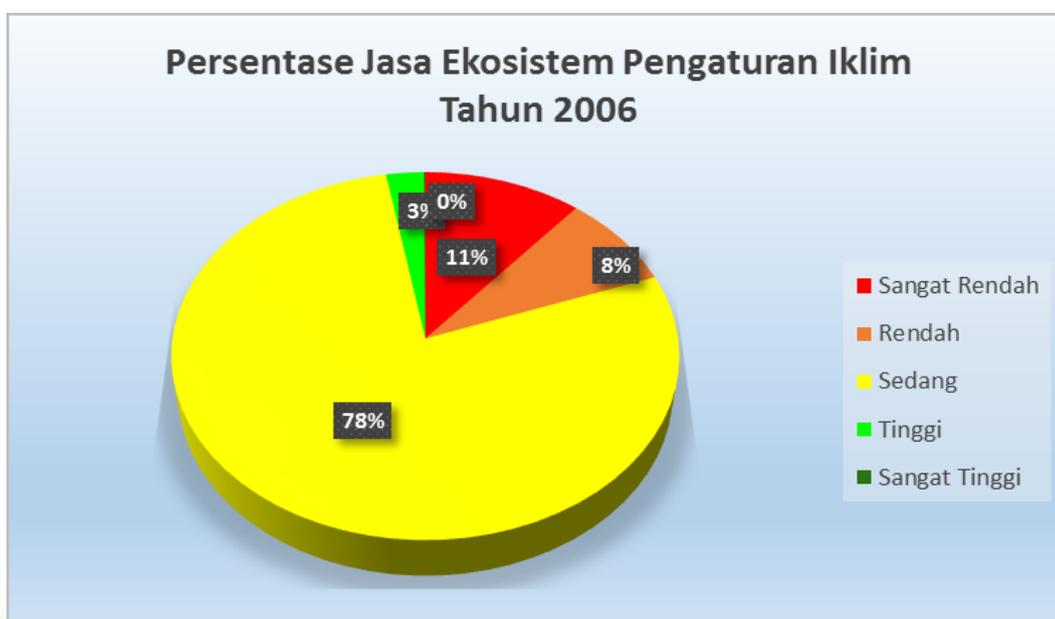
**Gambar 2.33**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**



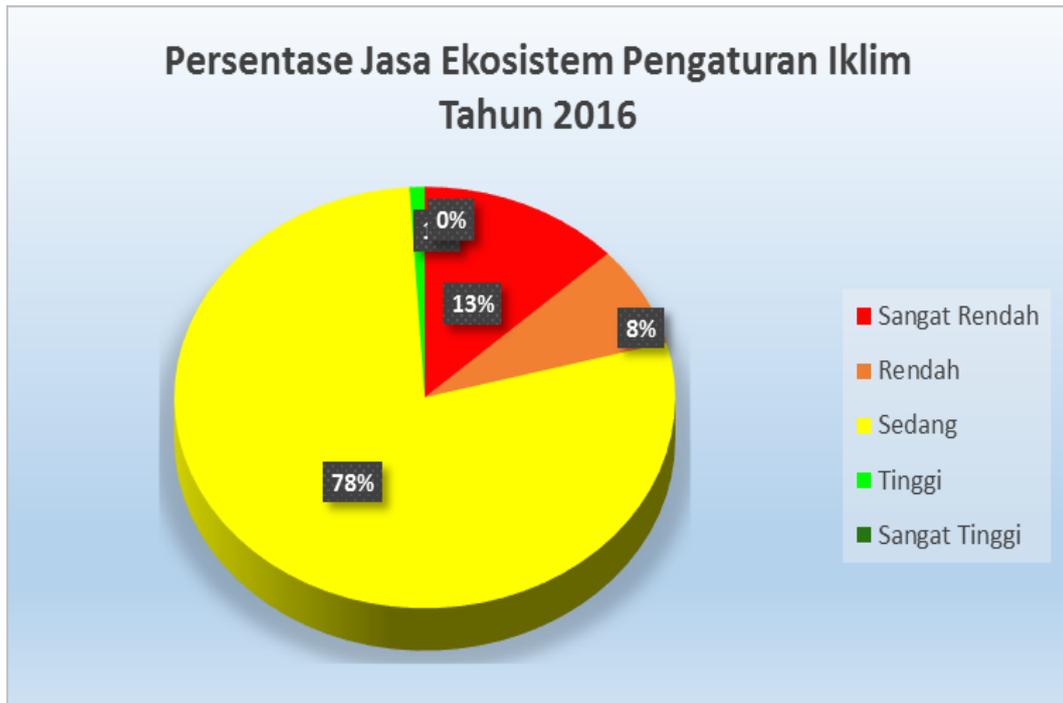
**Gambar 2.34**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim**  
**Kabupaten Bangka Tahun 1996**



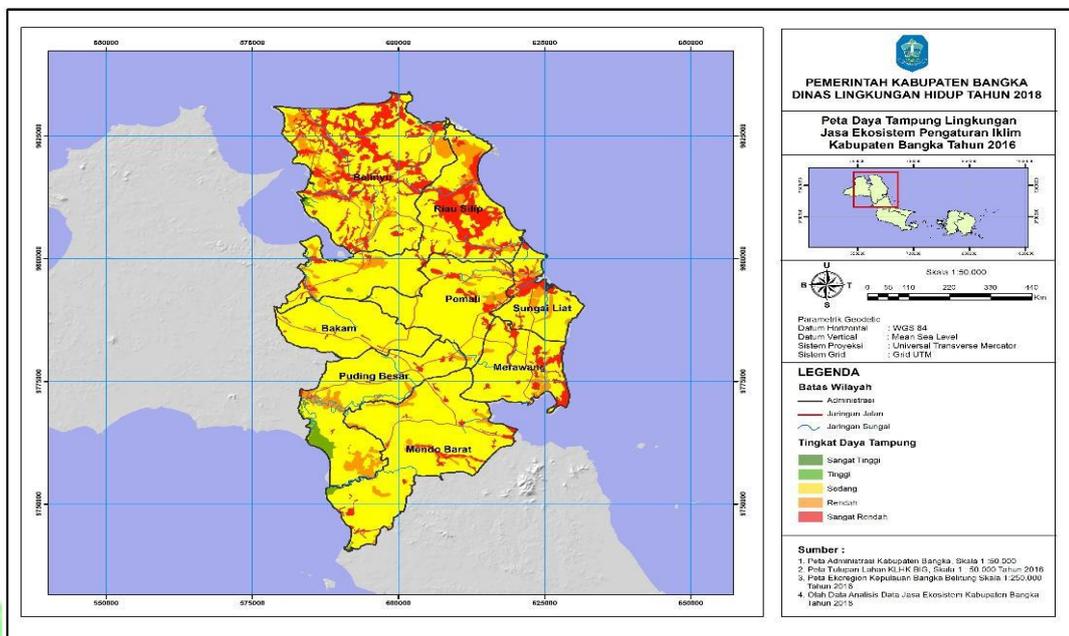
**Gambar 2.35**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2006**



**Gambar 2.36**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2016**



**Gambar 2.37**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim  
Kabupaten Bangka Tahun 2016**



Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan iklim menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016. Pada jasa pengaturan

iklim, distribusi luasan untuk kelas sangat rendah-rendah yang paling besar berada di Kecamatan Belinyu seluas 23.342,38 Ha (8,07%), pada kelas sedang yang paling besar ada di Kecamatan Mendo Barat sebesar 45.852,81 Ha (15,86%), dan pada kelas tinggi - sangat tinggi yang paling besar berada di Kecamatan Puding Besar seluas 1.902,55 Ha (0,66%).

Pada Gambar 2.34, Gambar 2.35 dan Gambar 2.36 menunjukkan persentase luasan tiap kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di 3 (tiga) tahun yang berbeda dengan selisih 10 tahun yaitu pada Tahun 1996, Tahun 2006 dan Tahun 2016. Persentase luasan jasa ekosistem pengaturan iklim pada Tahun 1996 untuk kelas sangat rendah - rendah sebesar 14%, kelas sedang sebesar 83%, kelas tinggi - sangat tinggi sebesar 3%. Pada Tahun 2006 sebaran luas untuk kelompok sangat rendah - rendah sebesar 19%, kelompok sedang yaitu 78%, dan kelompok tinggi-sangat tinggi sebesar 3%. Pada Tahun 2016 sebaran persentase luas untuk kelompok sangat rendah-rendah sebesar 21%, kelompok sedang 78% dan kelompok tinggi-sangat tinggi sebesar 1%. Berdasarkan data tersebut maka secara umum peranan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Bangka lebih dominan sedang.

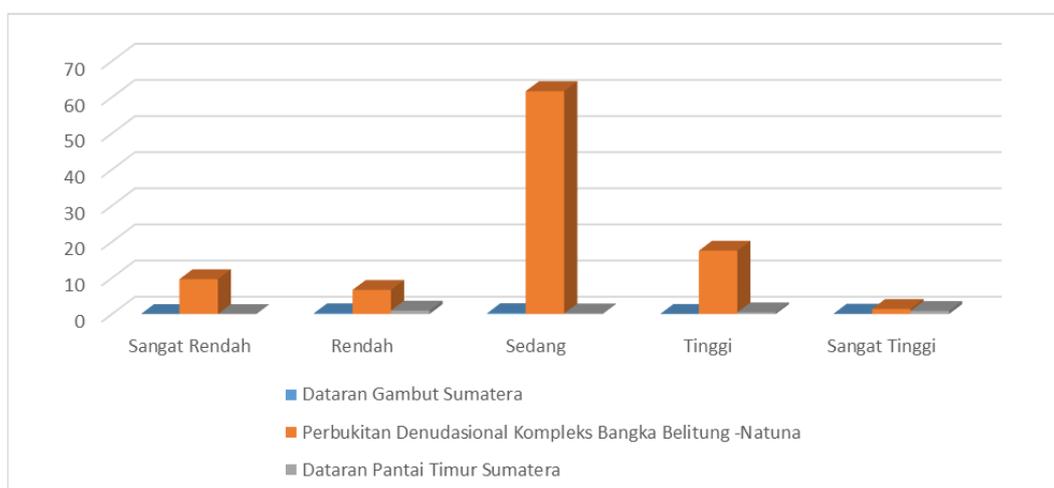
#### **2.6.5. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pencegahan Bencana Alam**

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana menurut ekoregion disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.81**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Menurut Ekoregion Tahun 2016**

NO	Nama Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Dataran Gambut Sumatera	0	0	683	0.236	734.06	0.254	131.92	0.046	260.61	0.09
2.	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	27830.42	9.62	19280.45	6.67	178318.6	61.67	50684.05	17.53	4068.81	1.41
3.	Dataran Pantai Timur Sumatera	0	0	2809.87	0.97	493.93	0.17	1376.91	0.47	2481.93	0.85

**Gambar 2.38**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Menurut Ekoregion Tahun 2016**



Pada Tabel dan Gambar diatas menunjukkan tingkat daya tampung berbasis jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana menurut ekoregion di Kabupaten Bangka. Pada gambar tersebut terlihat distribusi daya tampung pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dominan sedang terutama pada Ekoregion Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna dengan persentase luasan sebesar 61,67% dari total luas Kabupaten Bangka.

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana pada Ekoregion Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna luasan untuk kategori sangat rendah - rendah yaitu 47.110,87 Ha (16,29%), kategori sedang seluas 178.318,6 Ha (61,67%) dan

kategori tinggi – sangat tinggi mencakup luasan 54.752,86 Ha (18,94%). Pada Ekoregion Dataran Gambut Sumatera, distribusi luasan untuk kategori sangat rendah - rendah pada ekoregion ini sebesar 637,05 Ha (0,22%), kategori sedang yaitu 98,55 Ha (0,034%) dan kategori tinggi - sangat tinggi yaitu sebesar 1.073,98 Ha (0,37%). Pada Ekoregion Dataran Pantai Timur Sumatera, pada ekoregion ini sebaran luasan untuk kategori sangat rendah - rendah sebesar 2.809,87 Ha (0,97%), kategori sedang memiliki luasan sebesar 493,93 Ha (0,17%) dan kategori tinggi - sangat tinggi yaitu seluas 3.858,84 Ha (1,32%).

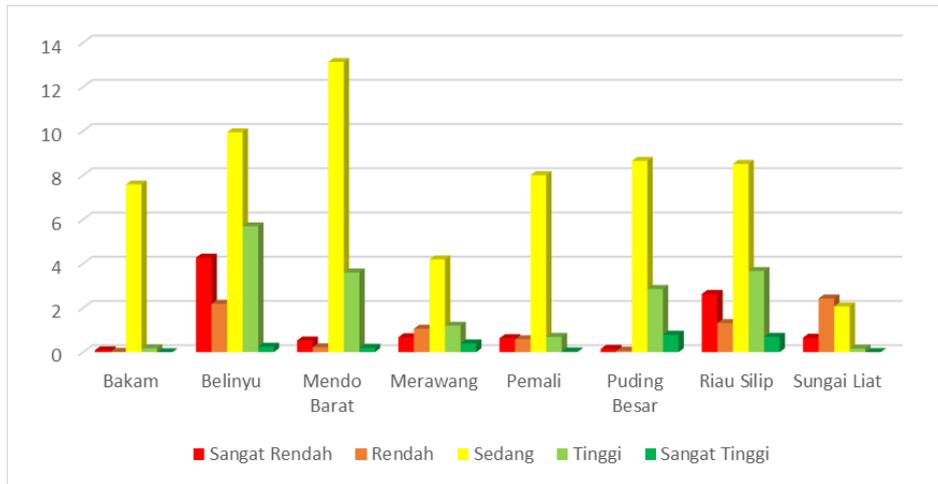
Apabila distribusi peran jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dilihat berdasarkan wilayah administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

**Tabel 2.82**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Bakam	241.57	0.08	35.81	0.01	21,934.40	7.59	518.17	0.18	0.00	0.00
2.	Belinyu	12,352.74	4.27	6,318.57	2.19	28,756.02	9.94	16,450.29	5.69	715.06	0.25
3.	Mendo Barat	1,528.60	0.53	644.50	0.22	37,951.50	13.12	10,413.80	3.60	562.69	0.19
4.	Merawang	1,947.30	0.67	3,063.58	1.06	12,135.18	4.20	3,462.41	1.20	1,138.42	0.39
5.	Pemali	1,821.37	0.63	1,693.51	0.59	23,152.86	8.01	2,008.04	0.69	98.52	0.03
6.	Puding Besar	421.63	0.15	189.89	0.07	25,016.38	8.65	8,272.28	2.86	2,274.99	0.79
7.	Riau Silip	7,614.06	2.63	3,803.01	1.32	24,626.52	8.52	10,604.99	3.67	2,009.04	0.69
8.	Sungailiat	1,903.15	0.66	7,024.46	2.43	5,973.70	2.07	462.91	0.16	12.63	0.00

**Gambar 2.39**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Menurut Kecamatan**

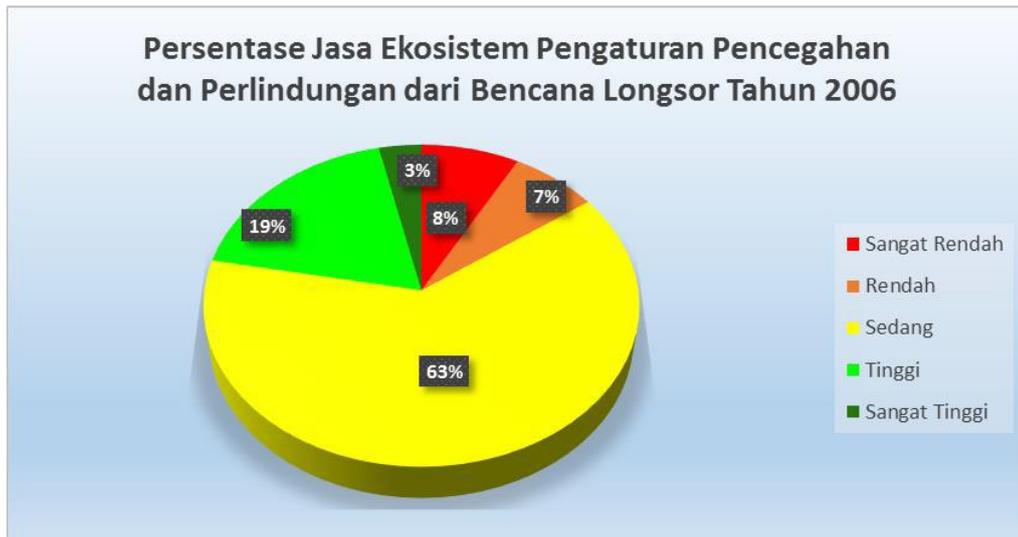
di Kabupaten Bangka Tahun 2016



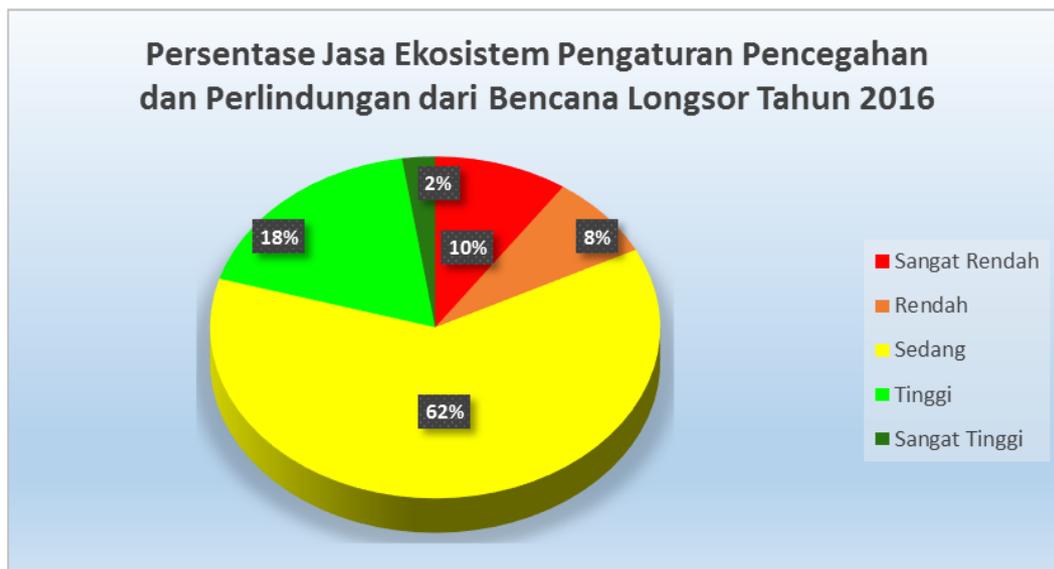
**Gambar 2.40**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Bangka Tahun 1996**



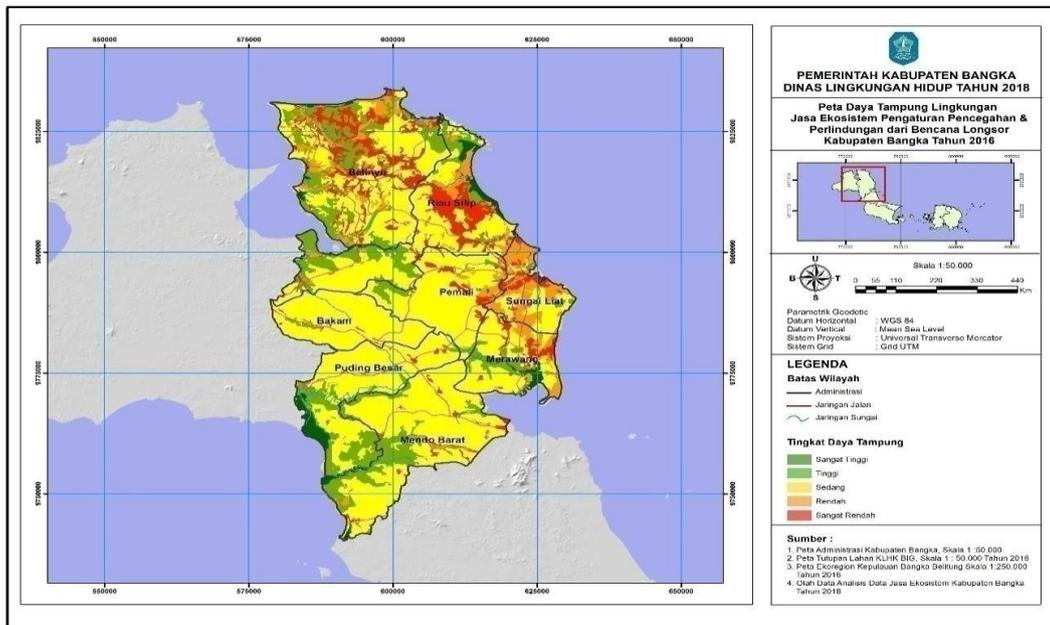
**Gambar 2.41**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2006**



**Gambar 2.42**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2016**



**Gambar 2.43**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Bangka Tahun 2016**



Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016. Pada jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana, distribusi luasan untuk kelas sangat rendah - rendah yang paling besar berada di Kecamatan Belinyu seluas 18.671,31 Ha (6,46%), pada kelas sedang yang paling besar ada di Kecamatan Mendo Barat sebesar 37,951.50 Ha (13,06%), dan pada kelas tinggi - sangat tinggi yang paling besar berada di Kecamatan Belinyu seluas 17.165,35 Ha (5,94%).

Persentase luasan tiap kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di 3 (tiga) tahun yang berbeda dengan selisih 10 (sepuluh) tahun yaitu pada Tahun 1996, Tahun 2006 dan Tahun 2016. Persentase luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana pada tahun 1996 untuk kelas sangat rendah - rendah sebesar 11%, kelas sedang sebesar 62%, kelas tinggi - sangat tinggi sebesar 27%. Pada Tahun 2006 sebaran luas untuk kelompok sangat rendah-rendah sebesar 15%, kelompok sedang yaitu 63%, dan kelompok tinggi - sangat tinggi sebesar 22%. Pada Tahun 2016 sebaran persentase luas untuk kelompok sangat rendah - rendah sebesar 18%, kelompok sedang 62% dan kelompok tinggi - sangat tinggi sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut maka secara umum peranan jasa

ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bangka dikelompokkan dalam kategori sedang.

### 2.6.6. Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Air Limbah

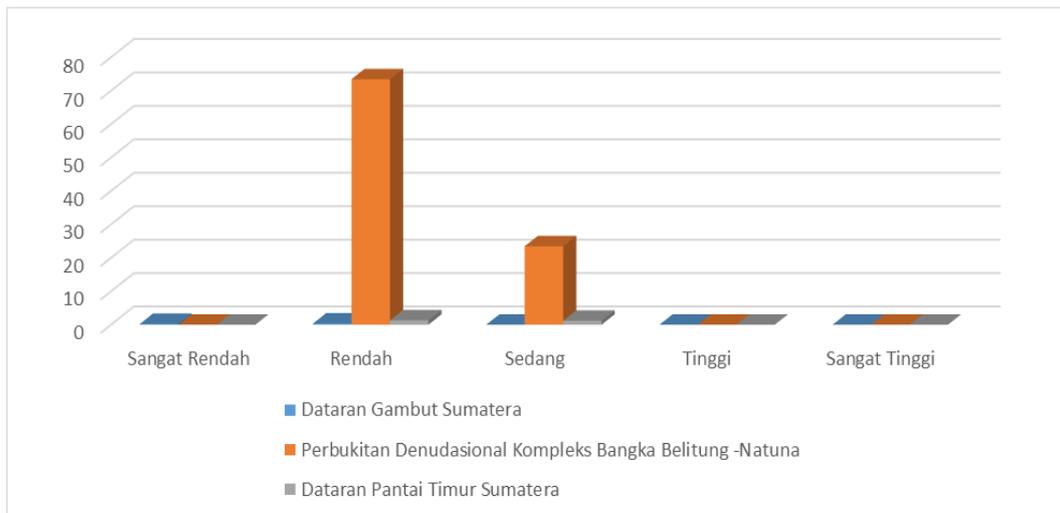
Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemarmelalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakterialam dalam merombak bahan organik. Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air menurut ekoregion disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.83**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Ekoregion Tahun 2016**

NO	Nama Ekoregion	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Dataran Gambut Sumatera	705.06	0.24	1104.54	0.38	0	0	0	0	0	0
2.	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	0	0	212327.1	73.43	67855.18	23.47	0	0	0	0
3.	Dataran Pantai Timur Sumatera	0	0	3748.7	1.3	3413.95	1.18	0	0	0	0

**Gambar 2.44**  
**Distribusi Luas dan peran Jasa Ekosistem Pengaturan**

### Pemurnian Air Menurut Ekoregion Tahun 2016

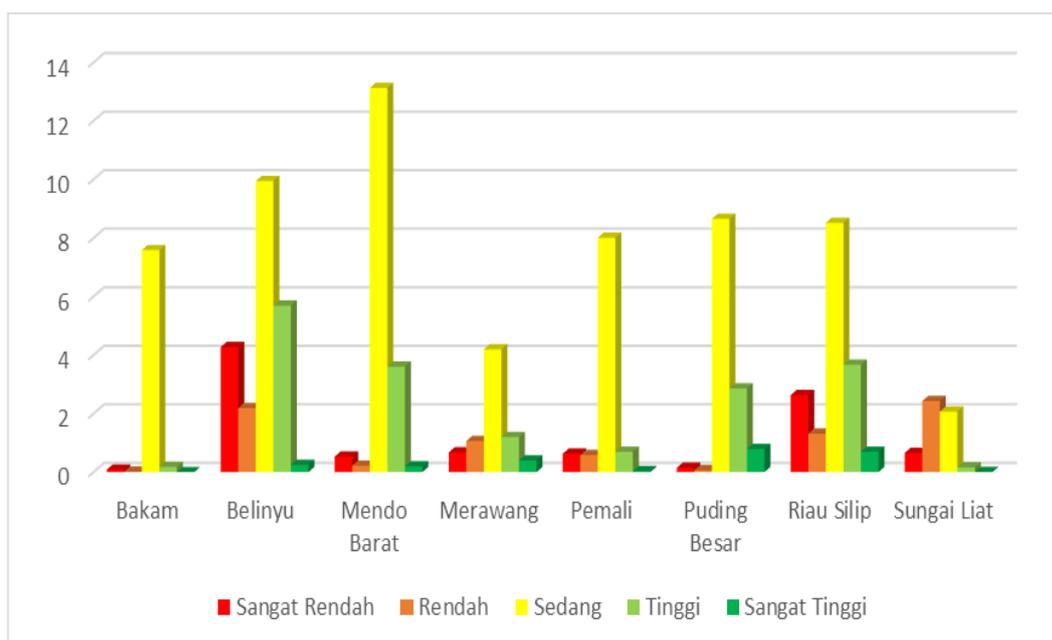


Tingkat daya tampung berbasis jasaekosistem pengaturan pemurnian air menurut ekoregion di Kabupaten Bangka. Pada gambar tersebut terlihat distribusi daya tampung pengaturan pemurnian air dominan rendah terutama pada Ekoregion Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna dengan persentase luasan sebesar 73,43% dari total luas Kabupaten Bangka. Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air pada Ekoregion Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna luasan untuk kategori sangat rendah - rendah yaitu 212.327,1 Ha (73,43%), kategori sedang seluas 67.855,18 Ha (23,47%) dan kategori tinggi – sangat tinggi tidak ada. Pada Ekoregion Dataran Gambut Sumatera, distribusi luasan hanya terdapat pada kategori sangat rendah - rendah sebesar 1.809,6 Ha (0,62%). Pada Ekoregion Dataran Pantai Timur Sumatera hanya terdapat dua kategori yaitu sangat rendah – rendah dan kategori sedang. Kategori sangat rendah - rendah sebesar 3.748,7 Ha (1,3%) sedangkan kategori sedang memiliki luasan sebesar 3.413,95 Ha (1,18%).

**Tabel 2.84**  
**Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**

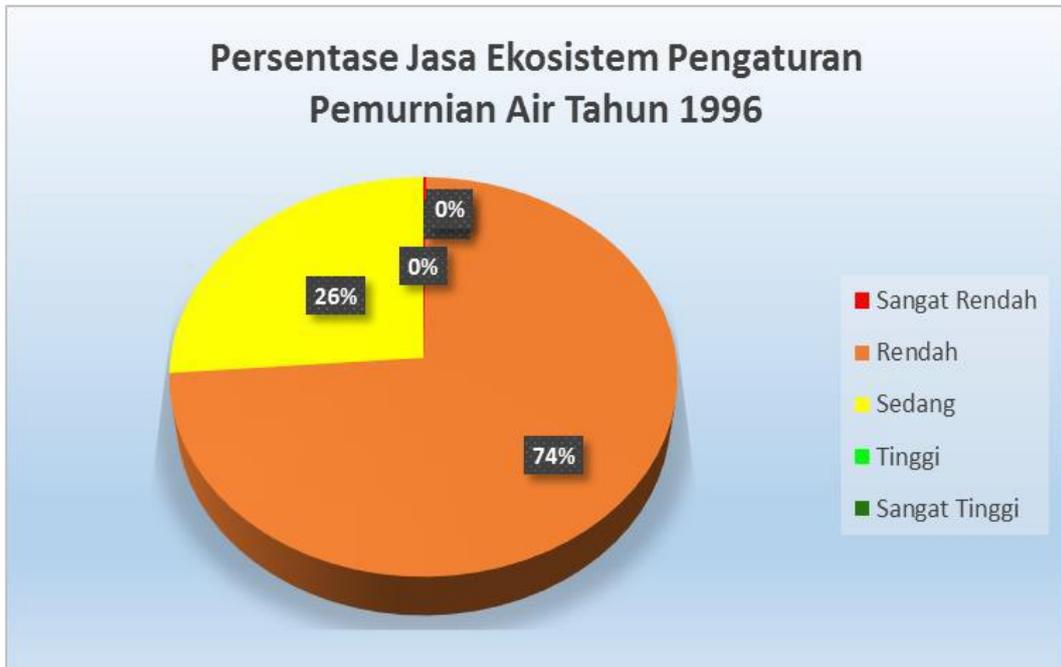
NO	Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	Bakam	0.00	0.00	14,366.01	4.97	8,363.93	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Belinyu	108.08	0.04	44,529.50	15.40	19,955.10	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Mendo Barat	0.00	0.00	43,990.85	15.21	7,110.23	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Merawang	596.98	0.21	18,810.39	6.51	2,339.53	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pemali	0.00	0.00	16,665.04	5.76	12,109.25	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Puding Besar	0.00	0.00	29,427.74	10.18	6,747.43	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Riau Silip	0.00	0.00	34,887.55	12.07	13,770.07	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Sungailiat	0.00	0.00	14,503.26	5.02	873.59	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

**Gambar 2.45**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2016**



**Gambar 2.46**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan**

### Pemurnian Air Kabupaten Bangka Tahun 1996

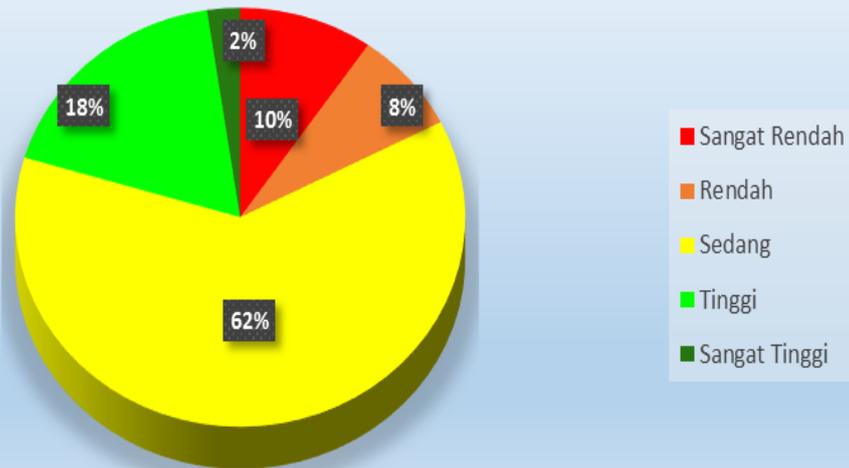


**Gambar 2.47**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Bangka Tahun 2006**

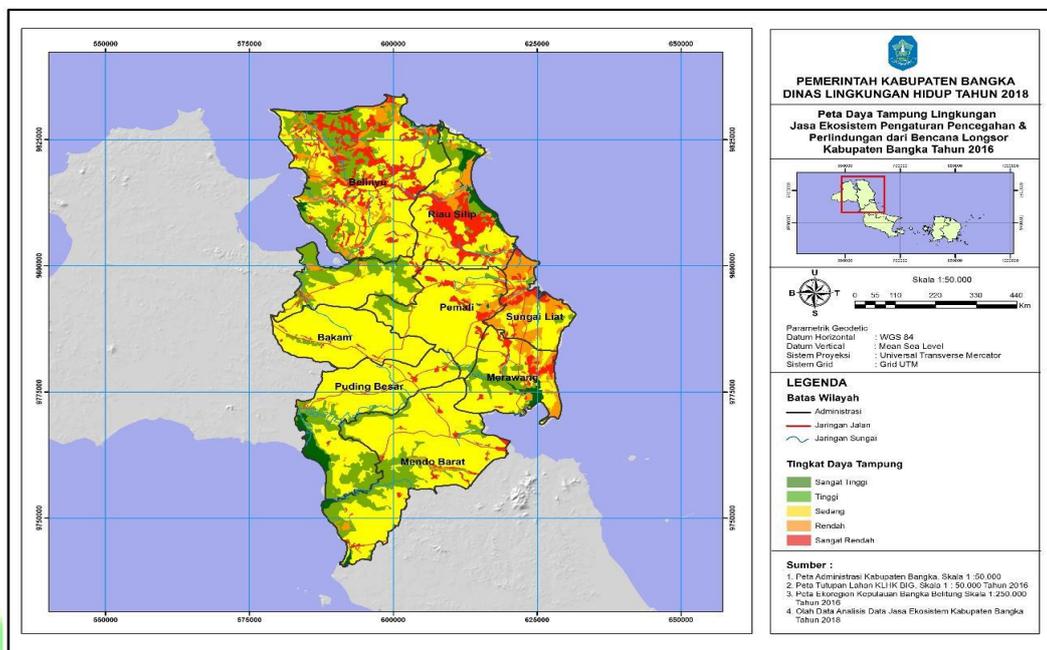


**Gambar 2.48**  
**Grafik Distribusi Luasan (%) Jasa Ekosistem Pemurnian Air Kabupaten Bangka Tahun 2016**

## Persentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor Tahun 2016



**Gambar 2.49**  
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Bangka Tahun 2016



# BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengadopsi kepada peraturan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni; (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan-peraturan diatas selain menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, juga menjadi motor penggerak dinamika tujuan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong investasi daerah. Pengelolaan keuangan menjadi efektif dan efisien apabila di dalam pelaksanaannya mengacu atau menitikberatkan pada pola efektivitas dan efisiensi dari setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk dapat memahami optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, secara detail perlu mencermati kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

#### 3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Adapun struktur pendapatan daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. **Pendapatan Transfer** yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar Daerah.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan diatas, juga didukung oleh dana lainnya yang juga berasal dari pemerintah pusat yakni dana Dekonsentrasi (Dekon) dan dana Tugas Pembantuan (TP) yang disalurkan melalui kementerian dan provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Dalam kurun lima tahun, Pemerintahan Kabupaten Bangka telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar 1,07 triliun rupiah atau 101,57% dari target yang ditetapkan, dan meningkat sebesar 1,26 triliun rupiah atau 101,06% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019. Dengan demikian, persentase realisasi peningkatan pendapatan dari tahun 2015 ke tahun 2019 mencapai 17,27%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pajak Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

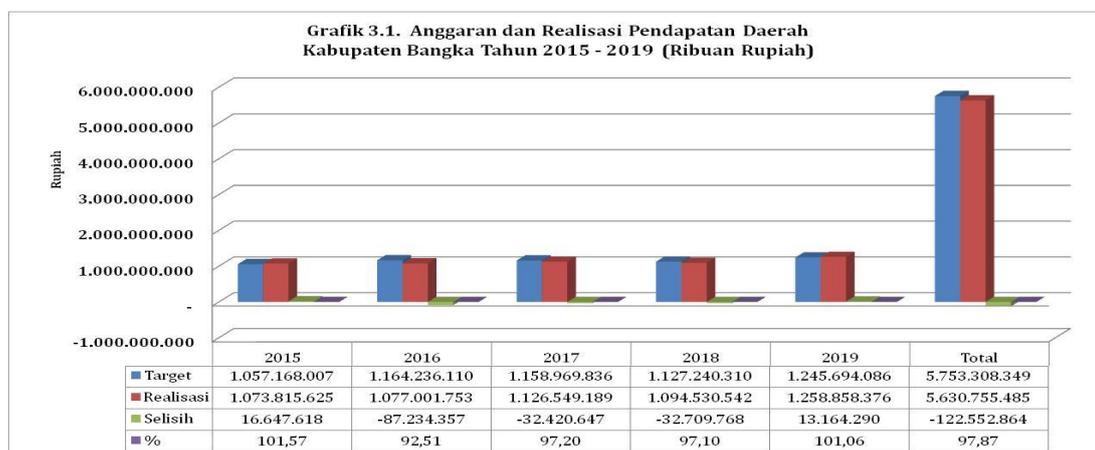
**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015 - 2019 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rataan Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.073.815.625</b>	<b>1.077.001.753</b>	<b>1.126.549.189</b>	<b>1.094.530.542</b>	<b>1.258.858.376</b>	<b>3,44</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>115.957.554</b>	<b>129.059.622</b>	<b>196.070.487</b>	<b>173.056.935</b>	<b>144.668.129</b>	<b>6,68</b>
<b>1.1.1</b>	Pajak Daerah	33.872.466	43.856.888	72.789.961	62.576.813	59.371.242	12,79
<b>1.1.2</b>	Retribusi Daerah	14.490.943	10.363.588	9.211.795	8.866.317	10.378.099	(9,12)
<b>1.1.3</b>	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	4.543.683	5.584.384	5.120.893	4.811.844	5.078.295	0,59
<b>1.1.4</b>	Lain-Lain PAD yang Sah	63.050.462	69.254.762	108.947.838	96.801.961	69.840.493	5,04
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>957.700.920</b>	<b>942.770.179</b>	<b>930.478.702</b>	<b>921.473.607</b>	<b>1.075.408.392</b>	<b>2,22</b>
<b>1.2.1</b>	Transfer Pemerintah Pusat	868.220.008	867.196.452	858.443.710	848.351.439	972.664.393	2,15
	Bagi Hasil Pajak	30.010.041	24.572.826	17.560.244	25.264.920	23.702.397	(4,92)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	119.206.423	58.651.372	48.937.590	86.712.629	113.614.535	1,98
	Dana Alokasi Umum	500.006.221	535.973.885	526.558.547	529.693.057	552.780.809	1,88
	Dana Alokasi Khusus	122.521.343	207.301.384	166.216.342	146.711.844	163.138.662	1,28

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rataan Pertumbuhan (%)
	Dana Otonomi Khusus	18.136.526	-	-	-	-	(100,00)
	Dana Penyesuaian	78.339.454	40.696.985	99.170.987	59.968.989	119.427.990	12,76
1.2.2	Transfer Antar Daerah	89.480.912	75.573.727	72.034.992	73.122.168	102.743.999	2,91
	Pendapatan Bagi Hasil	56.200.022	27.819.775	61.277.754	47.983.195	72.958.179	10,08
	Bantuan Keuangan	33.280.890	47.753.952	10.757.238	25.138.973	29.785.820	(10,09)
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>157.151</b>	<b>5.171.952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.781.855</b>	<b>81,70</b>
1.3.1	Hibah	-	5.171.952	-	-	38.781.855	82,35
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	157.151	-	-	-	-	(100,00)

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (Data diolah)

Untuk tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka sebesar 144,67 milyar rupiah atau 112,19% dari target yang ditetapkan, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,96 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka selama lima tahun (2015 – 2019) memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,68% dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah rata-rata per tahun sebesar 3,86%. Kontribusi transfer daerah terhadap total pendapatan daerah dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar (1,27%) dari total pendapatan Kabupaten

Bangka, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 79,04% total pendapatan daerah Kabupaten Bangka. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun terakhir berkisar 3,44% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 81,70% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,68% per tahun, sedangkan pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,22% per tahun.

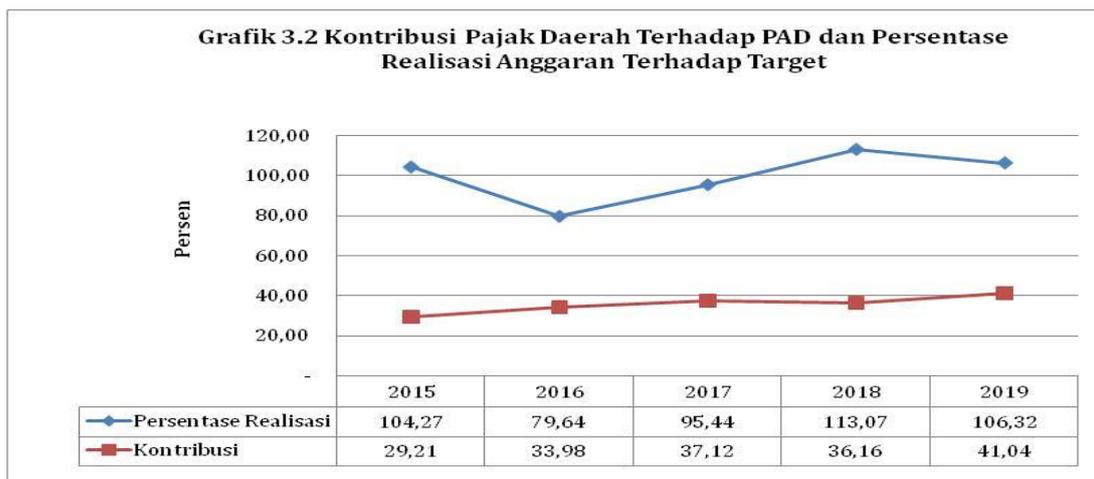
**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap**  
**Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**  
**(ribuan rupiah)**

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan		Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi
			Rp	%		
1	2014	89.113.750				
2	2015	115.957.554	26.843.804	30,12	1.073.505.575	10,80
3	2016	129.059.622	13.102.068	11,30	1.076.952.556	11,98
4	2017	196.070.487	67.010.865	51,92	1.126.754.723	17,40
5	2018	173.056.935	(23.013.552)	(11,74)	1.094.530.542	15,81
6	2019	144.668.129	(28.388.806)	(16,40)	1.258.858.377	11,49
<b>Rata-Rata Per Tahun</b>			<b>7.177.644</b>	<b>8,77</b>	<b>1.139.234.965</b>	<b>14,17</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

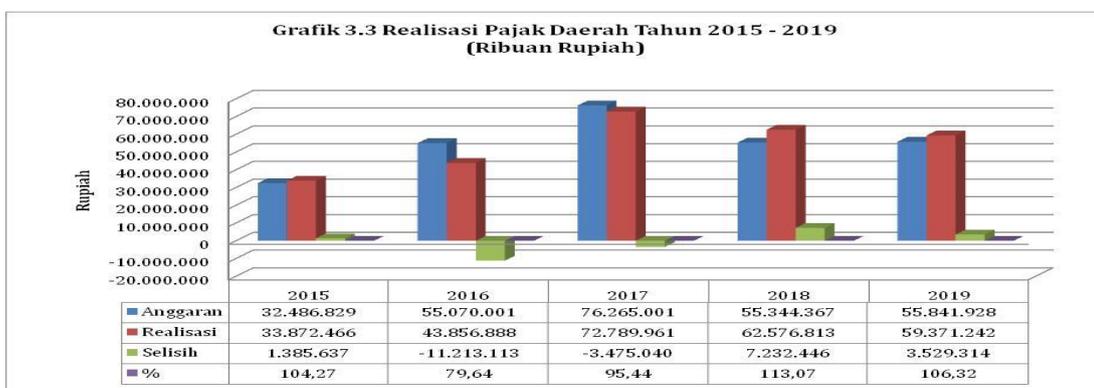
### 3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah

Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka merupakan pos yang cukup besar peningkatannya dibandingkan dua pos lainnya (retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), memiliki kontribusi selama tahun 2015 – 2019 berkisar antara 29,21% - 41,04%. Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak pada tingkat 79,64% - 113,07%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 41,04% dan terendah pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 29,21%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 113,07% dan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 79,64%. Pertumbuhan realisasi pajak daerah Kabupaten Bangka rata-rata per tahun mencapai (44,52%) sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 65,97%.

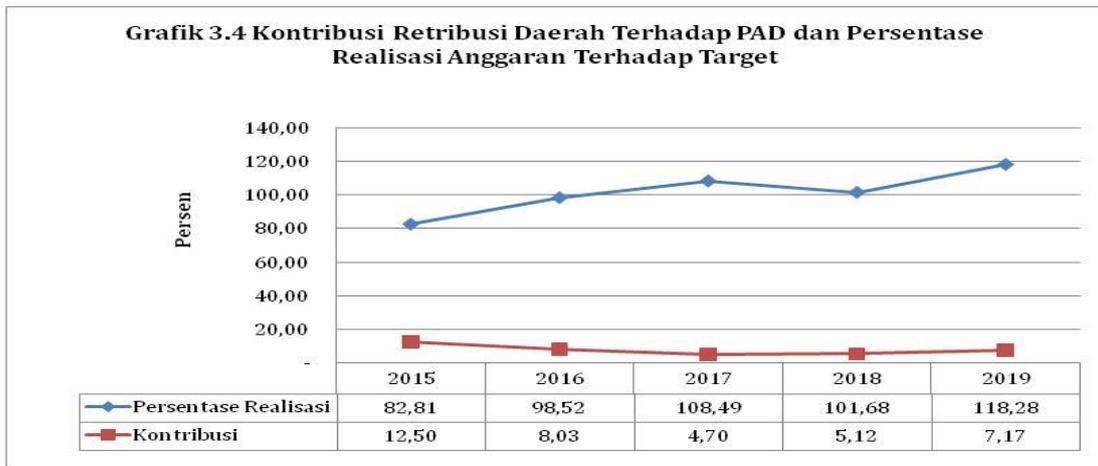


Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Pencapaian pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 59,37 milyar rupiah, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2015 yang hanya sebesar 33,87 milyar rupiah. Dengan demikian trend peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019 rata-rata per tahun mencapai 12,79%.

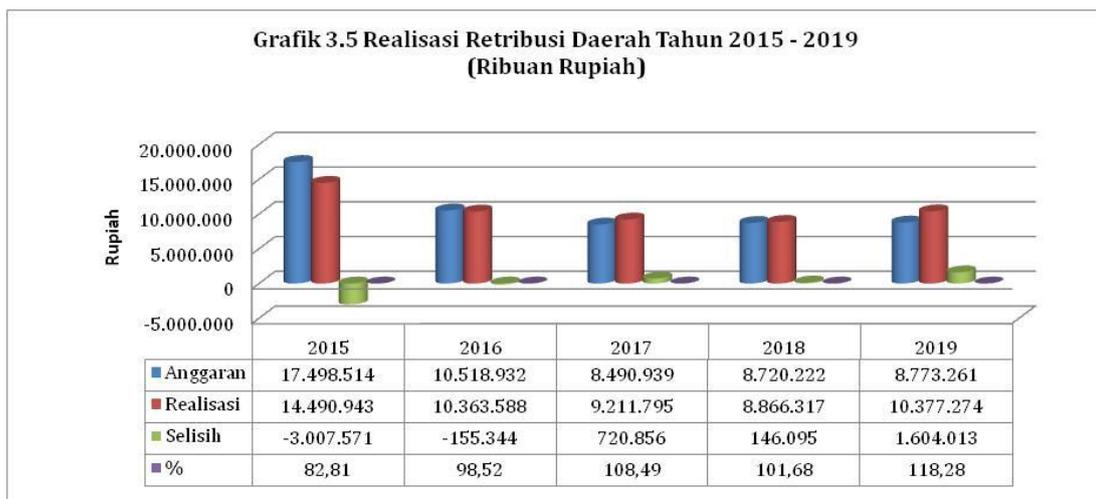
### 3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah

Retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sampai tahun 2019 berkisar antara 4,70% - 12,50%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar antara 82,81% - 118,28%. Retribusi daerah diperoleh dari objek-objek retribusi yaitu : (i) retribusi jasa umum; (ii) retribusi jasa usaha; dan (iii) retribusi perizinan tertentu.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Dari tabel diatas kontribusi retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni mencapai hingga 12,50%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni hanya sebesar 4,70%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 118,28% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 4,70%. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah tahun 2015 terhadap tahun 2014 sebesar 34,59%, pada tahun 2017 pertumbuhan menurun hingga menjadi (11,11%). Tahun 2019 pertumbuhan retribusi daerah mencapai 17,05%, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai (3,75)%.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2015 retribusi daerah hanya sebesar 14,49 milyar rupiah namun justru mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 10,38 milyar rupiah. Dengan demikian, trend pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2015 - 2019 rata-rata mencapai (9,12%).

### 3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

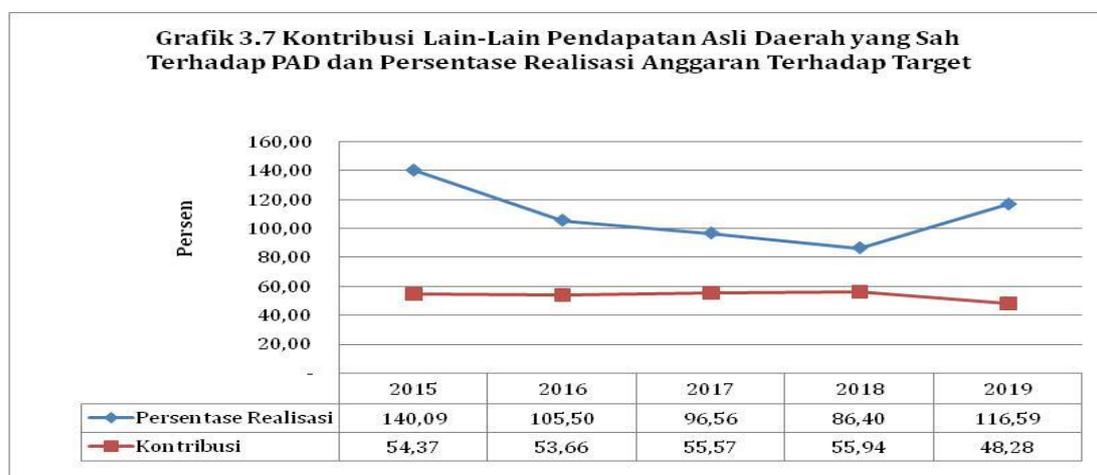
Pencapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,54 milyar rupiah dan meningkat menjadi 5,08 milyar rupiah pada tahun 2019. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari komponen penyertaan modal pada Bank Sumsel dan Bank Syariah Bangka serta JAMKRIDA.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

### 3.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Disahkan

Kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Bangka terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sebesar 54,37% atau sebesar 63,05 milyar rupiah, tahun 2016 berkontraksi menjadi 53,66% atau sebesar 69,25 milyar rupiah. Selanjutnya di tahun 2017 meningkat hingga menjadi 108,95 milyar rupiah atau 55,57%, dan kembali berkontraksi hingga mencapai 69,84 milyar rupiah atau 48,28% pada tahun 2019. Dari sisi realisasi anggaran terhadap target menunjukkan fluktuasi yang beragam, pada tahun 2015 terealisasi 140,09% dari target sebesar 45,01 milyar rupiah. Di tahun 2016 justru mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai 105,50%, namun pada tahun 2017 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 96,56% dari target sebesar 112,83 milyar rupiah dan ternyata pada tahun 2019 realisasi anggaran kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 116,59% dari target sebesar 59,90 milyar rupiah.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

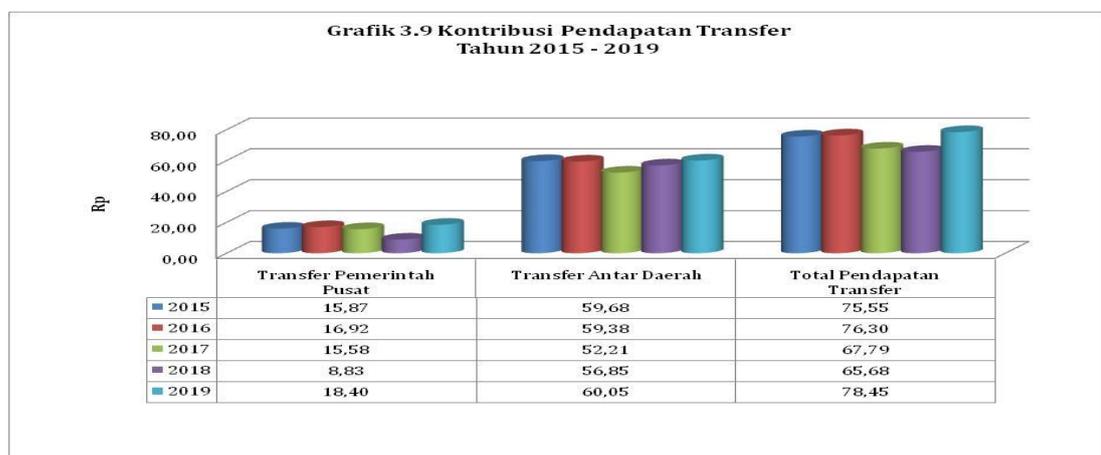
### 3.1.1.5. Pendapatan Transfer

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bangka menunjukkan trend yang fluktuatif. Hasil ini terlihat dari realisasi pendapatan tranfer tahun 2015 sebesar 957,90 milyar rupiah dan meningkat menjadi 1,08 triliun rupiah pada tahun 2019. Capaian

dari komponen pendapatan transfer tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

### 3.1.1.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan hibah merupakan katalisator utama pembentukan dana dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kurun waktu lima tahun, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 79,04% dari total realisasi pendapatan. Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh tidak terealisasinya pos lain-lain realisasi pendapatan daerah yang sah pada selama periode 2015 hingga 2019. Secara detail, perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun 2015 – 2019 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hibah	-	5.171.952	-	-	38.781.855
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang- Undangan	157.151	-	-	-	-
<b>Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>157.151</b>	<b>5.171.952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.781.855</b>

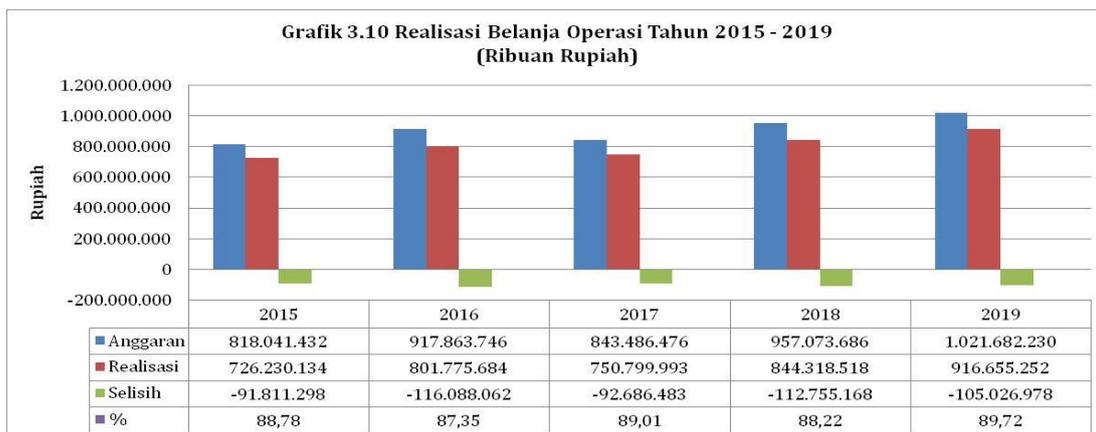
Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Salah satu ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dari perbandingan tersebut, kapasitas keuangan daerah Kabupaten Bangka cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif dengan rata-rata per tahun yang berkisar pada level 3,86%. Tahun 2015 rasio tersebut sebesar 10,80% kemudian tahun 2016 naik menjadi 11,98%. Kemudian kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 17,40% di tahun 2017, namun ternyata mengalami degradasi nilai di tahun – tahun berikutnya yakni hanya mencapai 11,49% pada tahun 2019.

### 3.1.2 Kinerja Belanja Daerah

#### 3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

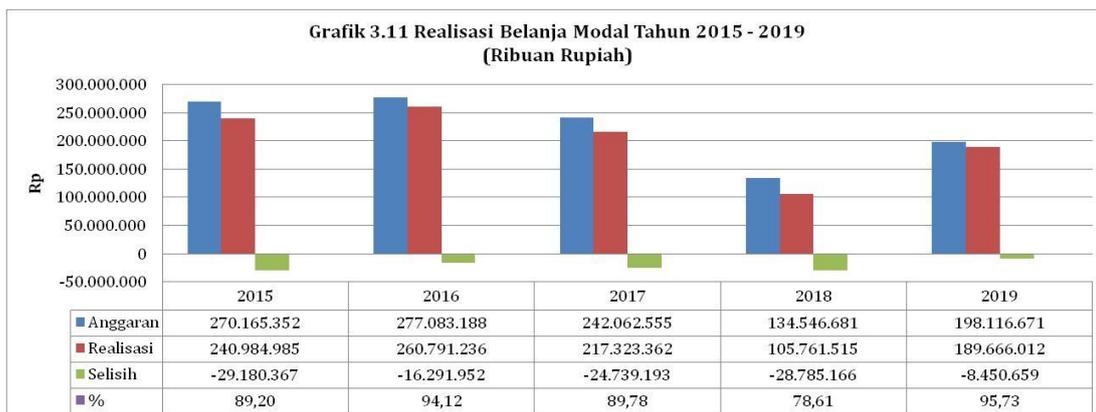


Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Belanja Operasional pada tahun 2019 mencapai 916,66 milyar rupiah atau sebesar 89,72%. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya terealisasi sebesar 726,23 milyar rupiah atau mencapai 88,78%. Realisasi belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan, pendidikan, industri kecil dan menengah (UKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.

### 3.1.2.2 Belanja Modal

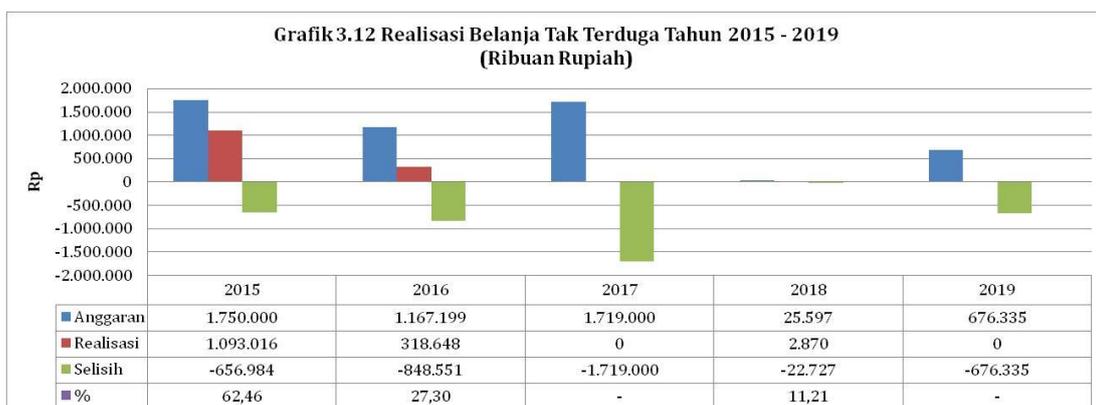
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan sebagainya. Realisasi belanja modal pada tahun 2019 mencapai 95,73%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 89,20%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan efektifnya penggunaan belanja sehingga anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran jauh dibawah target. Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

### 3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda APBD tahun berkenaan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. Perkembangan realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2015 – 2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

### 3.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer diberikan dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan daerah dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memprioritaskan untuk pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh

peraturan perundang - undangan. Belanja transfer diperoleh dari bantuan keuangan provinsi ke kabupaten dan bantuan keuangan provinsi atau kabupaten kepada desa. Berdasarkan grafik dibawah, menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif, dengan rentang kinerja antara 97,10% sampai dengan 99,99%. Selengkapnya perkembangan kinerja belanja transfer selama periode 2015 - 2019 tersaji pada grafik berikut ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020

Gambaran lebih rinci tentang anggaran dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019 (ribuan rupiah)**

Uraian		Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Operasi	Rencana	818.041.432	917.863.746	843.486.476	957.073.686	1.021.682.230
	Realisasi	726.230.134	801.775.684	750.799.993	844.318.518	916.655.252
	%	88,78	87,35	89,01	88,22	89,72
Belanja Pegawai	Rencana	469.482.667	502.563.758	446.282.369	465.829.563	492.458.667
	Realisasi	414.528.226	425.971.525	387.701.163	410.671.392	433.542.911
	%	88,29	84,76	86,87	88,16	88,04
Belanja Barang dan Jasa	Rencana	312.925.495	350.876.717	351.452.290	427.768.355	493.241.329
	Realisasi	279.648.543	318.686.657	319.374.169	378.528.414	449.677.368
	%	89,37	90,83	90,87	88,49	91,17
Belanja Bunga	Rencana	-	-	-	-	-
	Realisasi	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	Rencana	3.150.000	500.000	350.000	350.000	350.000
	Realisasi	150.000	500.000	350.000	350.000	-
	%	4,76	100,00	100,00	100,00	-
Belanja Hibah	Rencana	30.306.520	49.091.691	34.729.054	56.354.596	32.382.234
	Realisasi	29.692.365	43.618.601	33.175.732	48.348.097	30.305.312
	%	97,97	88,85	95,53	85,79	93,59
Belanja Bantuan Sosial	Rencana	2.176.750	14.831.580	10.672.763	6.771.172	3.250.000
	Realisasi	2.211.000	12.998.901	10.198.929	6.420.615	3.129.661

Uraian		Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
	%	101,57	87,64	95,56	94,82	96,30
Belanja Modal	Rencana	270.165.352	277.083.188	242.062.555	134.546.681	198.116.671
	Realisasi	240.984.985	260.791.236	217.323.362	105.761.515	189.666.012
	%	89,20	94,12	89,78	78,61	95,73
Belanja Tak Terduga	Rencana	1.750.000	1.167.199	1.719.000	25.597	676.335
	Realisasi	1.093.016	318.648	-	2.870	-
	%	62,46	27,30	-	11,21	-
Belanja Transfer	Rencana	79.727.866	89.771.787	117.899.374	126.326.924	136.323.751
	Realisasi	78.922.294	89.758.852	117.862.367	122.661.977	136.258.081
	%	98,99	99,99	99,97	97,10	99,95
<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rencana</b>	<b>1.169.684.650</b>	<b>1.285.885.920</b>	<b>1.205.167.405</b>	<b>1.217.972.888</b>	<b>1.356.798.987</b>
	<b>Realisasi</b>	<b>1.047.230.429</b>	<b>1.152.644.420</b>	<b>1.085.985.722</b>	<b>1.072.744.880</b>	<b>1.242.579.345</b>
	<b>%</b>	<b>89,53</b>	<b>89,64</b>	<b>90,11</b>	<b>88,08</b>	<b>91,58</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rencana</b>	<b>- 112.516.643</b>	<b>- 121.649.809</b>	<b>- 46.197.569</b>	<b>- 90.732.577</b>	<b>- 111.104.901</b>
	<b>Realisasi</b>	<b>26.585.196</b>	<b>- 75.642.667</b>	<b>40.563.467</b>	<b>21.785.662</b>	<b>16.279.031</b>
	<b>%</b>	<b>-23,63</b>	<b>62,18</b>	<b>-87,80</b>	<b>-24,01</b>	<b>-14,65</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015-2019

### 3.1.3. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2014 - 2018 mengalami pertumbuhan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2015- 2019**

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1.</b>	<b>ASET</b>	<b>7,29</b>
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>23,43</b>
1.1.1.	Kas	13,17
1.1.2.	Piutang	68,81
1.1.3.	Persediaan	21,97
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>6,46</b>
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5,87</b>
1.3.1.	Tanah	16,49
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	11,52
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	4,29
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,78
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	22,00
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	193,09
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	16,76
<b>1.4.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>23,31</b>
1.4.1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1.4.2.	Kemitraan dengan Pihak Kedua	9,60
1.4.3.	Aset tak Berwujud	13,95
1.4.4.	Aset Lain-Lain	207,77
1.4.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12,64)
1.4.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	(40,00)
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>7,29</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>43,39</b>
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>43,39</b>
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	83,53
2.1.2.	Pendapatan diterima dimuka	63,16
2.1.3.	Utang Beban	30,39
2.1.4.	Utang Belanja	52,57
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	19,20
<b>2.2.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0,00

2.2.2.	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	0,00
2.2.3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>7,15</b>
3.1.	EKUITAS	7,15
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7,29</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2015 – 2019, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai 7,29% yang menandakan bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bangka meningkat sebesar 7,29% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 23,43%, komponen terbesar adalah kas yang merupakan aset lancar dalam bentuk uang dan disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal, kas mengalami kenaikan sebesar 13,17%, sementara persediaan tumbuh sebesar 21,97% dan piutang tumbuh sebesar 68,81%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bangka berada pada kondisi yang sehat.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2015 – 2019 dengan rata-rata sebesar 43,39%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, dengan total aktiva lancar yang jauh lebih tinggi dibandingkan total hutang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*) yang menggambarkan kemampuan pemda dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) menggambarkan kemampuan pemda dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

**Tabel 3.5**  
**Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rataan
1	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	10,63	5,59	8,92	7,79	13,42	<b>9,27</b>
2	Rasio Cepat ( <i>Quick Ratio</i> )	10,06	4,92	8,36	7,14	12,57	<b>8,61</b>
3	Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> )	7,97	2,89	4,79	3,64	5,89	<b>5,04</b>
4	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	<b>0,01</b>
5	Rasio Hutang terhadap Modal	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	<b>0,01</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rata-rasio lancar (*current ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 sangat baik, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rataan rasio lancar (*current ratio*) pada tahun 2019 mencapai 13,42 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Bangka adalah 13,42 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo.

Rataan rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 mencapai 8,61. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu dekat.

Rataan rasio kas (*cash ratio*) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 mencapai 5,04. Dengan tingkat rasio yang lebih dari 1% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan kas yang disimpan di bank.

Rasio solvabilitas, menggambarkan kemampuan aset pemda dalam menutupi seluruh utang pemda baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu perbandingan total utang dengan total aset. Tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 rasio total kewajiban terhadap total aset sebesar 0,01 artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup untuk menutupi seluruh utang pemda, dan rataan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditutupi oleh modal pemerintah Kabupaten Bangka.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sebagaimana amanah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar dan pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2014 - 2018 diprioritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana termuat dalam visi dan misi Bupati terpilih. Kebijakan tersebut antara lain :

- a) Untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- c) Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar 1,24 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1,05 milyar rupiah.

#### 3.2.1.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data rata – rata pertumbuhan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Bangka tahun 2015 – 2019, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 – 2019 secara rinci tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
1	2015	471.030.006	1.051.801.679	44,78
2	2016	493.450.520	1.161.405.685	42,49
3	2017	505.563.530	1.088.865.722	46,43
4	2018	533.333.369	1.075.144.880	49,61
5	2019	569.800.992	1.242.579.345	45,86
	<b>Rataan</b>	<b>514.635.683</b>	<b>1.123.959.462</b>	<b>45,83</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Rata – rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Bangka selama lima tahun terakhir yakni sebesar 45,83%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Bangka relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi

terhadap total pengeluaran dalam APBD dan pengeluaran dalam APBD lebih banyak digunakan untuk program pelayanan untuk masyarakat.

### 3.2.1.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data realisasi belanja Kabupaten Bangka tahun 2015 – 2019, maka diperoleh gambaran proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2015 – 2019 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja APBD**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rataan Proporsi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>69,35</b>	<b>69,56</b>	<b>69,14</b>	<b>78,71</b>	<b>73,77</b>	<b>72,10</b>
	Belanja Pegawai	39,58	36,96	35,70	38,28	34,89	37,08
	Belanja Barang dan Jasa	26,70	27,65	29,41	35,29	36,19	31,05
	Belanja Subsidi	0,01	0,04	0,03	0,03	0,00	0,02
	Belanja Hibah	2,84	3,78	3,05	4,51	2,44	3,32
	Belanja Bantuan Sosial	0,21	1,13	0,94	0,60	0,25	0,63
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>23,01</b>	<b>22,63</b>	<b>20,01</b>	<b>9,86</b>	<b>15,26</b>	<b>18,15</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>7,54</b>	<b>7,79</b>	<b>10,85</b>	<b>11,43</b>	<b>10,97</b>	<b>9,72</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir proporsi belanja operasi berada dikisaran 72,10%, kemudian diikuti oleh belanja modal dengan kisaran 18,15%, belanja transfer sebesar 9,72% dan belanja tak terduga hanya sebesar 0,03% saja. Dari sisi belanja operasional, belanja pegawai memiliki proporsi terbesar dalam kurun waktu tersebut dengan besaran mencapai 37,08%, kemudian belanja barang jasa dengan proporsi sebesar 31,05% dan belanja subsidi menjadi belanja operasi dengan proporsi terkecil yakni hanya sebesar 0,02% saja.

### 3.2.2 Analisa Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah kurun waktu tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2015 - 2019 terjadi surplus anggaran, yaitu realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah sebesar 26,59 milyar rupiah pada tahun 2015, 75,64 milyar rupiah pada tahun 2016, 40,56 milyar rupiah pada tahun 2017, 21,79 milyar rupiah pada tahun 2018 dan 16,28 milyar rupiah pada tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama periode tersebut

seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya.

Namun untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, sehingga angka surplus/defisit anggaran tersebut harus dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi keuangan pemerintah Kabupaten Bangka mengalami surplus riil sebesar 22,01 milyar rupiah pada tahun 2015, 66,88 milyar rupiah pada tahun 2016, 37,68 milyar rupiah pada tahun 2017, 19,39 milyar rupiah pada tahun 2018 dan 16,28 milyar rupiah pada tahun 2019.

**Tabel 3.8**  
**Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015 - 2019 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.073.815.625	1.077.001.753	1.126.549.189	1.094.530.542	1.258.858.376
2	Dikurangi Realisasi Belanja Daerah	1.047.230.429	1.152.644.420	1.085.985.722	1.072.744.880	1.242.579.345
<b>A1</b>	<b>Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>26.585.196</b>	<b>75.642.667</b>	<b>40.563.467</b>	<b>21.785.662</b>	<b>16.279.031</b>
3	Dikurangi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.571.250	8.761.265	2.880.000	2.400.000	-
<b>A2</b>	<b>Surplus/(Defisit) Riil</b>	<b>22.013.946</b>	<b>66.881.402</b>	<b>37.683.467</b>	<b>19.385.662</b>	<b>16.279.031</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka selama ini cukup kuat untuk membiayai realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Surplus riil dalam jumlah yang cukup besar hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 66,88 milyar rupiah atau 5,80% dari total realisasi belanja sebesar 1,15 triliun rupiah pada tahun 2016.

Defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pinjaman daerah, bila realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit riil anggaran, maka akan memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan. Realisasi penutupan defisit riil pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2015 – 2019 dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	116.237.635	138.181.785	54.377.360	92.842.964	113.604.901
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	265.696	1.071.751	1.376.274	509.943
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai UU	5.800	-	-	-	-
A	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	95.516.624	116.243.435	55.449.111	94.219.238	114.114.844
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	138.257.381	54.043.549	93.132.578	113.604.900	130.393.875

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 116,24 milyar rupiah atau 11,10% dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2015, tahun anggaran 2016 sebesar 138,18 milyar rupiah atau 11,99% dari realiasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2017 sebesar 54,38 milyar rupiah atau 5,01% dari total realisasi belanja daerahnya,

dan tahun anggaran 2018 sebesar 92,84 milyar rupiah atau 8,65% dari total realisasi belanja daerahnya serta tahun anggaran 2019 sebesar 113,60 milyar rupiah atau 9,14% dari total realisasi belanja daerahnya.

Besarnya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan relatif kecilnya realisasi defisit riil anggaran atau bahkan terjadinya surplus riil anggaran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sebesar 138,26 milyar rupiah atau 13,20% dari total belanja daerah, pada tahun 2016 sebesar 54,04 milyar rupiah atau 4,69% dari total belanja daerah dan pada tahun 2017 sebesar 93,13 milyar rupiah atau 8,58% dari total belanja daerah dan pada tahun 2018 sebesar 113,60 milyar rupiah atau 10,59% dari total belanja daerah serta pada tahun 2019 sebesar 130,39 milyar rupiah atau 10,49% dari total belanja daerah. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diatas menjadi sumber dana yang sangat potensial untuk membiayai belanja dan menutup defisit anggaran daerah tahun berikutnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah dari anggaran penerimaan dana perimbangan dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Disamping itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun yang bersangkutan. Dari tabel berikut, dapat dijelaskan secara detail terjadinya penyebab terjadinya SiLPA pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten**  
**Bangka Tahun 2015 – 2019 (ribuan rupiah)**

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SiLPA	116.261.067	100,00	138.257.381	100,00	54.377.360	100,00	93.132.578	100,00	113.604.901	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	29.142.820	25,07	26.585.196	19,23	-	-	40.563.468	43,55	112.518.242	99,04
6	Pelampauan Pembiayaan Netto	87.118.247	74,93	111.672.185	80,77	54.377.360	100,00	52.569.110	56,45	1.086.659	0,96

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber terjadinya SiLPA yang paling besar adalah dari pelampauan pembiayaan netto dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya seperti tidak selesai atau tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan, yang pada tahun 2015 mencapai 87,12 milyar rupiah atau 74,93%, pada tahun 2016 mencapai 111,67 milyar rupiah atau 80,77%, pada tahun 2017 mencapai 54,38 milyar rupiah atau 100,00% dari jumlah SILPA serta pada tahun 2018 mencapai 52,57 milyar rupiah atau 56,45% dari jumlah SILPA. Dana tersebut dapat menggambarkan semakin meningkatnya proporsi pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah sebagai sumber terjadinya SiLPA.

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah Kabupaten Bangka selama tiga tahun ke depan tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023 yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi - asumsi yang diperoleh berdasarkan analisa data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi kedepan, prediksi belanja - belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama tiga tahun kedepan. Disamping itu, perlu juga dilakukan perhitungan mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

pembangunan selama tiga tahun kedepan. Secara detail, kapasitas riil kemampuan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)**

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1.	Pendapatan	1.232.355.156	1.235.130.671	1.238.468.239
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	34.262.886	41.875.092	38.851.251
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.266.618.042</b>	<b>1.277.005.763</b>	<b>1.277.319.490</b>
	Dikurangi :			
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	634.870.884	636.014.429	635.270.803
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Daerah</b>	<b>631.747.158</b>	<b>640.991.335</b>	<b>642.048.687</b>

Sumber : data diolah

Tabel diatas secara nyata menunjukkan bahwa kapasitas riil Kabupaten Bangka selama periode tiga tahun ke depan diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2020 kapasitas riil keuangan daerah hanya mencapai 623,82 milyar rupiah, maka pada tahun 2021 sampai 2023 kapasitas riil keuangan daerah diharapkan tembus pada level 631,75 sampai dengan 642,05 milyar rupiah. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya indikator - indikator pendapatan seperti pendapatan asli daerah maupun besaran pendapatan transfer yang diterima pemerintah Kabupaten Bangka. Faktanya, semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar signifikansi pembangunan daerah, semakin lancar pembangunan maka semakin maju perkembangan daerah, disamping itu, tentunya juga diiringi dengan membaiknya indikator - indikator pembangunan lainnya seperti produk domestik regional bruto, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, semakin meratanya distribusi pendapatan hingga tingkat ketimpangan antar daerah yang semakin menurun.

Untuk membiayai pembangunan daerah tiga tahun kedepan, setelah besaran kapasitas riil keuangan daerah diukur, maka perlu dilakukan rencana terkait penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut, terutama berkenaan dengan belanja program -program unggulan (*core programs*), besaran belanja langsung terkait program prioritas di tingkat OPD, serta besaran belanja operasional seperti tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun belanja

lainnya. Selengkapnya kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah selama tiga tahun ke depan tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Kerangka Pendanaan**  
**Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (ribuan rupiah)**

No.	Jenis Dana	ALOKASI					
		2021		2022		2023	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	42,69	269.692.862	41,05	263.126.943	40,19	258.039.367
2.	Prioritas II	35,73	225.723.259	37,71	241.717.832	38,53	247.381.359
3.	Prioritas III	21,58	136.331.037	21,24	136.146.559	21,28	136.627.961
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>631.747.158</b>	<b>100,00</b>	<b>640.991.335</b>	<b>100,00</b>	<b>642.048.687</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, 2020 (data diolah)

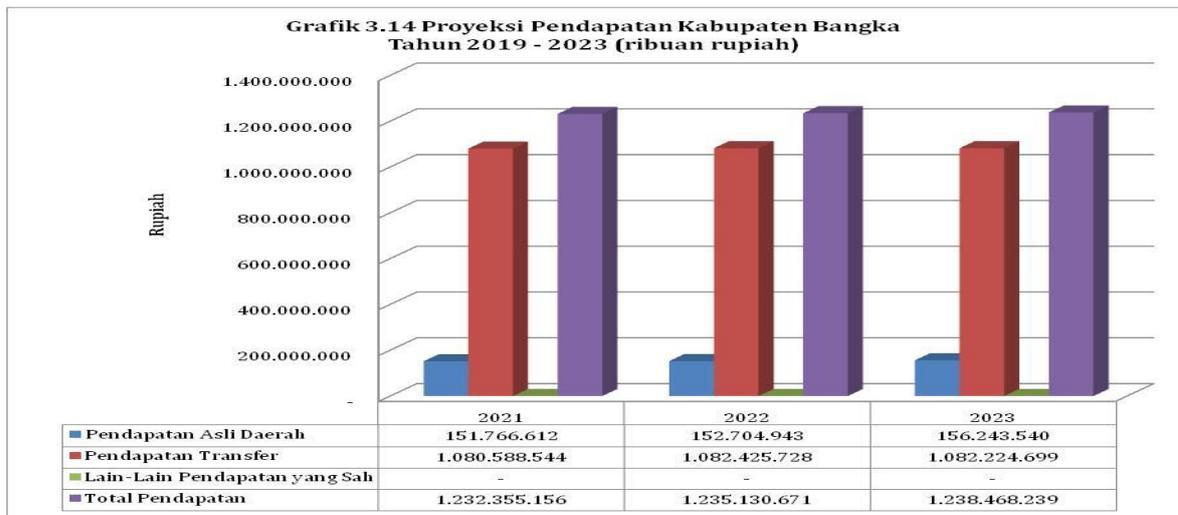
Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bangka direncanakan untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) sesuai dengan arah kebijakan nasional sebesar 269,69 milyar rupiah, kemudian mengalami penurunan hingga (2,43%), yakni hanya mencapai 263,13 milyar rupiah pada tahun 2022, dan diperkirakan trend tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan alokasi anggaran hanya sebesar 258,04 milyar rupiah. Kondisi diatas ternyata berbeda dengan besaran plafon anggaran yang akan direncanakan untuk membiayai program prioritas di tingkat OPD (prioritas II). Jika pada tahun 2021, besaran rencana belanja prioritas II sebesar 225,72 milyar rupiah, maka di tahun berikutnya mencapai 241,72 milyar rupiah, dan mencapai 247,38 milyar rupiah pada tahun 2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,63%. Untuk pembiayaan prioritas III yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan lainnya diperkirakan mencapai 136,33 milyar rupiah sampai dengan 136,63 milyar rupiah. Dari total rencana pengeluaran prioritas I, prioritas II dan prioritas III maka surplus anggaran riil selama kurun waktu 2021 – 2023 adalah sebesar 0,00 rupiah.

Tabel 3.12 menunjukkan alokasi kapasitas riil keuangan daerah yang akan membiayai program - program yang masuk kedalam prioritas I dan prioritas II serta prioritas III yang akan digunakan untuk membiayai belanja urusan pemerintahan lainnya. Disamping itu, tabel tersebut menggambarkan bahwa alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama semakin berkurang sedangkan belanja diatasnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan

bahwa, kedepan, pemerintah Kabupaten Bangka *concern* terhadap frekuensi pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata proporsi belanja pembangunan 50,15% dibandingkan dengan belanja kebutuhan pegawai yang hanya 49,85% saja.

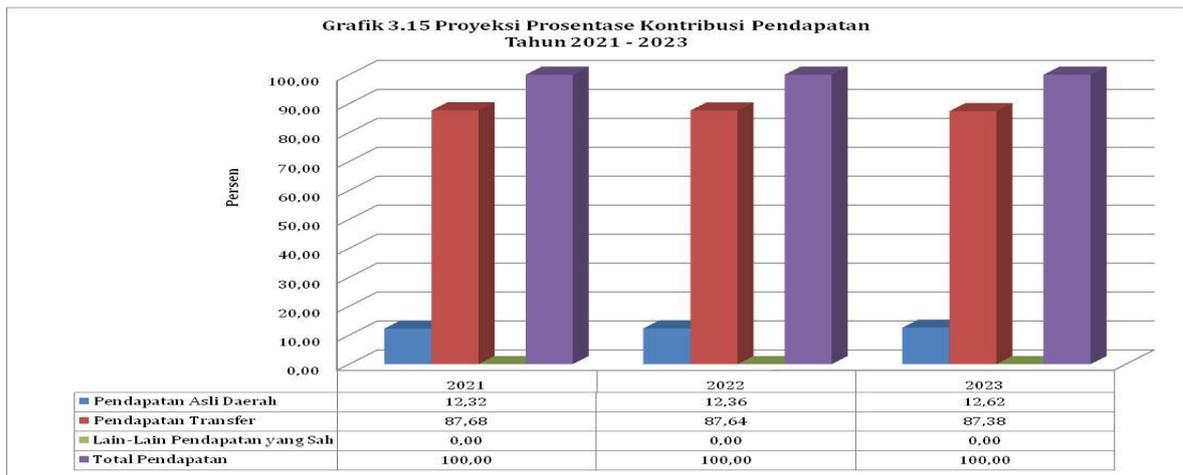
### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk tiga tahun ke depan dari tahun 2021 - 2023 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : data diolah

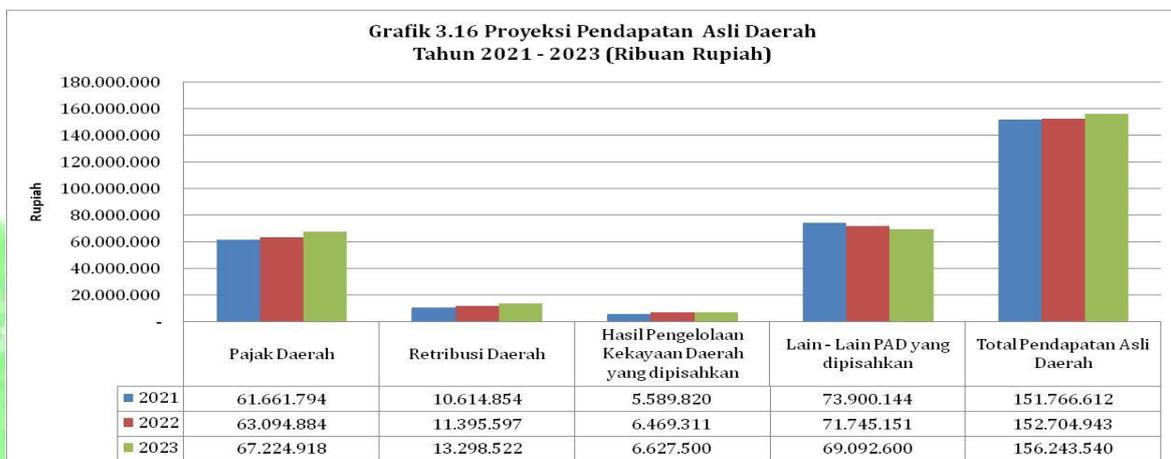
Grafik diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, ketergantungan keuangan Kabupaten Bangka pada pendapatan transfer masih cukup tinggi yaitu sekitar 87,68% dan diharapkan perannya akan semakin berkurang hingga mencapai 87,38% pada tahun 2023, sementara PAD ditargetkan mampu meningkat rata-rata 1,47% per tahun, yang pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 0,62% dan pada akhir tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 1,47%.



Sumber : data diolah

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan proporsi PAD, hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan perundangan, yaitu dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan PPHTB dan PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam PAD yang semula merupakan kelompok pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan 2023 peningkatan PAD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 1,47% pertahun dan pendapatan transfer sebesar 0,08%, proyeksi pertumbuhan pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata - rata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bangka.

Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka tiga periode sebelumnya, maka proyeksi penerimaan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

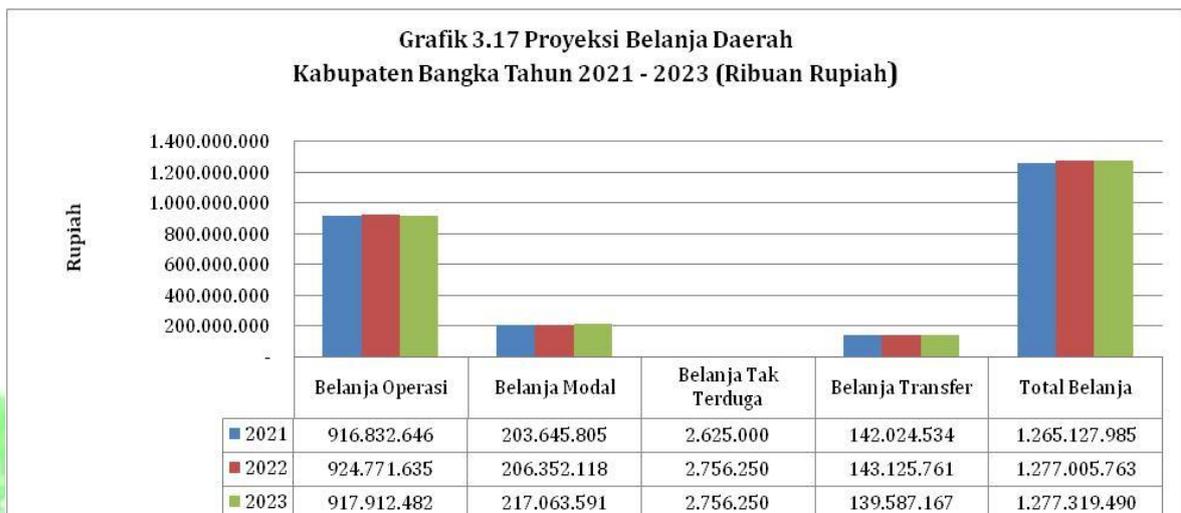


Sumber : data diolah

Untuk peningkatan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkret bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

### 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Bangka tiga tahun ke depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Untuk tiga tahun kedepan, belanja daerah Kabupaten Bangka diproyeksikan sebagai berikut.



Sumber : data diolah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja operasi yang merupakan belanja untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari – hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, proyeksi komposisi belanja operasi rata-rata adalah sebesar 72,25% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar 16,42%, belanja transfer sebesar 11,12% dan belanja tak terduga sebesar 0,21% saja dari total belanja daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 0,48% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja operasi direncanakan sebesar 0,06%, belanja modal sebesar 3,26, belanja tak terduga sebesar 2,50% sedangkan pertumbuhan belanja transfer adalah sebesar (0,85%).

Belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata mencapai 63,20% dari belanja operasi atau 72,25% dari total belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan kompensasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN Kabupaten Bangka yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproyeksikan tumbuh sebesar 0,35% setiap tahunnya.

**Tabel 3.14**  
**Proyeksi Proporsi Belanja Operasi**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2021 – 2023 (ribuan rupiah)**

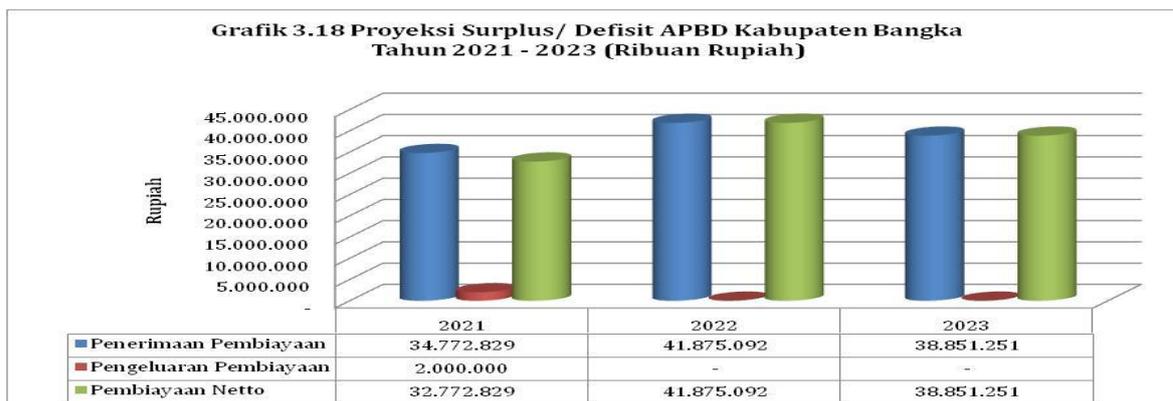
No	Belanja Operasi	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Belanja Pegawai	579.802.102	580.292.207	583.889.916
2	Belanja Barang dan Jasa	299.818.486	305.406.767	294.397.566
3	Belanja Subsidi	350.000	367.500	375.000
4	Belanja Hibah	33.411.607	35.082.187	35.500.000
5	Belanja Bantuan Sosial	3.450.451	3.622.974	3.750.000
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>916.832.646</b>	<b>924.771.635</b>	<b>917.912.482</b>

Sumber : data diolah

Belanja Hibah akan meningkat pada tahun 2023 sejalan dengan rencana adanya Pemilukada pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata adalah sebesar 0,39% dari total belanja operasi sedangkan belanja tidak terduga direncanakan disediakan secara konstan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

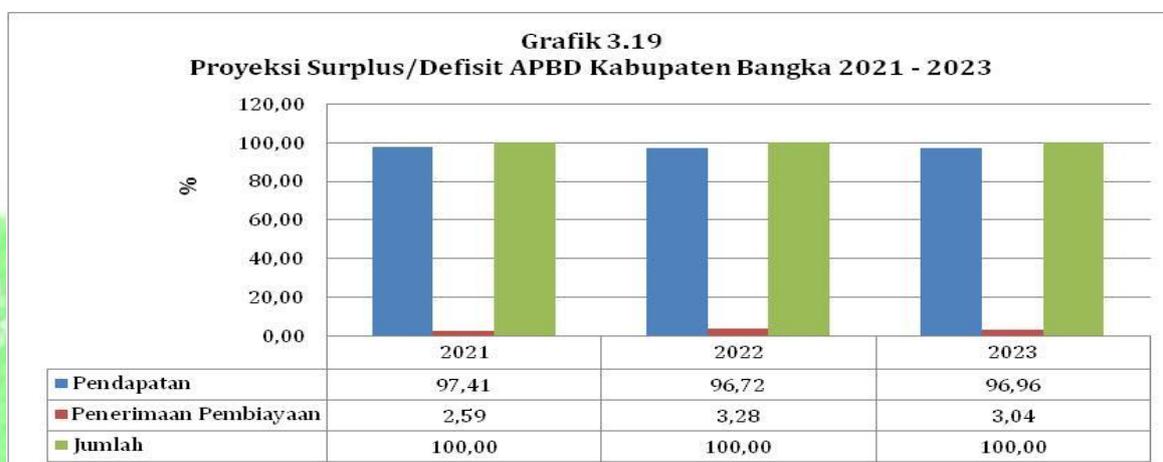
### 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.



Sumber : data diolah

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka tiga tahun kedepan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. Oleh karena itu proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah 0,02% lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai 0,27% sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.



Sumber : data diolah

Komposisi pendanaan belanja daerah dalam tiga tahun ke depan secara bertahap peran pendapatan akan lebih maksimal (97,03%) sedangkan peran pembiayaan diturunkan (2,97%) sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Secara bertahap maka pada tahun 2023 diharapkan belanja daerah 96,96% akan didanai dari pendapatan daerah. Secara lebih rinci, proyeksi pembiayaan Kabupaten Bangka tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 – 2023 (ribuan rupiah)**

No	Pembiayaan	Tahun		
		2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>34.772.829</b>	<b>41.875.092</b>	<b>38.851.251</b>
1.1	SILPA TA. Tahun Sebelumnya	34.262.886	41.875.092	38.851.251
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	509.943	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
2.4	Pembentukan Dana Bergilir	-	-	-
2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>32.772.829</b>	<b>41.875.092</b>	<b>38.851.251</b>

Sumber : data diolah

# BAB IV

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Bangka dalam 5 (lima) tahun mendatang. Bab ini akan menyajikan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kabupaten Bangka. Untuk memahami permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dan isu strategis 2019 – 2023 digunakan pendekatan model integratif menghubungkan beberapa dokumen perencanaan di daerah dan nasional serta isu – isu pada tingkat global.

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis

merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka.

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka**

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar yang termuat dalam SPM/SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian-capaian dokumen tersebut di atas, terdapat permasalahan mendasar pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bangka pada periode 2019-2023 mencakup:

1. Bidang tata kelola pemerintahan umum,
2. Bidang sosial budaya
3. Bidang infrastruktur,
4. Bidang pariwisata,
5. Serta bidang Ekonomi dan lingkungan hidup.

Penjelasan secara lebih rinci terhadap permasalahan tersebut selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **4.1.1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

Dalam perwujudan *good governance* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Pembangunan

berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Terbangunnya tata kelola pemerintahan bersih dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari mentalitas birokrat, penegakan hukum, penggunaan anggaran, pelayanan publik, penerapan wewenang, organisasi dan penerapan *e-Government*.

**Gambar 4.1**  
**Permasalahan Mendasar Bidang Tata kelola Pemerintahan Umum**



Permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah sebagai berikut :

1. Perubahan perilaku dan mentalitas birokrat. Salah satu aspek reformasi yang sangat penting selain reformasi struktur adalah melakukan perombakan *mindset* para birokrat. Hal ini terkait dengan transformasi perubahan kultural (nilai-nilai dan perilaku). Permasalahan terkait perubahan perilaku dan mentalitas dan *mindset* birokrat yang cenderung

menempatkan dirinya sebagai agen kekuasaan daripada agen pelayanan. Perilaku ini berpengaruh dengan sikap birokrat seperti rendahnya lambatnya pelayanan publik, sikap disiplin pegawai, resistensi terhadap perubahan, distribusi tugas dan tanggungjawab yang kurang proporsional. Beberapa permasalahan di atas dapat menyebabkan rendahnya profesionalitas birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu aspek yang terpenting dalam melakukan perubahan perilaku dan mentalitas birokrat adalah dengan penyusunan dan pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi (*rewardandpunishment*) kepada PNS secara konsisten dan proporsional.

2. Meningkatkan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum mengalami permasalahan terkait dengan lemahnya pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan serta kurangnya tindak lanjut hasil pengawasan oleh instansi terkait. Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang harus ditingkatkan levelnya, terbatasnya aparatur pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas serta penerapan mekanisme pengawasan belum berjenjang pada masing level organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Permasalahan ini terkait dengan pembiayaan pembangunan yang masih memerlukan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja masih kurang Hal ini terlihat dari regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat dinamis dan masih terdapat beberapa perencanaan yang bersifat rutinitas sehingga belum berdampak pada perubahan pembangunan secara mendasar.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan profesional. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan pelayanan publik adalah sistem dan prosedur pelayanan masih harus ditingkatkan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 masih belum mencapai target RPJMD 2019 -2023, Tahun 2019 angka IKM 74,07, sedangkan target RPJMD 83,00. Pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) belum optimal, budaya kerja melayani dan kompetensi SDM dalam bidang Informasi Teknologi masih perlu ditingkatkan.

5. Mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini terlihat dari pengangkatan dan penempatan PNS pada Jabatan Struktural masih ada yang belum sesuai kompetensi, pangkat dan golongan serta pola rekrutment masih berorientasi pada Hubungan Patrimonial. Profesionalitas ASN yang dilihat dari **pertumbuhan kualifikasi yang diukur dari indikator riwayat pendidikan formal, pertumbuhan kompetensi yang diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, pertumbuhan kinerja yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN dan pertumbuhan tingkat disiplin yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami** masih rendah. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 67,26 sementara target RPJMD 2019-2023 sebesar 88,37.
6. Meningkatkan fungsi organisasi. Permasalahan yang muncul dalam meningkatkan fungsi organisasi adalah esensi SOP belum sepenuhnya dipahami dengan baik, kelembagaan organisasi masih terdapat ketidaksesuaian pada hasil Analisis Jabatan dan struktur organisasi menggunakan pola maksimal dengan memperbanyak jabatan struktural. **Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka tahun 2019 capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, dimana capaian kategori BB di tahun 2019 baru mencapai 79,17 persen dari target yang ditetapkan ingin dicapai diakhir periode RPJMD.**
7. Meningkatkan penerapan *E-Government*. Hal ini terlihat dari penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan TIK, sarana dan prasarana untuk mendukung TIK masih harus ditingkatkan, belum terintegrasinya aplikasi dan keterbukaan informasi publik. Penerapan E-Government tersebut dilihat dari **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka walaupun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik yaitu sebesar**

**2,47 pada tahun 2019 namun Kebijakan internal terkait dengan pelaksanaan SPBE masih bersifat parsial atau sektoral.**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Terkait dengan Rumusan Permasalahan yang Berhubungan dengan Good Governance**

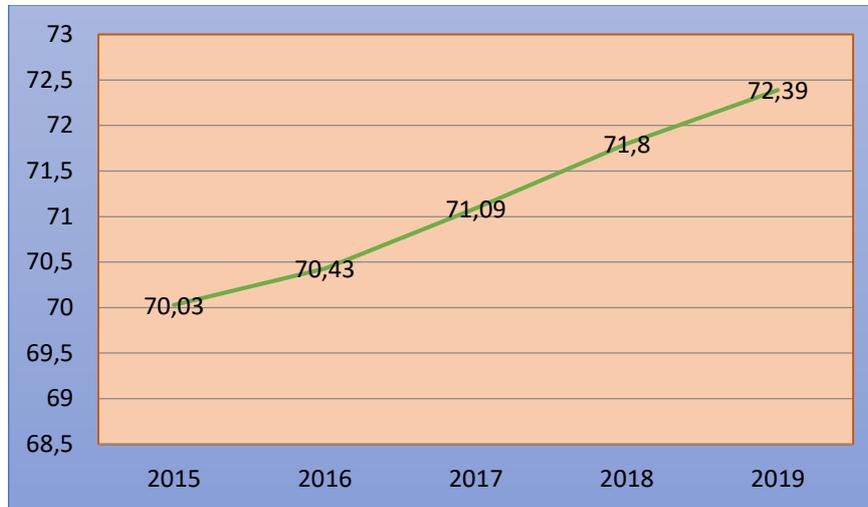
Sasaran Pembangunan Daerah			Permasalahan
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>		<b>Kinerja</b>	Belum sempurnanya seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran dan indikator kinerja) seluruh perangkat daerah serta keberlanjutan implemementasi manajemen kinerja.
			Cascading yang telah disusun belum sempurna
			Masih diperlukannya efisiensi program dan kegiatan
			Aplikasi pengolah data kinerja belum terintegrasi
			Belum optimalnya penataan peraturan perundang-undangan
			Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi
<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel</b>		<b>Keuangan</b>	Pencatatan Aset Daerah yang belum terintegrasi dengan Sistem aplikasi
			Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangka atas pengelolaan keuangan desa kurang optimal
			Keterbatasan sumberdaya terutama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat</b>			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah pemberi pelayanan

#### 4.1.2. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja

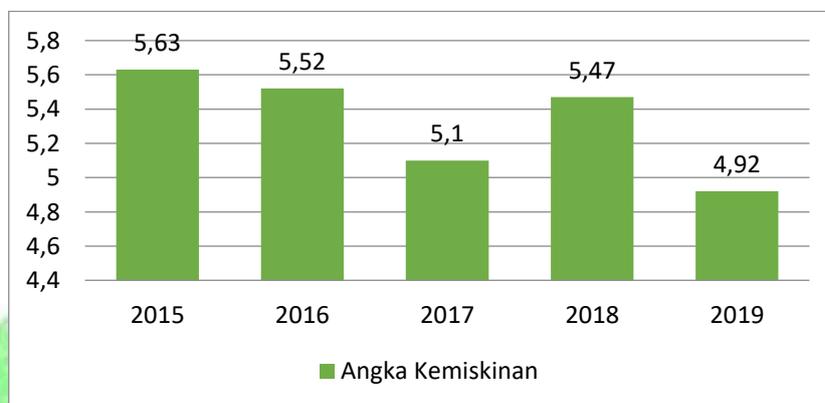
pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bangka berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan tersebut terangkum dalam sebuah indikator *impact* yakni Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Bangka mencapai nilai 72,39. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 71,30. Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung, nilai IPM Kabupaten Bangka menempati urutan ke 3 yaitu di bawah Kota Pangkal pinang dan Kabupaten Belitung. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Bangka masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bangka pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 70,99; (2) Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) sebesar 12,76 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) sebesar 8,23 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di angka 12.480.000.

**Grafik 4.1**  
**Prestasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka**  
**Periode 2015-2019**



**Pembangunan Manusia juga tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan.** Kinerja pengentasan kemiskinan cukup mengagumkan. Penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan program yang berpihak pada masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan yang diukur dengan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk di Kabupaten Bangka bersifat fluktuatif namun cenderung menurun selama periode 2015-2019. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka tahun 2015 turun dari 5,263 menjadi 4,92% pada tahun 2019.

**Grafik 4.2**  
**Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**



Upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat seperti PNPM yang diterapkan di seluruh kecamatan di Indonesia serta implementasi program strategis Pemerintah Kabupaten Bangka yang berbasis pada perekonomian rakyat.

Permasalahan masyarakat miskin ini utamanya disebabkan oleh Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakatmiskin terhadap akses sumber daya pertanian. Untuk itu perlu mendorong kebijakan di sektor pertanian mengingat sektor pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap jumlah penduduk miskin. Selain itu perlunya pemenuhan ketersediaan pangan strategis, kemudahan masyarakat untuk mengakses pangan, kualitas dan kemampuan PMKS masih perlu ditingkatkan dan pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.

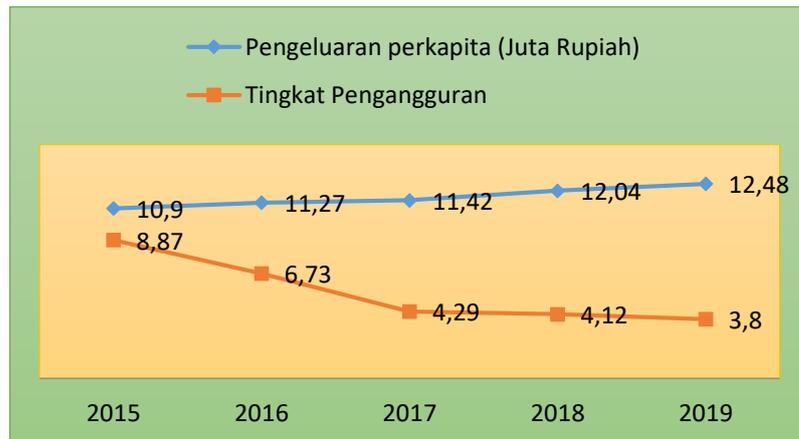
**Pembangunan manusia yang berkualitas adalah upaya menciptakan manusia yang produktif dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran.** Tingkat pengangguran bukan hanya menunjukkan banyaknya sumber daya yang tidak produktif, melainkan juga permintaan agregat yang lebih rendah. Ketika tingkat pengangguran rendah, banyak orang yang bekerja dan memperoleh pendapatan sehingga mampu membeli barang dan jasa yang diinginkan. Disamping itu, tingkat pengangguran yang rendah juga menaikkan jumlah tabungan dan menambah dana yang tersedia untuk investasi.

Di Kabupaten Bangka, tingkat pengangguran pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami tren penurunan. Penurunan tingkat pengangguran tersebut cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 persentase tingkat pengangguran mencapai 8,87% sedangkan pada tahun 2019 tingkat pengangguran menurun hingga 3,8%.

**Grafik 4.3**  
**Prestasi Capaian Tingkat Pengangguran**  
**Kabupaten Bangka Periode 2015-2019**



**Grafik 4.4**  
**Pengeluaran perkapita dan tingkat pengangguran**  
**Kabupaten Bangka Periode 2015-2019**



Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran, keduanya memiliki korelasi yang negatif bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin menurun. Jika pertumbuhan ekonomi baik maka kinerja sektor-sektor dalam perekonomian akan semakin baik dan akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi baik maka kinerja sektor-sektor dalam perekonomian akan semakin baik dan akan menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Capaian pengurangan pengangguran Kabupaten Bangka

berada di atas persentase Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62% dan di bawah nasional sebesar 5,28 %. Namun demikian, masalah pengangguran dan langkanya lapangan pekerjaan merupakan masalah klasik yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam pembangunan. Permasalahan mengurangi pengangguran bidang ini yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja.

Permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Permasalahan yang Berhubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Sasaran Pembangunan Daerah**

Sasaran Pembangunan	Permasalahan
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>	<p>Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah yang berkisar 8,23 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan</p> <p>Terjadi kenaikan Angka Putus Sekolah (APUS) SD/ MI dan Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs</p> <p>Terjadi penurunan Angka Kelulusan SMP/ MTs</p> <p>Menurunnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV</p> <p>Cakupan PAUD yang belum 100 persen</p> <p>Masih rendahnya Penduduk Kabupaten Bangka yang Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>
<b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>	<p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan balita</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia produktif</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, antara lain belum semua desa memiliki posyandu lansia, mobilitas lansia yang terbatas serta kesiapan logistik untuk skrining kesehatan lansia yang belum mencukupi</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tidak menular (penderita hipertensi dan penderita diabetes mellitus)</p> <p>Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki sarana NICU untuk menangani kasus neonatal. Dari 5 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bangka yang memiliki ruang NICU hanya 3 Rumah Sakit yaitu RSUD Depati bahrin Sungailiat, RS Medika STANIA Sungailiat dan Rumah Sakit Arsani Sungailiat, sementara RSUD DR.</p>

Sasaran Pembangunan	Permasalahan
	<p>Eko Maulana Ali Belinyu dan RSUD Syafri Rahman Puding Besar belum tersedia ruang NICU. Di Kabupaten Bangka terdapat 12 Puskesmas, akan tetapi hanya ada 5 Puskesmas PONED atau hanya 42 % dari total puskesmas yang ada.</p> <p>Kurangnya tenaga dokter spesialis</p> <p>Terbatasnya jumlah armada ambulance dan tenaga medis yang mendukung layanan SPGDT</p> <p>Dampak COVID-19 menyebabkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan kesehatan menjadi sangat besar</p>
<b>Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	<p>Pada tahun 2019 jumlah PUS di Kabupaten Bangka sebanyak 50.437 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta aktif sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38.015 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 38.092 orang. Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.</p>
<b>Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat</b>	<p>kualitas dan kompetensi angkatan kerja masih rendah</p> <p>daya serap tenaga kerja masih rendah</p> <p>belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar</p> <p>data masyarakat miskin yang belum <i>up to date</i> dan terintegrasi</p>
<b>Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda</b>	<p>Masih tingginya angka kelahiran usia anak (ASFR 15-19) yaitu sebesar 22,034 per 1000</p> <p>Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 47,02% pada tahun 2019</p> <p>Masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di tahun 2019 hanya sebesar 7,98 dibanding laki laki sebesar 8,69</p> <p>Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan kepemudaan</p>

#### 4.1.3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Bangka akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kabupaten Bangka.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar terkait dengan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Rumusan Permasalahan yang Berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
<b>Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur</b>	Masih perlunya pengoptimalan upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah
	Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara
	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
	Pengembangan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan

#### 4.1.4. Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan

Kontribusi pertumbuhan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi kunjungan wisatawan, kawasan wisata yang berkualitas dan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata yang perlu ditingkatkan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan pembangunan kepariwisataan terkait dengan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Rumusan Permasalahan yang Berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan Pembangunan Kepariwisataan**

Sasaran Pembangunan Daerah			Permasalahan
Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek – objek wisata daerah

#### 4.1.5. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kabupaten Bangka adalah masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kabupaten Bangka menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kualitas pembangunan perekonomian adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Permasalahan Bidang Pembangunan Ekonomi**



**1. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi.** Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih menghadapi permasalahan dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar dapat memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Beberapa fenomena yang mewarnai pertumbuhan perekonomian berkaitan dengan masih rentannya pertumbuhan tersebut pada gejolak ekonomi dunia, masih belum mampu memberikan dukungan secara maksimal pada upaya untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masih menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan kemampuan sumber daya alam dalam memberikan dukungan pada pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode 2015-2019, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik. Hal ini diindikasikan capaian PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang terus meningkat.

**Tabel 4.5**  
**PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2015-2019**

<i>Tahun</i>	<i>PDRB Per Kapita (Ribu Rp)</i>	<i>Pertumbuhan (%)</i>
2015	35.365	5,83
2016	37.049	4,76
2017	39.493	6,60
2018	42.013	6,38
2019	42,180	4,77
<b>Rataan</b>	<b>30.792</b>	<b>5,66</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020*

Pertumbuhan positif dari PDRB perkapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan metode terbaru, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2019 adalah sebesar 42,180 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 4,77 persen dari 42,013 juta rupiah pada tahun 2018. Selama periode 2015-2019, PDRB perkapita Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan rata-rata 5,66 persen.

Beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan perekonomian dimana walaupun sektor pertanian masih cukup mengesankan namun sektor pengolahan dan pertambangan masih sangat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian ke depan. Untuk itu, keberhasilan dalam perubahan dan peralihan sektoral ini perlu di dorong agar terjadi transformasi struktural yang ideal kee depan yang mengedepankan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor dasar di masa depan bagi pembangunan daerah.

**2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor-sektor unggulan.** Beberapa sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perikanan, agro industri, dan sektor perdagangan, dan pariwisata perlu didorong untuk agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

PDRB Kabupaten Bangka. Beberapa permasalahan terkait dengan upaya ini adalah:

*Pertama*, pertumbuhan sub sektor pertanian dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas pertanian, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian perlu ditingkatkan, dukungan seluruh *stakeholder* dalam rantai tata niaga dan laju alih fungsi lahan pertanian yang perlu dikendalikan.

*Kedua*, pertumbuhan sub sektor Perikanan dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan.

*Ketiga*, kontribusi pertumbuhan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi kunjungan wisatawan, kawasan wisata yang berkualitas dan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata yang perlu ditingkatkan.

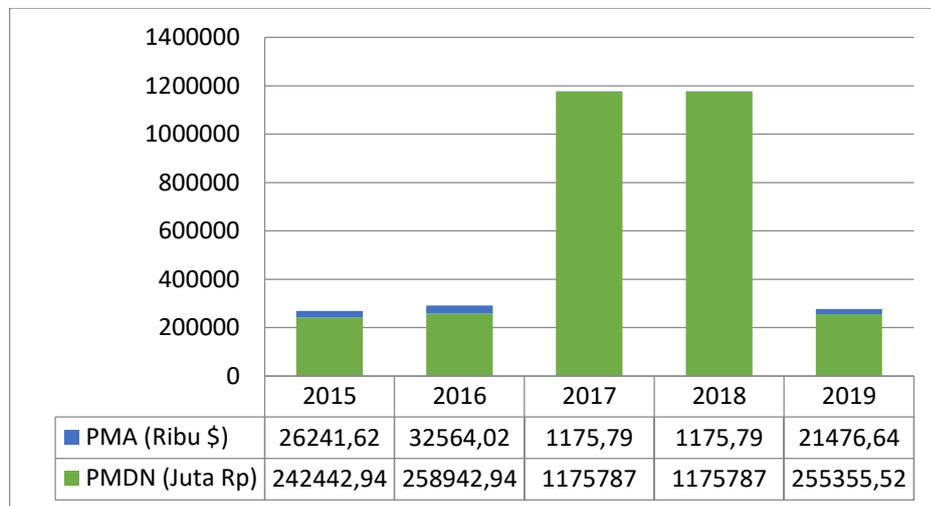
*Keempat*, pertumbuhan sub sektor agroindustri dalam PDRB perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi ketersediaan bahan baku perlu ditingkatkan kualitasnya, fasilitas permodalan harus didukung oleh *stakeholder*, adanya dukungan ketersediaan pasar, dukungan infrastruktur bidang agroindustri, penelitian dan pengembangan produk, kualitas produksi, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri harus ditingkatkan serta peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing.

*Kelima*, pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB perlu ditingkatkan juga. Hal ini terkait beberapa aspek meliputi pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di Kabupaten Bangka yang masih perlu ditingkatkan, tertib ukur untuk tera dan tera ulang alat UTTP, terpenuhinya ketersediaan barang kebutuhan pokok barang penting serta informasi harga kebutuhan pokok, pembangunan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masih harus ditingkatkan, perlunya peningkatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi, pertemuan dengan *stakeholder* Ekpor Impor masih harus ditingkatkan, perlunya penyelenggaraan kampanye pencitraan

produk ekspor dan keikutsertaan Kabupaten Bangka dalam pameran promosi dagang baik tingkat nasional maupun lokal masih harus ditingkatkan.

**3. Peningkatan investasi.** Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2015-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada Grafik

**Grafik 4.5**  
**Nilai Investasi PMDN/PMA**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2019**



Sumber : DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka Tahun 2019

Total nilai investasi pada tahun 2015, dimana total PMDN sebesar Rp. 242.442,94 juta rupiah dan PMA sebesar U\$2624162000,- Total nilai tertinggi investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebanyak 255.355.521.385,- rupiah dan PMA sebanyak 322.149.641.625,- rupiah.

Terjadi pergeseran sektor investasi selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-2014, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi serta bidang perdagangan sebagai sektor penunjang. Namun, selama tahun 2015-2016, bidang pertambangan dan energimulai ditinggalkan dan investor beralih ke bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta perdagangan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus berjalan meskipun tidak lagi

ditopang oleh sektor pertambangan sebagai sektor penggerak utama perekonomian.

Permasalahan yang muncul disebabkan oleh *pertama*, Penanaman Modal Asing (PMA) masih perlu ditingkatkan, terkait beberapa aspek seperti pelayanan perizinan ditingkatkan dan keamanan berinvestasi yang harus dijaga. *Kedua*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terkait beberapa aspek seperti kerjasama pananaman modal perlu ditingkatkan dan jaminan ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian yang berkaitan dengan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada table 4.6

**Tabel 4.6**  
**Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian**

Sasaran Pembangunan	Permasalahan
<b>Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa</b>	Penurunan produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
	Penurunan harga komoditas pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mengikuti harga dunia
	Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakat miskin terhadap akses sumber daya pertanian
<b>Meningkatnya Pemerataan Pendapatan</b>	manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik
	produktivitas koperasi dan UMKM masih rendah
	kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah
	belum optimalnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM
	minimnya akses pemasaran produk koperasi dan UMKM
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Menurunnya Persentase Penanganan Sampah
	Luas tutupan lahan yang mengalami penurunan karena aktifitas penambangan ilegal
	Kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga masih ditemukan masyarakat membuang sampah sembarangan terutama di aliran sungai

Selain berbagai permasalahan di atas. Kabupaten Bangka juga menghadapi permasalahan akibat dari Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). Pandemi COVID tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan. Akan tetapi, ribuan orang juga akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Implikasinya adalah bahwa Kabupaten Bangka perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian secara global. Dampak ekonomi pandemic COVID-19 dimulai dari adanya guncangan terhadap suplai barang dan jasa yang tersedia di pasar (*supply shock*). Guncangan tersebut terjadi ketika orang-orang (mayoritas pekerja) dalam rantai produksi terinfeksi virus dan kemudian sakit. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat produktivitas individu ataupun perusahaan. Guncangan terhadap suplai juga didorong oleh pembatasan aktivitas fisik (*physical distancing*) sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pabrik, kantor dan pusat bisnis ditutup untuk sementara.

Guncangan terhadap suplai pada akhirnya akan diikuti oleh guncangan terhadap permintaan konsumen (*demand shock*). Selama pandemi, tingkat konsumsi cenderung turun akibat kebijakan untuk penyebaran pandemi. Tingkat konsumsi masyarakat juga turun akibatnya turunnya tingkat pendapatan atau hilangnya mata pencaharian.

## 4.2 Isu Strategis

Rumusan isu strategis Daerah menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Bangka untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi isu-isu lingkungan

strategis pada tingkat global, nasional, provinsi dan analisis permasalahan menurut urusan pemerintahan, dan, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis.

**Gambar 4.3**  
**Kerangka Pikir**  
**Analisis Isu**  
**Strategis**



#### 4.2.1. Lingkungan Strategis

##### 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Bangka adalah : (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel.

Kebijakan pengurangan subsidi energi BBM dan tarif dasar listrik dari pemerintah berdampak pada risiko inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin, penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan

belanja rutin. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2018-2023.

Kebijakan moratorium PNS menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah kota untuk mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

Tantangan dalam RPJMN: (i) menjalankan reformasi birokrasi publik; (ii) membuka partisipasi publik; (iii) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup.

RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara umum memberikan tantangan kepada pemerintah Kabupaten Bangka membuat perencanaan pembangunan 2019-2023 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **2) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Bangka mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kabupaten Bangka menghadapi MEA, yaitu : memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja dan meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

### 3) *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (SDG's) merupakan amanah dari Inpres Nomor. 1 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG's Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan.

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama ([\*Sustainable Development Goals \(SDGs\)\*](#)), menggantikan program sebelumnya [\*Millennium Development Goals \(MDGs\)\*](#) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

**Gambar 4.4**  
**Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)**



Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2018-2023 sudah menjadikan SDG's sebagai salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018-2023.

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia pada tingkat global, nasional dan regional untuk terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. Agenda Resmi untuk Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 bidang dan tujuan utama sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)**

No	Bidang	Tujuan
1	Kemiskinan	Menghapus kemiskinan dalam berbagai bentuk dimanapun
2	Makanan	Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan
3	Kesehatan	Mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia
4	Pendidikan	Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5	Perempuan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6	Air	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya air dan sanitasi untuk semua
7	Energi	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8	Ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Infrastruktur	Membangun infrastruktur, mempromosikan pembangunan inklusif dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi
10	Ketimpangan	Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan diantara negara-negara
11	Huni	Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12	Konsumsi	Memastikan pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan.
13	Iklim	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14	Ekosistem Laut	Menghemat dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15	Ekosistem	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16	Kelembagaan	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17	Keberlanjutan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: United Nation.Org.

#### 4.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat disesuaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

##### **a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*).**

Pemerintah Kabupaten Bangka harus lebih serius dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Setiap aparatur di Pemerintahan Kabupaten Bangka harus merubah pola pikir dan budaya pikir yang lebih seperti mentalitas, pelanggaran hukum, pemborosan anggaran, pelayanan publik yang kurang cepat, tepat dan profesional, penyalahgunaan wewenang, *e-Government* belum berjalan lancar, menuju tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, bebas KKN, transparan dan akuntabel.

##### **b. Penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik.**

Peningkatan kandungan teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi pemerintah memiliki peran yang strategis bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam upaya penyebaran informasi, efektivitas dan efisiensi anggaran, pengendalian korupsi, meluasnya akses informasi masyarakat, memperpendek hubungan kerja antar institusi dan personal.

Pemerintah Kabupaten Bangka telah berupaya menerapkan *e-Government*, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya infrastruktur *bandwidth* internet, infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Bangka dan masih terbatasnya pengetahuan SDM aparatur dan masyarakat dalam teknologi informasi dan kelembagaannya.

**c. Peningkatan nilai tambah (*value added*) sektor industri pertanian**

Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penyumbang PDRB kedua tertinggi setelah industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Bangka tetap perlu mengutamakan sektor pertanian untuk mendukung pembangunan sektor lainnya. Industri pertanian dapat mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan investasi dan sebagai cara yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah perubahan orientasi pembangunan pertanian yang bernilai rendah (*low value added*) ke yang bernilai tinggi (*high value added*).

Tantangan pembangunan nilai tambah sektor industri pertanian ke depan adalah bagaimana memproduksi hasil-hasil pertanian yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

**d. Penguatan rantai nilai (*value chain*) tata niaga produk pertanian**

Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam komoditas dunia seperti : lada, karet, sawit, dan timah. Beberapa produk tersebut harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Penguatan rantai nilai produk unggulan dilakukan dengan aktivitas operasi, logistik, pemasaran dan penjualan, jasa, aktivitas pendukung, pengadaan, dan pengembangan teknologi.

Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Terkadang petani masih terikat Kontrak Farming kepada pengumpul. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga dunia.

**e. Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian daerah**

Pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Bangka ke depan yang akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Belum optimalnya kualitas kemitraan pariwisata, objek wisata dan promosi pariwisata di dalam

negeri dan luar negeri merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bangka masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata ke depan agar mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**f. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;**

Alih fungsi lahan pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap produksi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah serius dan strategis yang harus dihadapi dalam kemantapan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bangka harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ini. Jika tidak dikendalikan akan berdampak pada produksi bahan pangan yang ada di Kabupaten Bangka akan terganggu.

Langkah yang tepat untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan ini adalah dengan meningkatkan luas tanam lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian kaitannya dengan keberlanjutan kebutuhan pangan penduduk serta adanya penjaminan/perlindungan lahan dari pemerintah.

Disisi lain, permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Bangka juga cenderung dapat meningkatkan perekonomian salah satunya adalah maraknya tambak udang (kelompok perikanan), baik dari lahan eks tambang, pertanian dan lainnya menjadi pertanian. Aktivitas ini secara tidak langsung minimal dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja dan memberikan potensi PAD sehingga alih fungsi lahan sektor ini dapat diupayakan dalam peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang sehingga sejalan dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal.

**g. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkualitas;**

Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, membutuhkan ketersediaan sumber daya (*petugas kesehatan yang professional, sarana dan prasarana pendukung dan pembiayaan kesehatan*) dan standar pelayanan.

Kabupaten Bangka masih kekurangan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi dan belum terdistribusi secara merata. Faktor pembiayaan seringkali menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas walaupun sudah ada asuransi kesehatan.

**h. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan harus berkualitas;**

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satu ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan secara perspektif jarak dan keterjangkauan layanan. Di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2017, teridentifikasi masih ada beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD dan pendidikan dasar belum mampu tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana dan non fisik seperti sosial, budaya dan kapasitas finansial. Untuk itu, perlu adanya perwujudan aksesibilitas dan cakupan akses layanan bidang pendidikan, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**i. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan**

Aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan pada pemuda menjadi ancaman serius jika tidak dikawal dengan baik. Memasuki masa bonus

demografi, Pemerintah Kabupaten Bangka berkewajiban melindungi pemuda dalam berbagai aspek. Setiap pemuda berhak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Untuk itu perlu adanya jaminan terpenuhinya layanan pemuda secara sungguh-sungguh dari pemerintah.

**j. Peningkatan perlindungan dan Pemenuhan hak anak**

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah kabupaten dan kota umumnya lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditandai dengan belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang di bangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Untuk itu perlunya komitmen dan jaminan terpenuhinya hak anak dan perlindungan terhadap anak.

**k. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) 2030 dengan menetapkan prinsip *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan

dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya.

**l. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur serta konektivitas antara wilayah;**

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

**m. Peningkatan kualitas fungsi ekologis;**

Fungsi ekologis suatu kawasan sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Menurunnya fungsi ekologis di Kabupaten Bangka ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara oleh sampah dan limbah kimia, menyusutnya tutupan hutan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kebutuhan lahan baru untuk perumahan dan kegiatan-kegiatan lain sebagai pendukung, berkurangnya daerah resapan air dan tangkapan air, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya bencana lingkungan hidup seperti banjir dan kekeringan.

Di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2017, masih sulit untuk mengakomodir 20% RTH Publik dari 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Bangka. Meskipun pada tahun 2017, Kabupaten Bangka telah mendapat penghargaan Adipura, namun tuntutan untuk mempertahankan dan

terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama dalam penanganan sampah harus menjadi perhatian penting bagi pembangunan di Kabupaten Bangka.

**Tabel 4.8**  
**Pemetaan Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Bangka**

Indikator	Capaian s/d 2017	Target Akhir RPJMD	Hasil Evaluasi	Isu Strategis Pembangunan 2019 - 2023
Peningkatan Perkapita PDRB	6,60	5,81	Masih rentannya pertumbuhan ekonomi pada gejolak ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal pada upaya untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.	Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	53,21	54,05		
Tingkat Inflasi Bahan Pangan	5,58	5,16		
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,86	6,77	Rendahnya nilai tambah ( <i>value added</i> ) dan rantai nilai ( <i>value chain</i> ) produk pertanian	Pertanian
PDRB Sub Sektor Pertanian, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.056.075,00	2.241.500,00		
PDRB Sub Sektor Perikanan	744.441,00	823.190,00		
Hasil Evaluasi Kabupaten AKIP	B	BB	Belum optimalnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan <i>e government</i>	Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Penguatan <i>E-Government</i>
Hasil Evaluasi EKPPD terhadap LPPD	ST	ST		
Opini Pemeriksaan Hasil atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP		
Indeks Kepuasan Masyarakat	67,37	67,20		
Persentase Kemiskinan	Angka 5,10	5,40	Belum optimalnya pengurangan tingkat Kemiskinan	Kemiskinan
Persentase Pengurangan Pengangguran	4,29%	4,16%	Belum optimalnya pengurangan tingkat Pengangguran	Pengangguran
Peningkatan Kunjungan Wisatawan	4,58	5,50	Lemahnya Promosi dan <i>Event</i> Pariwisata	Pariwisata dan Kebudayaan
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,19	8,02	Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah	12,58	12,43		
Angka usia harapan hidup	70,56	70,56	Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan	Kesehatan

Indikator	Capaian s/d 2017	Target Akhir RPJMD	Hasil Evaluasi	Isu Strategis Pembangunan 2019 - 2023
Persentase balita gizi buruk	0,040	0,038		
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,22	4,20		
Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup	0,68	0,60		
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,18	77,75	Disparitas antar Kecamatan	Perekonomian Infrastruktur
Rasio jaringan irigasi	98,00	100,00		
Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten	91,88	92,26		
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,25	82,00		
Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	98,01	98,85		
Persentase rumah tinggal Bersanitasi	90,07	98,20		
Penilaian Adipura	75,92	75,50	Rendahnya Aksesibilitas dan Pelayanan Kebersihan	Lingkungan Hidup
Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	65,09	65,01	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
Ketaatan terhadap RTRW	100,00	100,00	Kurangnya terhadap RTRW	Ketaatan Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	32,38	32,38		

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tersebut harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah :**“Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera”**. Upaya-upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan, yaitu :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai penjabaran dari lima tahunan tahap ketiga (2016-2020) dan tahap keempat (2021-2025) RPJPD Kabupaten Bangka, maka arah pembangunan daerah merupakan kompilasi tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Bangka. Arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 difokuskan pada upaya transformasi ekonomi menuju pembangunan industri kluster melalui penguatan peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

Pada 2 (dua) tahun pertama, arah pembangunan dititikberatkan pada penguatan peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor unggulan daerah (*leading sectors*) dan peningkatan kawasan agropolitan secara berkelanjutan melalui usaha industri pengolahan produk dari sektor perkebunan dan perikanan melalui yang didukung secara kuat oleh sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sistem dan akses serta ketersediaan infrastruktur yang semakin baik. Pada 3 (tiga) tahun terakhir, arah pembangunan ditekankan pada terbangunnya transformasi ekonomi menuju pembangunan industri kluster berbasis potensi lokal dan budaya sosial lokal yang memiliki keunggulan kompetitif dan berfungsi sebagai industri pendukung (*supporting industries*) dalam tataran pembangunan industri daerah dan nasional.

Memperhatikan pemikiran di atas, berbagai peluang dan tantangan yang akan muncul dan bersifat sangat mendasar harus diantisipasi adalah berkaitan peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya untuk mendukung terwujudnya paradigma pembangunan kemandirian lokal yang menempatkan faktor manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan SDM harus mengutamakan pembentukan karakter akhlak mulia, berintegritas, berbudaya kearifan lokal melalui pemerataan fasilitas pendidikan. Peningkatan kualitas kesehatan SDM dan masyarakat harus lebih diperkuat melalui peningkatan pelayanan kesehatan secara prima, pola hidup sehat, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskinan dan kurang mampu. Fokus pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya strategis mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar daerah (*backwash effect*).

Untuk mewujudkan paradigma ini, birokrasi daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan sekaligus penyelenggara pelayanan publik juga perlu melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang bersih dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut didukung oleh penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dalam rangka mendorong kualitas dan jangkauan pembangunan yang lebih baik.

Disamping itu, visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan upaya untuk mewujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka penyelarasan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah nasional, RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 juga memperhatikan RPJMN 2020-2024 yang memiliki visi sebagai berikut : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 juga berupaya mendorong sinkronisasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 yang memiliki visi sebagai berikut **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

## 5.1. Visi

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 tidak dilakukan perubahan atas Visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019- 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Bangka dalam RPJMD tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

### **“BANGKA SETARA”**

Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

## 5.2. Misi

Sebagaimana Visi yang tidak berubah, pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 tidak dilakukan perubahan atas Misi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019- 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi “Bangka Setara”, maka diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- 4) Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- 5) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

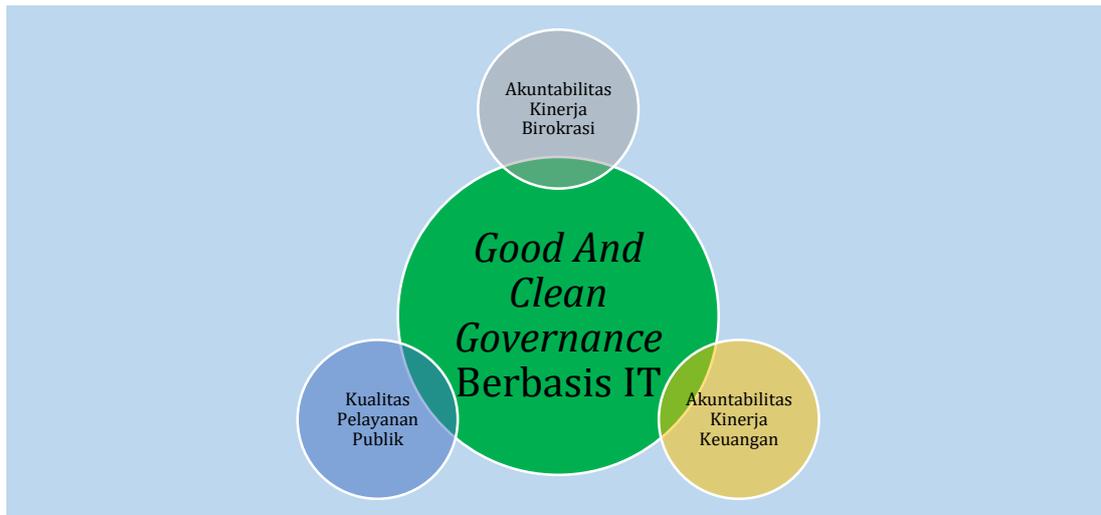
Dalam upaya penyamaan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai maka perlu dijabarkan dalam suatu kerangka berpikir perencanaan terintegrasi seperti dijelaskan di bawah ini.

### **1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi**

Persoalan kehidupan masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan yang semakin bervariasi sesuai tuntutan perubahan lingkungan harus mendapat pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat yang bermutu melalui tata kelola pemerintahan oleh aparatur yang profesional berlandaskan prinsip *good and clean governance* yang ditunjukkan kinerja birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai misi kesatu ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.1.

**Gambar 5.1**  
*Logframe*  
**Perencanaan**  
**Integratif Misi 1**



## **2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas**

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh semakin membaiknya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan menjadi faktor strategis dibarengi dengan peningkatan kesetaraan gender.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.2.

**Gambar 5.2**  
*Logframe*  
**Perencanaan**  
**Integratif Misi 2**

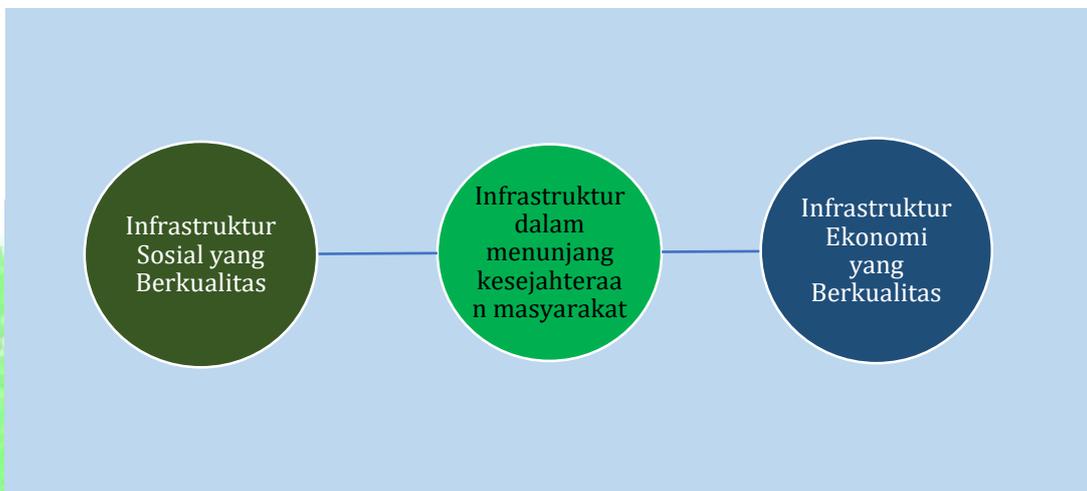


### 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah

Pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pengembangan potensi daerah dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.3.

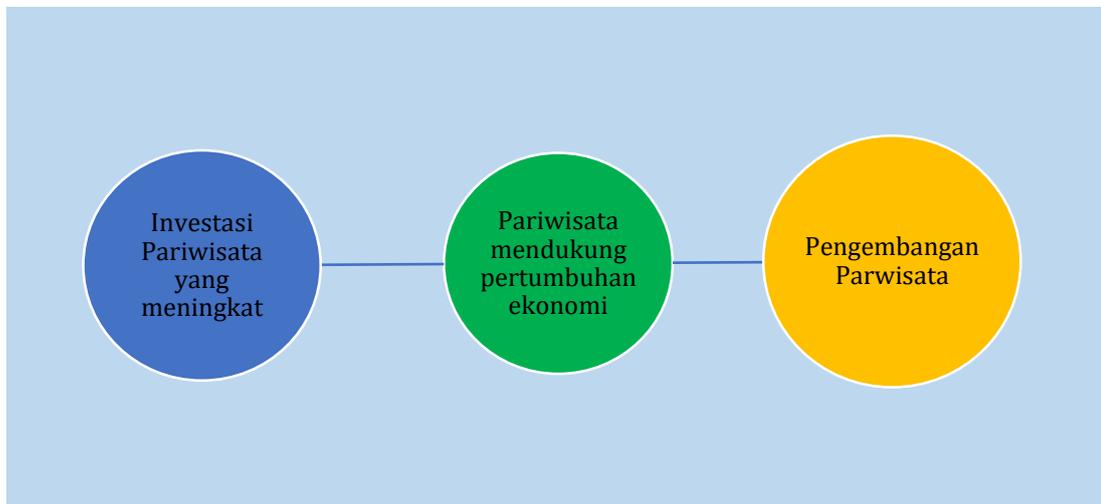
**Gambar 5.3**  
*Logframe*  
**Perencanaan**  
**Integratif Misi 3**



#### 4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.

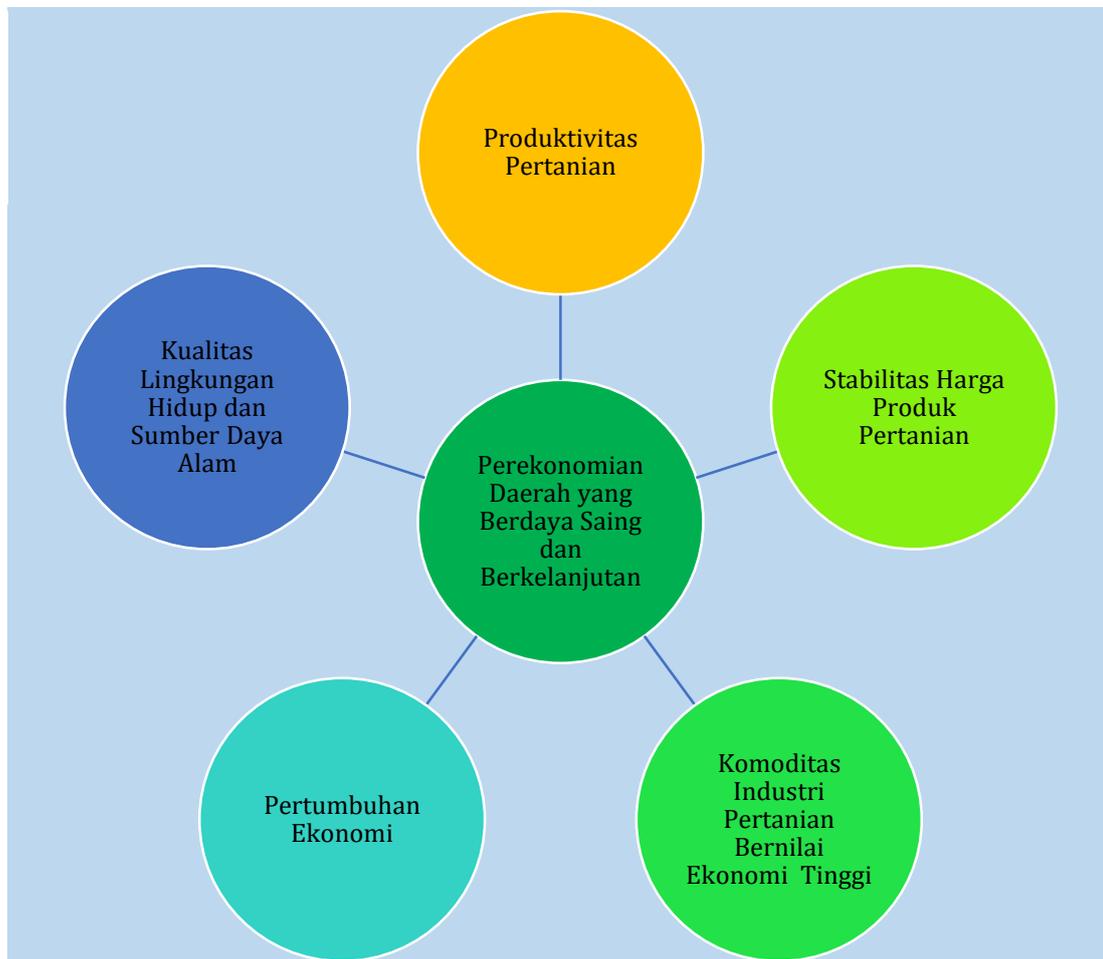
Sektor pariwisata dengan fungsi *multiplier effect*-nya merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Keberadaan destinasi pariwisata baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata hasil buatan manusia termasuk infrastruktur dan industri pariwisata pendukungnya yang terus dikembangkan secara berkelanjutan, serta ditetapkannya KEK Pariwisata Sungailiat, menjadi Kabupaten Bangka sebagai menjadi gerbang dan destinasi utama pariwisata berskala internasional bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke pulau Bangka. Untuk mencapai misi keempat ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.4.

**Gambar 5.4**  
*Logframe*  
Perencanaan  
Integratif Misi 4



## 5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

**Gambar 5.5**  
*Logframe*  
Perencanaan  
Integratif Misi 5



Potensi sumber daya alam yang melimpah baik yang tersimpan di dalam maupun di permukaan bumi serta di lautan dalam wilayah Kabupaten Bangka merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Penambahan nilai guna ekonomi tersebut diciptakan melalui pengembangan inovasi dan teknologi produksi komoditas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk dari industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan yang berdaya saing serta peningkatan investasi baik nasional maupun luar negeri secara berkelanjutan.

Untuk mencapai misi kelima ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 5.5.

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

### 5.3.1. Tujuan

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ini dilakukan penyesuaian terhadap tujuan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 sebagaimana yang nampak pada matriks tujuan dibawah ini.

Mengacu pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 beserta indikator kinerjanya dijelaskan pada Tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Matriks Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

Misi		Tujuan		Indikator Kinerja	
Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
<b>Misi 1:</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi</b>	Tidak mengalami perubahan	<b>Tujuan 1.1:</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	<b>Tujuan 1.1 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
<b>Misi 2:</b> <b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas</b>	Tidak mengalami perubahan	<b>Tujuan 2.1:</b> Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	<b>Tujuan 2.1 :</b> Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia
		<b>Tujuan 2.2:</b> Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Indeks Kesehatan Masyarakat	-
		<b>Tujuan 2.3:</b> Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	-	Indeks Pembangunan Gender	-

Misi		Tujuan			Indikator Kinerja	
Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
<b>Misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah</b>	<b>3:</b> Tidak mengalami perubahan	<b>Tujuan 3.1:</b> Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang proporsional	<b>Tujuan 3.1:</b> Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	:	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur
<b>Misi Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional</b>	<b>4:</b> Tidak mengalami perubahan	<b>Tujuan 4.1:</b> Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<b>Tujuan 4.1:</b> Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	:	<i>Spending of Money</i>	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
<b>Misi Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>	<b>5:</b> Tidak mengalami perubahan	<b>Tujuan 5.1:</b> Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Mendorong Perekonomian	<b>Tujuan 5.1:</b> Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	:	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
		<b>Tujuan 5.2:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	-	-	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-
		<b>Tujuan 5.3:</b> Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	-	-	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup	-

### 5.3.2. Sasaran

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ini dilakukan penyesuaian terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 sebagaimana yang nampak pada matriks sasaran dibawah ini.

Berangkat dari tujuan serta indikator kerjanya yang dikemukakan pada Tabel 5.1 di atas, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023

sebelum dan sesudah perubahan beserta indikator sasaran disajikan pada Tabel 5.2 di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Matriks Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

Sasaran		Indikator Sasaran			
Lama	Baru	Lama		Baru	
Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<b>Sasaran 1.1.1</b> : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten		
		Indeks SPBE	Indeks SPBE		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN		
		Hasil EKPPD terhadap LPPD	-		
Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	<b>Sasaran 1.1.2</b> : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-		
		Tingkat Kapabilitas APIP	-		
		Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya		
		Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	-		
Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	<b>Sasaran 1.1.3</b> : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-		
Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	<b>Sasaran 2.1.1</b> : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah		
		Angka Melek Huruf	-		
Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan terhadap Masyarakat	-	Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal A	-		
Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	<b>Sasaran 2.1.2</b> : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup		
		Angka Stunting	Angka Stunting		

Sasaran		Indikator Sasaran	
Lama	Baru	Lama	Baru
Sasaran 2.2.1 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	<b>Sasaran 2.1.3</b> : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i>
Sasaran 2.3.1 : Meningkatnya Kesetaraan Gender	<b>Sasaran 2.1.4</b> : Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.3.2 : Meningkatnya Perlindungan Anak	-	Prevalensi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Status Kabupaten Layak Anak Status Kabupaten Layak Pemuda
-	<b>Sasaran 2.1.5</b> : Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	-	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	<b>Sasaran 3.1.1</b> : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	Indeks Kualitas Infrastruktur
		Proporsi Panjang Jaringan jembatan dalam Kondisi Baik (%)	Indeks Pemerataan Infrastruktur
		Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	-
		Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	-
		Persentase Peningkatan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Baik	-
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	-	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	-
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	-
		Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	-

Sasaran		Indikator Sasaran			
Lama	Baru	Lama		Baru	
		Persentase Masyarakat yang terlayani Rumah Layak Huni		-	
		Persentase Penurunan Luasan Kumuh Kawasan		-	
Sasaran 4.1.1: Meningkatkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis <i>Sport Tourism</i> , Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	<b>Sasaran 4.1.1:</b> Meningkatkan Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)			<i>Spending of Money</i>
Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan Investasi di Bidang Pariwisata	-	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Total Investasi Daerah (%)		-	
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	<b>Sasaran 5.1.1 :</b> Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa	% Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB			Indeks PDRB
Sasaran 5.2.1 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	<b>Sasaran 5.1.2 :</b> Meningkatkan Pemerataan Pendapatan	Peningkatan PDRB Perkapita (%)			Indeks Gini
		Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)			
Sasaran 5.2.2 : Stabilitas Harga	-	Tingkat Inflasi Bahan Pangan (%)		-	
Sasaran 5.2.3 : Menurunnya Angka Kemiskinan	-	Persentase Angka Kemiskinan (%)		-	
		Angka Pengangguran Terbuka (%)		-	
Sasaran 5.2.4 : Meningkatkan Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	-	% Desa Swasembada		-	
Sasaran 5.3.1 : Meningkatkan Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	<b>Sasaran 5.1.3 :</b> Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Daerah	Kinerja Hidup	Indeks Lingkungan Daerah	Kualitas Hidup
		Ketaatan terhadap RTRW (%)		-	

	Sasaran		Indikator Sasaran			
	Lama	Baru	Lama		Baru	
Sasaran 5.3.2 : Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana	-		Indeks Bencana	Resiko	Indeks Bencana	Resiko

Selanjutnya keterkaitan antara visi, misi , tujuan dan indikator tujuan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 sebelum perubahan dapat dilihat pada tabel 5.3 sedangkan tabel 5.4 mendeskripsikan keterkaitan aspek-aspek dimaksud setelah dilakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023. Adapun keterkaitan antara keterkaitan visi, misi,tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebelum dan sesudah perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 diuraikan pada tabel 5.5 dan tabel 5.6.

**Tabel 5.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Kabupaten Bangka 2019-2023**

Visi : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2023)
					2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi	<b>Tujuan 1.1</b> : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB	
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	<b>Tujuan 2.1</b> : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,27	72,69	72,98	73,27	73,27	
3	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah	<b>Tujuan 3.1</b> : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	
4	Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional	<b>Tujuan 4.1</b> : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	3,67	6,85	8,21	8,56	10,12	10,12	
5	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	<b>Tujuan 5.1</b> : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	89,24	91,27	92,65	94,07	95,52	95,52	

**Tabel 5.4**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Kabupaten Bangka 2019-2023**

**Visi : Bangka Setara (Sejahtera dan Mulia)**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
						2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Tujuan 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	BB	BB	BB	BB	A	A
				Indeks SPBE	2,47	2,60	2,75	2,80	3,00	3,00
				Indeks Profesionalitas ASN	67,26	69,97	70,75	73,87	75,01	75,01
				Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,07	74,77	78,79	83,00	85,40	85,40

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)	
						2020	2021	2022	2023		
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	Tujuan 2.1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,23	8,24	8,71	8,89	9,04	9,04	
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,95	12,77	12,80	12,88	12,95	12,95	
				Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,99	71,01	71,15	71,28	71,44	71,44
				Angka Stunting (%)	8,90	4,35	4,15	3,45	0	0	
				Sasaran 2.1.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate	2,42	2,40	2,37	2,35	2,30	2,30
				Sasaran 2.1.4 : Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	88,49	88,50	88,73	88,96	89,13	89,13
				Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama	
				Status Kabupaten Layak Pemuda	n.a.	n.a.	Pratama	Pratama	Madya	Madya	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
						2020	2021	2022	2023	
			Sasaran 2.1.5 : Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.480	11.983	12.527	12.640	12.859	12.859
3	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah	Tujuan 3.1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	41,02	41,75	42,67	43,46	44,29	44,29
				Indeks Pemerataan Infrastruktur	71,14	73,46	73,97	74,73	75,43	75,43
4	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	Tujuan 4.1 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money</i>	13,20	15,80	20,00	22,00	25,00	25,00
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Tujuan 5.1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB	67,70	69,05	70,44	71,84	73,28	73,28
			Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	0,269	0,271	0,270	0,266	0,264	0,264

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
						2020	2021	2022	2023	
			Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,02	65,02	65,07	65,10	65,10
				Indeks Resiko Bencana	160,00	155,00	150,00	145,00	140,00	140,00

# BAB VI

## STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada Kekuatan (*Strength*), Kelemahaan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan tantangan atau ancaman (*threat*) secara bersama-sama. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Bangka. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) di Kabupaten Bangka, yang termasuk didalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan (*Strenght and Weakness*). Sedangkan dalam lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan (*uncontrollable*), yang meliputi peluang dan ancaman (*Opportunity dan thereath*).

### 6.1 Strategi Pembangunan Dearah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai

tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini.

<b>I N T E R N A L</b>	<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FUNGSI KEBIJAKAN DAN REGULASI</li> <li>2. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG SEMAKIN MEMBAIK</li> <li>3. TELAH MEMILIKI BERBAGAI MACAM SISTEM INFORMASI DAERAH YANG BAIK</li> <li>4. POLA KEPEMIMPINAN YANG VISIONER</li> <li>5. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG CUKUP MERATA</li> <li>6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG CUKUP BAIK</li> <li>7. PRODUKTIVITAS KOMODITI PERTANIAN YANG MEMBAIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CENDERUNG PRAGMATIS DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</li> <li>2. RENDAHNYA INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH</li> <li>3. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASIH PADA PEMENUHAN AKSES BELUM MENUJU KE PENINGKATAN KUALITAS</li> <li>4. PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASIH MINIM</li> <li>5. LEMAHNYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM PENDUKUNG PEREKONOMIAN KHUSUSNYA DI BIDANG PARIWISATA DAN PERTANIAN</li> <li>6. BELUM Maksimal DALAM PENCIPTAAN NILAI TAMBAH PRODUK PERTANIAN</li> <li>7. RENDAHNYA PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU</li> </ol>
<b>E K S T E R N A L</b>	<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POTENSI WISATA YANG BERAGAM</li> <li>2. MOMENTUM PENURUNAN TK.PENGANGGURAN TERBUKA</li> <li>3. BESARNYA UPIRA PEMERINTAH PUSAT DALAM REFORMASI BIROKRASI</li> <li>4. BANYAKNYA PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PUSAT YANG DITEMPATKAN DI DAERAH-DAERAH POTENSIAL YANG BERORIENTASI HASIL KHUSUSNYA PARIWISATA DAN PERTANIAN</li> <li>5. BANYAKNYA PELUANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF</li> <li>6. ARUS GLOBALISASI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</li> <li>7. KOMPOSISI PENDUDUK DENGAN USIA PRODUKTIF LEBIH BESAR DIBANDINGKAN USIA NON PRODUKTIF</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PANDEMI COVID 19</li> <li>2. KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN</li> <li>3. BELUM KUATNYA KARAKTER DAN PONDASI PEREKONOMIAN PERDESAAN</li> <li>4. LAJU INFLASI NASIONAL YANG CENDERUNGA FLUKTUATIF</li> <li>5. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG CENDERUNG MELAMBAT</li> <li>6. ANCAMAN KETERSEDIAAN BARANG DAN JASA DI TENGAH KONDISI LEMAHNYA PERKONOMIAN INDONESIA</li> <li>7. BELUM OPTIMALNYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK</li> </ol>

**Gambar 6.1 Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT**

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Bangka. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Penggunaan metode SWOT dalam Penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan</li> <li>2. Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan melalui UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Generasi yang handal melalui jaminan kesehatan yang komprehensif dan pengembangan pendidikan yang berorientasi pada potensi daerah</li> <li>2. Pengarusutamaan gender berbasis penguatan kelembagaan perempuan dalam peran serta aktif dalam pembangunan</li> <li>3. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan</li> </ol>
<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pro environment</li> <li>2. Penciptaan inklusivitas pemulihan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi covid 19 melalui pengembangan berbasis pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan melalui UMKM</li> </ol>

**Gambar 6.2**  
**Analisis SWOT dalam penetapan**  
**Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka adalah kepemimpinan visioner dan birokrasi yang solid yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sementara peluang paling besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka adalah kekayaan dan potensi wisata daerah yang sangat beragam serta produktivitas pertanian, sebagai lokomotif perekonomian daerah. *Proxy* Kontribusi Sektor pariwisata dalam perekonomian Bangka hanya mempunyai kontribusi rata-rata 8,79-9,55% pada tahun 2019. Sedangkan Industri Pengolahan yang mempunyai kontribusi paling besar dalam perekonomian daerah (22,30%) tumbuh rata-rata kurang dari 7,09%. Oleh sebab itu strategi yang ditetapkan adalah

mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan; dan Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan melalui UMKM. Institusionalisasi Inovasi diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mengangkat nama Bangka dalam konstelasi regional Sumatera, Nasional dan bahkan Internasional.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pariwisata. Pariwisata didesain menjadi “*Umbrella*” Investasi pemerintah dan swasta di Bangka, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Bangka. Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit

usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi. UMKM didesain sebagai sabuk pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menciptakan *integrated farming* dalam wadah ekonomi kreatif, yang mampu mengintegrasikan pertanian-pariwisata-UMKM. Termasuk didalamnya pengembangan wirausaha baru, standarisasi, sertifikasi, pengendalian, pengawasan produk dan peningkatan akses permodalan, merupakan bentuk nyata dari strategi ini.

Pandemi Covid 19 sangat memiliki dampak besar terhadap pembangunan Nasional khususnya pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2019-2023 mengalami perubahan signifikan. Pengusunan RPJMD dengan tematik sektor pariwisata dan beragam potensi pengembangan yang telah dilakukan dan trend pengembangan sektor pariwisata tersebut selalu mengalami peningkatan, maka dengan adanya Covid 19 ini sangat kuat menyentuh pelaku usaha sektor pariwisata. Kondisi hotel, restoran, objek wisata, dan industri-industri pendukung sektor pariwisata menjadi tertekan, yang dapat diperkirakan omzet atau pendapatan yang diperoleh pelaku usaha tersebut merosot, sehingga target penjualan tidak akan tercapai.

Berbagai regulasi mulai dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap orang melakukan social distancing sangat mempengaruhi perekonomian daerah.

Bayangkan seluruh sekolah dan Perguruan Tinggi meliburkan semua kegiatan belajar mengajarnya dan menggantikannya dengan proses belajar mengajar secara virtual yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang biasa melayani anak sekolah dan mahasiswa kehilangan pendapatannya. Kondisi tersebut baru dari satu komponen, belum lagi komponen-komponen lainnya, sehingga yang akan terjadi dalam kondisi pandemic Covid 19 ini adalah masyarakat akan kehilangan pekerjaannya yang berdampak kehilangan pendapatan dan berujung kepada peningkatan angka kemiskinan bagi daerah.

Di sektor primer ekonomi dampak dari covid 19 ini salah satunya adalah terhambatnya proses ekspor komoditi andalan Kabupaten Bangka yang juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan dari permasalahan diatas adalah juga berdampaknya terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu sehingga diperkirakan pembiayaan pembangunan akan berkurang tahun 2020, 2021 dan 2022.

Dengan latar belakang poin-poin di atas dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai tahun 2019 serta permasalahan yang ada maka perlu suatu rekonstruksi besar dalam dalam rangka pemulihan kembali segala sektor pasca pandemi covid 19. Oleh karena itu perlu disusun suatu strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2021-2023 ayang berfokus Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang disusun harus menjawab pertanyaan bagaimana prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat di fokuskan dalam rangka memacu pemulihan ekonomi yang menurun sebagai dampak dari COVID 19 dan juga mengembalikan kemandirian sosial masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID 19 dengan mendorong kebijakan lintas sektoral yang berfokus pada pemulihan industri (baik kecil, menengah dan besar), pariwisata dan investasi.

Selain itu Pandemi COVID 19 juga mengevaluasi pembangunan kesehatan kita yang selama ini cenderung bersifat business as usual, reformasi sistem kesehatan daerah yang lebih progresif diperlukan dalam pembangunan kedepan. Pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, jangkauan layanan kesehatan yang lebih luas dan baik menjadi tuntutan kedepannya.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangka untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Bangka masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utamanya hanya terletak pada komitmen pelaksanaan sistem pemerintahan dan manajemen kinerja yang semakin membaik. Pada Kondisi dibutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh 2 hal yaitu perencanaan yang akurat dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Data dan informasi yang valid merupakan basis penyusunan rencana pembangunan yang akurat, serta menjadi *early warning* untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah yang sedang dijalankan senantiasa tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Kompleksitas penyelenggaraan sistem pemerintahan saat ini, dapat disederhanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. TI merupakan instrument penting dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian dan pengawasan harus mampu menyediakan informasi yang *real-time* (cepat, akurat dan bisa

diakes kapanpun dibutuhkan) yang mampu memberikan gambaran hasil dan dampak pembangunan secara nyata.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara Meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pembiayaan pembangunan yang besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Bangka bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan; Membangun Generasi yang handal melalui jaminan kesehatan yang komprehensif dan pengembangan pendidikan yang berorientasi pada potensi daerah dan Pengarusutamaan gender berbasis penguatan kelembagaan perempuan dalam peran serta aktif dalam pembangunan.

Membangun generasi yang handal ini sejalan dengan concern Presiden dalam RPJMN dengan serius menaruh perhatian kepada pembangunan manusia. Di Bangka bentuk nyata dukungan terhadap masalah tersebut adalah dengan adanya peningkatan IPM yang cukup signifikan, dimana rata-rata lama sekolah berada diangka 8,23 dan angka harapan hidup 70,99 pada tahun 2019. Sementara untuk percepatan pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifitas antar wilayah (pusat-hinterland) dan penurunan kesenjangan (disparitas), serta infrastruktur strategis penunjang perekonomian. Mengingat *coverage* wilayah Bangka yang cukup luas, penetapan prioritas dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting. Kemudian tidak kalah pentingnya kita dalam pembangunan harus mendorong pengarusutamaan gender dalam setiap pembangunan di Kabupaten Bangka. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan

sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada *pro environment*; Penciptaan inklusivitas pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan melalui UMKM.

Melakukan dorongan ekonomi dengan membentuk kelompok-kelompok kewirausahaan yang diwadahi oleh UMKM penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas di perdesaan. Yang diharapkan mampu menjaga stabilitas Ekonomi dan sosial level mikro, kemudian untuk level makro penciptaan peluang investasi kepariwisataan melalui Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagai trigger pariwisata di Bangka dan penciptaan nilai tambah produk komoditi pertanian. Serta pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (*pro-environment*), agar kelestarian tetap terjaga dan kapasitas daya dukung dan daya tampung pembangunan masih dapat dinikmati anak cucu masyarakat Kabupaten Bangka.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”):

1. *Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan*
2. *Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata dan industrialisasi pertanian serta penumbuhan kewirausahaan melalui UMKM*
3. *Membangun Generasi yang handal melalui jaminan kesehatan yang komprehensif dan pengembangan pendidikan yang berorientasi pada potensi daerah*

4. *Pengarusutamaan gender berbasis penguatan kelembagaan perempuan dalam peran serta aktif dalam pembangunan*
5. *Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan*
6. *Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil*
7. *Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pro environment*

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

**Tabel 6.1**  
**Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi	1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level
		1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>
		1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Pemerintahan ❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada Hasil
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas	2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	❖ Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif Dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan Standar hidup Layak Masyarakat
		2.1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	
		2.1.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2.1.4 Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	
		2.1.5 Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah	3.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional	4.1 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4.1.1 Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata Dan Industrialisasi Pertanian Serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	5.1 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	5.1.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa 5.1.2 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan 5.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	❖ Melaksanakan Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pro Environment

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode RPJMD. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan

pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan :

**Tabel 6.2**  
**Fokus Strategi Aah Kebijakan 2021-**  
**2023**

SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
	2021	2022	2023
Sasaran: 1.1.1 1.1.2 1.1.3	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di		
	Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada		
Sasaran: 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif Dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat		
Sasaran: 2.1.5	Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan		
Sasaran: 3.1.1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan		
Sasaran: 4.1.1 5.1.1 5.1.2	Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata Dan Industrialisasi Pertanian Serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM		
Sasaran: 5.13	Melaksanakan Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pro Environment		

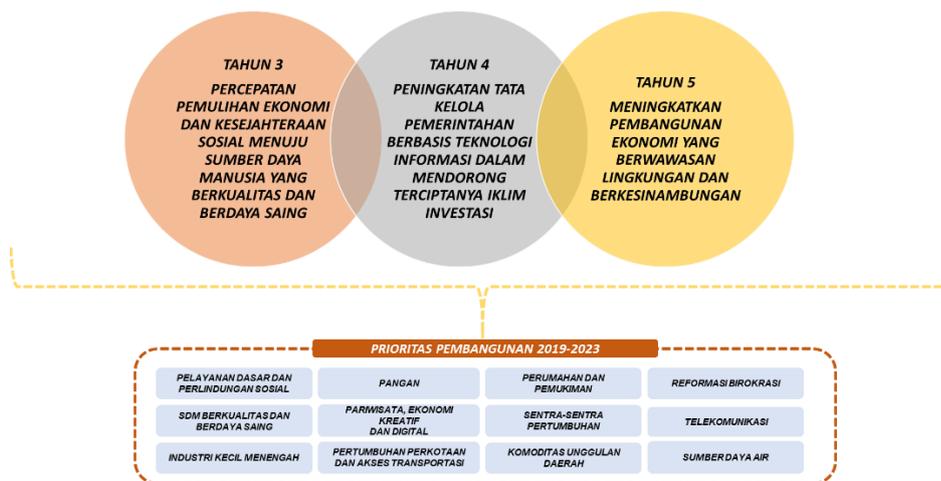
## 6.2 Tema dan Prioritas RPJMD 2019-2023

Tema Tahunan Pembangunan RPJMD merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan kebijakan yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Tema merasionalkan pencapaian visi dan misi pembangunan selama 5 tahun sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema Pembangunan selama lima tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 6.3**  
**Fokus/Tema Pembangunan 2019-**

Merujuk pada tema pembangunan diatas, maka prioritas pembangunan yang merupakan pengarusutamaan tema pembangunan ditetapkan sebagai berikut :



**Gambar 6.4**  
**Prioritas Pembangunan 2019-2023**

### 6.3 Arah Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akandilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya- upaya yang mengungkit kinerja masa depan

berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunandaerah, guna menunjang pencapaian Visidan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6.3**  
**Kerangka Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah 2019-2023**

<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
1	2	3
<p><b>1.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b></p> <p><b>1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel</b></p> <p><b>1.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan</li> <li>❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada Hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat</li> <li>❖ Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasidan penegakan peraturan daerah</li> <li>❖ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi</li> <li>❖ Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yangbersih dan efisien</li> <li>❖ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalammonitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang berorientasi padahasil</li> <li>❖ Mengembangkan sistem monitoring berbasis ITterintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerja pembangunan daerah</li> <li>❖ Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desadalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan danpembangunan</li> </ul>
<p><b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membangun Generasi Yang Handal Melalui Jaminan Kesehatan Yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruhmasyarakat</li> </ul>

<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
1	2	3
<p><b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b></p> <p><b>Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b></p> <p><b>Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat</b></p>	<p>Komprehensif Dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat</li> <li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan</li> <li>❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembang kesehatan</li> </ul>
<p><b>Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh pembangunan perempuan</li> <li>❖ Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial</li> <li>❖ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</li> </ul>
<p><b>3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan</li> <li>❖ Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership.</li> <li>❖ sistem jaringan infrastruktur yang mendukung struktur ruang</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas kumuh</li> <li>❖ Penciptaan sanitasi yang layak bagi masyarakat</li> </ul>
<p><b>Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata Dan Industrialisasi Pertanian Serta Penumbuhan Kewirausahaan Melalui UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif</li> <li>❖ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian</li> <li>❖ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif</li> </ul>

<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
1	2	3
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengembangan KEK Pariwisata</li> <li>❖ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian</li> <li>❖ Pengintegrasian perencanaan penganggaran daerah dan desa dalam menekan angka kemiskinan</li> <li>❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian</li> <li>❖ Pemberian insentif kemudahan investasi dalam mendorong industrialisasi pertanian</li> <li>❖ Pemanfaatan E-commerce dalam efisiensi tata niaga produk pertanian</li> <li>❖ Peningkatan produktivitas komoditi unggulan pertanian</li> <li>❖ Optimalisasi pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan sinergis</li> </ul>
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Melaksanakan Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pro Environment	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan</li> <li>❖ Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan</li> <li>❖ Peningkatan kesiagaan bencana dari aspek pra, pada saat dan pasca bencana</li> </ul>

#### 6.4 Arah Kebijakan

Setelah arah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan startegis Bupati terpilih dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD. Suatu program prioritas pembangunan

daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus menjawab pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, atau ke dalam Kebijakan Umum maupun Strategi.

## **6.5. Program Spesifik Unggulan Daerah**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, dirumuskan program spesifik unggulan daerah. Program ini menjadi diarahkan untuk memecahkan persoalan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian indikator-indikator pembanguana makro dan mikro. Berdasarkan catatan evaluasi terhadap RPJMD tahun 2014-2018 terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing sumberdaya manusia, kesenjangan antar wilayah kecamatan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa permasalahan mendasar tersebut diintervensi kembali dengan kebijakan dan program unggulan spesifik daerah pada dokumen perencanaan RPJMD Perubahan tahun 2019-2023. Beberapa program unggulan spesifik daerah selanjutnya akan dituangkan dalam RKPD tahunan Kabupaten Bangka. Pandemi COVID-19 diproyeksikan akan berlangsung selama 2 Tahun, Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka merumuskan beberapa Program Unggulan di Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebagai berikut :

### **6.5.1. Program Spesifik Unggulan Daerah 2020**

Kebijakan pendanaan daerah tahun 2020 tidak terlepas dari upaya untuk percepatan dan perkuatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat. Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka masih menghadapi permasalahan mendasar antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses tenaga kerja, kesenjangan antar wilayah kecamatan dan lambatnya implementasi reformasi pelayanan publik. Belanja daerah tahun 2020 antara lain diarahkan untuk penyelesaian permasalahan

pembangunan makro serta pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Upaya ini untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik daerah, serta membiayai program dan kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2020. Selain itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program yang tertuang RPJMD 2019-2023 Kabupaten Bangka serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, perlu penentuan program spesifik unggulan daerah yang didasarkan beberapa pertimbangan:

1. Percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkaka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023.
2. Penyesuaian terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan karakteristik daerah dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bangka.
3. Penyesuaian terhadap potensi sumber daya alam dan geopolitik pembangunan daerah untuk mendukung pengembangan potensi sektor unggulan daerah
4. Permasalahan mendasar hasil identifikasi terhadap capaian-capaian indikator makro dan indikator mikro pembangunan yang belum tercapai dan telah dilaksanakan pada tahun 2019.
5. Perubahan kondisi sosial politik dan ekonomi serta tuntutan aspirasi masyarakat yang memerlukan adaptasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

Kondisi keterbatasan pembiayaan pembangunan yang memerlukan Pemerintah Kabupaten Bangka merumuskan strategi jitu melalui program unggulan untuk percepatan tujuan pembangunan daerah.

Berikut rincian program spesifik unggulan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2020 yaitu:

**Tabel 6.4**  
**Program Unggulan Spesifik Daerah**

<b>Aspek</b>	<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>Program Unggulan Terkait Aspek (harus tertuang dalam RPJMD dan RKPD)</b>	<b>Kebijakan Sensitif Covid (BAB 3)</b>	<b>Dinas Pelaksana</b>	<b>Lokasi Intervensi</b>
Pertumbuhan ekonomi	2020	Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Pangan dan Pertanian. Dinas Sosial. Dinas Perikanan	8 Kecamatan (Sungailiat, Pemali, Belinyu, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Mendo Barat, Merawang) dan 62 Desa
	2020	Program Kredit Mikro tanpa Bunga Tanpa Agunan Lunak Tanpa Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Stimulus Bagi Masyarakat yang rentan secara ekonomi</li> </ul>	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8 Kecamatan (Sungailiat, Pemali, Belinyu, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Mendo Barat, Merawang) dan 62 Desa
Tingkat kemiskinan	2020	Program Perlindungan Sosial Masyarakat Terdampak Pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Dinas Sosial dan 8 Kecamatan	8 Kecamatan (Sungailiat, Pemali, Belinyu, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Mendo Barat, Merawang) dan 62 Desa

Aspek	Tahun Pelaksanaan	Program Unggulan Terkait Aspek (harus tertuang dalam RPJMD dan RKPD)	Kebijakan Sensitif Covid (BAB 3)	Dinas Pelaksana	Lokasi Intervensi
Tingkat Pengangguran	2020	Program Pembangunan Daerah Berbasis Padat Karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8 Kecamatan (Sungailiat, Pemali, Belinyu, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Mendo Barat, Merawang) dan 62 Desa
Ketimpangan pendapatan dan Wilayah	2020	Program Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Statistik	Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu
Pembangunan Manusia	2020	Peningkatan Instalasi Bedah Sentral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah	Kecamatan Sungailiat
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Mendo Barat
Pelayanan Publik	2020	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Yang Berbasis Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Kecamatan Sungailiat

Aspek	Tahun Pelaksanaan	Program Unggulan Terkait Aspek (harus tertuang dalam RPJMD dan RKPD)	Kebijakan Sensitif Covid (BAB 3)	Dinas Pelaksana	Lokasi Intervensi
		Program Bebas Rapid Test bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8 Kecamatan, 62 Desa
		Program Kerjasama Perguruan Tinggi		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Mendo Barat
		Program Lisensi dan Sertifikasi IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka
		Program Relaksasi Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Menjaga Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Stimulus Jasa Keuangan Bagi UMKM</li> </ul>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu
		Program Pencegahan Penyebaran COVID 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refocusing APBD</li> <li>• Pengendalian Penyebaran Covid19</li> </ul>	Dinas Kesehatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 8 Kecamatan	Kecamatan Sungailiat

### 6.5.2. Program Spesifik Unggulan Daerah 2021

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID 19, Pemkab Bangka memformulasikan beberapa kebijakan strategis dalam **frame Program sensitif** yakni :

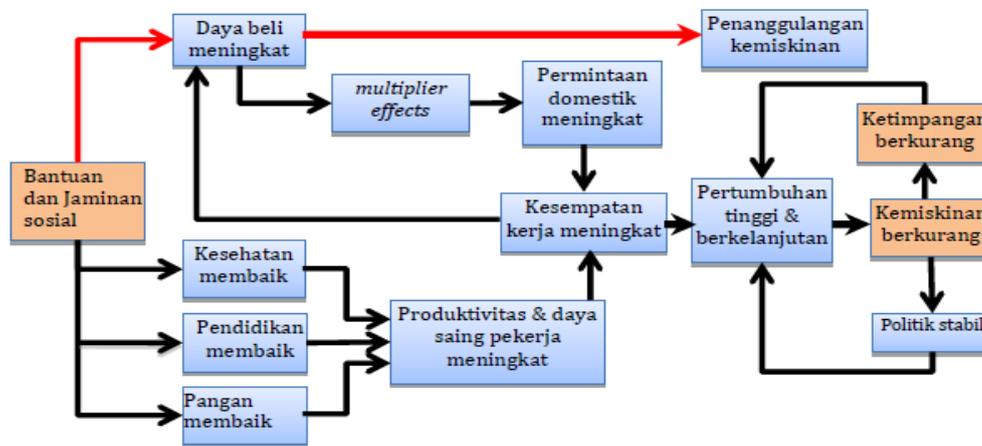
**Gambar 6.5.**  
**Frame Kebijakan Sensitif Pasca COVID 19**



- 1. Program Penguatan sektor kesehatan.** Penguatan sektor kesehatan ini sangat urgen untuk dilaksanakan menimbang hingga saat ini vaksin COVID 19 belum ditemukan dan masih dalam proses uji coba. Kondisi ini diperkuat dengan penjelasan *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia yang memprediksi bahwa vaksin COVID 19 paling lambat ditemukan dan diproduksi secara massal pada bulan Agustus tahun 2021 atau 18 bulan. Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui : i) peningkatan perilaku sehat dan *physical* dan *social distancing* dengan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh lini masyarakat dari perkotaan sampai ke perdesaan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media; ii) pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan lab); dan iii) pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD), alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk penanganan pasien.
- 2. Program Penguatan Sistem Jaringan Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi.** COVID 19 secara dalam waktu relatif singkat ternyata telah menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi

masyarakat dengan sangat cepat dan dalam. Kebijakan Sistem Jaring Pengaman Sosial ini merupakan salah satu bentuk transformasi struktural akibat masifnya perubahan tatanan yang sedang terjadi saat ini. Sistem yang dibangun tersebut merupakan kompilasi dari berbagai macam bentuk varian produk kesejahteraan sosial baik dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan sebagainya, pemerintah daerah berupa SEMARI (Sedekah Lima Ratus Sehari), Bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun elemen pembangunan diluar pemerintah (BAZ, CSR maupun bantuan masyarakat/komunitas dan individu) yang dilakukan dengan pendekatan *“the-one stop integrated”* yang dikoordinir langsung oleh Bupati melalui Kelompok Kerja (Pokja) sehingga nantinya setiap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dapat betul - betul tepat sasaran dan tepat guna dengan berbasis web dan data yang valid dan *reliable*.

**Gambar 6.6.**  
**Skenario Dampak Bantuan dan Jaminan Sosial Pasca COVID 19**



Sumber : Bappenas, 2014

### 3. Program pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19.

Pemulihan sektor usaha yang terdampak akan dilaksanakan melalui pemberian pinjaman daerah dengan mekanisme tanpa bunga dan angsuran terutama diperuntukkan bagi sektor usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu

sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerak turunnya perekonomian Kabupaten. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Daerah. Menurut data Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 81,99% dari jumlah pelaku usaha di Bangka. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak ±207 ribu pekerja atau 77% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah (PDRB) sebesar 60-70% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar. Dari data di atas, Kabupaten Bangka mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Pemberian Akses modal tanpa agunan dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh Pemkab Bangka. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan meminimalisir terjadinya kredit macet (*Non Performing Loan*) atas pinjaman daerah, baik aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan dan efektivitas pengendalian intern maka dalam kerjasama tersebut diatur mengenai prosedur pemberian kredit sampai dengan penagihan pinjaman akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank sedangkan Pemda hanya memfasilitasi data informasi terkait status perizinan usaha, omzet, produk dan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan IKM.

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023**

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah penanggung jawab
				2021		2022		2023		kondisi pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
I	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi				66.151.354.171		65.858.886.104		64.710.391.004		196.720.631.279	BUPATI
I.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	66.151.354.171	BB	65.858.886.104	BB	64.710.391.004	BB	196.720.631.279	BUPATI
I.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	BB	BB	23.152.973.960	BB	23.050.610.136	A	22.648.636.851	A	68.852.220.948	BUPATI
		Indeks SPBE	2,47	2,75		2,80		3,00		3,00		
		Indeks Profesionalitas ASN	67,26	70,75		73,87		75,01		75,01		
	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	% Keselarasan Perencanaan	89,00	90,00	2.315.297.396	91,00	2.305.061.014	92,00	2.264.863.685	92,00	6.885.222.095	BAPPEDA
		% Capaian Sasaran Daerah yang Sesuai Target RPJMD	82,00	84,00		86,00		88,00		88,00		BAPPEDA
		% Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dimanfaatkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA
		% Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA
	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN dengan Nilai "Baik" pada P2KP	98,77	99,86	5.788.243.490	99,86	5.762.652.534	99,89	5.662.159.213	99,89	17.213.055.237	BKPSDMD
		Indeks Kepuasan ASN	90,00	90,00		95,00		97,00		97,00		BKPSDMD
	Program Peningkatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi	5,00	5,00	4.630.594.792	10,00	4.610.122.027	15,00	4.529.727.370	15,00	13.770.444.190	DINKOMINFOTIK
	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip Daerah	Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal Daerah (%/Kategori)	56,72	69,00	694.589.219	73,00	691.518.304	76,00	679.459.106	76,00	2.065.566.628	DKP
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka (%/Kategori)	40,00	80,00	463.059.479	90,00	461.012.203	90,00	452.972.737	90,00	1.377.044.419	DKP
	Program Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Batas Adm. Wilayah yang diselesaikan	77,78	85,18	9.261.189.584	92,85	9.220.244.055	100,00	9.059.454.741	100,00	27.540.888.379	SETDA
		Nilai Indeks EKPPD	3,1147	3,275		3,2855		3,2911		3,2911		SETDA
		% Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dan Hibah Tepat Guna	94,55	95,65		95,76		95,83		95,83		SETDA
		Nilai indeks RB Komponen Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	0,84	2,50		3,00		3,50		3,50		SETDA
		Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik	94,12	100,00		100,00		100,00		100,00		SETDA
		% Hasil Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang di tindaklanjuti	62,50	60,00		60,00		60,00		60,00		SETDA
		Level Kematangan UKPBJ	level 3	level 3		level 3		level 3		level 3		SETDA
		Nilai Indeks Komp. RB Area Penataan & Penguatan Organisasi	1,40	4,33		5,16		6,00		6,00		SETDA
		Nilai Indeks Komp RB Area Tata Laksana	2,47	3,82		4,26		4,7		4,7		SETDA
		Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	5	5		7		10		10		SETDA

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah penanggung jawab
				2021		2022		2023		kondisi pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
I.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	13.230.270.834	WTP	16.464.721.526	WTP	16.177.597.751	WTP	45.872.590.111	BUPATI
	Program Peningkatan Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	level 3	level 3	5.292.108.334	level 3	6.585.888.610	level 3	6.471.039.100	level 3	18.349.036.044	INSPEKTORAT
		Tingkat Maturitas SPIP	level 3	level 3		level 3		level 3		level 3		INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Cakupan Peningkatan Indeks Akuntabilitas Keuangan Dan Aset Daerah	90,00	90,22	7.938.162.501	100,00	9.878.832.916	100,00	9.706.558.651	100,00	27.523.554.067	BPKAD
		Persentase Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	7	7,13		7,13		7,15		7,15		BPKAD
I.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,07	78,79	29.768.109.377	83,00	32.929.443.052	85,40	32.355.195.502	85,40	95.052.747.931	BUPATI
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,00	83,00	11.907.243.751	85,00	13.171.777.221	85,00	12.942.078.201	85,00	38.021.099.172	DINDUKPENCAPIL
		% Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,50	90,00		90,00		90,00		90,00		DINDUKPENCAPIL
		Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINPMP2KUKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	74,59	77,42		78,8		80,24		80,24		DINHUB
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan	14	13		7,22		4		4		SATPOLPP
	Program peningkatan Kualitas Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD Yang terselesaikan Tepat Waktu	75,00	77,00	17.860.865.626	78,50	19.757.665.831	79,00	19.413.117.301	79,00	57.031.648.758	SETWAN
II	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas				132.302.708.342		131.717.772.208		129.420.782.007		393.441.262.557	BUPATI
II.1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,69	132.302.708.342	72,98	131.717.772.208	73,27	129.420.782.007	73,27	393.441.262.557	BUPATI
II.1.1	Meningkatnya Kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,71	29.106.595.835	8,89	26.343.554.442	9,04	25.884.156.401	9,04	81.334.306.678	BUPATI
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	12,80		12,88		12,95		12,95		BUPATI
	Program Peningkatan Akses Pendidikan	Indeks Akses Pendidikan			18.919.287.293		17.123.310.387		16.824.701.661		52.867.299.341	DINDIKPORA
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Indeks Mutu Pendidikan			10.187.308.542		9.220.244.055		9.059.454.741		28.467.007.337	DINDIKPORA
II.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,99	71,15	66.151.354.171	71,28	65.858.886.104	71,44	64.710.391.004	71,44	196.720.631.279	BUPATI
		Angka Stunting	8,90	4,15		3,45		0		0		BUPATI
	Program Peningkatan Kebugaran dan Gizi Masyarakat	Indeks Kualitas Olahraga Daerah			16.537.838.543		16.464.721.526		16.177.597.751		49.180.157.820	DINDIKPORA
		% Ketersediaan Protein										DINPANPERTAN
		% Ketersediaan Energi										DINPANPERTAN
		Skor Pola Pangan Harapan	86,00	86,00		86,00		86,00		86,00		DINPANPERTAN
	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu			49.613.515.628		49.394.164.578		48.532.793.253		147.540.473.459	DINKES
		Angka Kematian Bayi										DINKES
		Prevalensi Gizi Buruk										DINKES
		Angka Kesakitan (Morbiditas)										DINKES
		Indeks Kepuasan Masyarakat										DINKES

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan/ Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah penanggung jawab
				2021		2022		2023		kondisi pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
II.1.3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate	2,42	2,40	1.323.027.083	2,37	1.317.177.722	2,30	1.294.207.820	2,30	3.934.412.626	BUPATI
	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	mCPR Unmeet Need			1.323.027.083		1.317.177.722		1.294.207.820		3.934.412.626	
II.1.4	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	88,49	88,73	2.646.054.167	88,96	2.634.355.444	89,13	2.588.415.640	89,13	7.868.825.251	BUPATI
		Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya		Madya		Utama		Utama		BUPATI
		Status Kabupaten Layak Pemuda	n.a	Pratama		Pratama		Madya		Madya		BUPATI
	Program Peningkatan Pembangunan Gender, Pemuda daerah dan anak	Indeks Kualitas Pemuda Daerah ASFR15-19th Persentase Baduta Stunting RATIO KDRT Anugerah Prahita Ekapraya Tk. Madya %Peningkatan Penilaian Indikator Kla			2.646.054.167		2.634.355.444		2.588.415.640		7.868.825.251	DINDIKPORA DINP2KB DINP2KB DINP2KB DINP2KB DINP2KB
II.1.5	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.480	12.527	33.075.677.086	12.640	32.929.443.052	12.859	32.355.195.502	12.859	98.360.315.639	BUPATI
	Program Peningkatan Kualitas Ketenaga kerjaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah Persentase PMKS Yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial			33.075.677.086		32.929.443.052		32.355.195.502		98.360.315.639	DINAKERPERINDAG DINSOS
III	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah				101.432.076.396		100.983.625.359		99.222.599.539		301.638.301.294	BUPATI
III.1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	4,5	4,6	101.432.076.396	4,7	100.983.625.359	4,8	99.222.599.539	4,8	301.638.301.294	BUPATI
III.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur Indeks Pemerataan Infrastruktur	41,02 71,14	42,67 73,97	101.432.076.396	43,46 74,73	100.983.625.359	44,29 75,43	99.222.599.539	44,29 75,43	301.638.301.294	BUPATI
	Program Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Insfrastruktur Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik Persentase RT Yang Menggunakan Air Bersih Persentase RT Yang Memiliki Akses Sanitasi Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	74,31 66,85 98,65 94,57 100,00 99,19	77,42 67,56 99,25 98,80 100,00 99,71	101.432.076.396	78,80 68,00 99,50 99,50 100,00		80,24 68,00 100,00 100,00 100,00		68,00 100,00 100,00 100,00		DINPUPR DINPUPR DINPUPR DINPUPR DINPERKPP DINPERKPP DINHUB
IV	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata berskala Internasional				22.050.451.390		21.952.962.035		21.570.130.335		65.573.543.760	BUPATI
IV.1	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	3,67	8,21	22.050.451.390	8,56	21.952.962.035	10,12	21.570.130.335	10,12	65.573.543.760	BUPATI

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan/ Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah penanggung jawab
				2021		2022		2023		kondisi pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
IV.1.1	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan wisatawan	Spending Of Money	13,20	20,00	22.050.451.390	22,00	21.952.962.035	25,00	21.570.130.335	25,00	65.573.543.760	BUPATI
	Program Peningkatan Kualitas Wisata Daerah	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan		4,74	22.050.451.390	5	21.952.962.035	5	21.570.130.335	5	65.573.543.760	DINPARBUD
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan		2,46 hari		2,5 hari		2,64 hari		2,64 Hari		DINPARBUD
		Indeks Pelestarian Budaya Daerah	57,26	70,43		74,59		83,04		83,04		DINPARBUD
		Persentase Jalan Wisata Dalam Kondisi Baik	10,11	15,55		17,77		25,86		30,71		DINPUPR
		Persentase Insfrastruktur Sumber Daya Air Wisata Dalam Kondisi Baik	45,77	51,67		55,44		59,77		59,77		DINPUPR
V	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan				119.072.437.508		118.545.994.987		116.478.703.807		354.097.136.302	BUPATI
V.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	89,24	92,65	119.072.437.508	94,07	118.545.994.987	95,52	116.478.703.807	95,52	354.097.136.302	BUPATI
V.1.1	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB	67,70	70,44	47.628.975.003	71,84	47.418.397.995	73,28	46.591.481.523	73,28	141.638.854.521	BUPATI
	Program Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi Unggulan	% Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,25	1,35	44.294.946.753	1,45	44.099.110.135	1,55	43.330.077.816	1,55	131.724.134.704	DINPERKAN
		% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,65	2,7		2,75		2,8		2,8		DINPERKAN
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura										DINPANPERTAN
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan										DINPANPERTAN
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan										DINPANPERTAN
		% Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	22,50	22,60		22,62		22,64		22,64		DINAKERPERINDAG
		% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,00	14,32		14,51		14,68		14,68		DINAKERPERINDAG
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Sehat	11,56	15,47	952.579.500	16,15	948.367.960	16,57	931.829.630	16,57	2.832.777.090	DINPMP2KUKM
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	31,77	34,67		41,56		41,56		41,56		DINPMP2KUKM
	Program Peningkatan Investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi Daerah	50,00	75,00	2.381.448.750	77,00	2.370.919.900	79,00	2.329.574.076	79,00	7.081.942.726	DINPMP2KUKM
V.1.2	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	0,269	0,270	23.814.487.502	0,266	23.709.198.997	0,264	23.295.740.761	0,264	70.819.427.260	BUPATI
	Program Pengembangan Pemerataan Pembangunan Desa	Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang (PERMENDAGRI 81/2015)	n,a	56,45	23.814.487.502	61,29	23.709.198.997	72,58	23.295.740.761	72,58	70.819.427.260	DINPEMDES/KECAMATAN
V.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,02	47.628.975.003	65,07	47.418.397.995	65,10	46.591.481.523	65,10	141.638.854.521	BUPATI
		Indeks Risiko Bencana	160,00	150,00		145,00		140,00		140,00		BUPATI
	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang	100,00	100,00	28.577.385.002	100,00	28.451.038.797	100,00	27.954.888.914	100,00	84.983.312.712	DINPUPR
		% Lingkungan yang dikelola	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINLH
		% Pemrakarya yang mentaati aturan lingkungan hidup	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		DINLH
		% Pengelolaan Sampah	97,00	98,00		99,00		100,00		100,00		DINLH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah penanggung jawab
				2021		2022		2023		kondisi pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	100	100	19.051.590.001	100	18.967.359.198	100	18.636.592.609	100	56.655.541.808	SATPOLPP
		Indeks Risiko Bencana	160	150		145		140		140		BPBD
<b>Supporting Program</b>					<b>576.130.652.273</b>		<b>579.011.305.534</b>		<b>584.801.418.590</b>		<b>1.739.943.376.397</b>	
<b>Total pagu Teknis</b>					<b>441.009.027.807</b>		<b>439.059.240.693</b>		<b>431.402.606.691</b>		<b>1.311.470.875.191</b>	
<b>Total pagu RPJMD</b>					<b>1.017.139.680.080</b>		<b>1.018.070.546.228</b>		<b>1.016.204.025.281</b>		<b>3.051.414.251.588</b>	

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Kerangka Pendanaan Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023 berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Bangka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas struktur pendapatan, struktur belanja dan struktur pembiayaan daerah, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Rencana pendanaan pada RPJMD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk pembangunan tahunan baik dalam RKPD maupun KUA.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah itu meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Diperlukan analisis secara komprehensif untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah melalui analisis pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Didalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 ini analisis kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal terdiri dari belanja

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Transfer diberikan dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan daerah dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memprioritaskan untuk pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1.	Pendapatan	1.232.355.156	1.235.130.671	1.238.468.239
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	34.262.886	41.875.092	38.851.251
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.266.618.042</b>	<b>1.277.005.763</b>	<b>1.277.319.490</b>
	Dikurangi :			
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	634.870.884	636.014.429	635.270.803
	Belanja Tidak Langsung	632.870.884	636.014.429	635.270.803
	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000	0	0
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Daerah</b>	<b>631.747.158</b>	<b>640.991.335</b>	<b>642.048.687</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangka 2019

## 7. 2. Program Perangkat Daerah

Hal mendasar yang melatar belakangi Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini merubah secara signifikan

nomenklatur program perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program Perangkat Daerah ini dikelompokkan berdasarkan:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
3. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Urusan pemerintah pilihan
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan
7. Unsur pengawasan unsur pemerintahan
8. Unsur kewilayahan
9. Unsur pemerintahan umum, dan
10. Unsur kekhususan

#### **7.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Merupakan program penunjang yang bersifat rutin dan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

#### **7.2.2. Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Program prioritas untuk urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup 6 (enam) urusan sebagai berikut:

##### **7.2.2.1. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** yang mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum

- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### **7.2.2.2. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kesehatan ini diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** mencakup 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

#### **7.2.2.3. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 4) Program Pengembangan Permukiman
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

#### **7.2.2.4. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 4) Program Kawasan Permukiman

#### **7.2.2.5. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 3) Program Penanggulangan Bencana (Perangkat Daerah Pengampuh Sub Bidang Kebencanaan)

#### **7.2.2.6. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Sosial**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Sosial diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

### **7.2.3. Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Program prioritas untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup 18 (delapan belas) urusan sebagai berikut:

#### **7.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

#### **7.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** mencakup 6 (enam) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

#### **7.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pangan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** mencakup 3 (tiga) program yaitu:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

#### **7.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** melalui pelaksanaan 4 (empat) Program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Izin Lokasi
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 4) Program Penatagunaan Tanah

#### **7.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** mencakup 7 (tujuh) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7) Program Pengelolaan Persampahan

### **7.2.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencakup 2 (dua) program yaitu:

- 1) Program Pencatatan Sipil
- 2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### **7.2.3.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** mencakup 3 (tiga) program yaitu:

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

### **7.2.3.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melalui penyelenggaraan 3 (tiga) program yaitu:

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

### 7.2.3.9. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perhubungan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** mencakup 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

### 7.2.3.10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik** mencakup 2 (dua) program yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

### 7.2.3.11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** mencakup 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5) Program Pengembangan UMKM

### 7.2.3.12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** mencakup 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### **7.2.3.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** mencakup 2 (dua) program yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

#### **7.2.3.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Statistik diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** mencakup 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

#### **7.2.3.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Persandian diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** mencakup 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

#### **7.2.3.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

### 7.2.3.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perpustakaan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** mencakup 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan

### 7.2.3.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kearsipan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** mencakup 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Arsip

## 7.2.4. Program Urusan Pemerintahan Pilihan

Program prioritas untuk urusan Pemerintahan Pilihan mencakup 5 (lima) urusan sebagai berikut:

### 7.2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** mencakup 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

### 7.2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### **7.2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** mencakup 6 (enam) program sebagai berikut:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 6) Program Penyuluhan Pertanian

#### **7.2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

#### **7.2.4.5. Urusan Pemerintahan Bidang Industri**

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Industri diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Industri** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian izin Usaha Industri kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

#### **7.2.5. Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah mencakup 2 (dua) urusan yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

### 1. Sekretariat Daerah

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah** melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan

### 2. Sekretariat DPRD

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD** melaksanakan 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

### 7.2.6. Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah mencakup 5 (lima) urusan yaitu urusan perencanaan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan pendidikan dan pelatihan, dan urusan penelitian dan pengembangan.

#### 1. Urusan Perencanaan

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan** mencakup 1 (satu) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### 2. Urusan Keuangan

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan** mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

### 3. **Kepegawaian**

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian** mencakup 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Kepegawaian Daerah

### 4. **Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan** mencakup 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

### 5. **Urusan Penelitian dan Pengembangan**

**Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan** mencakup 1 (satu) program, yaitu:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### 7.2.7. **Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan**

Unsur pengawasan unsur pemerintahan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah** mencakup pelaksanaan 2 (dua) program, yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

#### 7.2.8. **Unsur Kewilayahan**

Unsur Kewilayahan diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan** mencakup 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 7.2.9. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh **Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik** mencakup 5 (lima) pelaksanaan program, yaitu:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

### 7.2.10. Unsur Kekhususan

Pemerintah Kabupaten Bangka tidak melaksanakan program untuk pelaksanaan unsur kekhususan.

## 7.3. Dukungan Anggaran Terhadap Rencana Program Perangkat Daerah

Seiring dengan perubahan program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka dukungan anggaran terhadap rencana Program Perangkat Daerah juga mengalami perubahan.

Berikut adalah gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Bangka sebelum Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023 (Tabel 7.2).

Selanjutnya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, merubah dukungan anggaran terhadap Rencana Program Perangkat Daerah sesuai dengan Tabel 7.3 menjadi sebagai berikut:

**TABEL 7.2**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023 SEBELUM PERUBAHAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019					Tahun 2020					Tahun 2021					Tahun 2022					Tahun 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K		Rp			K		Rp			K		Rp			K		Rp			K		Rp			K	Rp			
		<b>URUSAN RUTIN</b>																															
		<b>Program Pada Setiap OPD</b>																															
xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani	100,00	100,00	56.348.409.290	100,00	58.038.861.569	100,00	59.780.027.416	100,00	61.573.428.238	100,00	63.420.631.085	100,00	299.161.357.598															Seluruh OPD	
xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100,00	100,00	37.164.268.500	100,00	38.279.196.555	100,00	39.427.572.452	100,00	40.610.399.625	100,00	41.828.711.614	100,00	197.310.148.746															Seluruh OPD	
xx	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penurunan Tindakan Indisipliner Pegawai	100,00	100,00	1.830.057.712	100,00	1.893.776.490	100,00	1.911.592.757	100,00	1.952.395.464	100,00	1.994.207.332	100,00	9.582.029.756															Seluruh OPD	
				Persentase Kehadiran ASN Tepat Waktu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																BKPSDMD	
xx	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Peningkatan Kompetensi Aparatur	100,00	100,00	5.100.000.000	100,00	5.250.000.000	100,00	5.500.000.000	100,00	5.750.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	27.600.000.000															Seluruh OPD	
xx	xx	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100,00	100,00	639.965.000	100,00	659.163.950	100,00	678.938.869	100,00	699.307.035	100,00	720.286.246	100,00	3.397.661.099															Seluruh OPD/BPKAD	
				Persentase Perencanaan Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																Seluruh OPD	
				Persentase Pelaporan Capaian Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																Seluruh OPD	
xx	xx	07	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Persentase Informasi Hasil Pembangunan Daerah yang disosialisasikan	100,00	100,00	340.000.000	100,00	350.200.000	100,00	360.706.000	100,00	371.527.180	100,00	382.672.995	100,00	1.805.106.175															Seluruh OPD	
			<b>URUSAN WAJIB</b>																														
			<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																														
			<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>																														
xx	xx	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio Penduduk terhadap Lembaga PAUD	1 : 176	1 : 156	704.000.000	1 : 136	774.400.000	1 : 116	851.840.000	1 : 96	937.024.000	1 : 76	1.030.726.400	1 : 76	4.297.990.400														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
xx	xx	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SD	1 : 26	1 : 26	25.292.500.000	1 : 26	27.821.750.000	1 : 26	30.603.925.000	1 : 26	33.664.317.500	1 : 26	30.030.749.250	1 : 26	147.413.241.750															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SMP	1 : 30	1 : 30		1 : 30		1 : 30		1 : 30		1 : 30		1 : 30																	
				Persentase Siswa Penerima Beasiswa SD	0,68	0,68		0,68		0,68		0,68		0,68		0,68																	
				Persentase Siswa Inklusi SD Penerima Bantuan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																	
				Persentase Siswa Penerima Beasiswa SMP	1,87	1,87		1,87		1,87		1,87		1,87		1,87																	
				Persentase Siswa Inklusi SMP Penerima Bantuan	34,00	34,00		34,00		34,00		34,00		34,00		34,00																	
xx	xx	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase PKBM terhadap Jumlah Desa	16,00	16,00	679.200.000	16,00	2.747.120.000	16,00	3.021.832.000	16,00	3.324.015.200	16,00	3.656.416.720	16,00	13.428.583.920															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
xx	xx	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang bersertifikasi	49,00	59,00	1.906.933.000	69,00	2.097.626.300	79,00	2.307.388.930	90,00	2.538.127.823	100,00	2.791.940.605	100,00	11.642.016.658															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi	na	10,00		19,00		27,00		35,00		44,00		44,00																	
				Persentase Pengawas yang bersertifikasi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00																	
				Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikasi	37,00	51,00		64,00		78,00		93,00		100,00		100,00																	
xx	xx	22	Program Manajemen Pelayanan	Nilai Rata-Rata Ujian SD/MI	201,94	207,99	3.601.601.500	214,06	3.961.761.650	220,11	4.357.937.815	226,17	4.793.731.597	232,23	5.273.104.756	232,23	21.988.137.318															Dinas Pendidikan dan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pendidikan	Nilai Rata-Rata Ujian SMP/MTs	55,00	57,00	59,00		61,00		63,00		65,00		65,00		Kebudayaan		
			Angka Lulusan SD/MI sederajat	99,60	99,65	99,65		99,75		99,85		100,00		100,00				
			Angka Lulusan SMP/MTs sederajat	99,12	99,20	99,30		99,40		99,50		99,60		99,60				
			Persentase Lembaga PAUD terakreditasi A	2,00	4,00	7,00		9,00		12,00		14,00		14,00				
			Persentase Lembaga SD Berakreditasi A	41,00	44,00	47,00		50,00		52,00		55,00		55,00				
			Persentase Lembaga SMP Berakreditasi A	64,00	70,00	77,00		84,00		91,00		100,00		100,00				
			Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan terakreditasi A	0,00	18,00	36,00		55,00		73,00		91,00		91,00				
xx	xx	23	Program Peningkatan Belajar Mengajar	Peringkat 5	Peringkat 4	1.512.000.000	Peringkat 3	1.663.200.000	Peringkat 3	1.829.520.000	Peringkat 2	2.012.472.000	Peringkat 1	2.213.719.200	Peringkat 1	9.230.911.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Peringkat O2SN Tingkat Provinsi	Peringkat 3	Peringkat 3		Peringkat 2		Peringkat 2		Peringkat 1		Peringkat 1		Peringkat 1			
			Peringkat FLS2N Tingkat Provinsi	Peringkat 5	Peringkat 4		Peringkat 4		Peringkat 3		Peringkat 3		Peringkat 1		Peringkat 1			
			Peringkat GSI Tingkat Provinsi	Peringkat 3	Peringkat 3		Peringkat 2		Peringkat 2		Peringkat 2		Peringkat 1		Peringkat 1			
			Persentase Siswa Berkarakter Baik	96,89	98,75	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Sekolah yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata	8,00	10,00	12,00		14,00		16,00		20,00		20,00				
			<b>URUSAN KESEHATAN</b>			<b>121.857.922.436</b>		<b>132.610.590.082</b>		<b>142.145.739.090</b>		<b>157.010.314.422</b>		<b>159.450.832.195</b>		<b>697.827.627.484</b>		
xx	xx	15	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Ketersediaan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	75,00	80,00	1.028.406.000	100,00	1.131.246.600	100,00	1.244.371.260	100,00	1.368.808.386	100,00	1.505.689.225	100,00	6.278.521.471	Dinas Kesehatan
xx	xx	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Esensial sesuai	75,00	80,00	6.011.775.000	0,85	6.312.363.750	0,88	5.838.305.232	0,90	5.765.326.417	0,95	5.682.882.249	100,00	29.610.652.649	Dinas Kesehatan/RSUD
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Pengembangan Wajib sesuai Standar	75,00	80,00		100,00		1,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Puskesmas yang Menjalankan Manajemen Puskesmas (Puskesmas terakreditasi)	75,00	80,00		91,00		0,92		93,00		94,00		100,00			
			Persentase Puskesmas yang Memiliki Sistem Manajemen dan Informasi Pelayanan Kesehatan	91,67	91,67		65,00		67,50%		70,00		72,5000		100,00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75	80		85,00		0,88		90,00		95,00		100,00			
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Pengguna Jasa Rumah Sakit	90,00	92,00		94,00		96,00		98,00		100,00		100,00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00			
			Persentase Bahan Baku Makan Minum Pasien yang Terpenuhi	90,00	92,00		70,00		96,00		98,00		100,00		100,00			
xx	xx	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Produk Pangan Beredar yang Memiliki Sertifikat PIRT	85,00	86,50	37.424.000	94,00	39.295.200	96,00	36.344.130	98,00	35.889.829	100,00	35.376.604	100,00	184.329.764	Dinas Kesehatan
xx	xx	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	70,04	72,00	134.048.000	74,00	147.452.800	76,00	162.198.080	78,00	178.417.888	80,00	196.259.677	80,00	818.376.445	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun	30,00	27,00			19,00				15,00			15,00			
			Persentase Posyandu Aktif	80,00	84,00			89,00				96,00			100,00			
xx	xx	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100,00	100,00	97.274.000	100,00	107.001.400	100,00	117.701.540	100,00	129.471.694	100,00	142.418.863	100,00	593.867.497	Dinas Kesehatan
			Persentase Balita Yang Dipantau Berat Badannya (D/S)	89,00	90,00			91,00				92,00			94,00			
			Persentase Balita yang Berat Badannya Naik (N/D)	89,00	90,00			91,00				92,00			94,00			
xx	xx	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan Desa/Kelurahan Sehat	60,00	90,00	468.850.000	95,00	515.735.000	100,00	567.308.500	100,00	624.039.350	100,00	686.443.285	100,00	2.862.376.135	Dinas Kesehatan
xx	xx	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Langsung	75,00	100,00	581.009.000	100,00	639.109.900	100,00	703.020.890	100,00	773.322.979	100,00	850.655.277	100,00	3.547.118.046	Dinas Kesehatan
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Endemik/Epidemik	75,00	100,00			100,00				100,00			100,00			
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Seksual	75,00	100,00			100,00				100,00			100,00			
xx	xx	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Menjalankan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Akreditasi	75,00	85,00	218.340.000	90,00	240.174.000	100,00	264.191.400	100,00	290.610.540	100,00	319.671.594	100,00	1.332.987.534	Dinas Kesehatan
			% Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi standar	85,00	90,00			90,00				95,00			100,00			
			Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Bagian Tata Usaha yang Memenuhi Standar Akreditasi	85,00	90,00			95,00				100,00			100,00			
			Persentase elemen Penilaian Akreditasi Bidang Pelayanan yang Memenuhi Standar Akreditasi	85,00	90,00			95,00				100,00			100,00			
			Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Bidang Perencanaan yang Memenuhi Standar Akreditasi	85,00	90,00			95,00				100,00			100,00			
			Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Bidang Keperawatan yang Memenuhi Standar Akreditasi	85,00	90,00			95,00				100,00			100,00			
xx	xx	24	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Rumah Sakit yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai Standar	75,00	80,00	8.200.950.000	85,00	9.021.045.000	90,00	9.923.149.500	95,00	10.915.464.450	100,00	12.007.010.895	100,00	50.067.619.845	Dinas Kesehatan
			Persentase Gedung Rumah Sakit yang Terpenuhi	65,00	65,00			80,00				90,00			90,00			
			Persentase Alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpenuhi	65,00	65,00			80,00				90,00			90,00			
			Persentase Obat-Obatan yang Terpenuhi	65,00	65,00			80,00				90,00			90,00			
			Persentase Sarana dan Prasarana Keperawatan yang Terpenuhi	65,00	65,00			80,00				90,00			90,00			
xx	xx	25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80,00	82,50	500.000.000	85,00	500.000.000	87,50	500.000.000	90,00	500.000.000	92,50	500.000.000	92,50	2.500.000.000	Dinas Kesehatan
xx	xx	26	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase FKTP dan Rumah Sakit yang Memiliki SDM sesuai Standar	86,82	90,00	21.091.808.000	92,00	22.609.070.439	94,00	20.911.129.249	96,00	20.679.757.151	98,00	20.391.562.378	98,00	105.683.327.218	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase FKTP yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai Standar	87,50	90,00		92,50		95,00		97,50		100,00		100,00	Dinas Kesehatan		
xx	xx	27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Esensial sesuai Standar	92,00	100,00	60.241.825.000	100,00	66.266.007.500	100,00	72.892.608.250	100,00	80.181.869.075	100,00	78.200.055.983	100,00	357.782.365.808	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Pengembangan Wajib sesuai Standar	91,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan		
			Bed Occupation Rate (BOR)	60,00	70,00		72,50		75,00		77,50		80,00		80,00	RSUD Depati Bahrin		
			Length of Stay (LOS)	2,00	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	RSUD Depati Bahrin		
			Turn Over Interval (TOI)	2,00	2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Pendapatan Rumah Sakit	94,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Efisiensi Anggaran Rumah Sakit	85,00	87,00		88,00		88,50		90,00		92,00		92,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Indikator SPM Bagian Tata Usaha yang Mencapai Target	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Indikator SPM Bagian Pelayanan yang Mencapai Target	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Indikator SPM Bagian Perencanaan yang Mencapai Target	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Indikator SPM Bagian Keperawatan yang Mencapai Target	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Jasa Rumah Sakit	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
			% Pendapatan UPT BLUD Dinkes	5,00	7,00		9,00		11,00		13,00		15,00		15,00	RSUD Depati Bahrin		
			Persentase Pelaksanaan Mutu Keperawatan	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	RSUD Depati Bahrin		
xx	xx	28	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Menjalankan Manajemen Mutu Pelayanan Puskesmas	95,50	100,00	5.275.726.350	100,00	5.793.632.060	100,00	6.337.449.016	100,00	6.950.070.949	100,00	7.623.885.370	100,00	16.732.993.005	Dinas Kesehatan
			% UPT Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan		
			Persentase Puskesmas yang Memiliki sistem Manajemen dan Informasi Kesehatan	92,78	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan		
xx	xx	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4,22	4,20	53.055.000	4,15	58.360.500	4,10	64.196.550	4,05	70.616.205	4,00	77.677.826	4,00	323.906.081	Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	91,62	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia	97,16	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
xx	xx	30	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan	88,78	100,00	430.821.000	100,00	473.903.100	100,00	521.293.410	100,00	573.422.751	100,00	630.765.026	100,00	2.630.205.287	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan	88,78	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	92,20	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
xx	xx	31	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00	3.500.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	5.500.000.000	100,00	24.000.000.000	Dinas Kesehatan
			Persentase pelayanan kesehatan matra dan haji	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	32	Profram Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diselenggarakan di % kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan	66,00	100,00	28.090.000	100,00	30.899.000	100,00	33.988.900	100,00	37.387.790	100,00	41.126.569	100,00	171.492.259	Dinas Kesehatan
xx	xx	33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau	56,20	57,20	13.958.521.086	58,20	14.725.293.833	59,20	17.028.483.182	60,20	21.935.838.968	61,20	25.059.351.374	61,20	92.707.488.443	Dinas Kesehatan
			<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>93.167.990.898</b>		<b>72.096.105.200</b>		<b>80.022.715.720</b>		<b>88.091.987.292</b>		<b>136.611.556.503</b>		<b>362.597.243.415</b>		
xx	xx	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%) Persentase Jaringan Jembatan dalam Kondisi Mantap (%) Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kawasan Pariwisata	63,29	64,07	46.199.258.898	67,00	20.135.500.000	69,00	22.149.050.000	71,00	24.363.955.000	73,00	26.800.350.500	73,00	26.800.350.500	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Sistem Jaringan Drainase Jalan yang Berfungsi Baik	90,00	91,00	3.400.000.000	92,00	3.740.000.000	93,00	4.114.000.000	94,00	4.525.400.000	95,00	4.977.940.000	95,00	20.757.340.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Persentase Panjang Turap/Talud/Brojong dalam Kondisi Baik	93,26	94,00	1.200.000.000	94,00	1.320.000.000	95,00	1.452.000.000	95,00	1.597.200.000	96,00	1.756.920.000	96,00	7.326.120.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%) Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	63,00	65,00	7.555.000.000	67,00	8.310.500.000	69,00	9.141.550.000	71,00	10.055.705.000	73,00	11.061.275.500	71,00	46.124.030.500	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	19	Program Rehabilitasi Turap/Talud/Brojong	Persentase Panjang Turap/Talud/Brojong dalam Kondisi Baik	93,26	94,00	3.200.000.000	94,00	3.520.000.000	95,00	3.872.000.000	95,00	4.259.200.000	96,00	4.685.120.000	96,00	19.536.320.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%) Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap (%)	72,50	74,00	650.000.000	76,00	715.000.000	78,00	786.500.000	80,00	865.150.000	82,00	951.665.000	82,00	3.968.315.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Penanganan Pembangunan Jalan dan Jembatan Darurat	90,00	100,00	1.000.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	1.210.000.000	100,00	1.331.000.000	100,00	1.464.100.000	100,00	6.105.100.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Infrastruktur yang up to date	60,00	65,00	350.000.000	70,00	385.000.000	75,00	423.500.000	80,00	465.850.000	85,00	512.435.000	85,00	2.136.785.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan /
xx	xx	23	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan dalam Kondisi Mantap	84,31	85,00	1.500.000.000	86,00	1.650.000.000	87,00	1.815.000.000	88,00	1.996.500.000	89,00	2.196.150.000	89,00	9.157.650.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	45,14	45,14	3.025.000.000	45,25	3.327.500.000	45,39	3.660.250.000	46,19	4.026.275.000	46,78	4.428.902.500	46,78	18.467.927.500	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase Jumlah Potensi Sumber Air Baku Persentase Peningkatan Pelestarian Sumber Air Baku	60,00	60,00	3.025.000.000	62,00	3.327.500.000	64,00	3.660.250.000	66,00	4.026.275.000	68,00	4.428.902.500	68,00	18.467.927.500	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Jumlah Potensi Sumber Air Baku Persentase Peningkatan Pelestarian Sumber Air Baku	60,00	60,00	1.025.000.000	62,00	1.127.500.000	64,00	1.240.250.000	66,00	1.364.275.000	68,00	1.500.702.500	68,00	6.257.727.500	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Persentase Cakupan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota	65,00	67,00	1.861.732.000	69,00	2.047.905.200	71,00	2.252.695.720	73,00	2.477.965.292	75,00	2.725.761.821	75,00	11.366.060.033	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Rumah Bersantitas Layak	83,60	85,00	86,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
xx	xx	28	Program Pembangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Persentase bangunan gedung dan penataan lingkungan	75,00	80,00	6.500.000.000	85,00	7.500.000.000	90,00	9.000.000.000	95,00	10.000.000.000	100,00	50.743.370.482	100,00	83.743.370.482	Dinas PU, Penataan Ruang dan
				Persentase Peningkatan Bangunan publik dalam	65,00	65,00		70,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Dinas PU, Penataan Ruang dan		
xx	xx	29	Program Pengendalian Banjir	Persentase Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota (%)	78,00	79,20	2.650.000.000	80,40	2.915.000.000	81,60	3.206.500.000	82,80	3.527.150.000	84,00	3.879.865.000	84,00	16.178.515.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	30	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	60,00	65,00	5.000.000.000	70,00	5.500.000.000	75,00	6.050.000.000	80,00	6.655.000.000	85,00	7.320.500.000	85,00	30.525.500.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	31	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jumlah Infrastruktur yang Memadai	91,79	91,79	3.060.000.000	92,00	3.366.000.000	93,00	3.702.600.000	94,00	4.072.860.000	95,00	4.480.146.000	95,00	18.681.606.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx		Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pemerintah Kab. Bangka yang tersedia	90,00	100,00	1.167.000.000	100,00	1.283.700.000	100,00	1.412.070.000	100,00	1.553.277.000	100,00	1.708.604.700	100,00	7.124.651.700	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	32	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang	2,00	2,00	300.000.000	3,00	330.000.000	3,00	363.000.000	3,00	399.300.000	3,00	439.230.000	3,00	1.831.530.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Persentase Dokumen Perencanaan Ruang yang Tersusun sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-Undangan	90,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
xx	xx	33	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR	100,00	100,00	350.000.000	100,00	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00	330.000.000	100,00	7.124.651.700	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	3 hari	3 hari		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari		
xx	xx	34	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Ketaatan terhadap Rekomendasi Tata Ruang (%)	100,00	100,00	150.000.000	100,00	165.000.000	100,00	181.500.000	100,00	199.650.000	100,00	219.615.000	100,00	915.765.000	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
			<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>															
xx	xx	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan yang Memiliki Site Plan	100,00	100,00	3.174.635.000	100,00	3.492.098.500	100,00	3.841.308.350	100,00	4.225.439.185	100,00	4.647.983.104	100,00	19.381.464.139	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase Peningkatan MBR yang memiliki Rumah	90,15	91,30		93,41	95,26	96,10	96,10	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80		
xx	xx		Program Pengembangan Data/Informasi Permukiman	Persentase Kesesuaian Perencanaan Kawasan Permukiman	12,35	37,04	1.227.600.000	61,73	1.350.360.000	80,25	1.485.396.000	92,59	1.633.935.600	100,00	1.797.329.160	100,00	7.494.620.760	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
xx	xx		Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	50,00	50,00	3.794.670.000	69,00	4.174.137.000	100,00	4.591.550.700	100,00	5.050.705.770	100,00	5.555.776.347	100,00	23.166.839.817	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>															
xx	xx	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Objek Vital Pemda yang aman dan terawasi	100,00	100,00	1.268.125.000	100,00	1.331.531.250	100,00	1.231.533.253	100,00	1.216.139.087	100,00	1.198.748.299	100,00	6.246.076.889	Satpol PP
				Persentase Objek Destinasi Wisata yang aman dan terawasi	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Angka Tunawisma	0,50	0,45	4.558.675.789	0,45	4.786.609.578	0,43	4.427.135.199	0,40	4.371.796.009	0,40	4.309.279.326	0,40	22.453.495.902	Satpol PP
				2. Angka Prostitusi	1,25	1,25		1,20		1,20	1,15		1,15		1,15		Satpol PP	
				3. Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	0,70	0,70		0,68		0,66	0,60		0,60		0,60		Satpol PP	
				4. Persentase Angka Kasus Perjudian	6,75	6,75		6,70		6,68	6,65		6,65		6,65		Satpol PP	
				5. Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	7,78	7,70		7,50		7,25	7,00		7,00		7,00		Satpol PP	
xx	xx	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Partisipasi Aktif dalam Pelestarian Budaya Bangsa	88,50	100,00	1.135.240.312	100,00	1.192.002.328	100,00	1.102.482.953	100,00	1.088.701.916	100,00	1.073.133.478	100,00	5.591.560.987	Kesbangpol
				Persentase Penanganan Konflik Antar Umat Beragama	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		Kesbangpol	
				Cakupan Parpol yang Menerima Bantuan Keuangan	77,75	81,23	96.700.000	83,51	101.535.000	84,78	93.909.722	85,58	92.735.850	86,46	91.409.727	86,46	476.290.299	Kesbangpol
xx	xx	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota per 10.000 Penduduk	42,00	42,00	708.320.000	42,30	743.736.000	42,50	687.881.426	42,75	679.282.909	42,90	669.569.163	42,90	3.488.789.498	Satpol PP
xx	xx	22	Program Pemecahan Dini dan Pengulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelayanan Bencana Alam Kabupaten/kota	100,00	100,00	3.474.206.127,16	100,00	8.988.611.457,00	100,00	8.141.290.318,94	100,00	8.118.453.199,66	100,00	3.522.691.900,09	100,00	14.247.719.582,50	Satpol PP
xx	xx		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100,00	100,00	3.376.517.846,40	100,00	4.987.834.917,06	100,00	6.041.832.172,38	100,00	7.345.504.643,88	100,00	7.441.353.537,14	100,00	62.453.396.837,06	Satpol PP
			<b>URUSAN SOSIAL</b>				<b>7.930.672.263</b>		<b>9.641.723.565</b>		<b>10.067.780.410</b>		<b>10.589.483.880</b>		<b>9.870.070.539</b>		<b>48.099.730.657</b>	
xx	xx	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	59,26	69,00	2.215.352.618	100,00	2.185.597.987	100,00	2.145.440.035	100,00	2.106.239.063	100,00	2.140.679.172	100,00	10.793.308.875	Dinsospemdes
				Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	23,00	39,00		48,00		64,00	80,00		90,00		90,00		90,00	
				Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	35,00	40,00		60,00		70,00	80,00		90,00		90,00		90,00	
xx	xx	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	82,16	83,17	4.315.832.745	84,31	5.868.851.682	85,27	6.371.292.455	86,52	6.937.939.629	88,17	6.172.651.925	88,17	29.666.568.436	Dinsospemdes
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	97,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
				Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	34,00	65,75		97,46		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
xx	xx	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	75,00	348.789.081	78,00	320.071.160	83,00	488.103.662	85,00	460.261.336	90,00	475.341.280	90,00	2.092.566.519	Dinsospemdes
xx	xx	19	Program Pemberdayaan Panti asuhan/Panti Jompo	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	70,00	75,00	193.972.051	78,00	275.834.417	83,00	255.644.418	85,00	238.059.791	90,00	247.583.966	90,00	1.211.094.644	Dinsospemdes
xx	xx	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	75,00	100,00	856.725.768	100,00	991.368.319	100,00	807.299.840	100,00	846.984.060	100,00	833.814.196	100%	4.336.192.183	Dinsospemdes
				Persentase Perusahaan yang Melaksanakan CSR sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2012	75,00	75,00		80,00		85,00	88,00		92,00		92,00		92,00	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD										SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>																
		<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>																
xx	xx	15	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	9,07	9,07	5.229.982.538,85	26,17	3.395.514.783,47	27,22	3.369.091.446,18	28,62	4.099.429.717,85	34,62	5.382.361.821,46	34,62	21.476.380.307,81	Dinakerperindag
				Persentase Alumni SMK yang Mendapat SKKNI	4,70	7,00		9,00		10,00		10,50		11,00		11,00		Dinakerperindag
				Persentase Pembinaan dan Movev BKK (Bursa Kerja Khusus) di Lembaga	0,00	0,00		23,18		25,22		27,23		29,17		29,17		Dinakerperindag
xx	xx	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	15,87	33,33	1.455.307.715,32	34,91	1.498.581.917,57	35,19	1.192.870.841,23	36,33	1.289.768.111,00	37,79	1.343.131.226,62	37,79	6.779.659.811,74	Dinakerperindag
xx	xx	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	18,29	28,38	1.607.055.328	31,94	1.753.632.951	35,71	3.787.951.464	39,71	4.514.766.676	43,94	5.388.769.395	43,94	17.052.175.814	Dinakerperindag
				Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	0,00	53,33		60,00		66,67		66,67		66,67		66,67		
			<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>															
xx	xx	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Menerapkan PPRG	52,94	52,94	920.000.000	64,71	947.600.000	76,48	976.028.000	88,24	1.005.308.840	100,00	1.035.468.105	100,00	4.884.404.945	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan Anak yang diselesaikan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	715.000.000	100,00	736.450.000	100,00	758.543.500	100,00	781.299.805	100,00	804.738.799	100,00	3.796.032.104	
xx	xx	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	21,78	21,78	875.000.000	22,50	901.250.000	23,00	928.287.500	23,50	956.136.125	24,00	984.820.209	24,00	4.645.493.834	
				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	20,67	20,67		23,20		23,50		24,45		25,00		25,00		
				Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	18,71	18,71		19,50		21,10		23,35		24,85		24,85		
			<b>URUSAN PANGAN</b>															
xx	xx	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Toko/Warung Penyedia Bahan Pangan Pokok (%)	82,71	82,71	2.050.515.284,42	85,18	2.990.584.302,83	87,65	4.054.427.457,63	90,12	4.381.307.021,23	92,59	5.408.881.921,29	92,59	18.885.715.987,41	Dinas Pangan
				Pemantauan Harga Pangan Pokok di Pasar Tradisional dan Pasar Modern (%)	84,61	84,61		84,61		92,31		92,31		92,31		92,31		
				Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	7.700	12.000		17.000		22.000		27.000		32.000		32.000		
xx	xx	16	Program Peningkatan Bahan Makanan	Persentase Kecukupan Pangan Masyarakat (%)	118,00	120,00	192.795.853,48	121,00	177.193.426,76	122,00	174.248.283,48	123,00	127.303.024,74	124,00	146.762.959,23	124,00	818.303.547,69	Dinas Pangan
				Persentase Desa/Kelurahan Intervensi Rawan Pangan (%)	7,41	7,41		7,41		7,41		11,11		11,11		11,11		
xx	xx	17	Program Pengembangan Pola Pangan	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	1 : 0,92	1 : 0,92	589.639.135,04	1 : 0,94	582.739.587,51	1 : 0,96	646.412.893,58	1 : 0,98	482.308.345,40	1 : 1	541.672.442,41	1 : 1	2.842.772.403,93	Dinas Pangan
				Rasio Tingkat Konsumsi Protein	1 : 1,44	1 : 1,44		1 : 1,39		1 : 1,34		1 : 1,29		1 : 1,24		1 : 1,24		
				Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	105,00	105,00		110,00		115,00		120,00		125,00		125,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga (%)	1,84	1,84		2,04		2,24		2,44		2,64		2,64				
		Kelompok Binaan Yang Memproduksi Olahan Pangan Lokal (%)	20,97	20,97		22,00		23,00		24,00		28,00		28,00				
xx	xx	18	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Produsen Pangan Segar yang Mendapatkan Sertifikat	8,00	8,00	533.784.503,92	8,00	632.219.050,60	8,00	646.666.025,29	8,00	709.431.987,96	8,00	722.901.236,85	40,00	3.245.002.804,62	Dinas Pangan
				Pembinaan Keamanan Pangan Segar ke Pasar (%)	66,67	66,67		77,78		77,78		88,89		88,89		88,89		
				Pengawasan Keamanan Pangan Segar ke Desa/Kelurahan (%)	44,44	44,44		46,91		49,38		51,85		54,32		54,32		
				Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	66,67		77,78		77,78		88,89		88,89		88,89		
			<b>URUSAN PERTANAHAN</b>			<b>1.612.332.500</b>		<b>1.692.949.125</b>		<b>1.777.596.581</b>		<b>1.866.476.410</b>		<b>1.959.800.231</b>		<b>8.909.154.847</b>		
xx	xx	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	28,07	28,20	1.288.870.500	28,35	1.353.314.025	28,50	1.420.979.726	28,75	1.492.028.713	29,00	1.566.630.148	29,00	7.121.823.112,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	131.771.000	100,00	138.359.550	100,00	145.277.528	100,00	152.541.404	100,00	160.168.474	100,00	728.117.955,44	
xx	xx	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Data Pertanahan Kabupaten	Persentase Pemenuhan Informasi Data Pertanahan Kabupaten	100,00	100,00	191.691.000	100,00	201.275.550	100,00	211.339.328	100,00	221.906.294	100,00	233.001.609	100,00	1.059.213.779,94	
			<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>26.408.040.990</b>		<b>40.597.500.216</b>		<b>44.154.223.980</b>		<b>46.821.524.455</b>		<b>50.373.948.296</b>		<b>208.355.237.938</b>		
xx	xx	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	18,00	20,00	19.621.411.684	22,00	32.387.307.878	24,00	35.410.910.428	26,00	37.757.588.874	27,00	41.426.335.336	27,00	166.603.554.200	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Penanganan Sampah	41,28	41,28		42,44		43,62		44,84		45,13		45,13		
xx	xx	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	59,00	59,00	1.747.568.841,26	60,00	1.113.720.726,79	61,00	1.127.495.066,80	61,50	1.212.093.013,02	62,00	1.329.786.268,15	62,00	6.530.663.916,03	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	88,00	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
				Persentase Penanganan Kasus Lingkungan	25,00	23,00		21,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
xx	xx	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lahan yang Dikonservasi	30,00	33,00	1.567.948.509,09	67,00	1.661.100.656,82	100,00	1.774.591.279,75	100,00	1.877.256.605,81	100,00	1.613.240.744,09	100,00	8.494.137.795,56	Dinas Lingkungan Hidup
xx	xx	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	22,00	22,04	1.129.495.239,67	20,00	1.148.685.151,90	30,00	1.153.230.282,66	40,00	1.156.757.849,60	50,00	1.162.272.771,67	50,00	5.750.441.295,50	Dinas Lingkungan Hidup
xx	xx	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Frekuensi Penyampaian Informasi Bidang Lingkungan Hidup	90,00	90,00	183.194.481	95,00	404.060.356	95,00	362.710.642	95,00	375.482.961	100,00	399.968.024	100,00	1.725.416.464	Dinas Lingkungan Hidup
xx	xx	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luasan RTH Publik yang dikelola	1,3349	1,3350	2.158.422.235	1,3351	3.882.625.447	1,3352	4.325.286.281	1,3354	4.442.345.152	1,3355	4.442.345.152	1,3355	19.251.024.267	Dinas Lingkungan Hidup
			<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>			<b>2.896.407.000</b>		<b>3.041.227.350</b>		<b>2.812.831.176</b>		<b>2.777.670.786</b>		<b>2.737.950.094</b>		<b>14.266.086.406</b>		
xx	xx	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	60,00	70,00	2.896.407.000	80,00	3.041.227.350	90,00	2.812.831.176	100,00	2.777.670.786	100,00	2.737.950.094	100,00	14.266.086.406	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan KTP	92,75	95,00		97,50		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85,00	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Penerbitan Kartu	85,00	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Penerbitan Akte Kematian	65,20	70,00		75,00		78,00		81,00		85,00		85,00		
			<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>5.461.572.784</b>		<b>5.726.967.304</b>		<b>7.095.107.834</b>		<b>7.470.814.254</b>		<b>7.652.195.377</b>		<b>32.016.226.497</b>		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
xx	xx	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Cakupan Pembinaan Masyarakat Lembaga Masyarakat	10,00	20,00	387.283.000	30,00	398.901.490	40,00	410.868.535	50,00	423.194.591	60,00	435.890.428	60,00	2.056.138.044	Kecamatan	
			Persentase Daerah Rawan Konflik yang dilakukan Pembinaan terkait Kantrantibmas	10,00	20,00		30,00	40,00		50,00		60,00		60,00					
xx	xx	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	85,00	100,00	1.117.246.957	100,00	1.176.330.967	100,00	1.590.293.462	100,00	1.714.814.301	100,00	1.838.813.855	100,00	7.437.499.541	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
xx	xx	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Penyusunan dan Pelaporan APBDesa Tepat Waktu	85,00	100,00	900.936.510	100,00	950.037.550	100,00	864.534.170	100,00	843.612.443	100,00	821.678.520	100,00	4.380.799.193	Dinsospemdes/ Kecamatan	
			Persentase Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Musrenbang	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			Kecamatan		
			Persentase Usulan Masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten	95,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			Bappeda/ Kecamatan		
			Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa	84,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
xx	xx	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	81,18	100,00	1.020.079.386	100,00	1.073.441.820	100,00	1.444.538.940	100,00	1.546.643.222	100,00	1.513.588.853	100,00	6.549.627.850	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
xx	xx		Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	Inovasi TTG yang dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan	85,00	100,00	314.599.480	100,00	310.364.294	100,00	527.597.959	100,00	544.293.424	100,00	663.865.295	100,00	889.269.980	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
xx	xx	19	Program Peningkatan Peran Wanita/Perempuan di Pedesaan	Persentase Peningkatan IKM	14,12	14,12	360.494.771	15,46	383.513.832,41	16,07	521.931.162,92	16,15	565.320.650,83	16,56	559.845.332,23	16,56	2.452.236.711	Dinakerperindag	
			Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	95,00	100,00	297.749.373	100,00	319.409.232,65	100,00	438.177.711,92	100,00	478.259.104,71	100,00	477.126.017,36	100,00	2.104.717.828	100,00	2.104.717.828	DP2KBP3A
xx	xx	22	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	82,00	84,00	234.177.425	86,00	249.192.248	88,00	228.230.283	90,00	222.946.658	92,00	217.246.686	92,00	1.151.793.300	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
xx	xx	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	90,00	100,00	295.670.000	100,00	304.540.100	100,00	313.676.303	100,00	323.086.592	100,00	332.779.190	100,00	1.569.752.185	Kecamatan	
xx	xx		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkriteria Baik	74,00	80,00	533.335.883	90,00	561.235.771	100,00	755.259.307	100,00	808.643.268	100,00	791.361.200	100,00	3.424.391.865	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			Kecamatan		
			<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>2.998.795.000</b>		<b>3.088.758.850</b>		<b>3.181.421.616</b>		<b>3.276.864.264</b>		<b>3.375.170.192</b>		<b>15.921.009.921</b>			
xx	xx	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	75,00	69,86	2.078.795.000	70,71	2.141.158.850	71,46	2.205.393.616	72,12	2.271.555.424	73,07	2.339.702.087	73,07	11.036.604.976	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	15,51		14,63		13,86		13,20		12,62		12,62				
			Ratio ASFR 15-19 Tahun	48,48	48,48		48,56		48,32		48,11		47,94		47,94				
			Cakupan Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP	16,99	16,99		17,47		17,88		18,22		18,51		18,51				
xx	xx	16	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (KRR)	Cakupan PIK Remaja Berkinerja Baik	30,00	30,00	520.000.000	40,00	535.600.000	50,00	551.668.000	60,00	568.218.040	70,00	585.264.581	70,00	2.760.750.621		
xx	xx	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	UPPKS di Setiap Desa/Kelurahan	50,62	50,62	400.000.000	69,49	412.000.000	70,77	424.360.000	80,24	437.090.800	90,12	450.203.524	90,12	2.123.654.324		
			Cakupan BKB Berkinerja Baik	50,00	50,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00				
			Cakupan BKR Berkinerja Baik	50,00	50,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD										SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		Cakupan BKL Berkinerja Baik	50,00	50,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00				
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>					<b>22.695.000.000</b>		<b>20.195.743.804</b>		<b>24.751.918.502</b>		<b>31.801.033.752</b>		<b>22.391.085.440</b>		<b>121.834.781.498</b>			
xx	xx	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Transportasi yang Aman	75,00	77,00	3.925.000.000	79,00	4.121.250.000	82,00	4.327.312.500	84,00	4.543.678.125	85,00	4.770.862.031	85,00	21.688.102.656	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Persentase Kecukupan Kelengkapan Sarana Lalu Lintas	66,67	67,13		67,59		68,05		68,51		68,97				
				Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00				
				Persentase Desa yang Mendapat Layanan Angkutan Sekolah Gratis	5,00	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00				
				Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00				
xx	xx	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	66,67	67,13	1.750.000.000	67,59	1.837.500.000	68,05	1.929.375.000	68,51	2.025.843.750	68,97	2.127.135.938	69,43	9.669.854.688	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,00	65,46	235.000.000	65,92	246.750.000	66,38	259.087.500	66,84	272.041.875	67,30	285.643.969	67,76	1.298.523.344	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
xx	xx	19	Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	5,00	4,50	16.785.000.000	4,00	13.990.243.804	3,00	18.236.143.502	2,50	24.959.470.002	2,00	15.207.443.502	2,00	89.178.300.811	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>13.164.642.000</b>		<b>13.789.953.900</b>		<b>11.905.685.433</b>		<b>10.840.535.317</b>		<b>9.854.676.493</b>		<b>59.555.493.142</b>		
xx	xx	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Update Konten Website Pemda	30,00	50,00	3.018.632.000	70,00	3.169.563.600	80,00	2.662.433.424	90,00	2.369.565.747	100,00	2.097.065.686	100,00	13.317.260.458	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
				Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada Masyarakat	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00	Setda	
				Rasio Intesitas Penyampaian Informasi Pemerintah Daerah	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
				Persentase Jenis Pelayanan yang Menggunakan Pelayanan Teknologi dan	20,00	20,00		20,00		25,00		30,00		40,00		40,00	Kecamatan	
				Persentase Desiminasi dan Pendistribusian Informasi yang dilaksanakan	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
xx	xx	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa Yang Dilaksanakan	90,00	100,00	1.146.010.000	100,00	1.180.390.300	100,00	1.215.802.009	100,00	1.252.276.069	100,00	1.289.844.351	100,00	6.084.322.730	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
xx	xx		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Publik Berbasis TIK	35,48	51,61	3.400.000.000	67,74	3.570.000.000	83,87	2.998.800.000	100,00	2.668.932.000	100,00	2.362.004.820	100,00	14.999.736.820	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
xx	xx		Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase Sistem Informasi Manajemen Pemerintah	21,90	41,90	1.700.000.000	61,90	1.785.000.000	81,90	1.499.400.000	91,42	1.334.466.000	100,00	1.181.002.410	100,00	7.499.868.410	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
xx	xx		Program Tata Kelola Pengembangan E-Government	Persentase Penyelenggaraan E-Government	23,07	60,00	3.400.000.000	65,00	3.570.000.000	70,00	2.998.800.000	75,00	2.668.932.000	80,00	2.362.004.820	80,00	14.999.736.820	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
xx	xx		Program Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	Persentase Pelaku Telekomunikasi yang Taat Aturan	95,00	100,00	500.000.000	100,00	515.000.000	100,00	530.450.000	100,00	546.363.500	100,00	562.754.405		2.654.567.905	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>																
xx	xx	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Wirusaha Baru	20,00	30,00	536.060.000	40,00	552.141.800	50,00	568.706.054	60,00	585.767.236	70,00	603.340.253	70,00	2.846.015.342	DINPMP2KUKM
xx	xx	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	1,12	5,00	5.475.304.761	6,00	5.774.625.032	7,00	10.517.592.554	8,00	12.545.005.946	9,00	15.900.231.720	9,00	50.212.760.012	DINPMP2KUKM
xx	xx	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pembinaan, Berkriteria Sehat, Minimal Melaksanakan RAT Setahun Sekali sesuai Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2017	85,85	86,00	173.516.256	87,00	4.324.402.983	88,00	9.161.333.623	89,00	10.853.941.396	90,00	14.182.863.001	90,00	38.696.057.259	DINPMP2KUKM
		<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>																
xx	xx	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Investasi yang Dilaksanakan	33,33	33,33	220.742.318	34,00	320.499.606	35,00	474.117.440	35,00	401.888.980	35,00	515.806.974	35,00	1.933.055.319	DINPMP2KUKM
				Persentase Promosi Investasi yang Dilaksanakan	17,00	17,00	8.124.036,32	33,00	8.028.974	50,00	469.144.201	67,00	2.320.284.891	83,00	3.004.236.429	83,00	5.809.818.532	DINPMP2KUKM
				Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	17,21	24,38	350.000.000	25,79	367.500.000	26,50	385.875.000	28,62	405.168.750	28,62	425.427.188	28,62	1.933.970.938	DINPMP2KUKM/ Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																
xx	xx	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	50,00	50,00	1.233.000.000	60,00	1.294.650.000	60,00	1.359.382.500	60,00	1.427.351.625	75,00	1.498.719.206	75,00	6.813.103.331,25	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50		2,50		2,75		2,75		3,00	3,00			
xx	xx	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	87.227.000	0,02	91.588.350	0,03	96.167.768	0,03	100.976.156	0,04	106.024.964	0,04	481.984.237,04	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
xx	xx	18	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	2,22	2,22	350.000.000	2,22	300.000.000	2,22	350.000.000	2,22	250.000.000	2,22	275.000.000	2,22	1.525.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
xx	xx	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Cakupan Pembinaan Atlet Muda	4,55	4,55	5.221.820.000	9,09	5.482.911.000	13,64	5.757.056.550	18,18	6.044.909.378	22,73	6.347.154.846	22,73	28.853.851.773,88	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					5,88	5,88		11,76		17,65		23,53		29,41	29,41			
xx	xx	21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,11	588.780.000	0,12	618.219.000	0,14	649.129.950	0,15	681.586.448	0,17	715.665.770	0,17	3.253.381.167,38	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		<b>URUSAN STATISTIK</b>																
xx	xx	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	IKM Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam	B	B	484.901.000	B	509.146.050	A	470.909.182	A	465.022.817	A	458.372.991	A	2.388.352.039	Setda
				IKM Bidang Perikanan	B	B		B		B		A	A	A	A	B	Dinas Perikanan	
				IKM Bidang Kesehatan	B	B		B		A		A	A	A	A	A	Dinas Kesehatan	
				IKM Bidang Administrasi Kependudukan	A	A		A		A		A	A	A	A	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				IKM Bidang Perizinan	B	B		B		A		A	A	A	A	A	DINPMP2KUKM	
				IKM Bidang Pendapatan dan Retribusi	B	B		B		A		A	A	A	A	A	BP2RD	
				Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		<b>URUSAN PERSANDIAN</b>																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
xx	xx	Program Pengembangan Persandian Daerah	75,00	100,00	339.838.000	100,00	350.033.140	100,00	360.534.134	100,00	371.350.158	100,00	382.490.663	100,00	1.804.246.095	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>					<b>4.550.000.000</b>		<b>5.401.300.000</b>		<b>5.801.755.000</b>		<b>6.450.433.115</b>		<b>6.828.230.999</b>		<b>29.031.719.114</b>		
xx	xx	15 Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Fasilitasi Lembaga Adat	25,00	38,00	1.250.000.000	63,00	1.500.000.000	75,00	1.750.000.000	88,00	2.000.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	9.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Fasilitasi Pelaku Budaya	51,00	60,00		69,00		80,00		91,00		100,00		100,00		
xx	xx	16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	40,00	350.000.000	60,00	400.000.000	60,00	450.000.000	80,00	500.000.000	100,00	550.000.000	100,00	2.250.000.000	
xx	xx	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Sanggar Kesenian yang Aktif	74,00	77,00	2.000.000.000	83,00	2.500.000.000	89,00	2.250.000.000	94,00	2.500.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	11.250.000.000	
			Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	84,00	86,00		89,00		93,00		95,00		100,00		100,00		
			Persentase Even Seni dan Budaya Daerah	84,00	86,00		89,00		93,00		95,00		100,00		100,00		
xx	xx	18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	12,00	20,00	950.000.000	30,00	1.001.300.000	40,00	1.351.755.000	50,00	1.450.433.115	60,00	1.778.230.999	60,00	6.531.719.114	
<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>					<b>3.496.620.000</b>		<b>3.693.518.600</b>		<b>3.792.574.158</b>		<b>3.793.851.383</b>		<b>3.897.416.924</b>		<b>18.673.981.065</b>		
xx	xx	15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	66,67	68,17	2.396.620.000	69,67	2.468.518.600	71,17	2.542.574.158	72,67	2.618.851.383	74,17	2.697.416.924	74,17	12.723.981.065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Layanan Perpustakaan Umum Daerah	96,30	96,30		96,55		96,80		97,05		97,30		97,30		
			Persentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	72,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
			Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/ Kecamatan yang dikembangkan	17,65	17,65		19,44		21,62		23,68		25,64		25,64		
xx	xx	Program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum	Persentase Koleksi Perpustakaan Berbasis Digital	0,00	50,00	1.100.000.000	50,00	1.225.000.000	100,00	1.250.000.000	100,00	1.175.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	5.950.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Komputer Internet bagi Pemustaka	16,67	50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		100,00		
<b>URUSAN KEARSIPAN</b>					<b>1.281.712.500</b>		<b>1.320.163.875</b>		<b>1.359.768.791</b>		<b>1.400.561.855</b>		<b>1.271.377.120</b>		<b>6.633.584.141</b>		
xx	xx	16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Arsip Dinamis Daerah yang diselamatkan	20,04	32,59	813.908.000	45,15	838.325.240	57,70	863.474.997	70,25	889.379.247	82,80	916.060.625	82,80	4.321.148.109	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Arsip Dinamis Daerah yang disusutkan dan dimusnahkan	17,65	26,47		35,29		44,12		52,94		61,76		61,76		
			Persentase Arsip Statis Daerah yang diselamatkan	0,00	12,55		12,55		25,10		25,10		37,66		37,66		
			Persentase Arsip Statis Daerah yang direproduksi	0,00	2,99		2,99		5,99		5,99		8,98		8,98		
xx	xx	17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan	60,02	66,30	265.910.000	72,57	273.887.300	78,85	282.103.919	85,13	290.567.037	91,40	128.082.457	91,40	1.240.550.713	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Arsip Dinamis dan Statis Daerah yang tertata dan terpelihara baik	50,00	57,14		64,29		71,43		78,57		85,71		85,71		
xx	xx	18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan	42,86	50,00	201.894.500	57,14	207.951.335	64,29	214.189.875	71,43	220.615.571	78,57	227.234.038	78,57	1.071.885.320	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Pedoman Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis	50,00	75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Database Kearsipan OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa	0,00	4,35		8,70		13,04		17,39		21,74		21,74		
<b>URUSAN PILIHAN</b>					<b>35.526.988.098</b>		<b>34.859.260.784</b>		<b>47.341.083.682</b>		<b>48.957.087.806</b>		<b>59.310.883.907</b>		<b>225.995.304.277</b>		
<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>5.050.583.339</b>		<b>5.300.110.594</b>		<b>6.674.622.337</b>		<b>7.091.466.001</b>		<b>8.188.200.962</b>		<b>32.304.983.233</b>		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
xx	xx	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	683,75	724,77	515.371.472,62	768,26	146.787.344,49	814,36	159.853.839,62	863,22	158.533.088,62	915,01	222.293.874	915,01	1.202.839.619	Dinas Perikanan
xx	xx	21	Program Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perikanan	Persentase tanda pencatatan/ siup yang diterbitkan	80,00	90,00	2.067.400.000,00	100,00	2.105.069.000,00	100,00	2.127.005.000,00	100,00	2.209.500.000,00	100,00	2.226.475.000	100,00	10.735.449.000	Dinas Perikanan
				Persentase SKTKPI yang diterbitkan	90,00	90,00		90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00
xx	xx		Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan	Persentase KUB/POKDAKAN/POKLAHS AR yang Berkinerja Baik	95,00	100,00	151.866.053	100,00	152.864.107	100,00	224.618.623	100,00	400.383.690	100,00	518.135.497	100,00	1.447.867.970	Dinas Perikanan
xx	xx		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan ke Kelompok Nelayan (paket)	9,00	9,00	1.046.813.703	10,00	1.452.809.067	10,00	1.324.788.696	10,00	2.362.229.180	10,00	3.007.219.308	10,00	9.193.859.954	Dinas Perikanan
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan	4,00	5,00	63.239.699	5,00	56.112.191	6,00	45.147.909	7,00	72.029.164	9,00	82.963.249	8,00	319.492.213	Dinas Perikanan
xx	xx		Program Peningkatan Kualitas Produksi Hasil Perikanan	Menurunkan Kasus Penggunaan Formalin dan Zat adiktif (%)	95,00	100,00	211.807.606	100,00	187.935.569	100,00	151.213.092	100,00	241.246.004	100,00	277.867.342	100,00	1.070.069.612	Dinas Perikanan
xx	xx		Program Peningkatan Kualitas SDM Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	19,45	25,50	310.351.699	28,87	571.861.088	34,43	390.993.851	37,60	682.381.555	40,00	718.485.556	40,00	2.674.073.749	Dinas Perikanan
				Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	34,15	40,55		44,29		48,34		53,09		56,50		56,50		
				Tingkat Penerapan CBIB dan CPIB di Pembudidaya Ikan	21,5	23,75		27,75		33,85		46,76		47,67		47,67		
				Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Pembudidaya	20	40,00		60		80		85,00		87,00		87,00		
				Persentase Desa yang Memanfaatkan Potensi untuk Usaha Perikanan Budidaya	4,838709677	6,45		8,06452		9,67742		11,29		12,90		14,52		
xx	xx		Program Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Nelayan yang telah diasuransikan Melalui Program Pemerintah dan Simantap Biru (orang/nelayan)	90,00	95,00	48.310.289	100,00	62.865.522	100,00	69.212.435	100,00	138.034.161	100,00	182.073.107	100,00	500.495.514	Dinas Perikanan
				Jumlah Nelayan Bersertifikat Hak atas Tanah (orang/nelayan)	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah Pembudidaya Ikan Bersertifikat Hak atas Tanah (orang/pembudidaya ikan)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx		Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Akses Daerah Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Tangkap (Lokasi)	89,90	95,00	453.873.441	100,00	402.719.076	100,00	2.052.177.671	100,00	620.346.869	100,00	714.516.022	100,00	4.243.633.078	Dinas Perikanan
				Jumlah Akses Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Budidaya (Lokasi Tujuan)	3,00	4,00		5,00		5,00		6,00		7,00		7,00		
xx	xx		Program Peningkatan Akses Permodalan	Persentase Akses Permodalan Melalui Perbankan/Lembaga Keuangan kepada Pembudidaya Ikan	88,00	94,74	181.549.376	100,00	161.087.630	100,00	129.611.221	100,00	206.782.290	100,00	238.172.007	100,00	917.202.525	Dinas Perikanan
				Persentase Akses Permodalan Melalui Non Perbankan/Lembaga Keuangan kepada Pembudidaya Ikan	88,00	94,74		94,74		94,74		100,00		100,00		100,00		
			<b>URUSAN PARIWISATA</b>			<b>13.697.903.700</b>		<b>14.437.976.897</b>		<b>19.490.861.162</b>		<b>20.913.694.027</b>		<b>25.640.188.877</b>		<b>94.180.624.662</b>		
xx	xx	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Event, Destinasi, Pameran, Media Promosi)	100,00	100,00	2.871.506.700	100,00	3.026.568.062	100,00	4.085.866.883	100,00	4.384.135.166	100,00	5.374.949.713	100,00	19.743.026.525	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	7,40	10.440.000.000	24,07	11.003.760.000	42,59	14.855.076.000	66,67	15.939.496.548	100,00	19.541.822.768	100,00	71.780.155.316	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase <i>Progress</i> Pelaksanaan Pembangunan KEK Pantai Timur Sungailiat	5,00	5,00		10,00		25,00		35,00		50,00		50,00		
xx	xx	17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	41,45	386.397.000	45,60	407.648.835	50,16	549.918.278	55,17	590.062.313	60,69	723.416.395	60,69	2.657.442.822	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi	5,00	5,00		10,00		25,00		35,00		50,00		50,00		
<b>URUSAN PERTANIAN</b>						<b>8.457.932.291</b>		<b>8.976.763.148</b>		<b>12.164.780.027</b>		<b>11.744.477.814</b>		<b>14.542.297.325</b>		<b>55.886.250.605</b>		
xx	xx	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,10	200.475.356	2,44	211.594.647	2,51	250.666.112	2,57	199.740.371	2,62	239.570.466	2,62	1.102.046.951	Dinas Pertanian
xx	xx	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menerima Pupuk Bersubsidi	77,00	80,00	661.201.282	83,00	430.948.589	86,00	510.524.292	89,00	406.805.334	92,00	487.926.116	92,00	2.497.405.613	Dinas Pertanian
				Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Pendampingan Tanaman Pangan	29,41	36,75		44,11		51,47		60,00		65,00		65,00		
				Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Benih/Bibit Tanaman Pangan	20,58	27,94		35,29		42,64		58,82		66,17		66,17		
xx	xx	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menerima Sarana	25,70	29,56	1.537.095.915	3,42	1.619.459.831	37,28	2.940.065.435	41,14	3.239.234.858	45,00	4.219.342.457	45,00	13.555.198.496	Dinas Pertanian
				Persentase Hama dan Penyakit Tanaman yang ditanggulangi	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
xx	xx	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha)	1.500 Ha	1.550 Ha	2.932.462.413	1.600 Ha	3.093.549.125	1.650 Ha	4.173.647.839	1.700 Ha	4.480.359.266	1.750 Ha	5.495.471.793	1.750 Ha	20.175.490.435	Dinas Pertanian
				Persentase Kelompok Tani yang Menerima Bibit Tanaman Hortikultura	10,28	11,56		12,85		14,14		15,42		16,70		16,70		
				Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Pendampingan/Pelatihan Tanaman Perkebunan	18,42	21,70		25,00		28,30		38,40		39,40		39,40		
xx	xx	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	90,00	95,00	531.927.578	100,00	860.683.878	100,00	1.019.611.246	100,00	812.465.341	100,00	974.478.516	100,00	4.199.166.558	Dinas Pertanian
xx	xx	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular (Zoonosis)	100,00	100,00	542.382.883	100,00	572.465.946	100,00	678.173.173	100,00	540.394.391	100,00	648.154.078	100,00	2.981.570.472	Dinas Pertanian
xx	xx	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	50,00	60,00	1.665.207.653	70,00	1.779.407.170	80,00	2.107.979.023	90,00	1.679.718.523	100,00	2.014.670.080	100,00	9.246.982.450	Dinas Pertanian
xx	xx		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang Menerima Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	51,60	58,20	387.179.211	64,90	408.653.961	71,50	484.112.907	78,10	385.759.729	86,00	462.683.821	86,00	2.128.389.629	Dinas Pertanian
				Persentase Kelompok Tani yang Menerima Sarana/Prasarana	36,8	40,00		44,80		52,30		60,00		72,00		72,00		
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>						<b>4.218.763.876</b>		<b>3.210.250.510</b>		<b>4.019.000.457</b>		<b>3.687.043.461</b>		<b>4.602.969.548</b>		<b>19.738.027.852</b>		
xx	xx	15	Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTPP	20,00	20,00	403.753.768,01	16,00	571.705.542,09	14,00	762.876.223,19	8,00	800.370.379,69	4,00	959.306.961,80	4,00	3.498.012.874,78	Dinakerperindag
				Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	10,81		8,11		7,50		5,00		2,50		2,50		
xx	xx	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Promosi Produk Perdagangan	0,00	0,00	2.359.329.277	14,28	2.076.102.646	28,57	2.508.564.130	28,57	2.094.538.128	28,57	2.684.555.746	28,57	11.723.089.926	Dinakerperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang sampai di Tingkat Pasar Kecamatan	87,50	87,50	117.861.852,09	87,50	183.578.476,09	87,50	248.883.007,04	87,50	268.948.668,49	87,50	332.026.854,93	87,50	1.151.298.858,63	Dinakerperindag	
		Persentase Pengelola Distribusi Perdagangan yang dibina terhadap Pasar/Ruko	35,29	35,29		41,18		52,94		64,70		88,24		88,24			
xx	xx	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	20,00	23,53	1.337.818.979,48	40,00	378.863.844,99	60,00	498.677.097,13	80,00	523.186.285,59	100,00	627.079.985,49	100,00	3.365.626.192,68	Dinakerperindag
		<b>URUSAN INDUSTRI</b>			<b>4.101.804.891</b>		<b>2.934.159.637</b>		<b>4.991.819.699</b>		<b>5.520.406.503</b>		<b>6.337.227.195</b>		<b>23.885.417.924</b>		
xx	xx	15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	19,34	23,40	58.182.974	24,96	455.760.886	29,12	829.344.617	31,62	830.668.585	33,15	1.006.518.265	33,15	3.180.475.327	Dinakerperindag
			Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	68,52	74,74	122.010.138	75,89	120.367.619	76,92	192.870.841	79,47	386.357.481	82,39	228.754.151	82,39	1.050.360.230	Dinakerperindag
xx	xx	16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Pertumbuhan dan Pembinaan Sektor Industri Pengolahan IKM	14,12	14,12	1.429.436.609	15,46	175.292.649	16,07	289.306.262	16,15	289.768.111	16,56	343.131.227	16,56	2.526.934.857	Dinakerperindag
			Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	0,00	14,12	1.342.111.514	15,46	1.285.479.423	16,07	2.121.579.253	16,15	2.105.648.273	16,56	2.493.420.247	16,56	9.348.238.710	Dinakerperindag
			Jumlah Wanita Perdesaan yang dilatih terkait IKM	0,00	0,00	488.040.550	1 IKM	467.447.063	1 IKM	192.870.841	1 IKM	289.768.111	1 IKM	343.131.227	4 IKM	1.781.257.792	Dinakerperindag
xx	xx	19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Potensial	0,00	33,33	662.023.106	40,33	429.811.998	55,75	1.365.847.884	57,75	1.618.195.941	59,09	1.922.272.079	59,09	5.998.151.008	Dinakerperindag
		<b>PENUNJANG URUSAN</b>			<b>121.437.598.725</b>		<b>132.752.188.350</b>		<b>127.906.787.733</b>		<b>130.152.834.212</b>		<b>132.103.771.210</b>		<b>644.353.180.229</b>		
		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>71.788.791.071</b>		<b>80.443.163.205</b>		<b>79.820.029.200</b>		<b>83.266.639.963</b>		<b>86.305.095.487</b>		<b>401.623.718.926</b>		
xx	xx	Program Pembinaan, Penyuluhan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	50,00	50,00	2.550.000.000	60,00	2.750.000.000	75,00	2.800.000.000	80,00	2.900.000.000	85,00	3.000.000.000	85,00	14.000.000.000	Satpol PP
			Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada	50,00	50,00		60,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
xx	xx	08 Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani	Persentase Partisipasi Aparatur yang Mengikuti Acara Penyebaran Rohani	100,00	100,00	3.398.308.600	100,00	3.568.224.030	100,00	3.300.250.405	100,00	3.258.997.275	100,00	3.212.393.614	100,00	16.738.173.925	Setda
			Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Setda/Kecamatan	
			Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya yang diakomodir	20,00	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		60,00	Kecamatan	
xx	xx	15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Perundang-Undangan	87,00	100,00	36.807.473.900	100,00	38.647.847.595	100,00	35.748.209.760	100,00	35.301.357.138	100,00	34.796.547.731	100,00	181.301.436.123	Sekretariat DPRD
			Cakupan Pemenuhan SOP Bagian Keuangan	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Cakupan Pemenuhan SOP Bidang Umum	89,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx	15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100,00	100,00	2.520.680.000	100,00	2.646.714.000	100,00	2.447.945.779	100,00	2.417.346.456	100,00	2.382.778.402	100,00	12.415.464.637	Setda
xx	xx	16 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase BUMD yang Memiliki Manajemen yang Sehat	85,00	85,00	576.800.000	87,00	607.947.200	91,00	553.231.952	93,00	539.843.739	95,00	525.807.802	95,00	2.803.630.692	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level Peran dan Layanan APIP	Level 3	Level 3	6.117.310.260	Level 3	8.852.015.420	Level 3	10.151.557.885	Level 3	11.815.077.763	Level 3	13.203.973.773	Level 3	50.139.935.101	Inspektorat
				Level Pengelolaan SDM APIP	Level 3	Level 3												Inspektorat
				Level Praktik Profesional APIP	Level 3	Level 3												Inspektorat
				Level Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	Level 3	Level 3												Inspektorat
				Level Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	Level 3	Level 3												Inspektorat
				Level Struktur Tata Kelola APIP	Level 3	Level 3												Inspektorat
				% OPD yang Perencanaan Kinerjanya Minimal Kategori	70,00	70,00												Inspektorat
				% OPD yang Pengukuran Kinerjanya Minimal Kategori	70,00	70,00												Inspektorat
				% OPD yang Pelaporan Kinerjanya Minimal Kategori	70,00	70,00												Inspektorat
				% OPD yang Evaluasi Internalnya Minimal Kategori	70,00	70,00												Inspektorat
				% OPD yang Capaian Kinerjanya Minimal Kategori	70,00	70,00												Inspektorat
				% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Aset yang Material	75,00	75,00												Inspektorat
				% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	75,00												Inspektorat
				% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	75,00												Inspektorat
				% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	75,00												Inspektorat
				% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00												Inspektorat
				% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	64,71												Inspektorat
				Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100,00	100,00												Setda
				Persentase Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan NPHD	100,00	100,00												Setda
				Persentase OPD yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Zona Integritas (ZI)	11,76	17,65												
xx	xx	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan dengan Kinerja dalam Kategori Baik	100,00	100,00	4.129.181.493	100,00	7.016.716.475	100,00	8.938.301.134	100,00	11.216.097.311	100,00	13.383.201.056	100,00	44.683.497.469	Setda/Kecamatan
				Persentase SOP yang diterapkan dalam Proses Pelayanan	10,00	20,00												Kecamatan
				Persentase Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100,00	100,00												DINPMP2KUKM
				Persentase Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100,00	100,00												DINPMP2KUKM
				Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan sesuai SOP	96,00	97,00												DINPMP2KUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Penetapan Kebijakan Administrasi Wilayah dan Perbatasan	90,00	100,00	303.120.000	100,00	319.488.480	100,00	291.692.982	100,00	284.634.012	100,00	277.233.528	100,00	1.476.169.002	Setda
xx	xx		Program Pembakuan Nama Rupabumi	Persentase Data Informasi RBI yang dimanfaatkan oleh Stakeholders	0,00	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	120.000.000	100,00	130.000.000	100,00	140.000.000	100,00	600.000.000	Setda
xx	xx	18	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	186.456.000	100,00	196.524.624	100,00	179.426.982	100,00	175.084.849	100,00	170.532.643	100,00	908.025.097	Setda
xx	xx	19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan	98,00	100,00	674.872.500	100,00	711.315.615	100,00	649.431.156	100,00	633.714.923	100,00	617.238.335	100,00	3.286.572.529	Setda
				Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian Draft Produk Hukum (SK, NPHD, Mou, dll) sesuai SOP	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Produk Hukum Daerah yang	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Peningkatan Pemekaran Kelurahan/Desa	0,00	100,00	170.000.000	100,00	179.180.000	100,00	163.591.340	100,00	159.632.430	100,00	155.481.986	100,00	827.885.756	Setda
xx	xx	21	Program Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan sesuai dengan Pembagian Urusan	100,00	100,00	363.773.510	100,00	381.962.186	100,00	353.276.825	100,00	348.860.865	100,00	343.872.155	100,00	1.791.745.541	Setda
xx	xx	22	Program Advokasi dan Bantuan Hukum	Persentase Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum	97,00	100,00	459.228.000	100,00	484.026.312	100,00	441.916.023	100,00	431.221.655	100,00	420.009.892	100,00	2.236.401.882	Setda
xx	xx		Program Peduli Hukum dan HAM	Skor Kabupaten Peduli Ham	75,71	76,00	350.000.000	77,00	400.000.000	78,00	450.000.000	79,00	500.000.000	80,00	550.000.000	80,00	2.250.000.000	Setda
				Persentase Desa Sadar Hukum	5,70	10,00		25,00		45,00		65,00		85,00		85,00		
xx	xx	23	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan data Sumber Daya Alam yang Potensial	94,00	100,00	152.906.500	100,00	161.163.451	100,00	147.142.231	100,00	143.581.389	100,00	139.848.273	100,00	744.641.843	Setda
xx	xx	24	Program Pelayanan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang jasa yang dilaksanakan secara Elektronik			2.555.941.000		2.683.738.050		2.254.339.962		2.006.362.566		1.775.630.871		11.276.012.449	Setda
				- Belanja Pengadaan 50jt - 200jt	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				- Belanja Pengadaan mulai dari 200 juta	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
xx	xx	25	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	Persentase Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tepat	100,00	100,00	72.905.000	100,00	76.550.250	100,00	70.801.326	100,00	69.916.310	100,00	68.916.506	100,00	359.089.392	Setda
xx	xx	25	Program Ketatalaksanaan	Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	100,00	100,00	360.707.000	100,00	360.707.000	100,00	380.185.178	100,00	347.109.068	100,00	338.709.028	100,00	1.787.417.274	Setda
xx	xx		Program Reformasi Birokrasi	Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	100,00	100,00	276.738.000	100,00	290.574.900	100,00	268.752.725	100,00	265.393.316	100,00	261.598.192	100,00	1.363.057.132	Setda
				Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	71,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
xx	xx		Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00	100,00	693.933.712	100,00	732.590.754	100,00	671.038.081	100,00	654.918.732	100,00	637.939.166	100,00	3.390.420.445	Inspektorat
xx	xx		Program Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah	Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada Masyarakat	80,00	85,00	235.600.000	90,00	247.380.000	95,00	207.799.200	100,00	184.941.288	100,00	163.673.040	100,00	1.039.393.528	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab							
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
xx	xx	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% Auditor yang Bersertifikat Penjenjangan	100,00	100,00	517.163.746	100,00	100,00	556.334.257	100,00	100,00	515.110.792	100,00	100,00	505.040.572	100,00	100,00	492.875.939	100,00	100,00	2.586.525.305	Inspektorat	
			% Auditor yang Bersertifikat	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
xx	xx	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Pemerintahan Umum yang tertangani	100,00	100,00	8.041.433.850	100,00	100,00	8.282.676.866	100,00	100,00	8.531.157.171	100,00	100,00	8.787.091.887	100,00	100,00	9.050.704.643	100,00	100,00	42.693.064.417	Kecamatan	
xx	xx	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang Meningkatkan Kompetensinya	89,00	100,00	174.258.000	100,00	100,00	179.485.740	100,00	100,00	184.870.312	100,00	100,00	190.416.422	100,00	100,00	196.128.914	100,00	100,00	925.159.388	Setda	
		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN</b>				<b>11.269.604.654</b>			<b>11.883.798.108</b>			<b>10.814.256.278</b>			<b>10.552.551.276</b>			<b>10.278.184.943</b>			<b>54.798.395.258</b>		
xx	xx	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Capaian Pembangunan Daerah	100,00	100,00	935.422.000	100,00	100,00	986.402.499	100,00	100,00	897.626.274	100,00	100,00	875.903.718	100,00	100,00	853.130.222	100,00	100,00	4.548.484.713	BAPPEDA
				Persentase OPD yang Mengintegrasikan Data Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA	
				Persentase data perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang terdokumentasikan	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan	
				Persentase ketersediaan data dan informasi potensi dan pemanfaatan kawasan budidaya perikanan yang up to date (%)	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan	
				Persentase ketersediaan data dan informasi tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan yang up to date (%)	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perikanan	
				Persentase Data yang Akurat dan up to date	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setda	
xx	xx	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100,00	100,00	1.482.626.354	100,00	100,00	1.563.429.490	100,00	100,00	1.422.720.836	100,00	100,00	1.388.290.992	100,00	100,00	1.352.195.426	100,00	100,00	7.209.263.099	BAPPEDA
				Jumlah Kerjasama Partnership Melalui Pembiayaan Pembangunan	0,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
xx	xx	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat Kompetensi	18,75	31,25	620.901.000	31,25	37,50	654.740.105	37,50	37,50	595.813.495	37,50	37,50	581.394.809	37,50	37,50	566.278.543	37,50	37,50	3.019.127.952	BAPPEDA
xx	xx	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	80,00	100,00	2.700.856.800	100,00	100,00	2.848.053.496	100,00	100,00	2.591.728.681	100,00	100,00	2.529.008.847	100,00	100,00	2.463.254.617	100,00	100,00	13.132.902.440	BAPPEDA
				Persentase Keselarasan Program RKPd terhadap	70,00	72,00		74,00	76,00		76,00	78,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
				Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	94,12	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPd	65,00	67,00		69,00	71,00		71,00	73,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang	5,00	5,00		10,00	15,00		15,00	20,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
xx	xx	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Strategis Ekonomi	100,00	100,00	1.582.861.000	100,00	1.669.126.925	100,00	1.518.905.501	100,00	1.482.147.988	100,00	1.443.612.140	100,00	7.696.653.554	BAPPEDA
				Persentase Monitoring Inflasi Daerah	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA
				Persentase Rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda
				Persentase Rekomendasi FPED yang ditindaklanjuti	65,00	65,00		69,00		73,00		76,00		82,00		82,00		Setda
xx	xx	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Strategis Sosial Budaya	100,00	100,00	1.366.841.000	100,00	1.441.333.835	100,00	1.311.613.789	100,00	1.279.872.736	100,00	1.246.596.045	100,00	6.646.257.404	BAPPEDA
xx	xx	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Strategis Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00	100,00	1.413.345.500	100,00	1.490.372.830	100,00	1.356.239.275	100,00	1.323.418.285	100,00	1.289.009.409	100,00	6.872.385.299	BAPPEDA
xx	xx		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Persentase pelaksanaan Program OPD sesuai Rencana Kerja OPD	82,96	83,95	1.166.751.000	84,95	1.230.338.930	85,95	1.119.608.426	86,95	1.092.513.902	87,95	1.064.108.540	87,95	5.673.320.798	BAPPEDA
				Persentase OPD dengan capaian kinerja baik	82,96	83,95		84,95		85,95		86,95		87,95		87,95		
			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN</b>				<b>20.989.565.500</b>		<b>22.133.496.820</b>		<b>20.207.882.596</b>		<b>19.718.851.838</b>		<b>19.206.161.690</b>		<b>102.255.958.444</b>	
xx	xx	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu	100,00	100,00	10.792.464.000	100,00	11.380.653.288	100,00	10.390.536.452	100,00	10.139.085.470	100,00	9.875.469.248	100,00	52.578.208.457	BPKAD
				Persentase OPD yang Menerapkan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dengan Hasil	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
				Persentase OPD yang Menerapkan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dengan hasil	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
				Persentase OPD yang Mencatat Aset ke dalam Buku Inventaris secara Benar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
				Persentase OPD yang Menggunakan Aset secara Tepat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
xx	xx		Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	17,00	18,00	4.618.816.000	18,00	4.870.541.472	21,00	4.446.804.364	23,00	4.339.191.698	25,00	4.226.372.714	25,00	22.501.726.248	BP2RD
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		BP2RD
				Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor PBB dan BPHTB	20,00	21,00		22,00		23,00		24,00		25,00		25,00		BP2RD
xx	xx		Program Optimalisasi Dana Perimbangan/Transfer	Persentase Penerimaan dari Daerah Dana Perimbangan/Transfer	97,00	97,00	527.584.000	97,00	556.337.328	98,00	507.935.980	98,00	495.643.930	98,00	482.757.188	98,00	2.570.258.426	BP2RD
				Persentase Penerimaan dari Dana Transfer Provinsi	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		80,00		BP2RD
xx	xx		Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah	100,00	100,00	1.523.934.500	100,00	1.606.988.930	100,00	1.467.180.893	100,00	1.431.675.116	100,00	1.394.451.563	100,00	7.424.231.002	BP2RD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD										SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
xx	xx	Program Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pajak Daerah	100,00	100,00	3.526.767.000	100,00	3.718.975.802	100,00	3.395.424.907	100,00	3.313.255.624	100,00	3.227.110.978	100,00	17.181.534.310	BP2RD	
		<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>				<b>12.617.062.500</b>		<b>13.251.726.489</b>		<b>12.244.572.294</b>		<b>12.080.788.574</b>		<b>11.897.566.315</b>		<b>62.091.716.172</b>		
xx	xx	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	85,00	100,00	10.589.152.500	100,00	11.118.610.125	100,00	10.283.602.505	100,00	10.155.057.473	100,00	10.009.840.151	100,00	52.156.262.754	BKPSDMD/Seluruh OPD
			Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	63,50		65,62		66,25		68,75		75,00		75,00		BKPSDMD	
			Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan	13,33	13,33		17,14		20,00		22,20		24,44		24,44		BKPSDMD	
			Persentase Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,00	20,00		25,00		50,00		65,00		75,00		75,00		BKPSDMD	
			Persentase Sumber Daya Aparatur yang Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	na	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		60,00		Setda	
			Persentase Aparatur Perencana yang Mendapat Sertifikat	18,75	31,25		31,25		37,50		37,50		37,50		37,50		Kecamatan	
xx	xx	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Disiplin Aparatur	67,00	67,00	952.716.000	70,00	1.004.162.664	75,00	916.800.512	80,00	894.613.940	83,30	871.353.977	83,30	4.639.647.093	BKPSDMD
			Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKPSDMD	
xx	xx		Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Kebutuhan Analisis Jabatan	50,00	55,00	421.581.500	60,00	442.660.575	65,00	409.416.766	70,00	404.299.056	75,00	398.517.580	75,00	2.076.475.477	BKPSDMD/Seluruh OPD
xx	xx		Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	653.612.500	100,00	686.293.125	100,00	634.752.511	100,00	626.818.105	100,00	617.854.606	100,00	3.219.330.847	BKPSDMD/Seluruh OPD
			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>4.772.575.000</b>		<b>5.040.003.729</b>		<b>4.820.047.364</b>		<b>4.534.002.561</b>		<b>4.416.762.776</b>		<b>23.583.391.429</b>		
xx	xx	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan	100,00	100,00	4.772.575.000	100,00	5.040.003.729	100,00	4.820.047.364	100,00	4.534.002.561	100,00	4.416.762.776	100,00	23.583.391.429	BAPPEDA
			Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA	
			Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BAPPEDA	
						<b>651.658.314.000</b>		<b>688.802.975.506</b>		<b>743.547.067.404</b>		<b>798.151.226.468</b>		<b>863.514.247.885</b>		<b>3.745.673.831.263</b>		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD									SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin	<i>(Jumlah Lembaga Formal Berizin) / (Jumlah Lembaga Formal) x 100%</i>	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Nilai Standar Isi Pendidikan	<i>Nilai Evaluasi Standar Isi Pendidikan</i>	n/a	47,00	1.650.218.615	50,00	1.666.720.801	53,00	1.750.056.841	53,00	5.066.996.257	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Nilai Standar Proses Pendidikan	<i>Nilai Evaluasi Standar Proses Pendidikan</i>	n/a	47,00		50,00		53,00		53,00		
				Nilai Standar Penilaian Pendidikan	<i>Nilai Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan</i>	n/a	47,00		50,00		53,00		53,00		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikasi	<i>(Jumlah Guru yang Bersertifikasi) / (Jumlah Guru di Kab. Bangka) x 100 %</i>	50,00	75,00	34.291.126.000	79,00	34.634.037.260	85,00	34.980.377.633	85,00	103.905.540.893	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi	<i>(Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi) / (Jumlah Tenaga Kependidikan di Kab. Bangka) x 100 %</i>	40,00	55,00		60,00		65,00		65,00		
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>134.383.251.369</b>		<b>135.729.587.763</b>		<b>130.815.534.596</b>		<b>400.928.373.728</b>	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>Jumlah Indeks 4 IKS dibagi 4</i>	n/a	0,44	132.948.467.869	0,45	134.277.952.548	0,47	129.277.952.548	0,47	396.504.372.964	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
				Indeks Keluarga Sehat Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<i>Indeks 6 IKS dibagi 6</i>	n/a	0,48		0,50		0,56		0,56		
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Meningkatkan Status Akreditasinya	<i>Jumlah Fasyankes yang meningkat status akreditasinya dibagi jumlah Fasyankes yang disurvei akreditasi dikali 100</i>	n/a	100,00		100,00		100,00		100,00		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	<i>Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang sesuai Standar / Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang ada x 100 Persen</i>	n/a	100,00	361.117.500	100,00	364.728.675	100	436.952.175	100,00	1.162.798.350	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	<i>Jumlah pengawasan dan pembinaan pada toko obat, apotek, dan IRTP dibagi jumlah toko obat, apotik, dan IRTP yang ada x 100 Persen</i>	n/a	60,00	138.932.000	65,00	142.825.200	70,00	147.107.720	70,00	428.864.920	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	<i>Jumlah rumah tangga yang ber PHBS dibagi jumlah rumah tangga yang di Survey</i>	n/a	0,75	934.734.000	0,77	944.081.340	0,78	953.522.153	0,78	2.832.337.493	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
1	03		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>128.681.890.150</b>		<b>121.272.740.128</b>		<b>117.894.960.983</b>		<b>367.849.591.261</b>	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	<i>(Panjang Saluran Irigasi/Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik) x 100%</i>	60,00	65,00	14.595.000.000	66,00	12.740.950.000	68,00	12.868.359.500	68,00	40.204.309.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	<i>(Panjang Saluran Drainase Primer/Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik) x 100%</i>	58,00	58,72		60,50		62,75		62,75		
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Bersih	<i>(Jumlah Desa yang terlayani Air Bersih) / (Jumlah Desa Keseluruhan) x 100%</i>	45,50	55,00	2.200.000.000	65,00	2.222.000.000	75,00	2.244.220.000	75,00	6.666.220.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perentase Desa/Kelurahan yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	(Jumlah kelurahan/Desa yang Memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) / (Jumlah Kelurahan / Desa) x100%	3,71	3,71	699.970.150	4,94	799.970.150	6,17	1.000.000.000	6,17	2.499.940.300	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL	(Jumlah Desa yang Memiliki SPAL) / (Jumlah Kawasan Desa yang Tertinggal) x100%	40,50	50,00	1.350.000.000	67,00	1.363.500.000	75,00	1.377.135.000	75,00	4.090.635.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman kondisi baik	(Panjang Jalan Lingkungan Permukiman dalam kondisi baik + Panjang saluran permukiman dalam kondisi baik / 2 x 100%	46,50	56,00	16.200.000.000	65,00	16.362.000.000	75,00	15.743.083.305	75,00	48.305.083.305	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Layanan Publik dalam Kondisi Baik	Jumlah Bangunan Layanan Publik yang baik / Jumlah bangunan layangan publik x 100%	32,50	45,00	11.065.000.000	56,00	8.175.650.000	67,00	8.257.406.500	67,00	27.498.056.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung Publik yang Tertata	Jumlah bangunan Publik yang tertata / Jumlah bangunan Publik x 100%	42,50	61,20	16.000.000.000	67,50	13.160.000.000	75,80	11.291.600.000	75,80	40.451.600.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik > 40 Km/jam	60,72	64,50	63.471.670.000	66,90	63.317.417.478	70,25	61.950.591.653	70,25	188.739.679.131	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang Terlatih	(Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih) / (Jumlah Tenaga Terampil) x 100%	n/a	60,00	600.000.000	65,00	606.000.000	75,00	612.060.000	75,00	1.818.060.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Jumlah Permohonan Yang sesuai/ Jumlah Keseluruhan Permohonan x 100%	90,00	100,00	2.500.250.000	100,00	2.525.252.500	100,00	2.550.505.025	100,00	7.576.007.525	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1</b>	<b>04</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>9.883.928.100</b>		<b>12.395.926.318</b>		<b>13.848.674.107</b>		<b>36.128.528.525</b>		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memiliki Rumah yang Layak	(Jumlah MBR yang Memiliki Rumah Layak) / (Jumlah Seluruh MBR) x 100 Persen	90,15	95,26	3.750.000.000	96,10	3.937.500.000	96,80	3.976.875.000	96,80	11.664.375.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Rumah Korban Bencana yang Direkonstruksi	(Jumlah Rumah yang Terkena Dampak) / (Rumah yang Direkonstruksi) x 100 Persen	12,35	80,25		92,75		100,00	100,00			
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	(Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani) / (Total Luas Kawasan Kumuh) x 100 Persen	50,00	50,00	1.360.188.750	80,00	3.446.000.000	100,00	4.709.000.000	100,00	9.515.188.750	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	(Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani) / (Total Luas Kawasan Kumuh) x 100 Persen	50,00	50,00	2.388.739.350	80,00	2.508.176.318	100,00	2.583.421.607	100,00	7.480.337.275	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang Memiliki Akses Sarana dan Prasarana Perumahan yang Layak	(Jumlah Perumahan yang Memiliki Sarana dan Prasarana yang Layak) / (Jumlah Seluruh Perumahan) x 100 Persen	50,00	100,00	2.385.000.000	100,00	2.504.250.000	100,00	2.579.377.500	100,00	7.468.627.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>21.890.000.000</b>		<b>22.984.500.000</b>		<b>23.871.120.000</b>		<b>68.745.620.000</b>	
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	(Jumlah Pelanggaran pada Tahun (n-1) - Tahun n) / (Jumlah Pelanggaran pada Tahun (n-1)) x 100%	15,00	13,00	14.940.000.000	7,40	15.687.000.000	4,00	15.843.870.000	4,00	46.470.870.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	(Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Diselesaikan) / (Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Dilaporkan/Terjadi) x 100%	79,80	83,30		93,60		95,50	95,50	95,50		
				Presentase Pengembangan Kapasitas Aparatur	(Jumlah Anggota Satpol PP yang Memiliki Sertifikat Pelatihan) / (Jumlah Keseluruhan Anggota Satpol PP) x 100%	72,00	82,00		87,00		92,00	92,00	92,00		
				Presentase Cakupan Satlinmas Inti	(Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Anggota Satuan Linmas Inti) / (Jumlah Desa/Kelurahan) x 100%	70,37	85,19		90,12		95,06	95,06	95,06		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Skor Kapasitas Bencana (aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian resiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor resiko dasar, pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini) x 10	n/a	30,00	3.390.000.000,00	40,00	3.559.500.000	60,00	3.915.450.000	75,00	10.864.950.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Bidang Kebencanaan)
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Pencegahan Bahaya Kebakaran	(Jumlah Gedung yang Memiliki APAR) / (Jumlah Seluruh Gedung Perkantoran) x 100%	62,84	69,18	3.560.000.000,00	71,58	3.738.000.000	74,18	4.111.800.000	74,18	11.409.800.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Presentase Penanggulangan Pemadam Kebakaran	(Jumlah Penanganan Kebakaran yang Ditangani) / (Jumlah Kejadian Kebakaran) x 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00		
				Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang tertangani	(Jumlah Investigasi Kebakaran) / (Jumlah Kejadian Kebakaran) x 100%	69,00	78,00		86,00		92,00	92,00	92,00		
1	06		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>3.582.162.750</b>		<b>3.680.318.454</b>		<b>3.786.549.030</b>		<b>11.049.030.234</b>	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	(Jumlah PMKS yang mendapat Pemberdayaan Sosial)/(Jumlah Seluruh PMKS) x 100%	59,26	80,00	1.348.803.200	85,00	1.389.267.296	90,00	1.430.945.315	90,00	4.169.015.811	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	(Jumlah PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial)/(Jumlah Seluruh PMKS) x 100%	45,00	50,00	1.586.503.600	55,00	1.615.828.780	60,00	1.646.620.219	60,00	4.848.952.599	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	(Jumlah PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial)/(Jumlah Seluruh PMKS) x 100%	55,00	60,00	646.855.950	65,00	675.222.378	70,00	708.983.496	70,00	2.031.061.824	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2						104.963.669.723		109.105.849.395		112.891.320.843		326.960.839.961			
2	07					571.216.200		599.777.010		659.754.711		1.830.747.921			
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Produktifitas Regional Bruto (PDRB) / Angkatan Kerja) x 100%	n/a	8,60	199.981.200,00	8,72	209.980.260	8,80	230.978.286	8,80	640.939.746,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	(Jumlah Penempatan) / (Jumlah Pencari Kerja) x 100%	n/a	32,65	140.165.000,00	32,90	147.173.250	32,95	161.890.575	32,95	449.228.825,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	(Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Syarat Kerja (Memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama) / Jumlah Perusahaan yang Wajib Membuat Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama) x 100%	n/a	50,7	231.070.000,00	52,11	242.623.500	53,52	266.885.850	53,52	740.579.350,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
2	08							2.491.825.000		2.461.416.250		2.234.487.063		7.187.728.313	
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	(Jumlah OPD yang Menerapkan PPRG) / (Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	79,11	100,00	470.000.000	100,00	488.500.000	100,00	507.925.000	100,00	1.466.425.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Yang terselesaikan	(Jumlah Kasus yang Terlayani) / (Jumlah Kasus) x 100%	100,00	100,00	502.500.000	100,00	512.625.000	100,00	223.256.250	100,00	1.238.381.250	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan	(Jumlah Pekerja Perempuan dalam Lembaga Pemerintah dan Swasta) / (Jumlah Pekerja Perempuan) x 100%	30,29	32,71	557.105.000	34,10	664.960.250	36,43	673.208.263	36,43	1.895.273.513	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profile Gender Kabupaten	(Jumlah PD yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak) / (Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	100,00	100,00	135.000.000	100,00	136.750.000	100,00	138.587.500	100,00	410.337.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Kasus Kekerasan Anak Yang Terselesaikan	(Jumlah Kasus Anak yang Terlayani) / (Jumlah Kasus) x 100%	100,00	100,00	504.470.000	100,00	529.693.500	100,00	556.178.175	100,00	1.590.341.675	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak				322.750.000		128.887.500		135.331.875		586.969.375	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	09		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>			<b>2.438.258.400</b>		<b>2.604.056.570</b>		<b>2.917.095.223</b>		<b>7.959.410.193</b>			
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Cadangan Pangan	<i>(Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Cadangan Pangan) / (Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan) x 100%</i>	3,70	6,17	805.787.700,00	8,64	825.000.000,00	12,35	975.003.117,00	12,35	2.605.790.817,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Kelancaran Distribusi Pangan	<i>(Jumlah Jenis Bahan Pangan Pokok Terdistribusi Merata) / (Jumlah Jenis Bahan Pokok yang Ditetapkan) x 100%</i>	74,60	76,92	1.160.117.700,00	84,62	1.276.129.470,00	90,00	1.403.742.417,00	90,00	3.839.989.587,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
			Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	<i>((Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Tahun n) - (Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Tahun (n-1))) / (Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun (n-1)) x 100%</i>	1,50	14,65		16,60		19,00		19,00			
			Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	<i>(Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n) - (Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n-1) / (Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian Tahun n-1) x 100%</i>	0,85	1,12		1,45		1,75		1,75			
			Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah	<i>(Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah Tahun n) - (Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah Tahun n-1) / (Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah Tahun n-1) x 100%</i>	2,68	3,25		3,50		5,00		10,00			
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah data neraca bahan makanan	<i>dokumen neraca bahan makanan yang tersedia</i>	1,00	1,00	208.265.000,00	1,00	212.430.300,00	0,00	218.803.209,00	2,00	639.498.509,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	<i>(Jumlah Sampel Pangan Segar yang Aman) / (Jumlah Seluruh Sampel yang Diuji) x 100%</i>	91,68	94,00	264.088.000,00	95,00	290.496.800,00	98,00	319.546.480,00	98,00	874.131.280,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pangan
2	10		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					<b>4.602.832.528</b>		<b>4.832.974.154</b>		<b>5.074.622.862</b>		<b>14.510.429.545</b>	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Usaha Yang Memiliki Izin Lokasi	<i>Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Lokasi dibagi Jumlah Perusahaan yang Menggunakan Tanah di Kabupaten Bangka x 100%</i>	100,00	100,00	257.555.000	100,00	270.432.750	100,00	283.954.388	100,00	811.942.137,50	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan	<i>Jumlah Konflik n-1 dikurangi Jumlah Konflik n dibagi Jumlah Konflik</i>	100,00	100,00	245.277.528	100,00	257.541.404	100,00	270.418.475	100,00	773.237.407,02	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Tersesalkan	<i>Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang Tersesalkan dibagi Jumlah Kewajiban Ganti Rugi dan Santunan Tanah Tahun n</i>	100,00	100,00	1.500.000.000	100,00	1.575.000.000	100,00	1.653.750.000	100,00	4.728.750.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lahan Pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan	Luas Lahan Pemda yang siap untuk Dimanfaatkan dibagi Total Luas Laham Pemda x 100%	28,07	28,50	2.600.000.000	28,75	2.730.000.000	29,00	2.866.500.000	29,00	8.196.500.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
<b>2</b>	<b>11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>12.813.186.250</b>		<b>13.197.581.838</b>		<b>13.593.509.293</b>		<b>39.604.277.380</b>		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi dibagi luas lahan rehabilitasi yang ditetapkan x 100%	22,46 Ha	27,43 Ha	314.686.000,00	31,95 Ha	324.126.580,00	33,05 Ha	333.850.377,40	33,05 Ha	972.662.957,40	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan lahan yang direhabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi dibagi luas lahan rehabilitasi yang ditetapkan x 100%	22,46 Ha	27,43 Ha	568.000.000,00	31,95 Ha	585.040.000,00	33,05 Ha	602.591.200,00	33,05 Ha	1.755.631.200,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Luas RTH yang ada dibagi Luas RTH yang harus ada x 100%	20,00	20,00	1.371.779.950,00	20,00	1.412.933.348,50	20,00	1.455.321.348,96	60,00	4.240.034.647,46	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	Target penurunan kasus tahun berjalan / target penurunan kasus 5 tahun	25,00	66,67	445.750.000,00	83,33	459.122.500,00	100,00	472.896.175,00	100,00	1.377.768.675,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	Target penurunan kasus tahun berjalan / target penurunan kasus 5 tahun	25,00	66,67	50.000.000,00	83,33	51.500.000,00	100,00	53.045.000,00	100,00	154.545.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penurunan kasus lingkungan hidup	Target penurunan kasus tahun berjalan / target penurunan kasus 5 tahun	25,00	66,67	100.000.000,00	83,33	103.000.000,00	100,00	106.090.000,00	100,00	309.090.000,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	Volume pengurangan sampah / volume timbulan sampah kabupaten x 100%	20,00	24,00	9.962.970.300	26,00	10.261.859.409,00	27,00	10.569.715.191,27	27,00	30.794.544.900	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
				Persentase Penanganan Sampah	Volume sampah yang tertangani / volume timbulan sampah kabupaten X 100%	80,00	74,00		73,00		71,00		71,00		
<b>2</b>	<b>12</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>4.320.131.176</b>		<b>4.536.137.735</b>		<b>4.762.944.622</b>		<b>13.619.213.532</b>		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan penerbitan KIA	Perbandingan Jumlah KIA yang diterbitkan dengan Jumlah seluruh Anak x 100 Persen	85,00	40,00	1.507.300.000	40,00	1.582.665.000	40,00	1.661.798.250	100,00	4.751.763.250	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Cakupan penerbitan KK	Perbandingan Jumlah KK yang diterbitkan dengan Jumlah seluruh KK x 100 Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Cakupan penerbitan KTP-el	Perbandingan Jumlah KK -El yang diterbitkan dengan jumlah KK yang diterbitkan x 100 Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian	Perbandingan Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan terhadap Jumlah Angka Kematian x 100 Persen		40,00		40,00		40,00		40,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	Perbandingan Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan terhadap Jumlah Angka Kelahiran x 100 Persen		70,00		70,00		70,00		90,00			
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Perkawinan	Perbandingan Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan terhadap Jumlah Perkawinan yang dilaporkan x 100 Persen		40,00		40,00		40,00		70,00			
			Persentase Cakupan penerbitan Akta Perceraian	Perbandingan Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan terhadap jumlah Perceraian yang dilaporkan x 100 Persen		40,00		40,00		40,00		70,00			
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah Standar Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang memiliki SOP dibagi Jumlah jenis pelayanan x 100 Persen	100,00	100,00	2.812.831.176	100,00	2.953.472.735	100,00	3.101.146.372	100,00	8.867.450.282	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Pemanfaatan Data	Jumlah permintaan data kependudukan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan data x 100 Persen	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00			
			Persentase inovasi kependudukan yang dimanfaatkan	Jumlah Inovasi Kependudukan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Inovasi Kependudukan yang dikembangkan x 100 Persen	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00			
			Persentase Pegawai yang telah Memiliki Kompetensi Pelayanan	Jumlah pegawai pelayanan yang memiliki sertifikat pelayanan dibagi jumlah pegawai pelayanan x 100 Persen	60,00	60,00		60,00			60,00	60,00			
			Persentase Penurunan Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan Tahun n - Jumlah Pengaduan Tahun n-1 dibagi jumlah pengaduan Tahun n-1 x 100 Persen	100,00	100,00		100,00			100,00	80,00			
			Persentase Pemenuhan Sarana/Prasarana	Jumlah sarana prasarana sesuai standar yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana sesuai standar yang harus tersedia x 100 Persen	80,00	80,00		80,00			80,00	80,00			
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>8.250.892.572</b>		<b>8.663.437.201</b>		<b>9.096.609.061</b>		<b>26.010.938.833</b>	
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi yang Baik	Jumlah desa dengan pengelolaan Administrasi yang baik dibagi jumlah seluruh desa x 100 Persen	100,00	100,00	715.856.500	100,00	751.649.325	100,00	789.231.791	100,00	2.256.737.616	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Jumlah desa dengan pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dibagi jumlah seluruh desa x 100 Persen	31,00	31,00	5.247.540.253	100,00	5.509.917.266	100,00	5.785.413.129	100,00	16.542.870.648	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat x 100 persen	100,00	100,00	2.287.495.819	100,00	2.401.870.610	100,00	2.521.964.140	100,00	7.211.330.569	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>					<b>4.581.421.616</b>		<b>3.276.864.264</b>		<b>3.375.170.192</b>		<b>11.233.456.072</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata anak per keluarga	Jumlah Anak Dibagi Jumlah Keluarga	1,72	1,62	551.668.000	1,58	568.218.040	1,52	585.264.581	1,52	1.705.150.621	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penggunaan alat kontrasepsi MKJP	Jumlah (Aktepor Implant, IUD, MOW, MOP) dibagi Jumlah Peserta KB aktif x 100 Persen	16,99	17,88	2.205.393.616	18,22	2.271.555.424	18,51	2.339.702.087	18,51	6.816.651.127	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KN Aktif dibagi Jumlah PUS x 100 Persen	69,86	71,46		72,12		73,92		75,77		
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Kelompok BKB ber KB	Jumlah Anggota BKB ber-KB dibagi seluruh PUS anggota BKB x 100%	65,67	75,67	1.824.360.000	77,75	437.090.800	79,10	450.203.524	79,10	2.711.654.324	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan Anggota Kelompok BKR ber KB	Jumlah Anggota BKR ber-KB dibagi seluruh PUS anggota BKR x 100 Persen	69,37	87,38		89,50		91,25		91,25		
				Cakupan Anggota Kelompok BKL ber KB	Jumlah Anggota BKL ber-KB dibagi seluruh PUS anggota BKL x 100 Persen	67,15	75,27		79,25		81,15		81,15		
				UPPKS di setiap Desa/ kelurahan	Jumlah UPPKS dibagi Jumlah Desa/kelurahan x 100 Persen	50,62	70,77		80,24		90,12		90,12		
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>14.674.000.000</b>		<b>15.114.220.000</b>		<b>15.567.646.600</b>		<b>45.355.866.600</b>	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi	Jumlah Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi tahun n - jumlah Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi tahun n-1/ jumlah rute n-1 x 100%	N/a	2,50	14.674.000.000	5,00	15.114.220.000	7,50	15.567.646.600	7,50	45.355.866.600	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
				Persentase Kecamatan yang mendapatkan pelayanan angkutan bus sekolah	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan angkutan bus sekolah dibagi jumlah seluruh kecamatan x 100 Persen	38,00	38,00		50,00		75,00		75,00		
				Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan	Jumlah Angkutan yang layak jalan dibagi jumlah seluruh angkutan x 100 Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Jumlah sarana prasarana LLAJ sesuai standar dibagi jumlah seluruh sarana prasana LLAJ x 100 persen	80,00	80,00		85,00		90,00		90,00		
				Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan Tahun (N-) - Jumlah Angka Kecelakaan Tahun (N) * 100%	15,00	15,00		10,00		5,00		5,00		
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>11.503.694.029</b>		<b>11.118.730.969</b>		<b>11.229.918.279</b>		<b>33.852.343.277</b>	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang KOMINFOTIK	Jumlah regulasi yang diimplementasikan dibagi jumlah regulasi bidang kominfatik x 100 Persen	51,61	83,87	6.503.694.029	100,00	6.568.730.969	100,00	6.634.418.279	100,00	19.706.843.277	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
				Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Jumlah layanan publik yang berbasis elektronik yang terintegrasi dibagi jumlah layanan publik berbasis elektronik x 100 Persen	46,15	92,30		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD									SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Jumlah layanan administrasi pemerintah yang berbasis elektronik yang terintegrasi dibagi jumlah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik x 100 Persen	65,00	65,00	5.000.000.000	70,00	4.550.000.000	80,00	4.595.500.000	80,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik	
2	17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>13.433.399.466</b>		<b>13.836.401.450</b>		<b>14.251.493.493</b>		<b>41.521.294.409</b>		
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	Jumlah Klasifikasi A tahun N - Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) / Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) x 100%	66,34	71,20	2.161.333.623	76,10	2.226.173.631	85,85	2.292.958.840	85,85	6.680.466.094	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	Jumlah Klasifikasi A tahun N - Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) / Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) x 100%	66,34	71,20	185.767.236	76,10	191.340.253	85,85	197.080.460	85,85	574.187.949	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	Jumlah Klasifikasi A tahun N - Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) / Jumlah Klasifikasi A Tahun (N-1) x 100%	66,34	71,20	568.706.054	76,10	585.767.236	85,85	603.340.253	85,85	1.757.813.542	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	Jumlah Omset Usaha Mikro Tahun N - Jumlah Omset Usaha Mikro N-1 / Jumlah Omset Usaha Mikro N-1 x 100%	32,00	50,00	5.517.592.554	66,67	5.683.120.330	100,00	5.853.613.940	100,00	17.054.326.824	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	Jumlah Omset Usaha Mikro Tahun N - Jumlah Omset Usaha Mikro N-1 / Jumlah Omset Usaha Mikro N-1 x 100%	32,00	50,00	5.000.000.000	66,67	5.150.000.000	100,00	5.304.500.000	100,00	15.454.500.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>3.876.546.641</b>		<b>3.992.843.040</b>		<b>4.112.628.331</b>		<b>11.982.018.013</b>		
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor	Jumlah Investor Yang Merealisasikan Penanaman Modal / Jumlah Investor Yang Berinvestasi x 100%	33,00	34,00	474.117.440	35,00	488.340.963	36,00	502.991.192	36,00	1.465.449.596	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor	Jumlah Investor Yang Merealisasikan Penanaman Modal / Jumlah Investor Yang Berinvestasi x 100%	33,00	34,00	1.469.144.201	35,00	1.513.218.527	36,00	1.558.615.083	36,00	4.540.977.810	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu	Jumlah Berkas Usulan Yang Memiliki Syarat Lengkap / Jumlah Berkas Usulan Yang Didaftarkan x 100 %	100,00	100,00	995.000.000	100,00	1.024.850.000	100,00	1.055.595.500	100,00	3.075.445.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM	Jumlah Perusahaan Yang Melaporkan LKPM / Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi x 100 %	33,00	34,00	385.785.000	35,00	397.358.550	36,00	409.279.307	36,00	1.192.422.857	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Sesuai Standar / Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Tersedia x 100 %	98,45	100,00	552.500.000	100,00	569.075.000	100,00	586.147.250	100,00	1.707.722.250	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
				Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pelayanan Perizinan Yang Memiliki Kompetensi Melalui Pendidikan dan Pelatihan / Jumlah Aparatur Pelayanan Perizinan Yang Belum Mengikuti Diklat x 100 %	100,00	100,00		100,00		100,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja						SKPD Penanggung Jawab					
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
2	19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			11.727.402.450		12.208.872.573		12.819.316.201		36.755.591.224				
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Penyadaran Pemuda	Persentase pemuda Kab. Bangka yang terbebas dari napa + Persentase Pemuda Kab. Bangka yang mengikuti sosialisasi kunjungan seks bebas + Persentase Pemuda yang bebas dari penyakit HIV AIDS+ Persentase Pemuda yang bebas dari tindak kekerasan + Persentase Pemuda yang bebas dari tindak radikalisme dan terorisme / 5	N/a	11,80	5.245.000.000	12,00	5.402.350.000	12,50	5.672.467.500	12,50	16.319.817.500,00	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
				Indeks Pemberdayaan Pemuda	Persentase Pemuda Kab. Bangka yang berpartisipasi dalam pendidikan formal + Persentase Pemuda Kab. Bangka yang berpartisipasi dalam pendidikan non formal + APM (Angka Partisipasi Murni) SMA/SMK + APM Pemuda di Perguruan Tinggi / 4	N/a	66,50		67,00		68,00		68,00			
				Indeks Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan + Persentase pemuda yang memiliki potensi keterampilan dan kemandirian usaha + Persentase pemuda yang berorganisasi + Persentase Pemuda yang mengikuti pendidikan dan diklat + Persentase Pemuda yang telah berwirausaha / 5	N/a	0,67		1,57		2,00		2,00			
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan	Persentase Tenaga Keolahragaan Pendidikan Yang Memiliki Sertifikat + Persentase Prestasi Pengolahraga Pendidikan + Persentase % Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Yang Memenuhi Standar/ 3	N/a	29,77	6.482.402.450	30,27	6.806.522.573	32,00	7.146.848.701	32,00	20.435.773.723,63	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
				Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi	PersentaseTenaga Keolahragaan Rekreasi Yang Memiliki Sertifikat+ Persentase Prestasi Pengolahraga Rekreasi + Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Yang Memenuhi Standar/ 3	N/a	8,54		8,79		9,04		9,04			
				Indeks Kualitas Olahraga Prestasi	Persentase tenaga olahraga prestasi yang bersertifikat + Persentase Prestasi Pengolahraga Prestasi + % Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi Yang Memenuhi Standar / 3	N/a	8,71		8,91		9,11		9,11			
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					470.909.182		465.022.817		458.372.991		1.394.304.990		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Data Statistik Daerah yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen data statistik yang disusun x 100 Persen	100,00	100,00	470.909.182	100,00	465.022.817	100,00	458.372.991	100,00	1.394.304.990	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Statistik	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	21					1.033.126.000		1.064.119.780		1.096.043.373		3.193.289.153			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan Terstandarisasi	Jumlah layanan administrasi pemerintah yang berbasis elektronik yang terdokumentasi dan terstandarisasi dibagi jumlah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik x 100 Persen	30,00	35,00	1.033.126.000	40,00	1.064.119.780	45,00	1.096.043.373	45,00	3.193.289.153	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Persandian
2	22					6.204.268.261		6.450.433.115		6.828.230.999		19.482.932.375			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>															
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pengembangan Budaya	Persentase Pelaku Tradisi yang Memahami Nilai Tradisi dan Karakter Bangsa + Persentase Objek Budaya yang direvitalisasi / 2	53,96	66,86	3.601.755.000	75,70	3.950.433.115	83,96	3.778.230.999	83,96	11.330.419.114	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
				Indeks Pemanfaatan Budaya	Persentase Responden yang Puas dengan Fasilitas Budaya + Persentase Peningkatan Kelompok Seni yang berprestasi + Persentase Kerjasama Budaya yang ditindaklanjuti/3	68,77	76,43		84,80		93,05	93,05			
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	% Pengguna Pusat Informasi Kebudayaan yang Aktif + % Objek Budaya yang diinventarisir + % Tradisi Budaya yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual Komunal + % Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan + % Seni dan Budaya yang dilestarikan + % Objek Budaya yang direpatisasi + % Objek Budaya yang direstorasi dibagi 7	51,09	66,09	2.602.513.261	68,67	2.500.000.000	74,43	3.050.000.000	74,43	8.152.513.261	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
2	23					1.276.188.000		3.793.581.383		3.897.416.924		8.967.186.307			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>															
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jenis Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jenis Layanan Perpustakaan yang ada / Jumlah jenis perpustakaan yang sesuai standar Nasional	100,00	100,00	1.276.188.000	100,00	3.793.581.383	100,00	3.897.416.924	100,00	8.967.186.307	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
				Persentase Jenis Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Jenis koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan berbanding jenis koleksi bahan pustaka yang harus dicapai sesuai Standar Nasional Kabupaten/Kota dikali 100%	83,33	83,33		83,33		83,33	83,33			
				Persentase Pustakawan yang Berkualifikasi Sesuai Standar Nasional	Jumlah pustakawan yang tersedia di Perpustakaan berbanding jumlah pustakawan yang harus dicapai sesuai standar nasional (1 orang pustakawan per 75.000 penduduk) dikali 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00			
				Persentase Pengelola Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Jumlah staf pengelola yang tersedia di Perpustakaan berbanding jumlah staf pengelola yang harus dicapai sesuai standar nasional (1 orang staf per 25.000 penduduk) dikali 100%	13,41	13,41		26,82		40,23	40,23			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Prasarana dan Sarana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Prasarana (gedung dan ruang) dan sarana (fasilitas peralatan) yang tersedia di Perpustakaan berbanding Prasarana (gedung dan ruang) dan sarana (fasilitas peralatan) yang harus dicapai sesuai Standar Nasional Kabupaten/Kota dikali 100%	96,25	96,25		96,25		100,00		100,00				
2	24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>694.371.952</b>		<b>889.379.247</b>		<b>916.060.625</b>		<b>2.499.811.824</b>			
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Nilai Aspek Pengolahan Arsip Inaktif	Persentase Nilai Aspek Pengolahan Arsip Inaktif pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90,00	92,50	694.371.952	93,00	889.379.247	93,50	916.060.625	93,50	2.499.811.824	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
			Persentase Nilai Aspek Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip	Persentase Nilai Aspek Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55,41	61,00		63,00		65,00		65,00			
			Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Persentase Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44,05	60,00		65,00		70,00		70,00			
			Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan	Persentase Nilai Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64,47	66,00		67,50		68,00		68,00			
			Persentase nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Nilai Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48,83	69,00		73,00		76,00		76,00			
			Persentase nilai Aspek Program Kearsipan	Persentase Nilai Aspek Program Kearsipan pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75,00	80,00		85,00		85,00		85,00			
			Persentase nilai Aspek Kelembagaan	Persentase Nilai Aspek Kelembagaan pada Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87,00	88,00		88,50		89,00		89,00			
			Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan	Persentase Nilai Aspek Tenaga Kearsipan	92,17	94,00		94,50		95,00		95,00			
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>46.014.087.525</b>		<b>47.023.134.795</b>		<b>47.091.338.021</b>		<b>140.128.560.342</b>			
3	25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>6.674.622.337</b>		<b>6.874.861.007</b>		<b>7.012.358.227</b>		<b>20.561.841.571</b>			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (%)	Jumlah KUB yang mendapat bantuan sarana prasarana dibagi Jumlah KUB x 100 Persen	12,76	19,00	4.069.554.337,00	21,50	4.191.640.967	24,00	4.275.473.786	24,00	12.536.669.091	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Tangkap (%)	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perikanan Tangkap Tahun n terhadap IKM Pelayanan Perikanan Tangkap Tahun n-1 dibagi IKM Pelayanan Perikanan Tangkap Tahun n-1 x 100 Persen	N/a	80,00		85,00		90,00	90,00	90,00			
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (%)	Jumlah POKDAKAN yang mendapat bantuan sarana prasarana/Jumlah POKDAKAN x 100 Persen	9,62	9,62	2.605.068.000,00	9,62	2.683.220.040	9,62	2.736.884.441	9,62	8.025.172.481	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Budidaya (%)	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Budidaya Tahun n terhadap IKM Pelayanan Budidaya Tahun n-1 dibagi IKM Pelayanan Budidaya Tahun n-1 x 100 Persen	N/a	80,00		85,00		90,00	90,00	90,00			
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					<b>20.490.861.161</b>		<b>21.105.586.996</b>		<b>21.527.698.736</b>		<b>63.124.146.893</b>	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata (%) + % Patensi Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan + % Sarana Pariwisata yang Memenuhi Standar + % Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar	46,30	70,11	14.855.076.000	73,56	15.300.728.280	77,53	15.606.742.846	77,53	45.762.547.126	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	% Ketertarikan atas Produk Wisata + % Tindakan atas Produk Wisata + % Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif + % Share Anggaran Promosi terhadap Anggaran Pariwisata	0,00	63,51	4.085.866.883	71,93	4.208.442.889	76,87	4.292.611.747	76,87	12.586.921.520	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	% Desa Wisata yang Atraktif + % Peningkatan Sertifikasi Usaha Pariwisata + % Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata + % Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi + % Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif	62,32	68,14	1.549.918.278	78,36	1.596.415.826	86,60	1.628.344.143	86,60	4.774.678.247	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>12.164.780.027</b>		<b>12.156.142.403</b>		<b>12.455.353.029</b>		<b>36.776.275.458</b>	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul		100,00	4.165.780.200	100,00	4.249.095.804	100,00	4.334.077.720	100,00	12.748.953.724	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	
			Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Pupuk		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00			
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian		100,00	3.192.322.327	100,00	3.256.168.774	100,00	3.321.292.149	100,00	9.769.783.250	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja								SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	100,00	100,00	2.122.182.500	100,00	2.185.847.975	100,00	2.251.423.414	100,00	6.559.453.889	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Populasi Jumlah Ternak	33,00	35,00		38,00		40,00		40,00			
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	100,00	100,00	565.000.000	100,00	581.950.000	100,00	599.408.500	100,00	1.746.358.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang memiliki sertifikat	100,00	100,00	465.000.000	100,00	478.950.000	100,00	502.897.500	100,00	1.446.847.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Yang Difasilitasi	100,00	100,00	1.654.495.000	100,00	1.404.129.850	100,00	1.446.253.746	100,00	4.504.878.596	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>3.438.029.000</b>		<b>3.559.087.350</b>		<b>2.684.673.325</b>		<b>9.681.789.675</b>	
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	65,00	65,00	155.000.000	75,00	159.650.000	85,00	164.439.500	85,00	479.089.500	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang representatif	20,00	60,00	2.387.155.000	80,00	2.458.769.650	100,00	1.532.532.740	100,00	6.378.457.390	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	95,00	95,00	647.605.000	95,00	679.985.250	100,00	713.984.513	100,00	2.041.574.763	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
			Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	95,00	95,00		95,00		100,00		100,00			
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	65,00	65,00	248.269.000	75,00	260.682.450	100,00	273.716.573	100,00	782.668.023	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
3	31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI</b>				<b>3.245.795.000</b>		<b>3.327.457.040</b>		<b>3.411.254.705</b>		<b>8.284.511.745</b>	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Penjaminan Mutu & Perlindungan Produk IKM	15,63	15,63	1.571.181.000	15,83	1.602.604.620	16,00	1.634.656.712	16,00	4.808.442.332	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
			Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	25,33	25,33		26,84		28,99		28,99			
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	15,63	15,63	550.000.000	15,83	566.500.000	16,00	583.495.000	16,00	1.699.995.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						SKPD Penanggung Jawab				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	$(\text{Jumlah industri s.d tahun } (n) - \text{Jumlah industri s.d tahun } (n-1)) \times 100\%$	15,63	15,63	1.124.614.000	15,83	1.158.352.420	16,00	1.193.102.993	16,00	3.476.069.413	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemerintah Bidang Industri
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>102.632.803.835</b>		<b>107.786.458.875</b>		<b>112.338.776.465</b>		<b>322.758.039.175</b>		
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>40.878.608.255</b>		<b>44.179.637.428</b>		<b>45.551.613.945</b>		<b>130.609.859.628</b>		
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	$(\text{Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun} / \text{Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang seharusnya disusun}) \times 100\%$	100,00	100,00	30.844.302.500	100,00	33.844.302.500	100,00	34.182.745.525	100,00	98.871.350.525	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
			Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	$(\text{Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah seluruh kerja sama}) \times 100\% + (\text{Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan tepat waktu} / \text{Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKP, LPPD, SPM)}) \times 100\% + (\text{Jumlah sebagian wewenang yang dapat dilaksanakan kecamatan} / \text{Jumlah seluruh wewenang yang dilimpahkan}) \times 100\% / 3$	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
			Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesra & masyarakat yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$(\text{Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun} / \text{Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang seharusnya disusun}) \times 100\%$	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
			Persentase produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	$(\text{Jumlah produk hukum yang ditetapkan} / \text{Jumlah produk hukum yang diajukan OPD}) \times 100\% + (\text{Jumlah raperda yang dievaluasi} / \text{Jumlah raperda yang seharusnya dievaluasi}) \times 100\% + (\text{Jumlah produk hukum yang dipublikasikan} / \text{Jumlah produk hukum yang seharusnya dipublikasikan}) \times 100\% / 3$	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
			Persentase permasalahan hukum dan HAM yang terselesaikan	$(\text{Jumlah kasus hukum pemerintah daerah yang terselesaikan} / \text{Jumlah kasus hukum yang masuk}) \times 100\% + (\text{Jumlah permohonan konsultasi hukum} / \text{Jumlah permohonan konsultasi hukum yang ditindaklanjuti}) \times 100\% + (\text{Jumlah dokumen Ranham dan peduli ham yang terselesaikan} / \text{Jumlah dokumen Ranham dan peduli ham yang ditetapkan}) \times 100\% + (\text{Jumlah desa yang dibina (desa sadar hukum dan keluarga sadar hukum} / \text{Jumlah desa yang dibina (desa sadar hukum dan keluarga sadar hukum yang seharusnya dibina}) \times 100\% / 4$	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	((Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun / jumlah dokumen rumusan yang seharusnya disusun) x 100% + (Jumlah kebijakan yang dievaluasi / jumlah kebijakan yang seharusnya dievaluasi) x 100%) / 2	85,00	87,50	100,00	10.034.305.755	100,00	10.335.334.928	100,00	11.368.868.420	100,00	31.738.509.103	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah	
			Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang dikelola	(Jumlah potensi yang telah dikelola / jumlah potensi yang ada) x 100%	84,94	85,19	90,37		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
			Capaian evaluasi pelaksanaan program pembangunan	((Jumlah Prog. Pembangunan yang dievaluasi / jumlah Prog. Pembangunan yang seharusnya dievaluasi) x 100% + (Jumlah peserta bimtek / jumlah peserta yang harus mengikuti bimtek) x 100)) / 2	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Persentase rumusan kebijakan di bidang pembangunan yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen rumusan kebijakan yang disusun / jumlah dokumen rumusan yang seharusnya disusun) x 100%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Persentase Paket PBJ yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	((Jumlah Paket Pengadaan E-Tender diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal RUP / jumlah paket pengadaan e-tender) x 100%	90,00	90,00	90,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	02		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>61.754.195.580</b>		<b>63.606.821.447</b>		<b>66.787.162.520</b>		<b>192.148.179.547</b>		
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sesuai SOP	Perbandingan Jumlah Layanan Bagi Anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai SOP terhadap Jumlah Layanan Bagi Anggota DPRD x 100 Persen	100,00	100,00	100,00	61.754.195.580	100,00	63.606.821.447	100,00	66.787.162.520	100,00	192.148.179.547	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD	
			Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD	Perbandingan Jumlah Bahan Acara yang selesai sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD terhadap Jumlah Agenda Program Kerja DPRD x 100 Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Produk Hukum yang diselesaikan tepat waktu terhadap Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan dalam 1 tahun x 100 Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>32.820.124.378</b>		<b>36.083.588.704</b>		<b>36.097.341.816</b>		<b>105.001.054.898</b>		
5	01		<b>PERENCANAAN</b>						<b>4.983.784.000</b>		<b>5.083.459.680</b>		<b>5.185.128.874</b>		<b>15.252.372.554</b>		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD terhadap RPJMN	Jumlah Program RPJMD yang selaras dengan Program RPJMN dibagi jumlah Program RPJMN x 100 Persen	72,00	75,00	80,00	4.983.784.000	75,00	5.083.459.680	75,00	5.185.128.874	75,00	15.252.372.554	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
			Persentase Keselarasan RKPd terhadap RKP	Jumlah Program RKPd yang selaras dengan Program RKP dibagi jumlah Program RKPd x 100 Persen	72,00	75,00	85,00		85,00		85,00	85,00	85,00	85,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						SKPD Penanggung Jawab				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Perbandingan Keselarasan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Program RKPD terhadap Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Program RPJMD x 100 Persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	Perbandingan Keselarasan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Program Renstra OPD terhadap Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Program RPJMD x 100 Persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	Perbandingan Keselarasan Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Target Kegiatan Renja OPD terhadap Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Target Kegiatan RKPD x 100 Persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah tahun n yang dimanfaatkan dibagi jumlah data dan informasi tahun n yang disusun x 100 persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase data rencana pembangunan strategis berbasis sektoral yg dimanfaatkan dalam perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan strategis sektoral tahun n yang dimanfaatkan dibagi jumlah dokumen perencanaan strategis sektoral tahun n yang disusun x 100 persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase data perencanaan yang diintegrasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Perencanaan yang diintegrasikan dalam perencanaan dibagi jumlah data perencanaan yang harus diintegrasikan x 100 persen	100,00	100,00			100,00		100,00					
		Persentase Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkala sesuai target	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Capaian Kinerja Berkala sesuai target dibagi jumlah seluruh perangkat daerah x 100 Persen	82,00	85,00			88,00		91,00					
5	02	<b>KEUANGAN</b>				<b>14.941.768.084</b>		<b>16.900.113.884</b>		<b>16.924.851.469</b>		<b>48.766.733.437</b>			
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan Di PPAS dan RAPBD Terhadap RKPD	Perbandingan Jumlah Program dan kegiatan di PPAS dan RAPBD yang sesuai dengan Program Kegiatan di RKPD	100,00	100,00	5.510.677.580	100,00	5.565.784.356	100,00	6.122.362.791	100,00	17.198.824.727	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				Persentase Pemenuhan Anggaran Kas Terhadap Belanja Daerah	Perbandingan Realisasi Belanja APBD Terhadap Anggaran Kas x 100 Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu	Perbandingan Jumlah SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu terhadap Total SP2D yang diterbitkan dalam waktu 1 Tahun x 100 Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja								SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Penerimaan Dana Transfer	Perbandingan Jumlah realisasi Penerimaan Dana Transfer dari RKUN ke RKUD terhadap alokasi anggaran transfer x 100 persen	93,00	95,00		96,00		97,00		97,00			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu sesuai SAP	Perbandingan jumlah laporan keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu sesuai SAP terhadap jumlah OPD x 100 Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Laporan Aset OPD yang disampaikan tepat waktu terhadap jumlah OPD x 100 persen	100,00	100,00	4.635.239.100	100,00	4.681.591.491	100,00	5.149.750.640	100,00	14.466.581.231	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
			Persentase Pemanfaatan Aset yang dikerjasamakan Sesuai Aturan yang berlaku	Perbandingan Jumlah Pemanfaatan Aset yang dikerjasamakan sesuai aturan berlaku terhadap total aset yang dikerjasamakan x 100 Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang memiliki Status Kepemilikan Pemerintah Daerah	Perbandingan Jumlah aset tanah yang memiliki sertifikat terhadap Jumlah aset tanah daerah x 100 Persen	25,00	27,00		29,00		32,00		32,00			
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100 persen	n/a	41,52	4.795.851.404	42,00	6.652.738.037	42,50	5.652.738.037	42,50	17.101.327.478	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
			Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	Perbandingan selisih realisasi Pajak Tahun n dikurangi realisasi Pajak Tahun n-1 terhadap Realisasi Pajak daerah Tahun n-1 x 100 Persen	N/a	7,13		7,13		7,13		7,13			
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>					<b>7.061.128.794</b>		<b>6.972.864.684</b>		<b>6.873.152.719</b>		<b>20.907.146.197</b>	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi dan tupoksi	Jumlah Aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi dibagi jumlah seluruh aparatur Kab. Bangka x 100 Persen	60,00	60,00	7.061.128.794	65,00	6.972.864.684	65,00	6.873.152.719	65,00	20.907.146.197	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
			Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional dibagi Jumlah Total ASN x 100 Persen	60,00	60,00		62,00		62,00		62,00			
			Persentase ASN yang kualitas kinerjanya meningkat	Jumlah aparatur yang meningkat nilai kinerjanya pada P2KP dari tahun sebelumnya dibagi Jumlah Total Aparatur x 100 Persen	99,80	99,82		99,86		99,91		99,91			
			Persentase menurunnya Tindak Indisipliner Aparatur	Jumlah Aparatur yang mendapat hukuman disiplin dibagi jumlah total aparatur x 100 Persen	0,20	0,18		0,14		0,09		0,09			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD								SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase pelayanan administrasi dan data base kepegawaian yang sesuai Standar layanan	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan ketersediaan database dibagi Jumlah Pelayanan administrasi Kepegawaian dan Database yang sesuai standar layanan	100	100									
5	04	<b>PENDIDIKAN DAN LATIHAN</b>				5.183.443.500		6.457.650.456		6.424.623.755		18.065.717.711		
5	04	02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional dibagi Jumlah Total ASN x 100 Persen	80,00	80,00	5.183.443.500	80,00	5.118.650.456	80,00	5.045.453.755	80,00	15.347.547.711	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Latihan
5	05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				650.000.000		669.500.000		689.585.000		2.009.085.000		
5	05	02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan	Jumlah Penelitian Tahun n yang dimanfaatkan dalam perencanaan dibagi jumlah penelitian yang dilaksanakan tahun n x 100 Persen	100,00	100,00	650.000.000	100,00	669.500.000	100,00	689.585.000	100,00	2.009.085.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Persentase rumusan kebijakan yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan	Jumlah rumusan kebijakan tahun n yang dimanfaatkan dalam perencanaan dibagi jumlah rumusan kebijakan yang disusun pada tahun n x 100 persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
			Jumlah inovasi daerah yang mendapat nominasi pada even penghargaan tingkat Nasional	Jumlah inovasi daerah yang mendapat nominasi pada even penghargaan tingkat Nasional	1,00	1,00		1,00		1,00		5,00		
6		<b>UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN</b>				3.945.000.000		4.063.350.000		4.266.517.500		12.274.867.500		
6	01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				3.945.000.000		4.063.350.000		4.266.517.500		12.274.867.500		
6	01	02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Elemen Peran dan Layanan APIP	Jumlah elemen tiap level yang terpenuhi dibagi total elemen dikali 100 Persen	Level 3	Level 3	2.030.000.000	Level 3	2.090.900.000	Level 3	2.195.445.000	Level 3	6.316.345.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
			Persentase OPD Dengan Predikat WBK	Jumlah OPD yang mendapat predikat WBK dibagi jumlah seluruh OPD x 100 Persen	0,00	33,33		66,67		100,00		100,00		
			Level Elemen Pengelolaan SDM	Jumlah elemen tiap level yang terpenuhi dibagi total elemen dikali 100 Persen	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
6	01	03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang membangun kegiatan pengendalian resiko	Jumlah OPD yang membangun kegiatan pengendalian Resiko dibagi jumlah seluruh OPD x 100 Persen	100,00	100,00	1.915.000.000	100,00	1.972.450.000	100,00	2.071.072.500	100,00	5.958.522.500	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				31.540.670.000		32.171.483.400		32.635.900.518		96.348.053.918		
7	01	<b>KECAMATAN</b>				31.540.670.000		32.171.483.400		32.635.900.518		96.348.053.918		
7	01	02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Jumlah pelayanan yang selesai tepat waktu dibanding jumlah seluruh pelayanan x 100%	100,00	100,00	17.550.250.000	100,00	17.901.255.000	100,00	18.080.267.550	100,00	53.531.772.550	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan
7	01	03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat di kecamatan x 100%	100,00	100,00	12.000.000.000	100,00	12.240.000.000	100,00	12.484.800.000	100,00	36.724.800.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Kewilayahan Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	Jumlah desa yang aktif menjaga trantibum secara swadaya dibagi jumlah seluruh desa x 100%	N/a	50,00	575.110.000	66,67	586.612.200	83,33	598.344.444	83,33	1.760.066.644	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Wilayah Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	Jumlah desa yang tertib administrasi berbanding jumlah seluruh desa x 100%	100,00	100,00	1.415.310.000	100,00	1.443.616.200	100,00	1.472.488.524	100,00	4.331.414.724	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Wilayah Kecamatan
			Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	Jumlah desa yang mengelola keuangan sesuai standar berbanding jumlah seluruh desa x 100%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>4.741.700.000</b>		<b>4.812.517.000</b>		<b>4.921.457.542</b>		<b>14.475.674.542</b>	
8	01		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>4.741.700.000</b>		<b>4.812.517.000</b>		<b>4.921.457.542</b>		<b>14.475.674.542</b>	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang dibina pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/Jumlah yang di rencanakan X 100 Persen	80,00	80,00	475.000.000	90,00	479.750.000	100,00	484.547.500	100,00	1.439.297.500	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Partai Politik yang anggotanya mengikuti pembinaan/Jumlah Partai politik yang mendapatkan suara X 100 Persen	80,00	80,00	3.096.700.000	90,00	3.127.667.000	100,00	3.195.657.042	100,00	9.420.024.042	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang anggotanya mengikuti pembinaan/Jumlah Ormas yang Terdaftar X 100 Persen	50,00	50,00	385.000.000	60,00	396.550.000	70,00	408.446.500	70,00	1.189.996.500	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Ketahanan sosial dan budaya/Jumlah yang direncanakan X 100 persen	80,00	80,00	285.000.000	90,00	293.550.000	100,00	302.356.500	100,00	880.906.500	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Jumlah Forum Koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah yang direncanakan X 100% + (Jumlah penanganan potensi konflik sosial/Jumlah Potensi konflik sosial yang ada X 100 Persen))/2	80,00	80,00	500.000.000	90,00	515.000.000	100,00	530.450.000	100,00	1.545.450.000	Perangkat Daerah Pengampuh Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>JUMLAH</b>							<b>1.268.886.465.900</b>		<b>1.282.104.283.167</b>		<b>1.284.889.200.281</b>		<b>3.835.879.949.348</b>		

## BAB VIII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 8. 1. Indikator Kinerja Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023, tentu tidak lepas dari tujuan serta sasaran kinerja daerah yang hendak dicapai hingga berakhirnya periode RPJMD di Tahun 2023. Untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut, perlu dirumuskan dan ditetapkan suatu alat ukur keberhasilan pencapaian tersebut yakni “Indikator Kinerja” dengan menentukan target-target kinerja daerah pertahun hingga kondisi akhir RPJMD. Dalam penetapan Indikator dan target Kinerja Daerah tahun 2019 - 2023 selain mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan

juga kondisi awal, kondisi empiris serta hasil olahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pertimbangan untuk



menentukan target kinerja selama kurun waktu lima tahun mendatang yang berasal dari *internal* maupun *eksternal*. Data yang berasal dari *internal* dapat berupa pencapaian dan pengukuran yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, sedangkan data yang berasal dari *eksternal* dapat berupa pengukuran yang dilakukan oleh instansi diluar Pemerintah Kabupaten Bangka seperti Badan Pusat Statistik, Polres, BMKG, dll.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang kemudian diperkuat dengan target-target kinerja tahunan. Tujuan juga direfleksikan dengan kondisi ideal suatu pemerintahan yang menjadi salah satu *asbabunnuzul* organisasi ini berdiri. Ada 5 (lima) buah Tujuan RPJMD 2019-2023 yang telah dirumuskan dan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan SDM
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
4. Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
5. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Selanjutnya, dari 5 (lima) tujuan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, diperoleh 5 (lima) indikator kinerja tujuan yang telah ditentukan target-target kinerja yang dapat memenuhi unsur S.M.A.R.T (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely*). Keterkaitan antara tujuan, indikator kinerja tujuan serta target-target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Tujuan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	B	B	B	BB	BB	BB
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,39	72,27	72,69	72,98	73,27	73,27

3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Indeks)	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8
4	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,67	6,85	8,21	8,56	10,12	10,12
5	Meningkatkan pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Indeks)	89,24	91,27	92,65	94,07	95,52	95,52

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi perencanaan pembangunan daerah guna penyusunan dan perbaikan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang baik tahunan maupun lima tahunan. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2019 - 2023 ini, dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

### 8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari sasaran strategis RPJMD 2019 - 2023, yang diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hingga ke tujuan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-



isu strategis serta program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari Kelima tujuan dalam Reviu RPJMD 2019-2023,

telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam 13 (tiga belas) sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatnya Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
8. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat
9. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
10. Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan
11. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa
12. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian				Kondisi Akhir	
			2020	2021	2022	2023			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	BB	BB	BB	BB	A	A	
		Indeks SPBE	2,47	2,60	2,75	2,80	3,00	3,00	
		Indeks Profesionalitas ASN	67,26	69,97	70,75	73,87	75,01	75,01	
2	Meningkatnya Pengelolaan Daerah yang Akuntabel	Keuangan	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Publik kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,07	74,77	78,79	83,00	85,40	85,40
4	Meningkatnya Masyarakat	Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,71	8,89	9,04	9,04
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77	12,80	12,88	12,95	12,95
5	Meningkatnya Masyarakat	Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,99	71,01	71,15	71,28	71,44	71,44
			Angka Stunting	8,90	4,35	4,15	3,45	0	0
6	Terkendalinya Penduduk	Laju Pertumbuhan	<i>Total Fertility Rate</i>	2,42	2,40	2,37	2,35	2,30	2,30
7	Meningkatnya Perempuan dan Pemuda	Kualitas Anak,	Indeks Pembangunan Gender	88,49	88,50	88,73	88,96	89,13	89,13
			Status Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama
			Status Kabupaten Layak Pemuda	n.a.	n.a.	Pratama	Pratama	Madya	Madya

<b>8</b>	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	12.480	11.983	12.527	12.640	12.859	12.859
<b>9</b>	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	41,02	41,75	42,67	43,46	44,29	44,29
		Indeks Pemerataan Infrastruktur	0,2262	0,2001	0,1897	0,1875	0,1840	0,1840
<b>10</b>	Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	Spending of Money (Milyar Rupiah)	13,20	15,80	20,00	22,00	25,00	25,00
<b>11</b>	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB (Indeks)	67,70	69,05	70,44	71,84	73,28	73,28
<b>12</b>	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini (Indeks)	0,269	0,271	0,270	0,266	0,264	0,264
<b>13</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,07	65,02	65,02	65,07	65,10	65,10
		Indeks Resiko Bencana	160,00	155,00	150,00	145,00	140,00	140,00

## 8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)



Indikator penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator kinerja kunci, dikarenakan dalam melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkadan terbagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, pilihan serta penunjang urusan

yang akan menjadi alat ukur keberhasilan sebagaimana tertera di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2019)	Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
<b>I.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	2,93	-2,96	2,95	3,03	3,05	3,05
2.	Laju Inflasi (%)	0,64	0,63	2,17	2,15	2,10	2,10
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	40.890	40.370	41.720	42.510	43.143	43.143
4.	Indeks Gini	0,269	0,271	0,270	0,266	0,264	0,264
5.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,189	0,190	0,189	0,181	0,177	0,177
6.	Angka Kemiskinan (%)	4,92	5,60	5,11	4,88	4,82	4,82
7.	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,27	72,69	72,98	73,27	73,27
8.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,80	5,43	4,85	4,14	4,12	4,12
9.	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,07	74,77	78,79	83,00	85,40	85,40
11.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	97,88	98,41	98,95	99,49	100,00	100,00
12.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,71	8,89	9,04	9,04
13.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,76	12,77	12,80	12,88	12,95	12,95
14.	Angka Melek Huruf	98,21	98,66	99,11	99,57	100,00	100,00
15.	Angka Harapan Hidup	70,99	71,01	71,15	71,28	71,44	71,44
16.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	19,46	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10
<b>II. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	42,96	42,71	42,58	42,26	42,26
<b>III. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>A. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	98,07	98,20	98,33	98,46	98,59	98,59

1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	74,85	75,06	75,28	75,49	75,71	75,71
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,076	0,070	0,064	0,059	0,0540	0,0540
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,426	0,393	0,362	0,334	0,309	0,309
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	99,37	99,68	99,78	99,88	99,98	99,98
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,47	99,51	99,55	99,60	99,64	99,64
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	99,76	99,81	99,84	99,87	99,93	99,93
1.9.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	87,06	87,96	89,81	93,90	98,17	98,17
2.	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100,00	100,00
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	74,59	76,00	77,42	78,83	80,24	80,24
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	92,57	95,00	97,50	100,00	100,00	100,00
3.4.	Kawasan Kumuh	50,00	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	32,39	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
4.	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	95,50	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
5.	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota per 10.000 Penduduk	42,00	42,30	42,50	42,75	42,90	42,90
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Layanan WMK							
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4	Angka Prostitusi	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	7,70	7,50	7,25	7,00	7,00	7,00
6.	<b>Sosial</b>						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00

6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>						
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.1.	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	9,07	26,17	27,22	28,62	34,62	34,62
1.2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33,33	34,91	35,19	36,33	37,79	37,79
1.3.	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	28,38	31,94	35,71	39,71	39,71	39,71
1.4.	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	53,33	60,00	66,67	66,67	66,67	66,67
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	21,78	22,50	23,00	23,50	24,00	24,00

2.2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	20,67	23,20	23,50	24,45	25,00	25,00
2.3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	18,71	19,50	21,10	23,35	24,85	24,85
3.	<b>Pangan</b>						
3.1.	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	1 : 0,92	1 : 0,94	1 : 0,96	1 : 0,98	1 : 1	1 : 1
3.2.	Rasio Tingkat Konsumsi Protein	1 : 1,44	1 : 1,39	1 : 1,34	1 : 1,29	1 : 1,24	1 : 1,24
3.3.	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	125,00
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89
4.	<b>Pertanahan</b>						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	28,20	28,35	28,50	28,75	29,00	29,00
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	<b>Lingkungan Hidup</b>						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13

5.3.	Indeks Kualitas Air	59,00	60,00	61,00	61,50	62,00	62,00
5.4.	Indeks Kualitas Udara	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
6.	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	95,00	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
7.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07

<b>8.2.</b>	Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
<b>8.3.</b>	Ratio ASFR 15-19 Tahun	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>						
<b>9.1.</b>	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
<b>9.2.</b>	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
<b>9.3.</b>	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
<b>10.1.</b>	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
<b>11.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
<b>11.1.</b>	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
<b>11.2.</b>	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00

<b>11.3.</b>	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pembinaan, Berkreteria Sehat, Minimal Melaksanakan RAT Setahun Sekali sesuai Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2017	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
<b>12.1.</b>	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
<b>13.1.</b>	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	50,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
<b>13.2.</b>	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
<b>13.3.</b>	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
<b>13.4.</b>	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>						
<b>14.1.</b>	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>						
<b>15.1.</b>	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
<b>16.1.</b>	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00

<b>16.2.</b>	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
<b>16.3.</b>	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
<b>17.1.</b>	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
<b>17.2.</b>	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64
<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>						
<b>18.1.</b>	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
<b>18.2.</b>	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71
<b>C.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>						
<b>1.</b>	<b>Pariwisata</b>						
<b>1.1.</b>	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
<b>1.2.</b>	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
<b>1.3.</b>	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00

<b>2.</b>	<b>Pertanian</b>						
<b>2.1.</b>	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
<b>2.2.</b>	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Perdagangan</b>						
<b>3.1.</b>	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
<b>3.2.</b>	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
<b>3.3.</b>	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,0
<b>4.</b>	<b>Perindustrian</b>						
<b>4.1.</b>	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
<b>4.2.</b>	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
<b>5.1.</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)						
<b>5.2.</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
<b>5.3.</b>	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00

<b>5.4.</b>	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,,34	53,09	56,50	56,50
<b>D</b>	<b>Penunjang Urusan</b>						
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
<b>1.1.</b>	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
<b>1.2.</b>	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.3.</b>	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
<b>1.4.</b>	Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.5.</b>	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
<b>1.6.</b>	Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
<b>2.</b>	<b>Keuangan</b>						
<b>2.1.</b>	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>2.2.</b>	Penetapan APBD	Tepat Waktu					

<b>3.</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>						
<b>3.1.</b>	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3.2.</b>	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
<b>3.3.</b>	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
<b>4.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
<b>4.1.</b>	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4.2.</b>	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4.3.</b>	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Penerapan SIDA</b>						
<b>5.1.</b>	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	32,35	32,35	35,29	35,29	38,24	38,24
<b>6.</b>	<b>Pengawasan</b>						
<b>6.1.</b>	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00

6.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
6.3.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
6.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
7.	<b>Sekretariat Dewan</b>						
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.3.	Terintegrasinya Program – Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

## BAB IX

### PENUTUP

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam proses model manajemen, perencanaan adalah kegiatan yang cukup penting dari seluruh kegiatan proses pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu (*goal*). Keinginan mencapai tujuan ini dipenuhi melalui manajemen pencapaian tujuan tertentu juga. Dalam proses manajemen, fungsi yang dalam urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Karena itu fungsi ini sangat menentukan arah pencapaian tujuan. Kekeliruan dalam penetapan rencana-rencana bisa mengakibatkan inefisiensi atau inefektivitas dalam proses manajemen selanjutnya. Akhirnya pencapaian tujuan menjadi tidak optimal.

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Bangka 5 (lima) tahun ke depan terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, dan RPJMD ini dijadikan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Karenanya pada kondisi yang dimungkinkan oleh aturan dan regulasi yang berlaku melihat tingkat urgensinya, perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 perlu dilakukan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dilakukan atas dasar penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 mengamanahkan setiap daerah untuk melakukan penyesuaian Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan program dan kegiatan secara bertahap mulai tahun 2020.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Selanjutnya untuk RKPD masa transisi Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilukada pada periode selanjutnya (tahun 2024-2028), pada saat RPJMD tahun 2024-2028 sedang disusun maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2035, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN 2020-2024.